

Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri

Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri	1
Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri	3
1 Pendahuluan	3
1.1 Kata Pengantar.....	3
1.2 Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri	3
1.3 Kewajiban Negara-Negara	4
1.4 Konteks internasional.....	5
1.5 Sumber-sumber.....	7
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemegang kepentingan utama.....	8
2.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa	8
2.2 Portugal.....	10
2.2.1 Kesimpulan	16
2.3 Indonesia	17
2.3.1 Kesimpulan	24
2.4 Australia	25
2.4.1 Kebijakan Australia hingga 1974	26
2.4.2 Kebijakan Australia tahun 1974-1975.....	28
2.4.3 Kebijakan Australia 1975-98	32
2.4.4 Beralihnya Kebijakan Australia	33
2.4.5 Kesimpulan	34
3 Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang	35
3.1 Dewan Keamanan.....	35
3.2 Cina.....	42
3.3 Prancis	45
3.4 Rusia (USSR).....	47
3.5 Inggris	50
3.6 Amerika Serikat (AS).....	56
3.7 Jepang	67
3.8 Kesimpulan	72
4 Vatikan.....	73
4.1 Pendahuluan	73
4.2 Latar Belakang Keterlibatan Vatikan	74
4.3 Gereja Katolik di Timor-Leste	74
4.4 Dom José Joaquim Ribeiro (1966-77)	74
4.5 Dom Martinho da Costa Lopes (1977-83).....	76
4.6 Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB (1983-2003).....	78
4.7 Paus Johannes Paulus II mengunjungi Timor Timur pada tahun 1989.....	80
4.7.1 Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia.....	82
4.8 Kesimpulan	84
5 Diplomasi perlawanan	84
5.1 Partai-partai politik dan badan-badan payung.....	84
5.1.1 Kebijakan internasionalisasi Fretilin.....	86
5.1.2 Pemanfaatan hukum internasional	88

5.1.3 Upaya Diplomasi di PBB	89
5.1.4 Voting tahun 1982 di PBB	92
5.1.5 Pembentukan kembali partai-partai	93
5.1.6 Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian	95
5.2 Diaspora.....	99
5.3 Kesimpulan	102
6 Masyarakat Sipil.....	103
6.1 Pendahuluan	103
6.1.1 Terminologi	104
6.2 Masyarakat Sipil Internasional.....	104
6.2.1 Tahap pertama: Tantangan-tantangan awal dan permulaan, 1974-78	104
6.2.2 Tahap kedua: Krisis dan permulaan-permulaan baru 1978-83.....	110
6.2.3 Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil 1983-91.....	115
6.2.4 Tahap keempat: Titik-titik balik 1991-98.....	119
6.2.5 Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998-99.....	124
6.3 Masyarakat sipil Indonesia	126
6.3.1 Tahun-tahun awal	126
6.3.2. Tahun 1990-an	128
6.4 Kesimpulan	132
7. Temuan-temuan.....	133
7.1 Komunitas Internasional	133
7.2 Pemegang kepentingan utama.....	135
Lampiran: Sikap memilih atas resolusi-resolusi mengenai Timor-Leste di Sidang Umum PBB	138

Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri

1 Pendahuluan

1.1 Kata Pengantar

1. Bab ini berfokus pada hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan sejauh mana hak ini ditegakkan atau diingkari, khususnya di kalangan masyarakat internasional.

2. Hak atas penentuan nasib sendiri merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari diri seorang manusia. Hak ini dicantumkan sebagai Pasal pertama oleh masyarakat internasional dalam dua instrumen utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), mengingat pentingnya hak ini bagi tatanan internasional dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Pengadilan Internasional mengakui hak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting, dan "menyangkut semua negara."¹

3. Penentuan nasib sendiri adalah juga fundamental karena merupakan hak kolektif suatu bangsa untuk dapat menjadi diri sendiri. Perjuangan untuk dapat menikmati hak ini di atas segala hak yang lain menjadi isu pokok yang sentral dari periode mandat CAVR. Periode ini bermula ketika kekuasaan kolonial yang lama memutuskan pada tahun 1974, untuk mengakui hak ini setelah 14 tahun mengingkarinya, dan berakhir dengan keputusan kekuasaan kolonial yang baru untuk mengakui hak ini pada tahun 1999 setelah 24 tahun pengingkaran. Sementara itu rakyat Timor-Leste melakukan pengorbanan luar biasa untuk mendapatkan hak ini. Pewujudan hak ini adalah hakiki untuk kelangsungan hidup, identitas dan nasib Timor-Leste.

4. Bab ini mempelajari catatan lembaga-lembaga internasional utama dan pemerintahan-pemerintahan di dunia, dalam menaati berbagai kewajiban yang sudah disepakati secara internasional, untuk melindungi dan memajukan hak ini demi kepentingan rakyat Timor-Leste. Bab ini akan melihat tiga pemegang saham utama dalam isu tersebut – Portugal, Indonesia, dan Australia – ditambah dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota tetapnya, yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Jepang juga akan dipelajari karena ia anggota terpilih di Dewan Keamanan di dalam tahun-tahun penting 1975 dan 1976, dan juga merupakan mitra utama Indonesia di dalam ekonomi regional. Bab ini juga akan melaporkan tentang peranan penting Vatikan, dan kontribusi penting terhadap realisasi penentuan nasib sendiri dari para diplomat dan diaspora Timor-Leste yang dijalankan bersama masyarakat sipil internasional.

1.2 Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri

5. Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri merupakan hak yang sangat jelas dan diakui secara resmi oleh masyarakat internasional. Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dalam banyak kesempatan memperkuat eksistensi hak ini, serta tanggung jawab semua negara di dunia untuk menghormatinya sejak 1960.² Pengakuan atas hak ini menetapkan legitimasi "persoalan Timor Leste" dalam hukum internasional, dan dengan sangat mencolok membedakannya dengan berbagai klaim atas penentuan nasib sendiri oleh kelompok-kelompok lain.

6. Penentuan nasib sendiri merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh "segala bangsa" untuk menentukan nasib politik dan teritorialnya. Hak ini memberi bangsa Timor-Leste tiga hal: a) untuk

menentukan status politiknya melalui tindakan memilih bebas; b) menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara bebas; dan c) untuk memanfaatkan sumber daya dan kekayaan alamnya secara bebas.³

7. Hak atas penentuan nasib sendiri memberikan hak kepada masyarakat Timor untuk mengakhiri situasi kolonial mereka, dengan menentukan kehendak secara bebas antara kemerdekaan, asosiasi bebas dengan negara yang ada, atau integrasi dengan negara yang ada. Keputusan atas kehendak tersebut haruslah dibuat melalui tindakan ekspresi yang murni dan bebas. Agar dapat sah dan diterima secara internasional, keputusan mengenai masa depan sebuah masyarakat harus dihasilkan melalui sebuah proses yang terpujuk oleh penerangan, terbuka, adil dan demokratis, bebas dari campur tangan atau ancaman pihak luar, dijalankan secara tidak memihak, dan sebaiknya diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena hak ini adalah milik seluruh bangsa Timor-Leste secara bersama dan bukannya kelompok tertentu, penerapan hak ini haruslah representatif. Bangsa Timor-Leste juga memiliki hak untuk berjuang atas penentuan nasib sendiri, dan untuk menerima dukungan bagi perjuangan mereka ini. Negara-negara boleh menanggapi permintaan-permintaan untuk bantuan moral dan material seperti ini.¹ Negara-negara tidak diperkenankan untuk menggunakan kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan sebagai alasan untuk membenarkan penundaan suatu kemerdekaan.⁴

8. Hak masyarakat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri juga meliputi hak untuk bebas dari penindasan oleh kekuatan asing, dan hak untuk secara bebas menentukan bagaimana sumber daya alam mereka seharusnya diperlakukan dan digunakan.

1.3 Kewajiban Negara-Negara

9. Pengakuan internasional bahwa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri membebaskan berbagai kewajiban kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai kekuasaan pemerintahan, Portugal terikat oleh Pasal 73 Piagam PBB dan Resolusi-Resolusi Majelis Umum, untuk menerima sebagai suatu "amanat suci" kewajibannya untuk meningkatkan setinggi-tingginya kesejahteraan bangsa Timor, dan:

- Untuk memastikan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat Timor-Leste, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang;
- Untuk mengembangkan kemampuan memerintah diri sendiri, mempertimbangkan aspirasi politik masyarakat, dan membantu mereka dalam mengembangkan lembaga politik yang bebas; dan
- Untuk menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai situasi di dalam wilayah tersebut.

10. Selain itu, semua negara memiliki kewajiban tertentu mengenai hak atas penentuan nasib sendiri. Semua negara harus menghormati dan menggalakkan hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri⁵ dan untuk mengambil aksi positif untuk memfasilitasi realisasinya.⁶ Pada khususnya, semua negara harus "menahan diri dari turut campur dengan masalah internal dari negara lain, sehingga berpengaruh buruk terhadap kemampuan untuk merealisasikan hak atas penentuan nasib diri sendiri."⁷ Negara-negara harus menahan diri dari tindakan paksa yang mencabut sebuah masyarakat dari haknya atas penentuan nasib diri sendiri.⁸

¹ Kedua tuntutan ini berdasarkan atas Resolusi Majelis Umum 2105, 20 Desember 1965 dan UN Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the UN, Resolusi Majelis Umum 2625 (XXV), Pleno Majelis Umum Sesi 1883, 24 Oktober 1970. Lihat Suzannah Linton, Konsultan Penasihat Hukum pada CAVR, "The Right to Self-Determination in International Law," sebuah submisi kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

11. Di dalam keadaan di mana hak sebuah masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri ditolak, semua negara-negara berkewajiban untuk mengakui keadaan tersebut sebagai tidak sesuai hukum, dan diharuskan untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang menolong atau membantu dalam mempertahankan keadaan tersebut.⁹

12. Pada tahun 1975, kemudian lagi di tahun 1976, Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB menyerukan "semua negara" untuk menghormati hak tak terpisahkan bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri serta persatuan dan keutuhan wilayah Timor Portugis.¹⁰ Semua negara-negara anggota PBB terikat untuk mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.¹¹ Dewan Keamanan juga mewajibkan beberapa ketentuan kepada Indonesia dan Portugal, di mana kedua negara ini juga terikat dengan resolusi-resolusi tersebut. Dewan Keamanan menuntut Indonesia untuk menarik pasukan bersenjata dari Timor Timur,¹² dan kepada Portugal untuk bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan masyarakat Timor secara bebas menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.¹³

13. Komisi mengambil kesimpulan, bahwa kewajiban negara-negara adalah sebagai berikut:

- Untuk menghormati hak atas penentuan nasib sendiri, dan untuk menggalakkan realisasi terhadapnya.
- Untuk tidak menggunakan kekerasan memberangus hak atas penentuan nasib diri sendiri.
- Untuk tidak melakukan apa pun yang bisa melemahkan hak sebuah masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri.
- Untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan demi penentuan nasib diri sendiri.
- Untuk tidak memberikan bantuan kepada negara yang terlibat dalam melakukan penindasan terhadap hak atas penentuan nasib diri sendiri.
- Untuk tidak mengakui keabsahan sebuah situasi yang timbul dari penolakan atas hak terhadap penentuan nasib diri sendiri.

1.4 Konteks internasional

14. Masyarakat internasional telah menyetujui prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang akan mengatur dekolonisasi Timor Portugis, akan tetapi banyak pemerintahan negara-negara penting mengambil pendekatan yang berbeda pada tahun 1970-an dibanding pendekatan mereka di akhir tahun 1990-an.

15. Sejumlah faktor eksternal telah merugikan kepentingan Timor dan proses hukum pada tahun 1970-an. Hal ini mencakup kesibukan luar biasa dengan konflik ideologis di tingkat internasional, dan berbagai krisis domestik dengan bermacam-macam signifikansi di dalam negara-negara yang paling terlibat dengan Timor-Leste. Persoalan-persoalan ini memang sangat penting, dan telah mempengaruhi jiwa manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, mereka juga telah berdampak bagi Timor-Leste, dengan membelokkan perhatian dari permasalahan sesungguhnya, dan menyamarkan, atau bahkan memutarbalikkan, sikap-sikap resmi.

16. Permasalahan yang dominan pada masa itu adalah Perang Dingin. Ini adalah persaingan terbuka, namun terbatas, yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Barat dan Uni Sovyet dan sekutunya, sampai runtuhnya Uni Soviet (USSR) pada tahun 1991. Persaingan Barat-Timur ini merupakan sebuah konteks ideologis antara sistem kapitalis dan komunis, namun selain itu juga merupakan persaingan komersial dan militer. Persaingan ini membagi Eropa, yang dilambangkan dengan jelas oleh Tembok Berlin yang mengisolasi Berlin Barat dari Berlin Timur dan Jerman Timur yang dikuasai

komunis. Ia juga membagi Dunia Ketiga, ketika negara-negara ini menjadi ajang persaingan kompetisi para adikuasa setelah tercapai suatu keseimbangan kekuasaan di Eropa. Uni Sovyet mendukung dekolonisasi. Kompetisi ini tidak serta merta menghasilkan konflik militer langsung antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet, namun memang melibatkan aksi militer atau perang-perang *atas nama* di sejumlah negara, termasuk di kawasan Asia. Persaingan ini menimbulkan ketegangan besar yang dirasakan di semua lapisan masyarakat di banyak negara, dan mempengaruhi opini publik dalam banyak persoalan. Hal ini juga mengakibatkan pengeluaran militer besar-besaran, dan sebuah perlombaan senjata yang antara lain menghasilkan penumpukan peluru kendali dan persenjataan nuklir yang telah mengancam kelangsungan dunia. Masyarakat internasional terbagi menjadi blok Timur, Barat dan Non-Blok seputar persoalan ini, dan memberikan suara mereka di PBB sesuai dengan dikte geopolitis ketimbang inti permasalahan yang sedang dibahas.

17. Dengan latar belakang seperti ini, pencapaian-pencapaian komunis di Asia, yang memuncak pada tahun 1975 dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam dan kemenangan-kemenangan komunis di Laos dan Kamboja, mensiagakan Amerika Serikat dan sekutunya, dan tidak menguntungkan kepentingan Timor-Leste. Indonesia dan pemerintahan yang sangat anti-komunis lainnya di kawasan ini, termasuk Australia, Selandia Baru, dan negara-negara anggota ASEAN bertekad untuk bekerja sama dalam membendung pergerakan lebih jauh komunisme. Perkembangan-perkembangan sayap kiri di Portugal dan Timor Portugis dipandang dengan derajat kekhawatiran yang berbeda-beda, khususnya di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini juga menguntungkan Indonesia yang dapat mengeksploitasi persoalan ini melawan Fretilin, untuk memaksimalkan peran penting mereka kepada negara-negara Barat sebagai benteng melawan komunisme, dan untuk mendapat dukungan politik, militer dan komersial yang kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

18. Perkembangan politik pada tahun 1960-an dan 1970-an juga menguntungkan Timor-Leste secara tidak langsung. Selama periode ini muncul berbagai gerakan politik dan masyarakat sipil yang baru bagi perdamaian, hak asasi manusia, pelucutan senjata, pembangunan dan keadilan sosial – khususnya sebagai akibat kekecewaan terhadap Uni Sovyet dan tragedi-tragedi Perang Dingin seperti keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Mereka menuntut adanya suara atau demokrasi partisipatoris dan terdorong oleh kepedulian akan masa depan planet ini, apabila hanya para adikuasa, pemerintahan dan bisnis besar yang dibiarkan membuat keputusan. Pencarian akan alternatif-alternatif ini juga dirasakan di komunitas keagamaan di seluruh dunia, termasuk dalam Gereja Katolik setelah Dewan Vatikan Kedua pada tahun 1960-an. Gerakan-gerakan ini menjadi tulang punggung dukungan masyarakat sipil internasional bagi Timor-Leste.

19. Ketiadaan dukungan resmi bagi kemerdekaan Timor juga diperburuk dengan anggapan, bahwa arus dokolonisasi utama sudah usai. Sebagian besar dari koloni besar milik kekuatan-kekuatan Eropa – Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia dan Belgia – sudah merdeka atau, dalam kasus Portugal, sedang dalam proses menjadi merdeka. Dekolonisasi dimulai di Timur Tengah pada dasawarsa 1920-an dan diikuti oleh gelombang kedua di Asia pada tahun 1940-an dan 1950-an ketika India mendapat kemerdekaan dari Inggris dan Indonesia dari Belanda. Proses ini memuncak pada tahun 1960-an dengan gelombang emansipasi ketiga ketika tak kurang dari 42 negara, sebagian besar di Afrika, mendapat kemerdekaan dan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, persoalan seperti Timor dan Macau dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sisa-sisa kolonialisme yang tidak mampu menyokong diri sendiri sebagai negara merdeka, dan paling baik diatasi melalui penggabungan ke dalam entitas yang lebih besar, dalam sebagian kasus ke bekas-bekas koloni yang berbatasan langsung atau memiliki kesamaan-kesamaan lain. Penggabungan Goa ke dalam India sering kali dijadikan contoh untuk hal ini. Dari sudut pandang ini, masa depan Timor secara historis sudah ditentukan, dan hanya bisa dibayangkan sebagai bagian dari Indonesia, walaupun pada kenyataannya wilayah ini lebih besar dari beberapa koloni Portugal di Afrika dan banyak negara-negara yang baru merdeka lainnya.

20. Di tingkatan politik nasional, tiga pemangku kepentingan utama – Portugal, Indonesia dan Australia – mengalami berbagai macam tantangan internal dan ketidak-stabilan selama masa tahun 1974-75 yang kritis. Persoalan-persoalan dalam negeri menambah kesibukan para pembuat kebijakan utama dan, setidaknya dalam kasus Portugal, terbukti merugikan bagi Timor-Leste.

21. Dalam masa ini, Portugal mengalami kudeta militer sayap kiri, percobaan kudeta balasan dan beberapa pergantian pemerintahan. Selain amat disibukkan oleh nasibnya sendiri, Portugal juga terlibat dalam dekolonisasi koloni-koloni utamanya di Afrika. Indonesia terancam oleh sebuah keruntuhan ekonomi akibat krisis Pertamina selama beberapa bulan pada masa itu. Ini terjadi ketika Pertamina, perusahaan minyak negara Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ibnu Sutowo, mengalami kesulitan membayar hutang-hutang luar negerinya yang besar. Krisis ini semakin mengancam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada minyak dan kepercayaan para investor asing. Harga minyak yang semakin meningkat mampu mengangkat Indonesia dari kemiskinan ke kesejahteraan yang relatif, dan sangat penting bagi kelangsungan program-program politik Presiden Soeharto. Para penasihat Presiden mengatakan bahwa Timor tidaklah begitu penting dibandingkan dengan krisis Pertamina, dan bahwa krisis ini menyita sembilan puluh persen waktu Presiden dalam bulan-bulan menjelang invasi Indonesia.¹⁴ Kesehatan Presiden Soeharto, yang selalu menjadi soal penting dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, juga menjadi masalah menjelang akhir 1975 ketika ia menjalani operasi kandung empedu. Australia pun mengalami ketidak-stabilan politik yang tidak biasa selama masa ini. Pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Gough Whitlam dibubarkan pada bulan November 1975, setelah terjadi sebuah krisis konstitusi yang menyisakan sebuah pemerintahan sementara pada masa invasi Indonesia. Kebijakan luar negeri menjadi masalah yang tidak begitu penting dalam sebuah pemilihan umum yang sulit, yang diadakan pada tanggal 13 Desember 1975.

1.5 Sumber-sumber

22. Komisi sedapat mungkin mendasarkan penelitiannya pada sumber-sumber tangan pertama. Komisi berkonsultasi dengan sebagian besar pemerintahan dan lembaga-lembaga yang disebut dalam bab ini mengenai penyelidikannya dan meminta masukan dari mereka. Komisi menulis kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Republik Rakyat Cina, dan Persatuan Kerajaan Inggris. Komisi tidak menerima satu pun balasan resmi, namun mendapatkan bantuan yang cukup berarti dari sejumlah perwakilan negara-negara ini yang berbasis di Timor-Leste. Komisi juga menghubungi pihak-pihak di Moskow dan Vatikan mengenai akses terhadap dokumentasi.

23. Masalah umum yang dihadapi baik oleh Komisi maupun Pemerintahan-pemerintahan adalah tantangan dalam mendapatkan catatan-catatan dari masa 30 tahun yang lalu. Mendapatkan dan mengakses catatan-catatan ini dari masa pra-komputer di tahun 1970-an merupakan sebuah tantangan administratif dan finansial, yang semakin dipersulit oleh perlunya memberi sebuah identifikasi yang tepat mengenai dokumen-dokumen dan tanggal-tanggal. Dalam sebagian besar kasus, sebuah penyelidikan yang lebih menyeluruh masih perlu dilakukan, dan dalam kasus di mana belum ada undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi atau di mana akses masih dibatasi, hal ini pun mungkin tidak akan berhasil.

24. Akan tetapi keputusan beberapa pemerintahan untuk membuka walau sedikit dari informasi mereka mengenai Timor-Leste, telah sangat membantu Komisi dalam mengemban tanggung jawabnya mencari kebenaran. Dokumentasi yang dibuka oleh pemerintah Australia untuk periode 1974-76 telah sangat berharga, seperti halnya laporan dua jilid *Relatórios da Descolonização de Timor* mengenai tahun 1974--75 yang disediakan oleh Pemerintah Portugal. Komisi juga dibantu oleh informasi rahasia yang dibuka kepada Arsip Keamanan Nasional oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Perpustakaan Presiden Ford dan Carter, empat jilid bahan-

bahan rahasia yang dibuka oleh Pemerintah Selandia Baru, serta dokumen-dokumen yang dibuka oleh Pemerintah Inggris dan disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga banyak mengandalkan catatan debat-debat informatif mengenai Timor di PBB, Kongres AS dan Parlemen Australia, serta koleksi dokumen-dokumen dasar mengenai persoalan Timor yang disunting oleh Heike Krieger dan diterbitkan oleh University of Cambridge. Ini diperkaya lagi oleh sebuah laporan mengenai penentuan nasib sendiri yang dipersiapkan untuk Komisi oleh Profesor Geoffrey C. Dunn, Universitas Nagasaki, Jepang dan kesaksian tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang berdinasi di PBB dan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia.¹

25. Catatan-catatan ini merupakan bagian penting dari khazanah sejarah Timor-Leste yang sebagian besar orang Timor-Leste baru kali ini dapat melihatnya. Komisi sangat berterima kasih atas segala kebaikan hati dan kerja sama yang diterimanya dalam menyusun bahan-bahan ini, dan sesuai dengan mandatnya, telah menyimpan dan menyusun arsip-arsip ini untuk bahan referensi di masa mendatang. Komisi berharap bahwa Pemerintahan-pemerintahan yang belum melakukan hal ini, akan menyumbang catatan-catatannya atau membantu peneliti Timor atau yang lain untuk mengakses arsip-arsip mereka.

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemegang kepentingan utama

Indonesia sudah melakukan studi akan kemungkinan reaksi internasional terhadap intervensi Indonesia di Timor Portugis...[Indonesia] sudah mengambil konklusi, bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak akan memprotes. Tidak akan ada reaksi signifikan dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Hubungan dengan Portugal tidaklah penting bagi Indonesia. Referensi apa pun tentang hal ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditangani oleh Indonesia dengan memuaskan. Negara-negara Afrika Hitam akan bereaksi, tetapi ini tidak akan memiliki dampak serius bagi Indonesia. Hanya dua negara yang akan memprotes secara keras – Cina dan Australia. Di dalam kasus Cina, bentuk protes ini akan berupa rutinitas dan stereotip (“sebuah reaksi yang diwajibkan”). Sedangkan di Australia, kelompok-kelompok tertentu dan media akan menyebabkan kegemparan. Pemerintah Australia akan merasa diharuskan untuk melakukan protes. Ini akan disesali oleh Indonesia. Tetapi semua itu akan hilang ditelan waktu.¹⁵

2.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa

26. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun kerja sama antar-negara-negara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan hak-hak asasi manusia. Negara-negara anggotanya terikat oleh Piagam PBB, sebagai sebuah kesepakatan internasional yang memaparkan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai anggota komunitas internasional.

¹ Komisi juga berterima kasih kepada John Waddingham, Julia Davey, dan Peter Carey atas nasihat dan kontribusi mereka pada proses riset bab ini.

27. Piagam PBB mengakui prinsip-prinsip dari hak atas penentuan nasib sendiri dan, seperti yang tercantum dalam Bab XI, mewajibkan anggotanya yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah atau koloni-koloni yang tidak berpemerintahan sendiri, untuk menerima suatu 'amanat yang suci' untuk mendorong pemajuan bangsa-bangsa itu beserta lembaga-lembaga politiknya, dan memberitahu komunitas dunia mengenai langkah-langkah yang diambil dalam persiapan penentuan nasib sendiri.

28. Gerakan menentang kolonialisme semakin kuat bergulir setelah Perang Dunia Kedua. Bangsa-bangsa yang terbelenggu dan kekuatan kolonial, keduanya sepakat bahwa kolonialisme, sebagai sebuah sistem yang didasarkan atas dominasi dan ketidak-setaraan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental PBB dan tidak dapat dipertahankan dalam dunia yang sedang berubah. Pada tahun 1960, untuk mempercepat proses tersebut, PBB mengumumkan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Kolonial. Deklarasi ini diterima dengan mayoritas besar anggota-anggota PBB tanpa adanya yang menentang. Deklarasi itu menyatakan:

Segala bangsa berhak atas penentuan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan nasib sendiri dan bebas mengupayakan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka.¹

29. Begitu pentingnya dokumen ini bagi Timor-Leste, sehingga setiap resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan mengenai persoalan Timor-Leste mencantumkannya sebagai pendahuluan.

30. Pada hari yang sama, Majelis Umum mengemukakan berbagai prosedur di mana pemerintahan diri sendiri secara total dapat diraih oleh wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Resolution 1541 (XV) memberi tiga pilihan: kemerdekaan, asosiasi bebas, atau integrasi dengan negara merdeka. Resolusi ini mensyaratkan, bahwa integrasi hanya dapat terjadi jika wilayah yang dimaksud sudah memiliki lembaga-lembaga politik yang bebas dan maju, dan bahwa integrasi adalah hasil dari keinginan bebas masyarakatnya yang diungkapkan melalui pemungutan suara dewasa universal yang terbuka.²

31. Pada tahun 1961 PBB membentuk Komite Khusus Dekolonisasi untuk memperkuat Deklarasi tersebut.³ Peran utamanya adalah untuk menasihati Majelis Umum mengenai cara-cara untuk mendorong dekolonisasi dan kemerdekaan, serta memberi tahu Dewan Keamanan mengenai perkembangan di wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Komite ini tidak memiliki kuasa untuk menegakkan resolusi-resolusi atau rekomendasinya, tetapi diberi mandat untuk bepergian ke seluruh dunia, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengumpulkan informasi langsung mengenai situasi di wilayah-wilayah itu, termasuk kehendak bangsanya mengenai masa depan mereka. Pembahasan mengenai dekolonisasi juga dilakukan dalam Komite Keempat Majelis Umum.

32. Karena inisiatif-inisiatif ini, dekade 1960-an sering disebut sebagai dekade dekolonisasi dan kemerdekaan. Tidak kurang dari 42 negara, yang sebagian besar di Afrika, memperoleh kemerdekaan dan keanggotaan PBB selama tahun 1960-an, lebih banyak dari dekade-dekade

¹ Resolusi SU 1514 (XV). UN Doc. A.RES/1514 (XV) Sembilan anggota abstain: Australia, Belgia, Republik Dominika, Prancis, Portugal, Spanyol, Union of South Africa, Inggris dan Amerika Serikat.

² Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh anggota-anggota di dalam menentukan adanya sebuah kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan disebut di dalam Pasal 73e dari Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Prinsip IX, digabungkan ke Resolusi SU 1541 (XV), 15 Desember 1960

³ Komite itu juga disebut sebagai Komite 24 berdasarkan jumlah anggotanya. Nama lengkapnya adalah Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.

lainnya dalam sejarah PBB. Walau demikian, Timor tidak turut merdeka sampai 40 tahun kemudian.

33. Hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri diakui pada tanggal 15 Desember 1960, ketika Majelis Umum PBB mencantumkan nama Timor sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, bersama dengan koloni-koloni Portugal lainnya¹⁶. Ini adalah pertama kalinya bangsa Timor-Leste diakui oleh Majelis Umum sebagai bangsa yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Portugal menolak untuk menerima keputusan itu dan tetap bersikeras di hadapan tantangan-tantangan internasional sampai terjadi perubahan rejim pada tahun 1974. Walau demikian, keputusan PBB ini sangat signifikan. Meskipun perlu waktu untuk menerapkannya dan menemui berbagai macam rintangan sampai pada tahun 1999, keputusan ini merubah status hubungan Timor dengan Portugal dan komunitas internasional secara radikal. Keputusan ini mengangkat takdir sebuah bangsa kecil dari ketidak-jelasan kolonial menjadi sebuah persoalan tanggung jawab internasional, dan PBB serta lembaga-lembaganya menjadi forum/pertanggung-jawaban utama untuk masa depan mereka.

2.2 Portugal

34. Portugal bergabung dengan PBB pada tahun 1955. Amandemen pada tahun 1951 terhadap Konstitusi Portugis 1933 membatalkan Undang-Undang Kolonial tahun 1930, dan menetapkan koloni-koloni Portugis sebagai "provinsi seberang lautan". Penduduk pribumi koloni-koloni ini tidak diikutkan dalam pembahasan mengenai perubahan status *de jure* mereka. Portugal bersikap abstain ketika Majelis Umum menerima Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-negara dan Bangsa-bangsa Kolonial pada tahun 1960, menolak untuk melapor kepada PBB sebagaimana yang diwajibkan dalam Bab XI Piagam PBB, dan menentang inisiatif-inisiatif PBB lainnya termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada tahun 1963 yang mengkritik Portugal atas ketidak-patuhannya, dan kembali mempertegas hak atas penentuan nasib sendiri Timor Portugis. Rejim Salazar-Caetano bersikeras, bahwa Portugal adalah negara "pluri-continental" di mana bangsa-bangsanya menjalankan penentuan nasib sendiri melalui partisipasi dalam proses politik Portugis. Perdana Menteri Portugis, Dr António de Oliveira Salazar, juga percaya bahwa proses dekolonisasi global ini dimotori oleh negara-negara Dunia Ketiga dan komunis, yang menginginkan disintegrasi Eropa Barat, dan bahwa Barat menuruti pihak mayoritas melalui PBB.¹⁷ Kebuntuan ini berlanjut hingga tahun 1974.

35. Situasi sosio-ekonomi di Timor Portugis pada periode ini terbelakang dan pada dasarnya lumpuh. Konsul Australia untuk wilayah itu, James Dunn, melaporkan pada tahun 1963:

Timor Portugis adalah wilayah yang miskin dan sangat terbelakang. Tidak ada industri hilir, sumber daya mineralnya sangat minim, dan produksi pertanian subsistennya juga rendah. Sangat sedikit yang dilakukan oleh Portugis untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, dan sejauh ini tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi hal ini di masa mendatang.

36. Dunn percaya situasi itu begitu menyia-nyiakan orang Timor, sehingga mereka mungkin akan lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka tapi miskin. Ia menulis:

Orang Portugis di Timor tidak banyak mendapat dukungan riil dari penduduk aslinya... sebagian besar mungkin akan lebih memilih berada di bawah Indonesia daripada terus dikuasai Portugis.¹⁸

37. Ada beberapa kemajuan pada awal 1970-an di bawah Gubernur Fernando Alves Aldeia. Namun sistem ini sesungguhnya sudah begitu bangkrut, sehingga José Ramos-Horta, sekembalinya dari pengasingannya di Mozambique, berkomentar:

Saya melihat negeri saya tercinta sama saja seperti sebelum saya pergi (tahun 1970). Timor-Leste, di bawah Portugis, tampak duduk diam dalam sejarah. Denyut nadi pembangunan tidak terasa di sini.¹⁹

38. Pada bulan November 1975 PBB menggambarkan situasi sosio-ekonomi Timor Leste dengan istilah-istilah yang tidak kalah menyedihkan:

Menurut sebuah publikasi resmi Portugis, di antara faktor-faktor yang merintang pembangunan wilayah ini ialah rendahnya pendapatan per kepala, kurangnya infrastruktur transportasi dan energi, kurangnya tradisi komersial di antara penduduk pribumi, kekurangan pekerja yang berkualifikasi secara teknis di berbagai tingkatan sektor publik dan pribadi, kurangnya kemampuan finansial, defisit dalam perdagangan, dan kuatnya pemusatan di proses produksi akan satu produk saja, yaitu kopi.²⁰

39. Kondisi bangsa yang amat menyedihkan ini dibicarakan lebih jauh di kalangan internasional oleh diplomat-diplomat yang mengunjungi wilayah itu setelah tahun 1975. Setelah kunjungan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Portugis Vittorio Winspeare Guicciardi ke Timor pada awal 1976, Pemerintah Australia melaporkan:

Winspeare begitu terkejut melihat 'keterbelakangan' sedikit orang yang ia temui di daerah-daerah pedesaan di pinggiran kota dan mengatakan, bahwa sangat sulit membayangkan mereka dapat memahami segala persoalan seputar tindakan penentuan nasib sendiri. Ia begitu 'terkesima' bagaimana 'primitifnya' kondisi sebagian orang, contohnya yang ia temui di wilayah kantong Oecussi. Ia mengatakan, bahwa ia yakin hidup mereka tidak banyak berubah setelah 500 tahun kekuasaan Portugis.²¹

40. Menyusul perubahan rejim pada tanggal 25 April 1974, Pemerintah Portugis yang baru menerima kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Piagam PBB, dan pada 24 Juli 1974 menganulir Pasal 1 Konstitusi 1933, yang mengklasifikasikan Timor-Leste sebagai wilayah nasional, dan mengakui haknya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Portugal secara resmi menyampaikan perubahan radikal kebijakan ini kepada PBB sebanyak empat kali antara bulan Agustus dan Desember 1974.²² Dalam resolusinya yang diterima pada tahun 1974, Majelis Umum menyambut penerimaan oleh Portugal "akan prinsip sakral penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan serta penerapannya yang tanpa syarat, terhadap semua bangsa yang ada di bawah dominasi kolonial Portugis".²³

41. Sehubungan dengan prinsip utama kebijakan ini, yaitu menghormati pilihan bebas rakyat, Gubernur Portugis, Kolonel Mario Lemos Pires, secara konsisten berupaya memperlakukan semua partai politik dengan sama selama tahun 1975. Ia tidak menyetujui tindakan-tindakan Kolonel Maggiolo Gouveia, Komandan Polisi Portugis yang bergabung dengan UDT pada awal terjadinya perang saudara, dan dalam dua kesempatan menolak untuk mengakui Fretilin sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah – pada bulan September setelah Fretilin mengambil alih administrasi pemerintahan dan kemudian pada bulan November setelah Fretilin

mendeklarasikan kemerdekaan. Untuk alasan yang sama, Portugal juga tidak mengakui deklarasi integrasi dengan Indonesia oleh empat partai.²⁴

42. Setelah mengakui pada bulan November bahwa ia tidak memiliki “cara untuk menjamin normalisasi situasi di Timor”²⁵, Portugal menyerahkan persoalan tersebut kepada PBB untuk diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur PBB. Setelah invasi Indonesia, Portugal memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia, dan memohon kepada Dewan Keamanan untuk segera menghentikan intervensi militer Indonesia, dan sebuah “penyelesaian konflik secara damai dan ternegosiasi serta proses dekolonisasi di bawah pengawasan PBB”.²⁶ Walaupun secara fisik telah menarik diri dari Timor, Portugal mengakui kewajibannya sebagai kekuasaan pemerintahan untuk mendorong penentuan nasib sendiri, dan menyebutkan hal ini secara eksplisit di dalam Konstitusi.¹

43. Prinsip ini terus dipertahankan selama terjadinya konflik² dan ditegakkan dalam beberapa kesempatan, walaupun menghadapi tekanan politik yang berkebalikan. Ada dua contoh yang dapat dikemukakan. Pada bulan Juni 1976, Jenderal Portugal Morais da Silva, mengadakan negosiasi-negosiasi rahasia dengan perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Jenderal Benny Moerdani dan Harry Tjan mengenai pembebasan 23 tawanan Portugis yang ditahan di Indonesia sejak perang saudara, yang menjadi kekhawatiran umum di Portugal. Sebagai imbalannya, Morais da Silva menawarkan kemungkinan pengakuan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste oleh Portugis. Usulnya ditolak oleh Presiden terpilih, Jenderal António Ramalho Eanes, dan Perdana Menteri baru, Mario Soares, yang menegaskan bahwa negosiasi mengenai kedaulatan itu bergantung pada tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.²⁷ Dalam kesempatan lainnya, pada tahun 1987, Portugal dan PBB mempertimbangkan untuk mengamati pemilihan umum Indonesia di Timor-Leste sebagai satu cara untuk menilai sikap rakyat Timor terhadap integrasi. Setelah sebuah kampanye protes oleh kalangan masyarakat sipil, Portugal pun memperbaharui komitmennya terhadap penentuan nasib sendiri.

44. Pada tahun 1991 Portugal menegaskan komitmen kepada prinsip ini, ketika ia mengajukan Australia ke Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice; ICJ*) atas dasar, bahwa Perjanjian Celah Timor antara Australia dengan Indonesia telah melanggar, antara lain, hak atas penentuan nasib sendiri Timor-Leste. ICJ memutuskan tidak bisa bertindak sebagai hakim di dalam perdebatan ini. Tapi ICJ menyatakan, bahwa dalam pandangan Portugal dan Australia wilayah Timor Timur tetap merupakan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, dan masyarakatnya memiliki hak atas penentuan nasib diri sendiri.²⁸

45. Keputusan Portugal untuk mendekolonisasi Timor-Leste, untuk mempertahankan dukungan secara prinsip atas penentuan nasib sendiri, dan untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia selama 25 tahun, telah berperan sangat penting bagi nasib Timor-Leste. Meskipun demikian, walaupun sudah berkali-kali menyatakan komitmen kebijakan sejak tahun 1974, secara umum Portugal gagal menjelmakan prinsipnya menjadi dukungan yang berkelanjutan sampai menjelang akhir konflik. Portugal telah salah mengelola proses dekolonisasi pada tahun 1974 dan 1975, dan umumnya tidak efektif sebagai “kuasa pemerintahan” selama sebagian besar masa pendudukan Indonesia itu.

46. Letnan-Kolonel Lemos Pires bersaksi kepada Komisi, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi gagalnya proses dekolonisasi pada tahun 1974-75, termasuk agresi yang dilakukan oleh Indonesia dan ketidak-dewasaan partai-partai politik baru di Timor. Akan tetapi,

¹ Pasal 307 Konstitusi Republik Portugis, 2 April 1976, menyatakan: “Portugal shall remain bound by its responsibility, in accordance with international law, to promote and safeguard the right to independence of Timor-Leste”. Pada tanggal 7 Juli 1989, Artikel 293 diubah untuk membaca “to promote and safeguard the right to self-determination and independence of East Timor”. Krieger, hal. 36.

² Penerimaan Portugal atas kewajiban-kewajiban internasionalnya bagi Timor Timur bertentangan dengan penerimaannya terhadap pengambilalihan India atas Goa pada tanggal 1961 dan pelepasan Spanyol terhadap Sahara Barat kepada Moroko pada bulan November 1975. Keduanya terjadi tanpa adanya proses penentuan nasib sendiri.

satu faktor kunci untuk semua ini adalah kegagalan Portugal untuk melibatkan komunitas internasional sebelum dan setelah tahun 1974.

47. Mantan Gubernur itu menjelaskan, bahwa keputusan untuk melakukan dekolonisasi adalah peristiwa revolusioner yang sangat mendadak, dan menjadi kejutan baik bagi Portugal maupun Timor-Leste. Keduanya tidak siap dan tidak memiliki perangkat yang baik untuk menjalankan peran mereka masing-masing, dan seakan terjerumus ke dalam kekacauan karena keputusan itu. Hal ini sebagian besar merupakan akibat kegagalan rejim Salazar-Caetano mematuhi kewajiban internasionalnya dalam mempersiapkan diri beserta koloni-koloninya, untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan cara yang sistematis dan positif, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengabaian Portugal atas tanggung jawabnya dan kekukuhannya meneruskan *status quo* yang melanggar kebijakan PBB, menggagalkan terjadinya dekolonisasi yang sah, serta mengakibatkan kehancurannya sendiri dan pergolakan, baik di dalam negeri maupun di wilayah-wilayahnya di seberang lautan. Hal ini juga menimbulkan adanya pandangan di Portugal, bahwa kemerdekaan bukan pilihan politik dan ekonomi yang dapat berjalan bagi Timor-Leste, dan bahwa wilayah itu seharusnya bersatu dengan Indonesia, walaupun harus melalui proses penentuan nasib sendiri.

48. Walaupun keputusannya untuk melakukan dekolonisasi dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, Portugal menolak menginternasionalisasi proses itu dengan mencari bantuan kepada PBB. Pada bulan Februari 1975, misalnya, sebuah delegasi Pemerintah Portugis di Timor bertemu dengan Komisi Nasional Dekolonisasi di Lisbon, dan menegaskan “perlunya segera menetapkan sebuah kebijakan dengan jelas, [dan] membela internasionalisasi persoalan Timor melalui PBB, khususnya meminta negara-negara Dunia Ketiga sebagai satu-satunya pelindung terhadap intervensi militer Indonesia.”¹ Komisi ini memutuskan, bahwa sebuah permintaan kepada PBB untuk menahan Indonesia harus digunakan sebagai jalan terakhir. Namun Portugal lebih memilih melakukan pembicaraan rahasia putaran ketiga dengan Indonesia.² Penolakan untuk melibatkan PBB ini, setidaknya sampai setelah invasi Indonesia terjadi, merupakan suatu kesalahan besar. Mantan Gubernur Pires mengatakan kepada CAVR:

Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya menjadi pemain utama dalam proses ini...Saya kira akan lebih baik bagi Portugal [dan] proses dekolonisasi Timor-Leste, apabila Portugal menginternasionalisasi persoalan ini sejak kebutuhan akan penentuan nasib sendiri diakui pada tahun 1974...Pemerintah Portugis tidak meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa datang ke wilayah ini...Saya kira ini adalah kesalahan.³

49. Bukannya mencari bantuan internasional, Portugal justru memutuskan untuk mengelola proses itu sendiri dengan sedikit sumber daya militer dan uang, tanpa adanya rencana, dan sementara kewalahan dengan runtuhnya imperium Portugal di Afrika dan konflik di dalam negeri. Akibat ketidak-stabilan politik yang mewabah di Portugal, Timor menderita akibat tidak adanya

¹ João Loff Barreto, *The Timor Drama*, 1981, hal. 25-26. Pada bulan Juni 1975 Komisi kembali menolak untuk menginternasionalisasikan isu tersebut dan pada bulan September, Portugal meyakinkan Indonesia bahwa PBB adalah jalan terakhir. Barreto, hal. 53. Letnan-Kolonel Portugal Lopes Pires, seorang pengawas militer dalam pertemuan Komisi Nasional Dekolonisasi menulis: “Saya memahami ini (internasionalisasi) sebagai satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari apa yang kita semua ingin hindari, melihat situasi sistematis yang memburuk”. Barreto, hal. 63. Menteri Luar Negeri Australia, Don Willesee, mengatakan kepada Parlemen pada tanggal 8 Oktober 1975: “Sampai pada saat itu, Pemerintah Portugis... belum menyerahkan proposal resmi apa pun untuk mediasi PBB di Portugis Timor”. (http://www.whitlam.org/collection/2000/20001012_East_Timor_74-75/index.html).

² Pejabat-pejabat Portugis dan Indonesia bertemu secara rahasia di Lisbon tanggal 14 Oktober 1974, di Paris tanggal 14 November 1974, dan London tanggal 9 Maret 1975.

³ Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003. PBB mengikuti proses itu dan mengadakan sebuah pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi di Lisbon pada bulan Juni 1975, tapi Portugal tidak menyerahkan isu tersebut sampai pada bulan Desember 1975.

kepemimpinan yang tegas di saat-saat terjadinya krisis. Pemerintahan di Portugal tidak berdaya, misalnya, selama berlangsungnya Gerakan Militer UDT di bulan Agustus, dan lagi pada bulan November menjelang invasi Indonesia. Letnan Kolonel Lemos Pires mengatakan kepada Komisi:

*Tidak ada kebijakan dekolonisasi bagi Timor-Leste.
Dukungan dana yang diberikan sangat sedikit...Pasukan
militer yang dialokasikan teramat minim*²⁹

50. Kurangnya pasukan Portugis dapat dipahami dalam konteks revolusi Pergerakan Pasukan Bersenjata (*Movimento das Forças Armadas, MFA*), namun membuat Gubernur relatif tidak berdaya pada masa perang saudara, dan wilayah itu pun menjadi semakin rentan terhadap agresi Indonesia.¹ Situasi sial yang dihadapi Portugal ini semakin tersorot jelas, ketika Gubernur Pires mundur ke Ataúro dan kemudian ke Portugal.

51. Portugal sangat menyadari adanya rencana Indonesia yang semakin agresif untuk menyatukan Timor, dan mencoba meredam tindakan-tindakan Indonesia melalui jalur-jalur diplomatik. Meskipun demikian, selama periode ini, Portugal tampaknya menganggap Indonesia sebagai bagian dari solusi daripada bagian dari masalah. Perundingan-perundingannya dengan Indonesia sampai terjadinya invasi pada tanggal 7 Desember 1975, umumnya terjadi secara rahasia dan kooperatif, dengan pemahaman akan kepentingan-kepentingan Indonesia, termasuk jaminan bahwa persoalan tersebut tidak akan diinternasionalisasikan, dan khususnya hampa akan kritikan publik mengenai maksud-maksud militer Indonesia dan campur tangannya dalam hubungan dalam negeri Timor Portugis.

52. Menteri Luar Negeri Melo Antunes konon tidak menggunakan kesempatan, dalam perundingan di Roma dengan Indonesia pada tanggal 1-2 November 1975, untuk memperlihatkan bukti yang diberikan oleh wartawan Portugis, Adelino Gomes, bahwa Indonesia telah mengumpulkan pasukan di Timor Barat dan sudah melintas masuk ke Timor Portugis.³⁰ Komunike dari pertemuan itu menggambarkan pertemuan itu sebagai "terbuka" tapi tidak menyebutkan aktivitas militer Indonesia. Pertemuan itu justru terfokus pada perlunya diadakan perundingan dengan partai-partai politik Timor "untuk mengakhiri pertikaian bersenjata" dan melindungi "kepentingan Indonesia". Dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 28 dan 29 November 1975, Portugal mempersalahkan Fretilin atas situasi itu, dan tidak menyebutkan Indonesia dengan nama secara langsung.³¹ Baru setelah invasi besar-besaran tanggal 7 Desember 1975, ketika sudah sangat terlambat, Portugal langsung memprotes aksi-aksi militer Indonesia, kemudian memutuskan hubungan diplomatik dan membawa isu itu kepada Dewan Keamanan.

53. Mantan Gubernur Pires mengatakan kepada Komisi, bahwa menurutnya Australia seharusnya dapat lebih membantu Portugal dan Timor pada saat itu. Pada tahun 1975, dia, anggota-anggota Parlemen Australia, UDT dan Fretilin berulang kali membuat permohonan kepada konsulat Australia, yang ditutup pada tahun 1971, untuk dibuka kembali agar ada kehadiran internasional dan dapat memberi laporan langsung kepada Australia mengenai situasi yang terjadi. David Scott bersaksi kepada Komisi, bahwa permohonan ini ditolak oleh Pemerintah Australia pada enam kesempatan.³² Menurut Gough Whitlam yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, "(Portugal) tidak pernah kapan pun... membuat permohonan spesifik kepada Australia atau kekuatan regional lainnya".³³

54. Portugal bersikap relatif pasif di kancah internasional selama tahun 1970-an dan awal 1980-an. Richard Dalton, seorang pejabat dalam Misi Inggris di PBB, mengamati, bahwa pada tahun 1976:

¹ Portugal mengurangi jumlah pasukannya kurang lebih dari 3000 orang pada tahun 1974 hingga kira-kira 200 sampai pada pertengahan 1975. José Ramos-Horta menulis: "Dalam pandangan saya, pengurangan pasukan adalah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Portugis pada tahun 1974". *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1987, hal. 48.

“Portugal terus diam. Secara pribadi mereka mengatakan, bahwa mereka akan menerima apa pun yang bisa diterima PBB secara utuh. Mereka tidak berusaha untuk menyelesaikan apa pun.”³⁴

55. Kehampaan inisiatif ini sangat kontras dengan agresi diplomatik Indonesia, dan menyebabkan terjadinya kehilangan suara di PBB serta melemahnya dukungan bagi Timor-Leste. Pemerintah Portugis terkadang lamban atau tidak tanggap terhadap peristiwa-peristiwa penting di Timor-Leste. Contohnya, ketika Portugal gagal memprotes penyerangan militer Indonesia di Timor-Leste, yang diikuti oleh kegagalan gencatan senjata pada tahun 1983. Hal ini memicu kritik samar-samar dari José Ramos-Horta:

Kelalaian kriminal dan kepengecutan politik [Portugal] adalah dua hal yang dalam delapan tahun terakhir turut menyebabkan hilangnya blok suara yang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Setelah masa singkat setahun, di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Pinto Balsemão, ketika Pemerintah Portugal memang melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menarik perhatian komunitas internasional akan tragedi bangsa Timor-Leste, kita kini kembali lagi ke kesunyian dan pelarian yang sudah menjadi sikap pejabat Portugis sejak 1974 sampai 1981.³⁵

56. Beberapa pertanda positif adanya komitmen yang agak terlambat muncul pada dekade 1980-an, dan semakin menggagal momentum pada dekade 1990-an. Pada tahun 1982, di bawah Presiden Ramalho Eanes, Portugal mulai membahas persoalan ini secara sistematis serta mengerahkan kementerian luar negeri dan diplomat-diplomatnya. Pada tahun 1982 itu juga, Majelis Nasional Portugis membentuk Komite Khusus untuk Pendampingan Situasi di Timor-Leste. Di samping menunjukkan konsesus antar-partai mengenai persoalan tersebut, Komite memfasilitasi internasionalisasi persoalan Timor-Leste oleh wakil-wakil Portugis di berbagai fora, termasuk Komite Khusus Dekolonisasi PBB.

57. Satu kemajuan besar terjadi pada bulan Juni 1986 ketika Portugal bergabung dengan Komisi Ekonomi Eropa (*European Economic Commission, EEC*) dan dengan Parlemen Eropa pada tahun berikutnya. Ini merupakan keterlibatan Portugal yang pertama dalam sebuah organisasi lintas negara yang signifikan. Dipimpin oleh Presiden Mario Soares, dan didorong oleh tumbuhnya persatuan dalam Perlawanan Timor, Portugal memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk menggagal dukungan di antara rekan-rekan Eropanya, terutama Irlandia¹, Yunani dan Italia. Kegiatan resmi semakin meningkat selama dekade 1990-an, didorong antara lain oleh tanggapan publik di Portugal terhadap demonstrasi yang terjadi pada kunjungan Paus Yohanes Paulus II, dampak emosional pemuda Timor yang berdoa dalam bahasa Portugis selama pembantaian Santa Cruz tahun 1991, serta penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1996. Contohnya, pada tahun 1993, Portugal memiliki sebagian besar tanggungjawab untuk pemaknaan resolusi positif mengenai Timor-Leste oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dalam sesuatu yang dideskripsikan oleh seorang diplomat Amerika Serikat sebagai “salah satu saat yang paling dramatis di sidang tahun ini”, Portugal, dengan bantuan dari bekas koloni-koloninya, mendapatkan dukungan dari AS, Kanada dan Australia untuk resolusi tersebut. Misi AS di Jenewa melaporkan:

¹ Menyusul *footage* televisi mengenai pembantaian Santa Cruz dan aktifitas komunitas yang dipimpin oleh Kampanye Solidaritas Irlandia Timor Timur (*East Timor Ireland Solidarity Campaign, ETISC*), yang dibentuk di Dublin pada tahun 1992, kembalinya Irlandia ke Timor-Leste dikarenakan turunnya presiden [cek terjemahan]. Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews, berperan aktif dalam Uni Eropa dan ditunjuk sebagai utusan khusus Uni Eropa ke Timor-Leste.

“Perjalanan menuju Resolusi Timor Timur menunjukkan titik puncak akan usaha yang luar biasa besar dari Pemerintah Portugis, yang memainkan peranan sangat keras di dalam dialog antara EC-Indonesia, menangkis tekanan yang cukup besar – termasuk dari teman-teman terdekatnya – untuk menerima penggunaan bahasa yang kompromistis.³⁶

58. Portugal kembali ke panggung utama bersama dengan Indonesia dalam negosiasi-negosiasi yang bermuara pada Kesepakatan 5 Mei 1999. Pembicaraan antara Portugal dan Indonesia yang berdasar pada Resolusi Majelis Umum 37/30, tidak mengalami banyak kemajuan sejak tahun 1983, namun menyusul keputusan Kofi Annan untuk mengaktifkan kembali proses itu pada tahun 1997, Portugal bekerja langsung dengan Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste, Jamsheed Marker, dan berpegang teguh pada kebijakan penentuan nasib sendiri yang selalu diutarakan. Menurut Duta Besar Marker, Perdana Menteri Guterres dan Menteri Luar Negeri Jaime Gama menegaskan, bahwa “mereka tidak dapat menerima penyelesaian yang tidak berdasar pada pilihan bebas rakyat Timor”.³⁷ Hal ini dicapai melalui Kesepakatan 5 Mei 1999 dan pemungutan suara pada bulan Agustus, di mana Portugal memainkan peran penting dalam kedua peristiwa itu.

59. Portugal tidak secara resmi melepaskan diri sebagai “kekuasaan pemerintahan” di Timor-Leste. Setelah perdebatan di Lisbon menghadapi Kesepakatan 5 Mei, diputuskan untuk tidak membesar-besarkan masalah, kecuali jika hal ini membahayakan atau memperlambat jalannya negosiasi yang sensitif itu, menjelang tindakan penentuan nasib sendiri pada tahun 1999. Justru disetujui bahwa, dukungan Portugal terhadap tindakan-tindakan yuridis dan yang dapat diterima secara internasional, yang akan berujung pada kemerdekaan, akan mengakhiri statusnya sebagai “kekuasaan pemerintahan”. Hal-hal itu adalah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei 1999 (bergantung pada proses yang diawasi), dukungan bagi pembentukan dan berjalannya UNTAET sebagai pemerintahan transisi,³⁸ dan pengakuan Republik Demokratik Timor-Leste.

60. Pada tanggal 8 Mei 2002 Majelis Umum memutuskan “untuk menghapus Timor-Leste dari daftar “Wilayah-wilayah Yang Tidak Berpemerintahan Sendiri” setelah mendapatkan kemerdekaannya”.³⁹

2.2.1 Kesimpulan

61. Portugal mempunyai tanggung jawab utama, yaitu mempersiapkan dan memfasilitasi dekolonisasi di Timor, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya kepada PBB dan rakyat Timor. Kegagalannya di bawah rejim Salazar-Caetano untuk menjalankan tanggung jawab ini, dan mempersiapkan masa depan bangsa Timor tanpa Portugal, patut disesalkan dan merupakan pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri. Hal ini juga mengikis hak atas kemerdekaan dengan memperkuat pandangan umum, bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak dapat eksis secara ekonomi dan politik, dan hanya dapat bertahan melalui penyatuan dengan Indonesia.

62. Perubahan kebijakan Portugal pada tahun 1974 untuk mendukung penentuan nasib sendiri, merupakan hal yang sangat penting bagi nasib Timor-Leste, serta keteguhannya berpegang pada prinsip ini selama masa pendudukan Indonesia. Meskipun demikian Portugal gagal menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat Timor-Leste selama periode kritis tahun 1974-75 dan sesudahnya. Walaupun Timor secara geografis merupakan ketiga terbesar dari enam wilayah Portugal, Timor berada di urutan bawah dalam daftar prioritas Portugal. Bagi Portugal, periode ini tampaknya menandakan akhirnya perannya daripada menjadi aktif mengambil tanggung jawab baru. Pemerintah pusat tidak menyediakan sumber daya yang cukup kepada perwakilan lokalnya, tidak pula mengamankan wilayah itu di tengah ancaman agresi dari luar yang jelas, bahkan terlalu mengakomodasi posisi Indonesia, dan menolak untuk menginternasionalisasi isu tersebut. Harga nyawa akibat kelalaian ini sangat berat. Kepasifan

dan kebingungan ini terus mewarnai kegiatan diplomatiknya hingga pertengahan 1980-an, walaupun ada kewajiban menurut undang-undang dan kewajiban-kewajiban internasional serta petisi yang terus-menerus dari rakyat Timor- Leste dan masyarakat sipil Portugis, untuk pembelaan yang lebih meyakinkan bagi kepentingan bekas koloninya.

63. Mario Lemos Pires, Gubernur Timor Portugis yang terakhir, menjalankan tugasnya pada tahun 1974 dan 1975, dengan sikap terhormat dan berprinsip di hadapan tantangan-tantangan yang berat. Komisi ingin mengakui perannya selama masa yang kritis ini.

2.3 Indonesia

64. Indonesia mendapat dukungan dari PBB dalam perjuangannya untuk kemerdekaan dari Belanda, dan bergabung dengan badan dunia itu pada tahun 1950. Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi yang lantang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.¹

65. Pemerintah Indonesia baik di bawah Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto secara resmi mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengklaim hak teritorial atas koloni itu.

66. Dalam serangkaian pernyataan kepada Majelis Umum antara tahun 1954 dan 1962, yang berkaitan dengan sengketa atas Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, para pejabat Indonesia berulang kali menekankan, bahwa batas-batas nasional Indonesia adalah batas-batas bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1961, misalnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengatakan:

Mengenai pulau besar Borneo...yang bagian utaranya merupakan wilayah Inggris, dan sama halnya mengenai setengah pulau Timor, yang milik Portugis, kami tidak memiliki klaim teritorial apa pun; karena yang kami anggap sebagai milik Indonesia dan wilayah Indonesia adalah tidak lain dan tidak bukan seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda.⁴⁰

67. Pada tahun 1960 Indonesia mendukung Deklarasi PBB mengenai "Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Kolonial" dan resolusi Majelis Umum yang mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Indonesia mendukung resolusi-resolusi PBB selanjutnya, yang mengecam praktek-praktek kolonial Portugal, dan kegagalannya untuk memenuhi kewajibannya di bawah Piagam PBB. Wakil ketua Dewan Penasihat Presiden Sukarno, Ruslan Abdulgani, berkata dalam sebuah pawai yang diadakan di Jakarta pada tahun 1961:

¹ Ini diambil dari pernyataan Presiden Soeharto kepada perwakilan Pemerintah Sementara Timor Timur dalam tanggapan petisi mereka untuk integrasi dengan Indonesia, 7 Juni 1976. dalam Krieger, hal. 48.

Isilah hati kalian dengan kebencian tidak hanya terhadap penjajahan Portugis, tapi juga terhadap segala penjajahan yang masih ada di bumi Asia dan Afrika”; dan menambahkan bahwa “mata dan hati [Indonesia] ditujukan kepada Timor Portugis dan Goa [yang] masih berada di bawah kekuasaan penjajahan.”⁴¹

68. Pemerintah Australia yakin, bahwa kehadiran rejim kolonial yang terus menerus di dalam kepulauan Indonesia, akan memprovokasi Presiden Sukarno untuk menumpas sisa-sisa kolonialisme terakhir di lingkungannya, dan Australia menganjurkan Portugal untuk membangun wilayah itu dan Indonesia agar tidak menggunakan kekuatan. Meskipun demikian, ketertarikan Sukarno pada Timor umumnya hanya berupa wacana, dan tidak bisa disamakan dengan kampanye-kampanye “ganyang Malaysia” atau Irian Barat. Dalam sebuah kunjungan ke Lisbon pada tahun 1961, ia konon mengatakan kepada Perdana Menteri Portugis, Dr Salazar, bahwa Indonesia menghormati kedaulatan Portugis di wilayah itu.⁴²

69. Kebijakan-kebijakan ini dilanjutkan di bawah Presiden Soeharto Pada bulan Oktober 1974, dalam debat pertama di Komite Keempat PBB sejak terjadi perubahan rejim di Portugal, perwakilan Indonesia menyatakan:

Indonesia ingin melihat bangsa Timor Portugis menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri secara teratur dan damai, sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-Negeri dan Bangsa-Bangsa Kolonial.

70. Dia menambahkan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk integrasi, tetapi “hubungan semacam itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang, antara lain, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan”.⁴³ Duta Besar Indonesia untuk PBB, Anwar Sani, mengulangi sikap ini dalam sebuah pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi PBB yang diadakan di Lisbon pada bulan Juni 1975.

71. Namun, pada kenyataannya Indonesia telah memutuskan, sebelum akhir tahun 1974, bahwa hanya ada satu hasil penentuan nasib sendiri yang dapat diterima. Pada bulan Desember, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, seperti yang dikutip dalam kantor berita resmi Indonesia *Antara* mengatakan, bahwa rakyat Timor hanya memiliki dua pilihan: “tetap di bawah Portugis atau bergabung dengan Indonesia.” Kemudian ia mengatakan, bahwa pilihan dengan Portugal tidak mungkin karena pilihan itu “selain menambah beban Portugal, juga akan merupakan sebuah bentuk baru kolonialisme”; dan menyatakan, bahwa kemerdekaan akan “tidak realistis” karena “keterbelakangan dan kelemahan ekonomi penduduknya”.⁴⁴

72. Penasihat utama Soeharto, Harry Tjan, memastikan keputusan ini kepada Pemerintah Australia. Pada bulan Februari 1975 dia memberi tahu Kedutaan Besar Australia bahwa:

Pemerintah Indonesia sudah membuat suatu keputusan bahwa, cepat atau lambat, Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia. Ini merupakan keputusan bulat oleh semua tokoh terkemuka Indonesia yang terlibat, termasuk Presiden. Yang masih perlu diputuskan adalah kapan, dan bagaimana, hal ini harus diwujudkan. Seperti yang ia katakan, ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi akan terjadi. Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu mencoba segala cara yang memungkinkan sebelum berpaling ke solusi militer. Ia mengatakan bahwa ini adalah ‘tindakan terakhir’.⁴⁵

73. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menyebutkan kembali hal ini dalam sebuah analisis rahasia penting mengenai persoalan ini, yang ditulis pada bulan Januari 1976 untuk Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Fraser. Ia menuliskan:

Indonesia tidak akan dihalangi untuk mencapai tujuan fundamental kebijakan (penggabungan) ini. Indonesia sudah berketetapan dengan sikap ini secara konsisten, sejak beberapa bulan sebelum saya datang menjabat pos ini bulan Maret lalu.⁴⁶

74. Ini merupakan keputusan yang amat menentukan. Keputusan ini bertolak belakang dengan komitmen publik Pemerintah Soeharto untuk menghargai keinginan bebas rakyat Timor. Keputusan itu juga menempatkan Indonesia pada jalur yang akan bertabrakan dengan dua partai utama Timor-Leste, yaitu UDT dan Fretilin, yang keduanya menyuarakan kemerdekaan, dan memberi sebuah tantangan diplomatik yang besar bagi komunitas internasional.

75. Pelaksanaan tujuan ini dipercayakan kepada badan intelijen militer Opsus (Operasi Khusus) yang menyusun sebuah proyek terselubung Timor, untuk melancarkan sebuah operasi yang diberi nama sandi Operasi Komodo. Operasi ini dikendalikan oleh Mayor Jenderal Ali Moertopo, kepala Opsus, dan Letnan Jenderal Yoga Sugama, kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen). Eksekutif utamanya adalah Liem Bian Kie (sekretaris pribadi Ali Moertopo) dan penasihat utamanya adalah Harry Tjan dari Pusat Pengkajian Strategis dan Internasional (*Centre for Strategic and International Studies; CSIS*), lembaga penggagas bagi Opsus. Ini bukanlah suatu tantangan baru. Opsus, di bawah Ali Moertopo, pernah menyelenggarakan 'Tindakan Pilihan Bebas' di Irian Barat pada tahun 1969 dan berhasil memastikan bahwa proses itu membuahkan pilihan pro-integrasi. Beberapa tokoh lainnya dalam kampanye integrasi Timor juga sudah berpengalaman dalam pengambilalihan Irian Barat. Tokoh-tokoh ini termasuk Presiden Soeharto, dahulunya Mayor Jenderal, yang mengomandoi kampanye militer Mandala tahun 1962 untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda, Jenderal Benny Moerdani dan Kolonel Dading Kalbuadi.¹ Seiring perkembangannya, Operasi Komodo mengembangkan sejumlah fungsi, termasuk diplomasi internasional (sebagian besar diarahkan kepada Portugal), intelijen, subversi, dan belakangan persiapan untuk penggunaan kekuatan militer. (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik)

76. Di akhir Agustus 1975, Indonesia memperkeras posisinya dan memutuskan untuk melancarkan intervensi militer guna mendapatkan integrasi. Hal ini terjadi setelah keberhasilan-keberhasilan Fretilin dalam perang saudara, dan sinyal samar-samar oleh Menteri Koordinasi Antar-Wilayah Portugis, Dr António de Almeida Santos, bahwa Portugal kemungkinan akan menyerahkan kekuasaan kepada Fretilin. Pada pertemuan tanggal 5 September, Presiden Soeharto dan Jenderal Moerdani menyelidiki tujuh kemungkinan mulai dari sebuah undangan kepada Indonesia dari Portugal untuk langsung turun tangan, sampai pada keterlibatan PBB, di mana Indonesia akan berpartisipasi. Presiden Soeharto mencoret semua opsi kecuali rencana Opsus yang ia sebut sebagai "cara klasik". Di bawah komando Jenderal Moerdani, rencana Opsus akan mengerahkan "sukarelawan" yang dipersenjatai dengan baik, untuk menyokong pasukan UDT dan pasukan Timor anti-Fretilin lain, dalam usahanya untuk mencegah penguasaan Timor sepenuhnya oleh Fretilin.⁴⁷

77. Akan tetapi, Indonesia menjelaskan intervensi militernya kepada PBB dari segi kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Dalam sebuah pernyataan kepada Dewan Keamanan pada tanggal 15 Desember 1975, perwakilan Indonesia, Anwar Sani, menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas wilayah itu,

¹ Catatan mengenai keterlibatan Kapten Moerdani di Irian Barat dan Timor-Leste dapat ditemukan dalam Julius Pour, Benny Moerdani: Profile of a Soldier Statesman, Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993. Moerdani bertanggung jawab atas peran militer dalam Operasi Komodo. Kalbuadi bertugas sebagai komandan lapangan dalam penyerangan Indonesia di Portugis Timor pada tanggal 16 Oktober 1975.

bahwa Timor berada dalam keadaan anarki, dan bahwa Indonesia turun tangan atas permintaan partai-partai politik yang mewakili sebagian besar rakyat “untuk mengembalikan situasi damai kepada Wilayah itu agar rakyat dapat menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dengan bebas dan secara demokratis.”⁴⁸

78. Majelis Umum dan Dewan Keamanan menolak penjelasan Indonesia. Kedua badan itu mengancam campur tangan militer Indonesia, dan menyerukan untuk mundur secepatnya, serta mengimbau Portugal sebagai kekuasaan pemerintahan untuk bekerja sama dengan PBB “agar memungkinkan rakyat Timor Timur menjalankan hak penentuan nasib sendiri mereka dengan bebas”. Dewan Keamanan juga meminta agar PBB mengirim seorang utusannya ke wilayah tersebut, antara lain untuk menjalin komunikasi dengan semua pihak di wilayah itu, dan semua Negara yang berkepentingan untuk menjamin implementasi resolusi yang ada saat ini”.⁴⁹ Sekretaris Jenderal menunjuk Vittorio Winspeare Guicciardi untuk menjalankan tugas ini.

79. Tanggapan awal Indonesia terhadap resolusi PBB ini menyatakan, antara lain, bahwa Portugal telah kehilangan haknya untuk melaksanakan sebuah program dekolonisasi di wilayah itu, dan bahwa tidak perlu lagi ada plebisit karena penentuan nasib sendiri telah terjadi dalam bentuk deklarasi integrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November. Posisi ini, yang jelas bertentangan dengan resolusi PBB dan komitmen Indonesia sendiri, kemudian ditinggalkan sebagai tanggapan terhadap adanya misi Guicciardi. Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang dibentuk oleh Indonesia, berkata kepada utusan PBB bahwa “untuk menghormati kehendak PBB, yang pertama-tama harus dilakukan oleh Majelis Rakyat Timor Timur adalah meratifikasi keputusan rakyat untuk integrasi penuh dengan Republik (Indonesia)” dan bahwa perwakilan PBB akan diundang untuk mengamati proses itu.⁵⁰

80. Sebuah program empat tahap disusun oleh Indonesia dengan harapan, bahwa sebuah proses yang kredibel akan memberi legitimasi bagi integrasi di mata dunia internasional, dan mencoret persoalan Timor Timur dari agenda PBB.

81. Langkah pertama dan terpenting adalah untuk melaksanakan sebuah tindakan penentuan nasib sendiri. Ini terwujud dalam bentuk Majelis Rakyat, yang berkumpul di Dili pada tanggal 31 Mei 1976, dan menghasilkan sebuah petisi dengan suara bulat, yaitu untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini diikuti dengan kunjungan sebuah misi pencarian fakta Pemerintah Indonesia untuk memeriksa, apakah permintaan itu benar-benar mewakili kehendak rakyat. Menyusul laporan positif oleh misi ini, Parlemen Indonesia menyetujui sebuah rancangan undang-undang integrasi pada tanggal 15 Juli 1976. Langkah keempat dan yang terakhir, rencana undang-undang integrasi disahkan sebagai undang-undang, dan diumumkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juli 1976.

82. Dalam sambutannya ketika menerima petisi itu, pada tanggal 7 Juni 1976, Presiden Indonesia berusaha menjelaskan integrasi dari sisi budaya dan sejarah, ketimbang sisi hukum, dan sebagai suatu kemenangan atas kolonialisme Eropa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam sambutannya yang ditujukan lebih pada delegasi orang Timor daripada komunitas internasional, ia mengatakan, bahwa petisi tersebut merupakan sebuah “peristiwa bersejarah”, karena menandai penyatuan kembali setelah perpisahan selama generasi ke generasi oleh batas-batas buatan:

*Saya tidak merasa seperti menyambut orang asing hari ini. Saya merasa bahwa saya kembali bertemu dengan saudara-saudara saya, yang sudah dipisahkan selama...ratusan tahun oleh batas-batas buatan pemerintah-permerintah penjajahan.*⁵¹

83. Proses integrasi memungkinkan Indonesia mengklaim, bahwa rakyat Timor-Leste telah mengungkapkan keinginan mereka sekali dan untuk selamanya, dan bahwa wilayah itu secara sah dan secara undang-undang telah menjadi provinsi Indonesia. Mulai saat itu, seruan-seruan

Portugal dan yang lainnya untuk penentuan nasib sendiri ditolak sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar bagi penentangan Indonesia terhadap keterlibatan langsung para pemimpin Timor-Leste dalam negosiasi.

84. Komunitas internasional tidak mengakui proses pada tahun 1976 ini. Walaupun ketika itu tidak banyak yang dikatakan oleh masing-masing negara, secara umum disepakati bahwa Majelis tersebut gagal untuk memenuhi uji dasar kebebasan memilih, terutama karena kehadiran pasukan-pasukan Indonesia, tidak adanya opsi lain, serta status keterwakilan para peserta yang meragukan. Resolusi Majelis Umum 31/53, yang disetujui pada tanggal 1 Desember 1976, menolak "klaim bahwa Timor Leste telah disatukan dengan Indonesia, karena rakyat Wilayah itu belum bisa dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri mereka dan kemerdekaan".⁵² Majelis Rakyat tidak mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam resolusi Majelis Umum 1541 (XV) PBB tanggal 15 Desember 1960, yang menegaskan bahwa proses itu harus diinformasikan, bebas dan demokratis. Seorang penasihat hukum Pemerintah AS, George H. Aldrich, mengatakan kepada Kongres:

*Kita sebenarnya tidak tahu banyak mengenai proses seleksi bagi para utusan ini, walaupun prosesnya sendiri terjadi pada masa pendudukan militer oleh Indonesia ketika masih banyak pertempuran berlangsung.*⁵³

85. Alison Stokes, yang mewakili Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta pada peristiwa itu melaporkan, bahwa para pengamat asing diperkenankan untuk berada di Dili kurang dari dua jam, dan sesi itu sendiri berlangsung selama satu jam. Dia menulis:

Penilaian saya adalah bahwa Majelis Rakyat Timor Timur, dengan serius, sungguh-sungguh dan formal dan dengan suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia. Namun bagi pengamat luar ada dua kecacatan berat dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini. (A) Siapa-siapa saja para wakil yang mengambil keputusan ini, bagaimana mereka dipilih, dan apakah mereka memang dapat mewakili kehendak rakyat Timor-Leste. (B) Hanya ada satu opsi yang dicantumkan untuk status politik masa depan, yakni integrasi. Saya diberitahu di Dili, pemilihan distrik dilakukan atas dasar satu orang satu suara; dan seorang wartawan memberi tahu saya, bahwa di Baucau pun demikian. Di daerah-daerah lain ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat setempat, di mana para tetua adat yang melakukan seleksinya.

Ketika saya menanyakan kepada orang Indonesia yang bersama kita, mengapa Majelis Rakyat membahas hanya satu opsi, yakni integrasi, mereka mengatakan bahwa pilihan tersebut harus dipandang dalam konteks keseluruhan dari kejadian-kejadian dalam bulan-bulan terakhir, yakni ketika opsi-opsi lain seperti hubungan dengan Portugal atau kemerdekaan telah dibuang oleh orang Timor Timur. Selain itu, ada beberapa aspek yang mengecewakan hari itu: (A) Ketika di pesawat kami diberikan selebaran yang bertajuk 'Timor Timur' yang diterbitkan oleh PSTT yang antara lain menyatakan, bahwa 'rakyat Timor Timur sepenuhnya berada di belakang Pemerintahan Sementara dalam mempersiapkan integrasi penuh Timor Timur ke dalam Republik Indonesia...': penilaian dini itu terasa janggal. (B) Sidang Majelis tersebut dilakukan bahasa Portugis, dan hanya sebagian yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Seorang Timor yang duduk di dekat saya mengomentari dalam Bahasa Inggris jalannya sidang tersebut atas permintaan saya, namun ini tidak sebaik penerjemahan resmi. (C) Kami tidak menemui satu pun anggota PSTT atau Majelis Rakyat. Tidak ada konferensi pers. (D) Pawai di jalanan dan sorak sorai massa terlalu diatur dan terlihat tidak spontan.⁵⁴

Hanya sedikit wakil Komunitas internasional yang hadir. Indonesia mengungkapkan penyesalan bahwa undangan untuk Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan serta Komite Khusus Dekolonisasi tidak diterima, dan bahwa hanya tujuh negara anggota PBB yang mengirimkan pengamat-pengamatnya.¹ Di antara mereka yang diundang namun tidak menerima adalah Australia, Jepang, Filipina, Singapura dan AS. Fretilin mengecam Majelis itu sebagai tidak representatif, dan menyatakan bahwa merekalah yang mewakili mayoritas rakyat itu.⁵⁵

86. Walaupun proses itu tidak sah, lebih dari 30 negara anggota PBB secara eksplisit atau implisit mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia sampai tahun 1990, padahal pada saat yang sama juga mengakui bahwa Timor-Leste belum menjalankan tindakan penentuan nasib sendiri yang sungguh-sungguh. Beberapa negara seperti Australia, India, Papua Nugini dan AS, mengakui penggabungan itu melalui pernyataan publik eksplisit. Hanya Australia yang secara eksplisit mengungkapkan dukungannya bagi pengakuan *de jure*, praktek yang kemudian ditinggalkan pada tahun 1990-an. Yang lainnya memastikan pengakuan mereka dengan suara yang mereka berikan di Majelis Umum PBB. Negara-negara ini termasuk Bangladesh, Kanada, Yordania, Malaysia, Oman, Filipina, Singapura, Swedia dan Thailand. Kelompok negara ketiga dapat dikatakan secara efektif telah memberi pengakuan, dan dalam beberapa kasus menegaskan kembali dukungan yang sudah ada, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Indonesia setelah tahun 1976, yang tidak mengeluarkan Timor-Leste dari definisi 'Indonesia'. Negara-negara ini adalah Austria, Brunei, Bulgaria, Cina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Arab Saudi, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.²

¹ Tujuh negara yang mewakili adalah: India, Iran, Malaysia, Selandia Baru, Nigeria, Arab Saudi dan Thailand. Laporan sekretariat PBB, Annex 1. A/AC.109/L.1098 dan Add. 1.

² Daftar negara yang menandatangani mengenai perpajakan dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan Indonesia yang dapat dianggap sebagai pengakuan integrasi dapat dilihat di Krieger, hal. 291-297.

87. Francisc Vendrell, yang telah bekerja dalam masalah Timor-Leste di Sekretariat PBB, menjelaskan kepada Komisi, bagaimana Indonesia bisa memperoleh berbagai macam dukungan internasional seperti ini, walaupun telah melakukan pelanggaran *due process* di Timor [Leste]. Dia mengatakan kepada Komisi pada audiensi publik mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

*Walaupun reaksi langsung di sebagian besar negara adalah mengutuk aneksasi Timor-Leste, sedikit demi sedikit, dan cukup cepat, dalam beberapa tahun sebagian besar negara tidak lagi ingin terlalu kritis mengenai apa yang terjadi di Timor Leste.*⁵⁶

88. Vendrell menjelaskan bahwa, hubungan-hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan sejumlah kelompok penting mempengaruhi pergeseran sikap yang pragmatik ini. Di bawah Presiden Soeharto Indonesia mendapat dukungan di Barat sebagai “sebuah negara anti-komunis”. Indonesia juga mendapat dukungan dalam ASEAN dan dunia Islam, yang dalam keduanya Indonesia merupakan anggota terbesar, dan dalam gerakan non-blok di mana Indonesia menjadi anggota pendiri.⁵⁷

89. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan keabsahan proses tahun 1976 itu, walau menghadapi tantangan internasional yang semakin kuat terhadap kehadirannya di Timor, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz. Pada tahun 1992, Menteri Luar Negeri Ali Alatas merasa terpanggil untuk membawa posisi Indonesia ke Perkumpulan Pers Nasional (*National Press Club*) di Washington. Dalam pidatonya yang bertajuk *De-bunking the Myths around a Process of Decolonisation*, dia kembali menyatakan posisi yang sudah sering dikemukakan, bahwa Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor-Leste, dan telah mengikuti keputusan rakyat Timor-Leste mengenai masa depannya, yang dilakukan melalui proses yang benar dan adil.⁵⁸

90. Pada tanggal 21 Mei 1998 B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Agenda perubahan daruratnya juga mencakup pembahasan masalah Timor-Leste yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sudah diakui secara terbuka sebagai “kerikil di dalam sepatu Indonesia”, suatu penghalang bagi pembangunan. Presiden dilaporkan pernah berkata kepada rekan-rekannya:

*Kenapa kita masih ada masalah ini ketika kita punya segudang masalah lain? Apa kita dapat minyak? Tidak. Apa kita dapat emas? Tidak. Kita cuma dapat batu-batu. Kalau orang Timor Timur masih tidak berterima kasih setelah segala apa yang sudah kita lakukan, untuk apa kita harus bertahan?*⁵⁹

91. Pada bulan Juni ia mengumumkan, bahwa Indonesia akan mempertimbangkan sebuah “status khusus” bagi Timor-Leste, sebuah perubahan kebijakan yang sebelumnya berulang kali ditolak oleh Presiden Soeharto, termasuk yang terakhir pada tahun 1997. Pada tanggal 27 Januari 1999, khawatir bahwa otonomi akan berujung pada kemerdekaan yang akan merugikan Indonesia dari segi biaya, Presiden Habibie mendapat persetujuan Kabinet, untuk sebuah resolusi yang singkat dan jelas mengenai persoalan ini, melalui sebuah pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Setelah pertemuan Kabinet, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan bahwa:

Otonomi khusus akan diberikan kepada Timor Timur. Dan apabila ini tidak diterima luas di Timor Timur, kita akan meminta keanggotaan baru MPR hasil pemilihan umum mendatang ini, untuk melepaskan Timor Timur dari Indonesia.¹

92. Pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat Timor dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB, yang pertama kalinya dijanjikan pada tahun 1960. Militer Indonesia melanjutkan kebijakan subversi yang telah menjadi ciri pendekatan mereka sejak tahun 1974. Akan tetapi upaya-upaya sabotase dan intimidasi mereka diimbangi oleh kekuatan demokrasi dalam pemerintahan dan kalangan sipil Indonesia. Hasilnya sangat jelas: 21.5% berpihak pada otonomi khusus, dan 78.5% menentang.

93. Dalam pernyataannya mengumumkan hasil Jajak Pendapat, Sekretaris Jenderal Kofi Annan, menasihati:

Mereka yang memilih untuk menerima usulan otonomi khusus ini sebaiknya tidak menganggap hasil ini sebagai suatu kekalahan. Dan yang mayoritas sebaiknya tidak menganggap ini sebagai suatu kemenangan: tidak ada yang menang dan yang kalah hari ini. Sebaliknya, momen ini mengumandangkan kesempatan baru bagi warga Timor-Leste untuk mulai menempa masa depan baru bagi apa yang sebentar lagi akan menjadi Timor Timur merdeka.⁶⁰

2.3.1 Kesimpulan

94. Pemerintahan Soeharto melanggar hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Dilanggar pula hukum internasional dan semangat UUD Indonesia, yakni budaya dan kebijakan anti-kolonial. Pihak militer Indonesia paling bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Rakyat Indonesia tidak dimintai pendapat atau diberi informasi sehingga tidak memikul tanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

95. Pemerintahan Soeharto memiliki kepentingan legitim / sah terhadap hasil proses dekolonisasi Timor, dan disediakan pula jalur-jalur komunikasi untuk menyalurkan kepentingan tersebut, tetapi Indonesia memilih mengabaikan proses yang sah.

96. Pelanggaran ini terjadi menyusul keputusan rahasia tingkat tinggi pada tahun 1974, untuk mengintegrasikan koloni Portugis saat itu ke dalam wilayah Indonesia. Secara terbuka pemerintahan Soeharto mendukung hak rakyat Timor untuk memilih secara bebas salah satu dari tiga pilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Resolusi 1541(XV) tahun 1960 Majelis Umum PBB, dan menyatakan diri sebagai warga negara internasional yang baik. Dalam praktiknya, Indonesia berusaha mengatur hanya satu dari ketiga pilihan tersebut, yaitu integrasi, serta melemahkan dan menolak hak atas kemerdekaan yang merupakan tujuan akhir kedua partai politik utama Timor. Pemerintahan Soeharto berusaha mengesahkan pengambilalihan wilayah yang dilakukannya atas dasar tanggung jawab kemanusiaan, keamanan regional, pertahanan, kultur prakolonial, ikatan historis dan etnis, serta kurangnya kelangsungan hidup ekonomi Timor-Leste. Pengakuan-pengakuan ini bukanlah alasan yang sah untuk menolak hak tak terhapuskan

¹ Dikutip dalam *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001[selanjutnya, *East Timor in Transition*, DFAT], hal. 38. Sejumlah orang-orang penting Indonesia telah meminta perubahan kebijakan ini selama beberapa tahun (lihat bagian mengenai masyarakat sipil Indonesia dalam bab ini). Setelah Habibie menjabat sebagai Presiden, tokoh-tokoh seperti Adi Sasono, Dewi Fortuna Anwar, dan Ginanjar Kartasasmita juga mempengaruhi pemikirannya. Lihat Clinton Fernandes, *Reluctant Saviour*, Scribe Publications, Carlton North, Victoria, 2004, hal.40-41. Sebuah rekomendasi yang berpihak kepada penentuan nasib sendiri dari Perdana Menteri Australia John Howard, juga merupakan faktor penting.

rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, dan tidak sesuai dengan Deklarasi tahun 1960 tentang “Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara Kolonial dan Bangsa” yang dikatakan dijunjung tinggi oleh Indonesia.

97. Proses subversi ini semakin bertambah agresif. Presiden Soeharto menegaskan kepada para penasihatnya dan pemerintahan-pemerintahan asing, bahwa ia lebih suka mencapai integrasi melalui proses politik, tetapi ia tidak menyatakan kekuatan militer tidak mungkin digunakan. Ia mengizinkan penggunaan kekuatan [militer] pada tahun 1975 ketika menjadi jelas, bahwa perkembangan di Timor lebih berpihak pada kemerdekaan. Meskipun bagian-bagian yang berpengaruh dalam komunitas internasional mengakomodasi keputusan ini, PBB mengutuk intervensi Indonesia dan menolak keabsahan aneksasi sesudahnya. PBB tetap menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, meskipun klaim Indonesia resmi justru sebaliknya.

98. Intervensi militer dan kesalahan manajemen pemerintahan Soeharto di Timor-Leste menjadi bencana bagi rakyat Timor-Leste dan Indonesia sendiri, termasuk ribuan tentara muda Indonesia dan keluarga mereka. Kekerasan yang berkelanjutan pada tingkat lokal menyebabkan kegagalan diplomasi pada tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan hasil yang Indonesia dan negara-negara tetangganya pada tahun 1975 berusaha menghindari, yaitu Timor-Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin.

99. Keputusan Presiden Habibie pada tahun 1999 untuk membebaskan Indonesia dari Timor-Leste melalui tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, dan penghormatan atas proses tersebut oleh Presiden Abdurrahman Wahid, adalah tindakan negarawan sejati yang sesuai dengan hukum internasional dan membantu memulihkan kedudukan Indonesia dalam komunitas internasional.

2.4 Australia

100. Meskipun Australia bukanlah pihak yang berkepentingan utama dalam konflik Timor-Leste, tetapi pemerintahan Australia berturut-turut mengamati secara dekat isu ini, dan Australia dilihat sebagai pemain utama oleh Portugal dan Indonesia, serta juga oleh Perlawanan Timor-Timur. Kedekatan Australia dengan pulau Timor dan statusnya sebagai kekuatan menengah di wilayah ini, digabungkan dengan masyarakat sipil yang aktif, perhatian parlemen dan media atas situasi Timor-Timur, membuat keterlibatan Australia tidak terelakkan, meskipun pemerintah dalam berbagai kesempatan berusaha menjauhkan diri dari isu tersebut.

101. Kekuatan Barat utama juga berharap Australia memainkan peran penting. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris menekan Australia agar meningkatkan tanggung jawabnya terhadap isu-isu regional, antara lain isu Timor Portugis, setelah isu tersebut menjadi masalah internasional pada tahun 1960. Sidang-sidang kabinet tahun 1963 tentang masa depan wilayah ini menyebutkan “usulan-usulan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Australia sebaiknya harus meningkatkan inisiatif pertahanan dan diplomasi di Asia Tenggara, serta membagi tanggung jawab langsung dengan Amerika Serikat atau Inggris, daripada sekedar mendukung kepemimpinannya”.⁶¹

102. Setelah keputusan Portugal untuk mendekolonisasi wilayah ini pada tahun 1974, pemerintah negara-negara Barat meminta kepada pemerintah Australia saran intelijen dan kebijakan tentang isu ini. Menyadari pengaruh tetangganya Barat, pemerintahan Soeharto memberikan perhatian khusus pada hubungannya dengan Australia, dan tetap menginformasikan para pejabat Australia tentang perkembangan posisi Indonesia.¹ Di antaranya, pembicaraan

¹ Sebagai tambahan atas komunikasi resmi dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) dan departemen Luar Negeri Indonesia, Australia memiliki hubungan khusus melalui Harry Tjan mengenai pekerjaan *Operasi Komodo*. Komunikasi dari pejabat kedutaan besar pada Juli 1975 menggambarkan, betapa Australia menghargai keterbukaan Tjan dan

tentang isu Timor-Leste antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, dalam dua kesempatan pada tahun 1974 dan 1975. Pentingnya peran Australia baik bagi pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan negara-negara Barat, ditunjukkan secara jelas melalui dampak keputusan Australia untuk menentang Indonesia mengenai pertanyaan yang diajukan dalam Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1975. Pada waktu itu Harry Tjan, penasihat penting Presiden Soeharto untuk isu Timor, dengan marah memberitahu pemerintah Australia bahwa suara Australia merugikan, karena banyak negara yang mengharapkan kepemimpinan Australia. Amerika, dikatakannya, telah menyampaikan kepada pihak Indonesia bahwa niat *voting* Australia sangat mempengaruhi pemberian suara pihak Amerika. Indonesia juga mengetahui bahwa Kelompok Sembilan (termasuk Inggris) juga dipengaruhi oleh sikap Australia. Tentu saja beberapa negara lain terpengaruh juga. Pendekatan umum Australia di PBB “sangat merugikan Indonesia”.⁶²

2.4.1 Kebijakan Australia hingga 1974

103. Ciri-ciri utama kebijakan Australia mengenai isu tersebut berkembang pada tahun 1960an setelah Timor Portugis dicantumkan oleh PBB sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri. Kebijakan ini tidak timbul sebagai tanggapan atas hak Timor yang baru saja diakui, tetapi sebagai kewaspadaan mengenai posisi bertentangan antara Portugal dan Indonesia, yang potensial menimbulkan konflik di wilayah sebelah utara Australia. Para pembuat kebijakan di Canberra percaya, bahwa penolakan Salazar untuk bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan untuk membuat konsesi yang hanya minimal atas sentimen Dunia Ketiga, akan memancing Sukarno untuk mengambil tindakan militer terhadap Portugal yang sama seperti tanggapannya terhadap Inggris atas pembentukan Malaysia dan terhadap Belanda mengenai Irian Barat. Antara tahun 1961 dan 1964 Perdana Menteri Australia, R G Menzies, menulis surat kepada Perdana Menteri Portugis, Dr António de Oliveira Salazar, beberapa kali dalam rangka menghindari krisis yang diprediksikan.

104. Konflik tidak terjadi tetapi sebagai tanggapan atas kemungkinan itu, dikembangkannya beberapa kebijakan kunci. Beberapa bentuk kebijakan yang diambil sebelum timbulnya pemerintahan Soeharto atau pembentukan Fretelin, mencirikan penanganan isu Timor-Leste oleh Australia sepanjang masa konflik.

105. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri Garfield Barwick mencantumkan hal-hal berikut:⁶³

koneksinya: “la sering membaca langsung bagi kita dari catatan pertemuan rahasia dengan Portugal mengenai Timor Portugis. Ia memiliki dokumen-dokumen rahasia mengenai hal itu. Seringkali ia menerima telpon dari orang-orang penting (Ali, Yoga) ketika kami berada di kantornya Tjan menghormati dan mempercayai kami. Ia berbicara kepada kami lain dengan pada orang lain.”. Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya, DFAT], Melbourne University Press, Victoria, 2000, hal. 295.

- Australia mendukung prinsip penentuan nasib sendiri.¹
- Timor tidak memiliki masa depan di bawah pemerintahan Portugal.
- Wilayah ini tidak memiliki kemampuan untuk kemerdekaan politik.
- Australia akan menerima penggabungan dengan Indonesia, apabila penggabungan tersebut berjalan damai, dan seiring dengan keinginan rakyat Timor yang diungkapkan secara bebas.
- Australia akan menentang agresi militer Indonesia dalam wilayah ini, dan mendukung tindakan PBB sebagai balasannya.
- Opini publik Australia tidak akan menerima tindakan kekerasan Indonesia terhadap Timor.
- Inisiatif Australia apa pun mengenai persoalan ini harus mempertimbangkan pentingnya hubungan baik Australia dan Indonesia. Catatan-Catatan Sidang Kabinet tahun 1963 mengenai hal tersebut di atas menyatakan:

Kabinet menunjukkan bahwa (tidak ingin) mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan Australia dipandang oleh Indonesia dan negara-negara lain sebagai musuh. Tujuan Australia terhadap Indonesia adalah mencapai tingkat saling pengertian yang setinggi mungkin.⁶⁴

106. Barwick menolak proposal yang diajukan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Harriman yang menyatakan, bahwa Portugal didampingi untuk mendirikan program pembangunan sepuluh tahun, yang akan memuncak pada tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

107. Nasib Timor Portugis tidak dipersoalkan pada tahun-tahun awal Orde Baru. Pemerintahan Soeharto menunjukkan sedikit ketertarikan pada wilayah ini, dan Australia menutup konsulatnya di Dili pada tahun 1971. Australia menyambut baik Orde Baru dan sangat menghargai penekanan Orde Baru pada stabilitas, anti-komunisme, pertumbuhan ekonomi, masalah domestik, dan hubungan regional positif yang, dalam pandangan Australia, sangat berbeda dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan pergolakan domestik di bawah pemerintahan Sukarno. Memperkuat dan memperluas hubungan Australia dan Indonesia menjadi tujuan utama. Pada tahun 1973 Kedutaan Besar Australia melaporkan:

Presiden Soeharto...bermaksud baik terhadap Australia...Hal ini merupakan kesempatan yang unik bagi Australia, dengan mengutamakan kepentingan nasional, untuk mengembangkan hubungan lebih erat dengan negara yang sangat penting bagi Australia.⁶⁵

108. Selama periode ini, pejabat-pejabat Australia terus memberikan saran mendukung penggabungan Timor ke Indonesia. Pada tahun 1970 Perdana Menteri Australia, William McMahon, mendapat informasi:

¹ Cara mengimplementasi tindakan penentuan nasib sendiri merupakan pokok bahasan dalam lingkungan resmi. Sebuah kelompok kerja departemen melaporkan: "Tentu saja pemerintah ingin melihat penyerahan oleh Portugal diiringi dengan semacam proses penentuan nasib sendiri. Di samping itu kami harapkan, bahwa pihak Indonesia sendiri menginginkan adanya semacam tindakan penentuan nasib sendiri untuk melindungi diri dari tuntutan neo-kolonialisme karena membuat persetujuan dengan kekuasaan kolonial. Mungkin secara teoretis masalah penentuan nasib sendiri bisa diatasi dengan pengaturan seperti di Nugini Barat" "*The Future of Portuguese Timor*", dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.31

Tidak ada gejala bahwa Indonesia ingin mengambalalih Timor Portugis... (tetapi) dalam jangka panjang penggabungan koloni itu ke dalam Indonesia merupakan opsi yang paling layak.⁶⁶

109. Pada tahun 1973 Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mendapat informasi:

Rakyat Timor Portugis secara marjinal mungkin akan lebih baik di bawah pemerintahan Indonesia, daripada pemerintahan yang lain (separoh dari pulau ini, yang ada di bawah Indonesia, diatur dengan lebih baik daripada koloni Portugis ini, dan prospeknya sebagai entitas terpisah sangat buruk).⁶⁷

2.4.2 Kebijakan Australia tahun 1974-1975

110. Kebijakan Australia tentang Timor setelah Revolusi Bunga di Portugal utamanya diputuskan oleh Perdana Menteri Australia Gough Whitlam (1972-75). Pemerintahan Partai Buruhnya, yang pertama setelah lebih dari dua dasawarsa, memperkenalkan serangkaian reformasi domestik yang penting, tetapi juga memberikan perhatian terpenting atas posisi Australia di Asia dan hubungannya dengan Indonesia.

111. Kebijakan Whitlam tentang Timor mirip dengan kebijakan yang diwariskan pemerintahan Menzies, dengan satu perbedaan penting. Kebijakan Whitlam menempatkan prioritas tertinggi pada kerja sama dengan Indonesia, khususnya dengan Presiden Soeharto sendiri yang menggantikan Sukarno, dan yang sikap positifnya terhadap Australia merupakan faktor-faktor baru yang disambut baik. Whitlam mengambil kebijakan ini tanpa berbicara dengan Kabinet.⁶⁸ Namun, garis besar kebijakan disetujui oleh para pemimpin dari kedua kubu politik. Sekretaris Departemen Luar Negeri, Alan Renouf, memberitahu para pejabat Malaysia pada bulan Oktober 1975:

Perdana Menteri (Whitlam), sebagian besar anggota Kabinet, serta Fraser (Pemimpin Partai Oposisi) dan Peacock (*Shadow Foreign Minister*), sependapat dengan aspirasi kaum integrasionis Indonesia.⁶⁹

112. Whitlam membicarakan kebijakan Timor secara tatap muka dengan Presiden Soeharto dalam dua kesempatan: pada tanggal 5-8 September 1974 di Yogyakarta, Indonesia, dan pada tanggal 4 April 1975 di Townsville, Australia. Presiden Soeharto menegaskan, bahwa ia memberikan status khusus pada pertemuan pertama, dan mengharapkan mendengar pernyataan resmi tentang Timor dari Perdana Menteri Australia.

113. Singkatnya, Whitlam mengajukan tiga hal utama kepada presiden Indonesia:

1. Ia mengurangi ketiga pilihan yang ada bagi rakyat Timor menurut hukum internasional menjadi satu pilihan, yakni bergabung dengan Indonesia, apabila pilihan ini secara bebas dipilih oleh rakyat Timor. Menurut catatan resmi pertemuan tersebut:

Perdana Menteri menyatakan dua hal sebagai dasar pemikirannya mengenai Timor Portugis. Pertama, ia yakin bahwa Timor Portugis seharusnya menjadi bagian dari Indonesia. Kedua, hal ini harus terjadi sejalan dengan harapan-harapan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan tepat.

2. Kemerdekaan bukanlah pilihan. Ia memberitahu Presiden:

Timor Portugis terlalu kecil untuk menjadi merdeka. Timor Portugis tidak mampu secara ekonomi. Kemerdekaan tidak akan disambut baik oleh Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di wilayah ini, karena Timor Portugis yang merdeka pasti akan menjadi pusat perhatian negara-negara lain di luar wilayah ini.

Ia memberitahu presiden [Soeharto] bahwa Australia akan mendukung posisi Indonesia di Lisabon:

Tujuan kami sendiri di Lisabon adalah menunjukkan kepada pemerintahan Portugis pandangan mengenai Timor Portugis sebagai bagian dari Indonesia.

3. Ia menekankan pentingnya melindungi hubungan bilateral dan tidak mengasingkan opini publik Australia:

Ia berharap, bahwa Presiden akan tetap mengingat kebutuhan akan dukungan dari publik Australia bagi bergabungnya Timor Portugis ke Indonesia, yang berdasarkan pada penghormatan terhadap harapan-harapan demokratik rakyat.⁷⁰

Ia menekankan poin ini pada pertemuan kedua dengan presiden pada hari yang sama.

114. Presiden Soeharto, pada intinya, mengutarakan posisi yang sama. Mayor Jenderal Ali Murtopo, kepala proyek rahasia Opsus untuk Timor, memberitahu Duta Besar Australia untuk Portugal pada tanggal 14 Oktober bahwa pertemuan tersebut membenarkan komitmen Indonesia untuk integrasi:

Ali berkata bahwa hingga kunjungan Whitlam ke Djakarta, mereka belum mengambil keputusan tentang Timor. Namun dukungan Perdana Menteri untuk gagasan penggabungan ke Indonesia menolong mengkristalkan pemikiran mereka, dan kini mereka yakin akan kebijaksanaan posisi ini.⁷¹

115. Pembuatan kebijakan Whitlam membalikkan prioritas-prioritas yang ditetapkan dalam penataran mengenai penentuan nasib sendiri yang disetujui oleh Menteri Luar Negeri, Senator Willesee, sebelum pertemuan Whitlam dengan Soeharto. Hal ini menekankan proses penentuan nasib sendiri terbuka bagi tiap pilihan dari tiga pilihan yang ada daripada hasil proses tersebut. Ini juga tidak menyingkirkan isu kemerdekaan atas dasar-dasar ekonomi.⁷² Menteri Luar Negeri dan Sekretaris departemennya, Alan Renouf, sependapat dengan Whitlam, bahwa integrasi sepenuhnya dengan Indonesia adalah hasil terbaik, tetapi ia percaya pula bahwa prioritas harus diberikan pada penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dalam pandangan mereka, hal ini akan lebih diterima bagi opini publik Australia, dan akan memastikan bahwa hal-hal yang tidak dapat diterima dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Tindakan Pilihan Bebas) di Irian Barat tidak terulang di Timor. Pada bulan November 1991, Willesee mengutarakan ketidak-sepakatan dirinya dengan Whitlam:

Saya percaya seharusnya kita tidak bersikap seperti Tuhan, tetapi biarlah rakyat Timor yang memutuskan.¹

¹ David Jenkins, "Whitlam can't maintain outrage over East Timor", *The Sydney Morning Herald*, 30 November 1991. Mr Whitlam dan Senator Willesee menyetujui diperlukan mempersiapkan Timor untuk menentukan nasib sendiri. Pada Juli 1975, Menteri Luar Negeri menyetujui program hibah Australia bagi Timor-Leste, namun program tersebut tidak dapat

116. Whitlam mengulangi posisinya pada pertemuan lebih lanjut dengan Presiden Soeharto di Townsville pada tanggal 4 April 1975. Sebagai tanggapannya, Presiden Soeharto berkata, bahwa ia menyadari adanya spekulasi di Australia tentang kemungkinan invasi Indonesia atas Timor Portugis, tetapi bahwa "Indonesia tidak akan pernah memikirkan tindakan semacam itu."⁷³

117. Setelah pecah perang sipil pada bulan Agustus, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menganjurkan agar Perdana Menteri tidak lagi menulis surat tentang Timor kepada Presiden Soeharto. Ia menulis:

Soeharto akan mencari pengertian dari Australia atas apa yang ia, setelah berpikir baik-baik, putuskan untuk dilakukan lebih kuat daripada apa yang mungkin ia anggap sebagai ceramah atau pun peringatan bersahabat...Mulai sekarang saya mengusulkan agar kebijakan-kebijakan kita harus didasarkan pada menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari isu Timor; segera menarik warga Australia dari Timor; membiarkan kejadian demi kejadian berjalan; dan apabila dan ketika Indonesia melakukan intervensi, bertindak untuk meminimalkan dampak publik di Australia, dan secara pribadi menunjukkan pengertian kepada Indonesia atas isu-isu yang dihadapi.

118. Duta Besar menyatakan, bahwa masalah celah Timor di perbatasan dengan laut Australia dapat lebih mudah diselesaikan dengan Indonesia, daripada dengan Portugal atau Timor-Leste merdeka; dan menyimpulkan:

Saya tahu bahwa yang saya rekomendasikan lebih cenderung pragmatis ketimbang berprinsip, tetapi inilah yang dimaksud dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.⁷⁴

119. Sejalan dengan saran ini, pada tanggal 26 Agustus 1975 Whitlam menyampaikan kepada Parlemen Australia, bahwa Australia bukanlah pihak yang berkepentingan di Timor Portugis:

*Kami tidak memiliki kewajiban maupun kepentingan nasional untuk terlibat kembali dengan perihal-perihal kolonial maupun pasca-kolonial Timor Portugis...Kami tetap berpendapat bahwa masa depan wilayah ini harus diselesaikan oleh Portugal dan rakyat Timor sendiri, dengan Indonesia yang juga berperan penting karena kepentingan utamanya.*⁷⁵

120. Indonesia memberitahukan kepada Whitlam tentang penghargaan atas bantuan dan pengertiannya:

dilaksanakan karena terjadinya perang saudara antara UDT dan Fretilin. Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 140.

Jenderal Moerdani mengatakan bahwa ia, Presiden dan yang lain berhutang besar kepada Whitlam, atas pengertian yang sudah beliau tunjukkan atas posisi Indonesia dan posisi bermanfaat yang sudah beliau ambil. Presiden sangat menghargai ini. Tapi dia juga menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah. Apabila Australia tidak bisa mendukung Indonesia secara terbuka di beberapa bulan ke depan, maka dia berharap bahwa kita akan mengambil pilihan ketiga, dan tetap diam.⁷⁶

121. Secara resmi Australia tidak menentang Operasi Flamboyan, serangan Indonesia ke Timor Portugis pada tanggal 16 Oktober 1975, yang mengakibatkan kematian lima wartawan yang berbasis di Australia. Sebelumnya Woolcott pernah mengeluarkan pernyataan dari Jakarta:

Meskipun kami mengetahui bahwa hal itu tidak benar, namun secara formal posisi pemerintah Indonesia adalah, tidak ada intervensi militer Indonesia di Timor Timur. Apabila Menteri [Senator Willesee] menyampaikan atau menyiratkan kepada publik bahwa pemerintah Indonesia berbohong, kita akan mengundang reaksi terbuka dan marah.⁷⁷

122. Pada tanggal 11 November 1975, Malcom Fraser mengganti Whitlam sebagai Perdana Menteri, tetapi melanjutkan garis kebijakan yang sama.¹ Atas permintaan Fraser, Duta Besar Woolcott secara rahasia bertemu dengan Presiden Soeharto di kediamannya pada tanggal 25 November 1975, untuk meyakinkannya bahwa pemimpin Australia saat ini meletakkan hubungan Australia dengan Indonesia, dan hubungan pribadi dengan Presiden, sama tingginya dengan yang dilakukan Whitlam; bahwa ia akan “berusaha lebih meningkatkan hubungan tersebut” dan tidak akan menerima José Ramos-Horta atau wakil Fretilin siapa pun apabila mereka datang ke Australia.

123. Fraser juga meminta Duta Besar untuk memberitahu Presiden “bahwa ia memahami kebutuhan Indonesia untuk memperoleh solusi yang tepat bagi isu Timor Portugis.” Woolcott melaporkan bahwa Presiden sangat senang, ketika mengetahui pengertian Australia, dan ketika ia bertanya kepada Duta Besar untuk memastikan maksud Perdana Menteri, Woolcott menjawab:

Saya memperkirakan bahwa apa yang dimaksudkan Perdana Menteri dengan solusi yang tepat adalah solusi yang sesuai dengan kepentingan kebijakan Indonesia.

124. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama-sama tidak langsung mengacu pada penggunaan kekuatan militer.

Presiden tidak menyinggung keterlibatan Indonesia secara langsung meskipun saya beranggapan ia pasti menyadari bahwa saya mengetahui hal itu.²

¹ Malcolm Fraser ditunjuk sebagai *caretaker* Perdana Menteri setelah pemerintahan Whitlam dipecat pada 11 November 1975. Peranan sebagai pemerintah *caretaker government* secara inti adalah, mempertahankan proses administrasi rutin tanpa menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Fraser menjadi Perdana Menteri setelah Partai Liberal-nya memenangkan pemilu 13 Desember 1975 dan tetap bertugas hingga tahun 1983. Kebijakannya pra-pemilu mengenai Timor tetap dipertahankan .

² dokumen 343, Canberra, 20 November 1975 dan Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way., hal. 579-80. Fraser mengatakan kepada ABC TV pada 12 September 2000 bahwa Departemen Luar Negeri tidak memberi penataran kepadanya sebagai *caretaker* Perdana Menteri mengenai rencana invasi Indonesia. Alan Ramsey, “East Timor the secret that never was”, *Sydney Morning Herald*, 16 September 2000.

125. Secara pribadi Whitlam berkampanye atas nama Indonesia. Setelah kunjungannya ke Timor Timur pada tahun 1982, di mana ia melakukan laporan secara langsung kepada Presiden Soeharto, ia berperan penting dalam pencopotan Dom Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja Katolik di Timor, dan kemudian pada tahun itu juga ia berbicara di hadapan Komite Khusus PBB mengenai dekolonisasi, dan mengajukan petisi kepada komite ini untuk menghapus isu Timor-Leste dari agenda PBB.

126. Sepanjang tahun 1970-an Pemerintah Australia mengikuti kebijakan 'bisnis seperti biasa' di dalam urusannya dengan Indonesia, termasuk kerja sama dalam bidang pertahanan. Pemerintahan Whitlam memulai kerja sama pertahanan dengan Indonesia pada Juli 1972 senilai 20 juta dollar Australia yang termasuk di antaranya perlengkapan berupa 16 pesawat penyerang, kerja sama latihan dan intelijen. Kerja sama ini diperbarui pada tahun 1975 dan meningkat pada pemerintahan Fraser. Bantuan ini disediakan dengan persyaratan, bahwa bantuan tersebut tidak boleh digunakan di Timor-Leste maupun represi internal.

2.4.3 Kebijakan Australia 1975-98

127. Kebijakan dua arah Australia menciptakan dilema politik ketika isu Timor-Leste dibahas di Sidang Umum PBB menanggapi invasi Indonesia. Australia memilih menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Timur atas penentuan nasib sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB dan posisi Indonesia sendiri, tetapi berusaha agar acuan kepada Indonesia dihapus dari resolusi tersebut. Usaha ini gagal dan resolusi yang disetujui pada tanggal 12 Desember 1975 menyebarkan intervensi militer Indonesia, dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia secepatnya. Hal yang sangat menyebarkan pihak Indonesia, adalah Australia menjadi satu-satunya negara tetangganya yang mendukung resolusi tersebut.¹

128. Australia terus mengakui hak Timor atas penentuan nasib sendiri, dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap cara Indonesia menggabungkan wilayah tersebut. Australia menolak undangan Indonesia untuk menghadiri Majelis Permusyawaratan Rakyat di Dili pada tanggal 31 Mei 1976, dan tidak mengakui majelis tersebut sebagai tindakan sah dalam penentuan nasib sendiri. Kebijakan ini terus dipegang selama konflik. Dalam pendapat resminya terhadap persoalan tersebut, pemerintah Australia memutuskan:

Hingga tanggal 30 Agustus 1999, posisi Australia adalah, bahwa rakyat Timor-Timur belum menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri.⁷⁸

129. Namun Australia tidak menjunjung hak tersebut dalam praktik. Australia tidak mendukung resolusi-resolusi berikutnya tentang penentuan nasib sendiri di Sidang Umum PBB antara tahun 1976 dan 1981, serta memilih menentang Resolusi Sidang Umum 1982 yang lemah yang tidak menegaskan lagi hak tersebut, serta mengadakan pembicaraan di bawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik. Secara tidak langsung Australia pun mengabaikan hak tersebut. Pada bulan Januari 1978 secara *de facto* Australia mengakui kontrol Indonesia atas Timor-Leste. Pengakuan itu diperluas dengan pengakuan *de jure* sejak tanggal 14 Februari 1979, ketika Australia memulai negosiasi dengan Indonesia mengenai perbatasan dasar laut dengan Timor-Leste. Kebijakan-kebijakan ini dan program kerjasama dengan Indonesia yang menyusul, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan, berakibat pada penguatan dan pengesahan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste.

¹ Kedutaan Besar Selandia Baru di Canberra melaporkan pada bulan Oktober, bagaimana pemerintah Australia berniat menangani isu setelah "invasi menjadi berita umum". Wellington diinformasikan: "Mereka (Indonesia) akan diberitahu, bahwa pemerintah Australia tidak memiliki pilihan kecuali mengancam kejadian, namun relasi bilateral dengan Indonesia tetap merupakan hal yang sangat penting. Dengan lain kata, "kami terpaksa menggebukmu, harap dimengerti dan bertahan". Tentu saja setiap pernyataan dari Australia baik dikeluarkan di sini maupun kalau perlu di PBB, akan dibuat dengan kata-kata yang selemah mungkin"., 17 Oktober 1975, dalam New Zealand Government East Timor Official Information Act (OIA) Material (selanjutnya, NZ OIA Material), Volume 1.

130. Kebijakan pengakuan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Fraser yang konservatif itu, dilanjutkan oleh pemerintahan Partai Buruh. Pada tanggal 17 Agustus 1985 – hari kemerdekaan Indonesia – ketika Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh, Bob Hawke, tanpa ragu memastikan bahwa Australia mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, dan menganggap rakyatnya sebagai warga negara Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1989 Menteri Luar Negeri kabinetnya, Senator Gareth Evans, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Zona Celah Timor meskipun Portugal menyatakan keberatannya, yakni perjanjian ini melanggar hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

131. Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri Paul Keating sejak Desember 1991 mempertahankan, bahkan mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintahan Hawke. Setelah kunjungannya ke Indonesia, Keating menyampaikan kepada Parlemen Australia:

*Saya sengaja memilih Indonesia sebagai tempat kunjungan luar negeri saya yang pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah prioritas utama kita.*⁷⁹

132. Ia menyarankan agar pelecehan hak-hak asasi manusia di Timor-Leste dibicarakan melalui [proses] rekonsiliasi jangka panjang.

133. Sejak tahun 1975 fraksi-fraksi dalam *Australian Labour Party (ALP; Partai Buruh Australia)* bersikap kritis terhadap kepemimpinan partai ALP, karena mengabaikan kebijakan partai yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste serta melemahkan kebijakan itu. Ketika di pihak oposisi, juru bicara Urusan Luar Negeri ALP, Laurie Brereton, membuat ulasan kebijakan partai mengenai Timor-Leste, dalam konteks munculnya gerakan demokrasi rakyat di Indonesia dan perkembangan-perkembangan lain; contohnya, pembicaraan-pembicaraan yang diprakarsai PBB, advokasi Portugal mengenai isu ini, dan penguatan kepedulian publik di Australia. Ulasan kebijakannya menyimpulkan, bahwa “tidak ada solusi bagi konflik di Timor-Timur yang dapat bertahan lama, apabila tidak ada negosiasi di mana rakyat Timor-Timur dapat menegakkan hak penentuan nasib sendiri.”⁸⁰ Kebijakan yang diperbarui ini disahkan pada Konferensi Nasional ALP tahun 1998 dan pada Kaukus Federal. Brereton menggunakan kebijakan ini dalam setiap kesempatan, untuk menandingi kebijakan *status quo* pemerintahan Howard yang berkuasa mulai Maret 1996.

2.4.4 Beralihnya Kebijakan Australia

134. Kematian politik Presiden Soeharto dengan segera diakui pemerintah Australia sebagai kesempatan untuk melanjutkan [penyelesaian] masalah Timor-Leste dalam kerangka kedaulatan Indonesia.

135. Setelah tawaran otonomi Presiden Habibie pada tanggal 9 Juni 1998, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai persoalan ini di Jakarta, dan menyimpang dari praktek sebelumnya, mengizinkan pembicaraan langsung dengan pihak Timor-Timur. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan Duta Besar John McCarthy ke Timor-Leste, pertemuan dengan Xanana Gusmão, pemimpin Perlawanan yang ada di penjara, dan permintaan pembebasannya, serta berdasarkan saran duta PBB Jamsheed Marker, survei tentang opini rakyat Timor baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste. Duta Besar Australia untuk PBB, Penny Wensley dan Duta Besar McCarthy menjadi anggota penting kelompok-kelompok inti, yang didirikan oleh Jamsheed Marker di New York dan Jakarta untuk isu ini.

136. Survei tentang opini rakyat Timor dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 1998 dan sangat penting dalam mengubah arah kebijakan Australia. Survei ini mencakup semua sisi perdebatan

politik dan menemukan, bahwa sebagian besar responden Timor sepakat tidak menerima *status quo*; bahwa solusi apa pun, termasuk otonomi, pada akhirnya harus disetujui rakyat, apakah melalui referendum atau proses pengambilan keputusan lain, dan adanya semacam jaminan internasional, serta bahwa peranan Xanana Gusmão penting untuk resolusi. Australia membagikan hasil survei tersebut kepada pemerintah Indonesia.⁸¹

137. Pada tanggal 19 Desember 1998 Perdana Menteri Australia, John Howard, menulis surat kepada Presiden Habibie dan menekankan pembicaraan langsung dengan rakyat Timor-Timur secepatnya, untuk memperoleh dukungannya terhadap otonomi dalam wilayah Indonesia. Ia juga mencatat dukungan yang semakin bertambah, baik di Timor-Leste maupun secara internasional, untuk penentuan nasib sendiri; dan menyarankan pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri setelah periode otonomi yang cukup lama, serupa dengan pendekatan yang disetujui di Kaledonia Baru.

138. Presiden Habibie tersinggung dengan pendapat, bahwa kehadiran Indonesia di Timor-Leste disamakan dengan kolonisasi Prancis di Kaledonia Baru, tetapi mengakui usulan Australia mengenai penentuan nasib sendiri. Pada rapat kabinet tanggal 1 Januari 1999, terdapat kesepakatan bahwa Indonesia akan meminta pendapat rakyat Timor-Leste mengenai masa depannya, dan mengizinkan kemerdekaan apabila rakyat menolak tawaran otonomi khusus.

139. Intervensi Perdana Menteri Howard dimaksudkan untuk memajukan rekonsiliasi, dan untuk memastikan Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, melalui persetujuan bebas rakyatnya. Namun inisiatif itu menghasilkan efek yang berlawanan. Usulan ini menjadi pemicu kemerdekaan dan akhir dari kebijakan integrasionis yang telah menjadi inti kebijakan Australia tentang Timor selama proses dekolonisasi. Wakil Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, John Dauth, memberitahu Komite Senat Australia pada tanggal 6 Desember 1999, bahwa pemerintah meninggalkan pilihan yang diumumkan bagi Timor-Leste, untuk tetap menjadi wilayah otonomi Indonesia ketika rakyat Timor-Leste memilih merdeka:

Kami selalu menyatakan secara jelas kepada pemerintah Indonesia selama tahun ini, bahwa kami menghormati kedaulatannya hingga saat di mana proses-proses yang diprakarsai Presiden Habibie menghasilkan hasil yang berbeda.⁸²

140. Pemerintah Australia dan para diplomatnya memainkan peran penting dalam memajukan dan mendukung tindakan penentuan nasib sendiri secara politik, finansial, dan organisasi. Setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus 1999 dan meletusnya kekerasan, Australia mengatur dan memimpin *International Force in East Timor* (Interfet – Pasukan Internasional di Timor Timur) yang diutus Dewan Keamanan, dan yang membantu mengembalikan proses PBB pada jalurnya, serta memastikan bahwa keputusan rakyat untuk merdeka dihormati dan dilaksanakan.

2.4.5 Kesimpulan

141. Rakyat Timor-Leste menggantung harapan yang tinggi pada Australia berdasarkan kedekatannya, kehadirannya selama Perang Dunia II, hubungan dengan Indonesia serta reputasinya sebagai negara internasional yang baik dan berpengaruh.

142. Harapan-harapan ini tidak terpenuhi hingga tahun 1999. Australia hanya memberi dukungan nominal selama proses dekolonisasi, tetapi tidak menjungjungnya selama sebagian besar periode ini. Australia hanya mendukung satu pilihan, yaitu integrasi dengan Indonesia, meskipun buktinya dari tahun 1974 telah menunjukkan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri akan melawan integrasi. Pendapat Whitlam kepada para pejabat Departemen Luar Negeri pada tahun 1974 bahwa “saya setuju dengan penggabungan tetapi penentuan nasib sendiri tetap

harus dihormati”, adalah juga pendapat dari kelima pemerintahan Australia yang bertugas selama era Soeharto.¹

143. Australia menjelaskan kepada tingkat tertinggi pemerintahan Indonesia, bahwa Australia menentang penggunaan kekerasan di Timor-Leste; tetapi sekali keputusan diambil dan dilaksanakan pada pertengahan 1975, Australia mengetahui dan menerimanya. Australia segera mengakui pendudukan militer Indonesia atas Timor-Leste, dan memberikan pengesahan melalui pengakuan *de jure* atas kedaulatan Indonesia. Kecuali dalam satu kesempatan, Australia memberikan suara menentang Timor-Leste di Perserikatan Bangsa-Bangsa; meremehkan tanggung jawab Portugal sebagai kuasa pemerintahan², dan dengan sikap dan tindakannya menggerogoti dukungan internasional bagi Timor-Leste.

144. Mantan petugas resmi menteri luar negeri Australia, Dr. Kenneth Chan, bersaksi kepada Komisi:

Walaupun saya sudah berusaha untuk memberi laporan yang seimbang akan perkembangan kebijakan Australia terhadap Timor Timur, penilaian keseluruhan saya terhadap kebijakan selama 25 tahun yang dalam pertimbangan ialah, bahwa kebanyakan dari kebijakan tersebut adalah sebuah kegagalan. Ada kegagalan untuk mendukung prinsip pokok terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum serta keadilan internasional: hak semua orang terhadap penentuan nasib sendiri. Dan ada juga kegagalan dalam bekerja untuk menahan Indonesia dari jalan intervensi militer dan kekerasan pada tahun 1975, terutama setelah Fretilin mengambil alih kontrol atas Timor Timur, hudson membuat deklarasi kemerdekaan secara satu pihak.³

145. Rakyat Timor-Leste menyambut baik dan mengambil manfaat dari dukungan praktis yang kuat dari Australia bagi tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya pada tahun 1999.

3 Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

3.1 Dewan Keamanan

146. Dewan Keamanan yang bermarkas di New York, adalah badan yang paling berpengaruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini ditugasi menjaga perdamaian dan keamanan antara bangsa-bangsa sesuai dengan Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota: lima anggota tetap, yakni lima negara yang menang dalam Perang Dunia II: Republik Rakyat Cina,

¹ Dalam pembicaraan pribadi Whitlam mengatakan kepada pejabat departemen Luar Negeri: “Saya berpihak pada integrasi, tetapi penentuan nasib sendiri perlu dihormati juga. Saya ingin Timor diintegrasikan [dengan Indonesia] tetapi harus dengan cara yang tidak akan menimbulkan argumentasi, karena hal tersebut akan membuat masyarakat Australia lebih kritis terhadap Indonesia.” 24 September 1974. Dokumen, p. 111.

² Australia mengatakan di depan *International Court of Justice* bahwa Portugal tidak memiliki status sebagai kekuatan administratif Timor-Leste, karena wilayah ini ditinggalkan begitu saja pada tahun 1975, dan Portugal tidak disebutkan sebagai kekuatan administratif di dalam resolusi Sidang Umum PBB tahun 1976, 1977 dan 1978. Di samping itu Portugal telah melakukan mal-administrasi wilayah pada 1974. Krieger hal. 371-477.

³ Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret 2004. Dr. Chan bekerja di dalam Departemen Urusan dan Perdagangan Luar Negeri dari tahun 1972 sampai 1978. Dia mewakili Australia di PBB dari tahun 1979-1982, di mana dia sebagian besar berurusan dengan isu-isu dekolonisasi. Dia ialah administrator atas Kepulauan Cocos (Keeling) pada tahun 1984, ketika rakyat kepulauan tersebut memilih untuk bergabung dengan Australia.

Perancis, Federasi Rusia (dahulu Uni Soviet), Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Sedangkan sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum setiap dua tahun.

147. Timor Portugis menjadi subjek pembicaraan Dewan Keamanan pada tahun 1960an, ketika Portugal dikritik karena gagal memenuhi kewajibannya menurut Piagam PBB. Hal ini berubah setelah 1974, dan menanggapi permintaan Portugal, Dewan Keamanan bersidang pada tanggal 15 Desember 1975 untuk membicarakan intervensi Indonesia ke dalam wilayah Timor Portugis.

148. Pada tanggal 22 Desember 1975 Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang meminta semua negara menghormati integritas wilayah Timor Portugis, dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri.⁸³ Resolusi ini mengecam intervensi militer Indonesia, dan menyesali Portugal yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Bab XI Piagam PBB. Resolusi ini meminta Indonesia menarik semua pasukannya dari wilayah ini tanpa menunda-nunda, dan meminta Portugal, sebagai kuasa pemerintahan, bekerja sama sepenuhnya dengan PBB untuk memungkinkan rakyat Timor-Leste menegakkan hak penentuan nasib sendiri mereka dengan bebas. Resolusi ini juga meminta semua negara dan pihak-pihak lainnya, untuk bersama-sama PBB meraih solusi damai bagi situasi saat itu, dan untuk memfasilitasi dekolonisasi serta meminta Sekretaris Jenderal mengirim utusan khusus ke wilayah ini, karena keadaan sangat mendesak, untuk membuat penilaian di tempat dan menghubungi semua pihak dan negara, guna memastikan pelaksanaan resolusi ini.⁸⁴ Resolusi ini disahkan dengan suara bulat.

149. Dewan Keamanan tidak mengutuk Indonesia, baik tentang agresi maupun penggunaan kekerasan yang tidak sah. Ia mendeskripsikan aksi Indonesia sebagai "intervensi" bukan "invasi"; membatasi dirinya dengan menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya, dan tidak merekomendasi atau menjatuhkan hukuman atas sikapnya.

150. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (*Special Representative of the Secretary-General - SRSG*), Vittorio Winspeare Guicciardi, mengunjungi Timor-Leste pada bulan Januari. Karena halangan Indonesia, ia tidak dapat bertemu dengan wakil-wakil Fretilin, dan laporannya tidak memberikan hasil yang diinginkan.⁸⁵

151. Setelah menerima laporan tersebut, Dewan Keamanan bertemu pada tanggal 22 April 1976 untuk menyetujui resolusi lebih lanjut. Isi resolusi ini pada dasarnya sama dengan resolusi bulan Desember, termasuk permohonan agar SRSG melanjutkan tugasnya, tetapi menghilangkan dua hal: paragraf yang "mengecam" intervensi bersenjata Indonesia, dan paragraf yang "menyesali" kegagalan Portugal.⁸⁶ Dua belas negara setuju akan resolusi ini, satu tidak setuju, dan dua *abstain*: Jepang dan Amerika Serikat.¹

152. Indonesia tidak memenuhi permintaan kedua Dewan Keamanan tersebut, yaitu untuk menarik pasukannya, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan bagi penolakan ini. Permintaan agar SRSG kembali mengunjungi Timor-Leste dan melanjutkan pembicaraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak ditindak-lanjuti oleh Sekretaris Jenderal, Kurt Waldheim. Diplomat Inggris di PBB, Richard Dalton, melaporkan bahwa José Ramos-Horta menantang Sekretaris Jenderal karena gagal menjalankan Resolusi 389. Dalton menulis:

¹ Satu anggota (Benin) tidak ikut dalam pemungutan suara.

Winspeare telah diperintah untuk tidak mengambil inisiatif apa pun. Ia mengatakan kesediaannya, bila ada pihak yang ingin berkonsultasi dengan dia; tetapi ia sendiri tidak akan berusaha untuk mempertemukannya. Menurut Schlittler-Silva, seorang Brazil yang menemani Winspeare dan yang masih berhubungan dengan isu itu di sekretariat, apabila Sekretaris Jenderal ditantang mengenai alasan Resolusi 389 tidak ditindaklanjuti, ia siap mengatakan bahwa belum ada anggota Dewan yang mendesaknya.¹

153. Dewan Keamanan tetap “mengagendakan isu itu” tetapi tidak membahasnya kembali hingga tahun 1999.

154. Pada tahun 1982 Sekretaris Jenderal sekali lagi diminta memainkan peran langsung. Resolusi Majelis Umum 37/30 meminta Sekretaris Jenderal Javier Perez de Cuellar: “untuk memprakarsai pembicaraan-pembicaraan dengan semua pihak yang berkepentingan langsung, dengan maksud menggali kesempatan-kesempatan untuk mencapai penyelesaian menyeluruh atas isu ini.”² Dengan bantuannya pembicaraan-pembicaraan antara Indonesia dan Portugal mulai dilaksanakan tahun 1983. Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, dan pihak Perlawanan Timor tidak disertakan sebagai salah satu dari “pihak-pihak yang berkepentingan langsung”. Namun demikian kegigihan Sekretariat untuk memajukan isu, yang tampak sangat sulit untuk diselesaikan itu, merupakan tanda dalam dunia diplomasi yang serba simbolis bahwa, meskipun terbengkalai, isu ini masih bertahan dalam agenda PBB.

155. Pada akhir tahun 1992 perundingan antara Portugal dan Indonesia dilanjutkan setelah sempat dihentikan oleh Portugal menyusul pembantaian Santa Cruz. Pada waktu yang bersamaan, diplomat PBB berpengalaman, Francesc Vendrell, menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik, lalu Direktur untuk Asia dan Pasifik di Sekretariat PBB. Keterlibatannya dan penunjukan Tamrat Samuel untuk memegang berkas Timor-Leste, sangat berarti dalam memperkuat kapasitas Sekretaris Jenderal antara tahun 1993 dan 1999.³

156. Kedua pejabat ini memusatkan perhatian pada memajukan partisipasi rakyat Timor Timur dalam negosiasi tersebut. Berdasarkan saran mereka, Sekretaris Jenderal mendapat izin dari Indonesia untuk Utusan Khusus, Amos Wako, saat itu Jaksa Agung di Kenya, menemui Xanana Gusmão yang ada di dalam penjara dan diberitakan menyetujui integrasi. Francesc Vendrell menyampaikan pada audiensi publik CAVR:

Kini saya dapat memberitahu anda, bahwa ketika Wako dan Tamrat Samuel, yang juga menemaninya, mengunjungi penjara untuk bertemu dengan Xanana, Xanana menyelundupkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Dalam surat itu dia menyatakan dan menegaskan kembali komitmennya untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tanah airnya.⁸⁷

¹ 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 7.25. Sekretaris Jenderal Waldheim tidak menolak dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri ala Irian Barat untuk Timor-Timur. Ia menginformasikan Luard, *Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and Commonwealth Affairs* bahwa: “Ia bisa memperkirakan adanya semacam penentuan nasib sendiri dibawah naungan PBB, tetapi belum jelas dalam bentuk apa. Tentu saja pihak Indonesia ingin agar PBB melegalsir ‘Anschluss’-nya.... Sebuah proses serupa dengan yang diterapkan di Irian Barat dapat dipertimbangkan, apabila Indonesia bisa menerimanya.” *British FCO Record of Conversation*, 15 Mei 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 4.

² 23 November 1982, dalam Krieger, hal. 128. Javier Perez de Cuellar melakukan kontak bilateral terpisah dengan Indonesia dan Portugal, sejak awal 1982, ketika ia menjadi Sekretaris Jenderal. Dalam pekerjaannya ia dibantu oleh *Under-Secretary-General* Rafeeuddin Ahmed.

³ Arnold Kohen menggambarkan Francesc Vendrell sebagai “pejabat PBB yang berperan paling signifikan dalam isu Timor-Timur sejak tahun 1975”. *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, Oxford, 1999, hal. 289.

157. Mengomentari pertanyaan tentang apakah pantas seorang pejabat PBB membawa dokumen semacam itu, Vendrell mengatakan keyakinannya, adalah menjadi tugasnya untuk memastikan, bahwa pandangan orang Timor disampaikan ke negosiasi tersebut. Ia berbicara dalam audiensi:

Orang-orang mungkin berkata, bahwa tim ini tidak bersikap netral. Namun kami melihat diri kami bersikap objektif. Obyektivitas tidaklah sama dengan netralitas. Isu Timor Timur merasuk ke inti nilai-nilai dan prinsip-prinsip PBB, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau anda bekerja pada PBB, anda tidak bisa netral mengenai isu-isu ini...Kami bekerja demi hak rakyat Timor untuk menjalankan hak penentuan nasib sendiri...Dua pihak yang berunding adalah Indonesia, kekuatan pendudukan, dan Portugal, kuasa pemerintahan sah. Rakyat Timor Timur tidak terwakili.⁸⁸

158. Sesuai dengan tujuan ini, Vendrell dan Tamrat Samuel menemui Uskup Belo, para pastor dan suster di Dili pada tahun 1994, dan terkesan oleh tingkat dukungan bagi penentuan nasib sendiri, dan keyakinan mereka pada Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Salah satu hal yang paling mengharukan adalah keyakinan luar biasa yang dimiliki setiap orang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tamrat dan saya merasa bertanggung jawab, yakni kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat berpaling pada PBB untuk memperoleh dukungan.⁸⁹

159. All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogues (AIETD) yang disponsori PBB merupakan hasil dari pengalaman itu. Fransesc Vendrell dan Tamrat Samuel merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal, agar meminta kepada Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia untuk menerima ide dialog guna menyatukan masyarakat Timor dari dalam Timor Leste dengan masyarakat Timor Leste yang sedang dalam pengasingan.:

"Pada dasarnya, apabila mereka bertemu dan dibiarkan berdiskusi sendiri, mungkin mereka akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan mampu mencapai proposal bersama mengenai Timor Timur."⁹⁰

160. Hal ini disetujui, dan dengan dukungan dari pemerintah Austria, beberapa pertemuan telah dilakukan. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak mengeluarkan hasil secara politik, tapi dalam pertimbangan Francesc Vendrell, pertemuan-pertemuan tersebut telah menolong masyarakat Timor yang terlibat, untuk menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan.

161. Dengan diangkatnya sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 1997, Kofi Annan meningkatkan perhatian atas isu Timor-Leste. Segera setelah penganugerahan Hadiah Perdamaian Nobel kepada José Ramos-Horta dan Uskup Carlos Ximenes Belo pada bulan Desember 1996, ditunjuknya Jamsheed Marker dari Pakistan sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor-Leste, lebih memperkuat usaha-usaha PBB. Dalam apa yang disebut inovasi oleh Kofi Annan, Duta Besar Marker dan rekan-rekannya membentuk "kelompok inti" negara-negara untuk menyelesaikan persoalan Timor. Kelompok ini beranggotakan Australia, Jepang, Selandia Baru, Inggris Raya dan Amerika Serikat. Para pejabat kelompok tersebut juga terlibat dalam diplomasi bolak-balik yang kuat antara New York, Jakarta, Lisabon, dan Timor-Leste, termasuk pembicaraan dengan semua pelaku utama. Usahnya makin meningkat setelah jatuhnya

Presiden Soeharto, dan keputusan Presiden Habibie pada Juni 1998 untuk memberi “otonomi luas” kepada Timor-Leste.

162. Jamsheed Marker menyatakan rasa hormatnya kepada Kofi Annan karena keputusannya untuk memprioritaskan persoalan Timor di PBB:

Bila merenungkan urutan kejadian saat itu, saya tetap yakin bahwa tanpa adanya keputusan awal Kofi Annan untuk memulai suatu proses negosiasi mengenai Timor-Timur, yang bukan sekedar diperhatikan tetapi diperjuangkan dengan gigih setiap saat, PBB tidak akan mampu meraih semua kesempatan yang timbul akibat desentralisasi politik di Indonesia. Dengan lain kata, ibarat kami yang memegang bola dan kamilah yang melarikannya ke gawang begitu mendapat kesempatan.⁹¹

163. PBB memperoleh kesempatan untuk “melarikan bola” ketika pada tanggal Januari 1999 Pemerintah Habibie mengumumkan “pilihan kedua” bagi rakyat Timor-Leste Timur: pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Pada tanggal 11 Maret Sekretaris Jenderal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri Portugal, Jamie Gama, dan menyetujui Jajak Pendapat langsung mengenai “pilihan kedua” yang diatur oleh PBB, kemudian mengirim misi penilaian PBB ke Timor-Leste yang dikepalai Francesc Vendrell, wakil Jamsheed Marker selama negosiasi berlangsung.

164. Mengingat situasi sengit yang berlangsung di wilayah ini, persoalan paling penting bagi PBB adalah keamanan dan kepastian, bahwa Jajak Pendapat akan dijalankan dengan damai dan bebas. Dalam pertemuan tripartit berikutnya pada tanggal 22 April, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dengan datar menolak permintaan PBB yang menyatakan agar pasukan Indonesia dikantongkan atau dilokalisir di wilayah-wilayah tertentu, satu bulan sebelum jajak pendapat. Pada pertemuan tingkat tinggi mereka di Bali tanggal 27 April, Presiden Habibie juga menolak usulan Perdana Menteri Australia untuk menerima kehadiran pasukan perdamaian internasional.

165. Pada tanggal 5 Mei 1999 pertemuan tripartit terakhir dilaksanakan di New York antara Kofi Annan, Menteri Luar Negeri Alatas, dan Gama; dan tiga butir Kesepakatan yang berkaitan dengan Jajak Pendapat ditandatangani. *Inter alia*, tiga butir Kesepakatan tersebut mengizinkan pengambilan suara secara langsung, rahasia, dan umum, dan pembentukan misi PBB untuk melaksanakan jajak pendapat, serta mempercayakan keamanan kepada pihak Indonesia.⁹² Mereka didukung oleh Dewan Keamanan pada 7 Mei, yakni kali pertama Dewan Keamanan membicarakan masalah Timor-Leste sejak April 1976.⁹³ Pada tanggal 11 Juni, Dewan Keamanan membentuk Misi PBB di Timor-Timur (*UN Mission in East Timor - UNAMET*). Ian Martin ditunjuk sebagai Wakil Khusus bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor-Timur dan kepala UNAMET.¹

166. Meskipun dianggap suatu hal yang bersejarah, namun tiga butir Kesepakatan tersebut mendapat sambutan beragam. Pada satu sisi, Kesepakatan tersebut melambangkan kemenangan diplomasi internasional dan, berlawanan dengan latar belakang Penentuan Pendapat Rakyat yang palsu tahun 1969 di Irian Barat dan Majelis Rakyat Timor-Timur pada bulan Mei 1976, menerima bukti bahwa Indonesia menuju demokratisasi. Pada sisi lain, ada kekhawatiran bahwa mempercayakan keamanan kepada pihak Indonesia akan mengundang bencana. Dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara, yang ditunda karena alasan keamanan, José Ramos-Horta memprediksikan kekerasan, dan meminta agar komunitas internasional mengambil langkah-langkah pencegahan:

¹ Ian Martin adalah Sekretaris Amnesty International 1986-92. Sebelum menjabat sebagai kepala UNAMET, ia bertugas dalam beberapa jabatan hak asasi manusia untuk PBB di Haiti, Rwanda and Bosnia-Herzegovina.

Skenario terburuk – yang nyata – adalah kekerasan akan terjadi; bahwa kekerasan tersebut ditargetkan pada PBB; bahwa mereka mengundurkan diri dan terjadi pertumpahan darah yang luar biasa di Timor Timur. Mereka – bukan hanya PBB tetapi negara-negara yang benar-benar penting, seperti Australia – harus menciptakan kondisi untuk memastikan hal ini tidak terjadi.⁹⁴

167. Dalam kesaksiannya kepada CAVR pada Audiensi Publik Nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Ian Martin, kepala UNAMET, mengakui bahwa kritik utama terhadap Kesepakatan tersebut adalah meletakkan keamanan di tangan militer Indonesia. Meskipun ia bukan bagian dari negosiasi. Ia berkata:

*Saya sudah panjang lebar memikirkan hal ini, dan saya setuju dengan pendapat dari para negosiator, bahwa tekanan sekeras apa pun terhadap Presiden Habibie pada awal 1999 tidak akan menghasilkan diterimanya Pasukan Penjaga Kedamaian. Dengan demikian saya merasa lebih baik mengambil risiko, daripada hilangnya kesempatan untuk penentuan nasib sendiri yang tertutup selama 24 tahun dan yang akan tutup lagi setelah Habibie.*⁹⁵

168. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Ian Martin juga menjawab kritik, bahwa UNAMET dianggap bersikap berat sebelah supaya hasil pemungutan suara adalah kemerdekaan, dan bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara dipancing kemarahan pihak Timor-Timur pro-integrasi karena proses dan hasil yang tidak adil. Ia berkata:

Saya pikir ini hanya pandangan Indonesia dan kelompok-kelompok orang Timor-Timur pro-integrasi dan tidak memiliki kredibilitas di tempat lain, tetapi pertanyaan ini penting untuk dijawab. Menurut pendapat saya, usaha belum cukup dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini di Indonesia, khususnya ketika hal ini diteruskan hingga ke sidang-sidang di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta, oleh jaksa dan pembela. Para saksi TNI dalam pengadilan-pengadilan tersebut dibiarkan begitu saja, ketika mereka menyatakan kebohongan paling mencolok, sebagai contoh, dengan mengatakan bahwa polisi sipil PBB telah mengambilalih tanggung jawab keamanan di Timor-Timur, atau bahwa kotak-kotak suara ditemukan di rumah Uskup Belo, dan lain-lain.

169. Martin menjelaskan:

UNAMET tidak pro-kemerdekaan: UNAMET hanya berkomitmen agar rakyat Timor Timur bisa menjalankan haknya, yang diakui secara internasional, atas penentuan nasib sendiri...Prosedur pendaftaran dan pengumpulan suara yang kami tempatkan dan jalankan diperhatikan secara cermat oleh Komisi Pemilihan Independen, yang menyelenggarakan audiensi publik mengenai keluhan-keluhan pada hari-hari setelah pemungutan suara, dan oleh berbagai pengamat internasional. Semua pengamat yang netral menilai, pemilihan telah dijalankan dengan adil dan efisien, meskipun dalam kondisi yang sulit dan hambatan waktu.

170. Ia kemudian menyatakan, bahwa aspek-aspek Jajak Pendapat bersifat tidak adil bagi pendukung kemerdekaan.

[Jajak Pendapat] itu berpihak pada pendukung integrasi karena pihak Indonesia gagal memenuhi komitmen yang dijanjikan. Komitmen tersebut, di antaranya, bahwa pejabat pemerintah Indonesia akan bersikap netral, dan bahwa pejabat pemerintah berasal Timor hanya berkampanye dalam kapasitasnya sebagai individu tanpa menggunakan dana dan fasilitas pemerintah atau pun "tekanan jabatan". Semua ketentuan tersebut dilanggar secara terang-terangan tanpa menghiraukan protes UNAMET.⁹⁶

171. Pemungutan suara berlangsung relatif damai, dan hari pelaksanaan pemungutan suara merupakan hari kemenangan kecil bagi sebagian besar rakyat Timor-Leste. Setelah pecah kekerasan, Presiden Habibie, di bawah tekanan internasional yang kuat, menyetujui mengundang PBB mengirim pasukan internasional untuk memulihkan ketertiban. Hal ini disahkan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 15 September 1999.⁹⁷

172. Pada tanggal 20 Oktober 1999 badan legislatif tertinggi Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengakui hasil Jajak Pendapat Timor-Leste, dan mencabut TAP MPR tahun 1978, yang menyatakan penggabungan Timor-Timur ke Indonesia.¹ Pada hari yang sama, Presiden Habibie, turun dari kursi kepresidenan untuk digantikan Abdurrahman Wahid.

173. Pada tanggal 25 Oktober 1999 Dewan Keamanan menyambut baik keputusan MPR dan mendirikan Pemerintahan Transisi PBB di Timor-Timur (*UN Transitional Administration in East Timor*; UNTAET). Resolusi ini disetujui secara mutlak dan memberi wewenang kepada UNTAET untuk menjalankan semua otoritas legislatif dan eksekutif, antara lain pelaksanaan kehakiman, dan membantu Timor-Leste mempersiapkan pemerintahan sendiri. Kofi Annan menunjuk Sergio Vieira de Mello dari Brazil sebagai Wakil Khusus bagi Timor-Timur yang baru dan Kepala Pemerintahan Transisi.²

¹ Beberapa legislator Indonesia percaya, bahwa pihak legislatur dan bukan presiden yang berhak mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, dan bahwa dengan menyetujui Kesepakatan 5 Mei Presiden Habibie tidak mengikuti prosedur yang benar.

² Pada waktu diangkat Sergio Vieira de Mello adalah Wakil Sekretaris Jendral untuk Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat di PBB. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi. Ia bertugas sebagai SRSG di Irak, ketika dibunuh secara tragis pada 19 Agustus 2003 akibat serangan bom terhadap kantor PBB

174. Disetujui Resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 25 Oktober menandai pengalihan otoritas atas Timor-Leste dari Indonesia kepada PBB. (Mengenai akhirnya peranan Portugal yang formal, lihat seksi mengenai Portugal dalam bab ini).

3.2 Cina

175. Republik Rakyat Cina (RRC) yang bergabung dengan PBB pada tahun 1971 merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.¹ Berkaca pada pengalaman sendiri tentang latar belakang kolonialnya yang sering memalukan, Cina secara tradisional telah mengambil posisi kuat dalam hal kedaulatan, kemandirian, penentuan nasib sendiri dan hak-hak Dunia Ketiga. Cina khususnya sensitif terhadap apa yang mereka anggap pengaruh Barat yang berlebihan pada sistem internasional, termasuk campur tangan luar dalam masalah internal sebuah negara, atas nama intervensi kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta pemaksaan pengertian tentang hak asasi manusia yang bersifat individualistis.

176. Cina menentang kolonialisme Portugal di Afrika dan berencana menggabungkan Macau [ke Cina],² meskipun dulu dan hingga saat ini masih tetap menentang kemerdekaan bagi Taiwan dan Tibet.

177. Indonesia mengakui Republik Rakyat Cina pada tahun 1950, dan hubungan Cina-Indonesia pada periode Soekarno pada umumnya berlangsung positif. Hubungan tersebut memburuk dengan tajam tahun 1965, ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pro-Beijing dituduh mencoba melakukan kudeta di Jakarta. Di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia menerapkan larangan-larangan diskriminatif terhadap kebudayaan dan praktek keagamaan Cina, termasuk melarang penggunaan nama-nama Cina, teks-teks Cina serta pengajaran bahasa Cina di sekolah-sekolah. Dukungan pemerintah Soeharto pada Vietnam yang pro-Moskow juga mengecewakan Cina.

178. Pemerintah Soeharto khawatir Cina akan campur tangan dalam masalah Timor Portugis. Pada tahun 1974-75 Presiden Soeharto dan para penasihatnya berulang kali menyatakan kekhawatirannya, apabila Timor-Leste yang merdeka condong ke kiri dan karena lemahnya secara ekonomi akan mencari dukungan Cina. Para pejabat Indonesia setuju ketika Sekretaris Departemen Luar Negeri Australia, Alan Renouf, memberitahu mereka pada bulan Oktober 1974 bahwa:

dia memperkirakan niat Cina akan menjadi kekhawatiran khusus bagi Indonesia. Dia menyatakan bahwa terdapat 10.000 orang Cina di Timor Portugis, dan meskipun saat itu mereka berorientasi pada Taiwan, kesetiaan mereka dapat berubah.⁹⁸

179. Presiden Soeharto mengangkat masalah tersebut pada kedua kesempatan, saat dia membahas Timor dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam.

180. Baik Renouf maupun Whitlam berusaha menenangkan kekhawatiran Indonesia. Dalam sebuah surat pada Presiden Soeharto, Whitlam menulis:

¹ Menyusul revolusi komunis Cina pada tahun 1949 dan munculnya Perang Dingin, Taiwan menempati kursi 'Cina' di PBB. Pada tahun 1971, PBB mengakui RRC sebagai wakil sah Cina satu-satunya dan menggantikan Taiwan di PBB.

² Portugal mengembalikan Macau kepada Cina pada bulan Desember 1999. Sekarang Macau disebut Macau Special Administrative Region (SAR; Daerah Administrasi Khusus Macau) dan memiliki otonomi luas kecuali dalam bidang luar negeri dan pertahanan.

Kami tidak memiliki bukti yang mendukung kekhawatiran tentang masalah ini. Saat ini kami berpendapat, bahwa Cina, Uni Soviet, atau negara adikuasa lainnya hanya sedikit saja tertarik terhadap Timor Portugis; dan menurut hemat kami negara-negara yang mungkin tergoda untuk ikut campur, akan berhati-hati agar tidak membahayakan hubungan mereka dengan Indonesia.⁹⁹

181. Para diplomat di negara-negara lain dan PBB setuju dengan penilaian ini, dan menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah Soeharto.¹

182. Fretilin menyertakan Cina dalam strategi internasionalnya untuk mendapat perhatian dan dukungan, tapi inisiatif tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya bahwa Fretilin adalah komunis. Pers yang dikontrol pemerintah dan surat kabar militer *Berita Yudha* memuat cerita-cerita yang mengklaim adanya infiltrasi Komunis Cina ke Timor, pendanaan demonstrasi-demonstrasi dan keterlibatan Maoist, termasuk pembicaraan tentang kunjungan rahasia empat orang jenderal Cina ke Timor-Leste melalui Australia. Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, mengklaim pada bulan April 1975 bahwa "agen-agen di Indonesia dan Taiwan" milik UDT telah mengkonfirmasi hubungan Cina dengan Timor.²

183. RRC adalah satu-satunya negara penting di Asia yang mendukung Fretilin, dan satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan yang mengakui deklarasi kemerdekaan unilateral dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. Cina mendukung dua resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijalankan sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan sangat mengutuk tindakan-tindakan Indonesia. Perwakilan Cina, Huang Hua, memberi tahu Dewan Keamanan pada bulan Desember 1975:

Agresi terang-terangan pemerintah Indonesia terhadap Republik Demokratik Timor-Leste telah membongkar ambisi liar Indonesia untuk membasmi pasukan-pasukan patriotik rakyat Timor-Timur, mencekik Republik Demokratik Timor-Leste yang baru lahir, dan kemudian mewujudkan skemanya yang telah lama direncanakan untuk menjajah Timor-Timur. Tindakan-tindakan pemerintahan Indonesia di atas, melanggar semua tujuan dan -prinsip Piagam PBB. Delegasi Cina hanya dapat memperlihatkan kemarahannya dan mengutuknya."¹⁰⁰

184. Pengakuan Cina terhadap RDTL berarti Cina menerima, bahwa deklarasi kemerdekaan unilateral Fretilin adalah sebuah tindakan penentuan nasib sendiri. Tapi hal ini tidak berhasil mencegah Cina untuk memberi dukungannya, dengan satu pengecualian, pada resolusi Sidang Umum PBB tentang Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1982.

185. Cina juga menyediakan bantuan praktis bagi Fretilin. José Ramos-Horta menulis:

¹ Wakil Sekretaris Jendral untuk Urusan Politik, Perwalian, dan Dekolonisasi PBB., Tang Ming-Chao, memberitahu Whitlam ketika berkunjung ke Canberra pada bulan September 1975 bahwa, meskipun ia seorang pegawai negeri internasional, ia dapat memastikan "bahwa Cina tidak memiliki kepentingan di Timor Portugis". Dokumen 227, Canberra, 12 September 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 406-408

² Dokumen 131, Jakarta, 12 Mei 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 259. James Dunn menyangkal cerita-cerita dari bulan November 1974 ini dengan menyebutnya propaganda. Ia khususnya sangat kritis tentang "kebohongan belaka" yang disebar oleh Francisco Lopes da Cruz pada bulan September 1975 seperti klaimnya, bahwa 20 orang "pelatih militer" asal Vietnam Utara telah mengajar prajurit-prajurit Fretilin. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, 2003, hal. 72, 183.

Sementara Moskow menjaga jarak dengan Fretilin, Beijing memberikan keramah-tamahan dan dukungan diplomatik aktif. Saya pribadi mengunjungi RRC pada awal 1976, seperti juga perwakilan-perwakilan Fretilin lainnya. Cina juga memberikan kata-kata dukungan yang kuat di PBB, begitu pula bantuan finansial.¹⁰¹

186. Bantuan-bantuan ini tidak termasuk bantuan militer, meskipun Fretilin memintanya melalui Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, yang mengunjungi Cina tidak lama setelah invasi Indonesia, dan bertemu dengan Jenderal Ch'en His-lien, seorang komandan senior dalam Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), dan mengunjungi sebuah unit TPR. Duta Besar Australia untuk Cina, Stephen Fitzgerald, diminta oleh Canberra untuk memverifikasi klaim-klaim bantuan militer pada pejabat-pejabat Cina, dan berkesimpulan bahwa:

Posisi Cina saat ini tampaknya didikte oleh sikap moral, bahwa Indonesia seharusnya dikecam karena tindakan agresi terbukanya, padahal sebelumnya Cina tidak berniat untuk menjadi terlibat. Setelah invasi Indonesia Cina terpaksa, meskipun dengan segan, mengambil posisi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Saat itu Fretilin tampaknya merupakan partai pribumi yang paling mudah diidentifikasi, karena konsisten dengan kebijakan-kebijakan mereka sendiri.¹

187. Duta Besar Fitzgerald percaya bahwa pada saat itu Cina belum menyangkal masalah bantuan militer. Tapi dengan kata-kata Perdana Menteri Cina, Ch'iao Kuan-hua, pada perjamuan selamat datang tanggal 29 Desember 1975, bahwa "rakyat Timor Timur...pasti akan memenangkan kemerdekaan nasional selama mereka gigih bergantung pada diri sendiri dan perjuangan keras", maka ia memastikan bahwa itu berarti "tidak".

188. Pemerintah Inggris percaya, bahwa kata-kata keras Cina di Dewan Keamanan seharusnya tidak diterima mentah-mentah saja. Dalam sebuah telegram ke London pada tanggal 2 Januari 1976, Duta Besar untuk Indonesia, John Ford, menulis:

Mengenai kunjungan delegasi Fretilin ke Peking dan dukungan terbuka Cina pada Fretilin, pihak Cina tampaknya telah berkomentar, bahwa dukungan mereka terhadap Fretilin sebaiknya tidak usah terlalu diperhatikan: "ada waktunya ketika meriam perlu ditembakkan, meski hanya menembakkan bola-bola kertas".¹⁰²

189. Pada bulan Juli 1976 Cina meyakinkan Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, bahwa Cina tidak akan ikut campur dalam masalah internal Indonesia.¹⁰³

190. Indonesia diuntungkan oleh hubungannya dengan Cina, meski Fretilin dituntut karena menginginkan hubungan yang sama. Dukungan Cina pada Timor-Leste melemah pada tahun 1980an karena hubungannya yang membaik dengan Indonesia, dan karena merasa bahwa usaha untuk meraih kemerdekaan adalah sia-sia. Indonesia mengurangi posisi pro-Vietnamnya dan Cina mengambil pendirian yang lebih netral terhadap Timor-Leste. Pada tahun 1985, Indonesia mengendurkan larangan-larangan hubungan dagang dengan Cina yang menghasilkan

¹ 7 Januari 1976. Dokumen, hal. 663-64. Pengertian akan posisi Cina ini dikonfirmasi oleh SRSG Winspeare Guicciardi yang mengatakan bahwa sebelum ia meninggalkan New York, untuk mengunjungi Timor-Leste dan wilayah tersebut pada bulan Januari 1976 yang diberitahu oleh Tang Ming-Chao, [Wakil Sekertaris Jendral untuk Dekolonisasi], bahwa menurut Cina "misi Winspeare akan memiliki nilai, hanya jika ia mendesak pihak Indonesia untuk 'langsung pergi'." Laporan oleh pejabat Pemerintah Australia, 10 Februari 1976. *Documents*, hal. 705.

keuntungan aliran finansial spektakuler dan meningkatkan pertukaran-pertukaran bilateral. Pada bulan Agustus 1990 kedua negara menormalisasi hubungan dan, sebagai bukti hubungan yang sangat membaik, Presiden Soeharto mengunjungi Beijing pada tahun 1991. Untuk mengakomodasi keberatan-keberatan dari pihak nasionalis dan militer, pemerintah Soeharto mendapat kesepakatan-kesepakatan dari Cina, bahwa Cina tidak akan menyediakan bantuan bagi tindakan-tindakan subversi atau ikut campur dalam masalah dalam negeri Indonesia.

191. Cina mendukung Resolusi Dewan Keamanan pada tahun 1999 yang membenarkan tindakan penentuan nasib sendiri yang akan diatur oleh PBB. Sejalan dengan prinsipnya yang menentang intervensi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi, Cina mencoba mempengaruhi blok Asia agar mendukung Indonesia pada tahun 1999 untuk menentang penyelidikan oleh Komisi hak asasi manusia PBB tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor pada tahun itu. Hal ini tidak berhasil. Tetapi Cina berhasil menghilangkan sebagian referensi pada penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia sebelum membiarkan Dewan Keamanan membenarkan campur tangan Interfet pada bulan September 1999.

3.3 Prancis

192. Perancis ialah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggota tetap Dewan Keamanan, dan negara donor bagi anggaran organisasi tersebut. Pemerintah Prancis berkomitmen untuk mengkoordinasi kebijakan luar negerinya dengan menerapkan semua tujuan dan prinsip PBB, yang banyak memiliki persamaan dengan tradisi republik Prancis.

193. Perancis tidak mendukung inisiatif-inisiatif dekolonisasi yang dilakukan PBB pada tahun 1960an. Prancis *abstain* dalam mendukung deklarasi bersejarah mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*) pada tanggal 14 Desember 1960, serta prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan pelaporan tentang koloni. Pada periode yang sama, Prancis bergabung dengan Portugal dalam menentang pendaftaran Timor oleh Sidang Umum sebagai sebuah wilayah tanpa pemerintah sendiri.

194. Pemerintah Prancis mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 yang disetujui dengan suara bulat pada tanggal 22 Desember 1975, sebagai tanggapan terhadap invasi Timor-Leste oleh Indonesia. Prancis menegakkan hak rakyat Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta mengimbau Indonesia agar menarik mundur pasukan-pasukannya, tapi mengambil pendekatan secara damai pada masalah tersebut. Berbicara dalam debat Dewan Keamanan pada tanggal 18 Desember, wakil Prancis, M. LeCompt, mendesak kerja sama daripada saling menyalahkan:

*Misi Dewan dalam kasus ini bukan untuk menyalahkan, dan tidak juga untuk menyalahkan salah satu dari semua pihak yang terlibat. Kami tahu bahwa situasi-situasi sejarah jarang sekali sederhana, sehingga yang baik dan yang jahat tidak dapat ditentukan berdasarkan pandangan dari satu pihak saja. Timor juga bukan pengecualian terhadap peraturan itu.*¹⁰⁴

195. Perancis juga memilih mendukung resolusi Dewan Keamanan yang kedua, yang disetujui pada tanggal 22 April 1976. Prancis lagi-lagi menegakkan hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, tapi menyesali resolusi tersebut tidak menyertakan rekomendasi-rekomendasi dari Jepang, untuk mengakui niat baik Indonesia dan untuk menarik mundur pasukannya. Dalam sebuah pernyataan penjelasan yang tak jelas, wakil Prancis, M. Travert, memberitahu Dewan:

Daripada terus memikirkan masa lalu dan menyalahkan pihak ini atau itu, kita sekarang harus melihat ke depan. Masa depan Timor-Timur harus didasarkan pada rekonsiliasi nasional, penghentian total permusuhan dan bersatunya keragaman partai, yang perbedaannya tampaknya bagi kami tidak terlalu fundamental dibanding dengan aspirasi bersama mereka, yaitu peningkatan rakyat Timor menuju kesejahteraan dan kemerdekaan.¹⁰⁵

196. Untuk bertahan di posisi ini, Prancis *abstain* dari mendukung Resolusi Sidang Umum pertama, yang disetujui menyusul invasi Indonesia, karena resolusi tersebut tidak seimbang dan menyalahkan Indonesia sepenuhnya.¹⁰⁶ Pemerintah Prancis tetap *abstain* pada semua resolusi Sidang Umum berikutnya dengan menyatakan, bahwa resolusi-resolusi tersebut “mengabaikan realitas situasi di Timor-Leste”.¹⁰⁷ Pada tahun 1979, Pemerintah Giscard d'Estaing menandatangani sebuah perjanjian pajak dengan Indonesia. Dalam pandangan Pemerintah Australia, ini mengimplikasikan pengakuan *de jure* bagi kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste karena perjanjian tersebut ditandatangani setelah penggabungan tahun 1976, dan memiliki klausa yang mendefinisikan Indonesia sebagai wilayah yang ditentukan oleh hukum Indonesia.¹⁰⁸

197. Peralatan militer yang disediakan bagi Indonesia oleh Pemerintah Giscard d'Estaing digunakan di Timor-Leste, termasuk tank-tank dan helikopter-helikopter Puma dan Allouette. Helikopter Puma diproduksi di Indonesia pada tahun 1979. Tambahan Allouette disediakan oleh Prancis pada tahun 1982. Pihak Perlawanan Timor mengklaim, bahwa peralatan ini digunakan dalam pertempuran. José Ramos-Horta menulis:

'Allouette' adalah sesuatu yang sangat ditakuti Fretilin. Keserbagunaan dan kecepatannya memungkinkan pengoperasian efektif di daerah-daerah hutan dan pegunungan untuk mengejar pasukan-pasukan gerilya yang sedang mundur, atau memaksa mereka keluar dari basis-basis mereka.¹⁰⁹

198. Kedutaan Selandia Baru di Jakarta mengkonfirmasi pada bulan Januari 1978, tentang adanya helikopter-helikopter Puma di Dili, tetapi yakin bahwa helikopter-helikopter tersebut tidak dipersenjatai.

Angkatan Darat dan Udara saat ini mengoperasikan sekitar sepuluh helikopter ringan (BO-105, Puma dan Allouette), yang berbasis di Dili. Dari apa yang kami lihat, helikopter-helikopter tersebut hanya digunakan untuk kegiatan pengintaian dan evakuasi terbatas. Tidak ada yang tampak dibekali peralatan sebagai pesawat bersenjata.¹

199. Pihak perlawanan Timor-Timur dan organisasi-organisasi masyarakat sipil Prancis berharap, bahwa Prancis akan mendukung Timor-Leste di PBB, setelah Francois Mitterand menjadi presiden sosialis yang pertama negara itu pada tahun 1981. Ketika dalam oposisi, pihak sosialis selalu dengan semangat mengkritik kebijaksanaan pemerintah konservatif Giscard d'Estaing (1974-81) dalam isu tersebut, sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara moral, dan Mitterand menyebut rakyat Timor sebagai rakyat yang “ditinggalkan”, korban-korban dari kekuatan-kekuatan yang akan menghapus mereka”.¹¹⁰ Mitterand menjadi presiden sejak tahun 1981 sampai tahun 1995 dan, menurut Konstitusi Prancis, memiliki peran penting dalam

¹ Laporan oleh Duta Besar Roger Peren dan Col MacFarlane, Atase Pertahanan, 13 Januari 1978.

Documents on East Timor, Vol. 1. MacFarlane adalah atase pertahanan Barat pertama yang diperbolehkan mengunjungi Timor-Leste setelah invasi.

membentuk kebijakan luar negeri. Pada bulan Desember 1981, ia memberitahu televisi Portugis bahwa rakyat Timor-Timur sedang mengalami “penindasan yang sangat keras ...bahwa tidak dapat diterima bagi pihak yang kuat menghancurkan yang lemah, dan melakukan eliminasi-eliminasi fisik yang dapat mengakibatkan pemunahan rakyat” dan bahwa “jika PBB tidak mengambil inisiatif untuk membela hak-hak Timor, Prancis akan menjalankan wajib tersebut.”¹¹¹

200. Pada praktiknya, Prancis di bawah pemerintahan Mitterand melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, dan bahkan *abstain* dari mendukung Resolusi Sidang Umum tahun 1982, yang hanya mengimbau Sekretaris Jenderal untuk mencoba mencari solusi melalui dialog. Pada tahun 1983 Pemerintah Prancis secara resmi memberitahu Portugal, bahwa mereka akan menentang voting tahun itu jika isu itu timbul.¹¹² Menjawab sebuah pertanyaan tentang hak asasi manusia di Timor-Leste pada tahun 1986, Menteri Luar Negeri, Roland Dumas, berkata bahwa informasi tentang masalah tersebut tidak lengkap dan kontradiktif, dan bahwa pada tahun 1982 sebagian besar rakyat Timor-Timur telah memilih Partai Golkar Soeharto. Prancis membuat referensi singkat pada Timor dalam debat tentang penentuan nasib sendiri di Komisi hak asasi manusia PBB pada bulan Januari 1987. Para aktivis Timor-Leste memasuki dan meminta suaka di Kedutaan Prancis di Jakarta tiga kali pada tahun 1995-1996; permintaan-permintaan mereka untuk pergi ke Portugal telah dihormati.

201. Perancis merupakan donor besar bagi Indonesia selama periode Soeharto. Pada tahun 1991 Prancis adalah donor bilateral terbesar kedua, dan mempertahankan dukungannya selama krisis ekonomi Asia sejak tahun 1997. Berlawanan dengan sebagian dugaan,, Prancis meningkatkan kerjasama militernya dengan Indonesia di bawah Presiden Francois Mitterand. Pembelian-pembelian Indonesia pada tahun 1990an termasuk meriam-meriam dan kendaraan-kendaraan pengintai amfibi. Sejak tahun 1994, didorong oleh strategi agresif antara bisnis dan pemerintah, penjualan Perancis di Asia melampaui pasar-pasar tradisional seperti Timur Tengah untuk pertama kalinya, dan perusahaan-perusahaan grup Thompson, contohnya, menyediakan berbagai peralatan militer dan komunikasi bagi Indonesia. Kerja sama termasuk pertukaran personel militer. Pada tahun 1997, Prancis menganugerahi bintang penghargaan kepada BJ Habibie untuk perannya dalam mempromosikan hubungan Prancis-Indonesia dan pembangunan industri di Indonesia.

202. Perancis campur tangan dalam isu Timor-Leste pertama kalinya pada tahun 1999. Di bawah Presiden Jacques Chirac, Prancis mendukung proses penentuan nasib sendiri seiring dengan pernyataan-pernyataan kebijakan sebelumnya, dan merupakan satu dari 22 negara yang berkontribusi pada *International Force for East Timor* (Interfet), khususnya untuk meningkatkan kapabilitasnya di udara dan di air.

3.4 Rusia (USSR)

203. Bekas Uni Soviet (USSR)¹, yang menurut pengakuan sendiri teman rakyat kolonial, merupakan adikuasa dan anggota tetap Dewan Keamanan. Indonesia dan pihak Barat khawatir Uni Soviet akan campur tangan dalam Timor-Leste dan memonitor aktivitasnya secara dekat. Pada kenyataannya, Rusia memainkan peran kecil dan, seperti negara adikuasa lainnya, melakukan pendekatan pragmatis berdasarkan kepentingan strategisnya di Indonesia.

204. Menyusul Revolusi Bolshevik tahun 1917, Uni Soviet mempromosikan dirinya sebagai jawara rakyat kolonial dan pergerakan revolusioner. Aktivitas ini meningkat setelah Perang Dunia II dan jatuhnya kerajaan-kerajaan Eropa, dan memuncak pada tahun 1970an dengan, *inter alia*,

¹ Uni Soviet pecah pada tahun 1991 ketika lima belas negara anggotanya merdeka. Sekarang Uni Soviet dikenal sebagai Federasi Rusia, atau Rusia.

intervensi Soviet di Angola pada tahun 1975, Perang Ogaden (1976-78)¹ dan invasi sial Afghanistan (1979-89).

205. Pada tahun 1960 Uni Soviet mengusulkan dan membuat naskah asli Deklarasi PBB bersejarah tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan. Naskah tersebut banyak dimodifikasi, tapi inisiatif merupakan sebuah kontribusi penting pada dekolonisasi, termasuk bagi Timor-Leste. Uni Soviet mendukung dua Resolusi Dewan Keamanan tentang Timor-Leste yang diambil sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan semua Resolusi Sidang Umum tentang masalah tersebut antara tahun 1975 dan 1982.

206. Ketertarikan Soviet pada Timor tidak sekuat yang sebelumnya ditunjukkan pola pemilihan ini, atau seperti yang diantisipasi oleh sebagian pihak. Dalam konteks Perang Dingin yang seru, dan menyusul jatuhnya Vietnam ke tangan Viet Cong, ketakutan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk Indonesia dan Timor-Leste, bahwa Soviet mungkin akan campur tangan dan membentuk “Kuba Asia” di Timor-Leste, mungkin bahkan dengan peluru-peluru kendali yang disediakan Soviet mengincar Jakarta. Duta PBB menunjuk sebuah “pandangan gigih” bahwa Washington mendorong Soeharto untuk campur tangan di Timor guna mencegah kemungkinan tersebut. Menurut skenario ini, seperti diamati oleh Marker, “pengambilalihan Dili akan menambah fasilitas Soviet yang sudah ada di Teluk Cam Ranh, dan memberi alasan Moskow untuk menghadirkan angkatan lautnya yang sangat strategis di wilayah tersebut”.²

207. Komisi tidak berhasil mengakses arsip-arsip Rusia, sehingga sulit untuk menentukan kebenaran dari kepercayaan dramatis tapi penting ini.³ Bukti yang ada memberi kesan kuat, bahwa klaim-klaim ini seringkali termotivasi secara politik oleh pihak Indonesia dan tidak memiliki dasar realitas, karena Uni Soviet lebih tertarik pada hubungannya dengan Indonesia dibandingkan dengan nasib Timor-Leste.

208. Pemerintah-pemerintah yang mendukung terhadap Indonesia menyangkal klaim-klaim tersebut. Dalam sebuah laporan pada tanggal 8 Oktober 1975, atase pertahanan Selandia Baru di Jakarta, Kolonel AG Armstrong menulis:

Pihak Indonesia mengklaim pada beberapa kesempatan bahwa Fretilin menerima bantuan dari luar, tapi mereka tidak pernah bisa memberikan bukti nyata.

209. Lapornya menyebutkan sebuah klaim Angkatan Laut TNI (TNI-AL) yang telah menemukan “kapal selam milik Cina Merah berlayar di sekitar kota Dili, dan bahwa identitasnya sebagai sebuah kapal selam buatan Rusia, kemudian digunakan oleh Cina dikonfirmasi melalui “tanda” yang terdapat pada mesin-mesinnya. Kolonel tersebut melaporkan bahwa informannya meragukan Angkatan Laut Indonesia “mampu mengidentifikasi kelas sebuah kapal selam dari suara mesinnya” dan bahwa dari nama pembuat kapal yang dimaksud berarti pembuatannya setelah perpisahan Sino-Soviet. Ia menyimpulkan:

Sebuah kapal selam mungkin saja telah terlihat, tapi identifikasi positifnya sebagai milik Cina, Rusia atau apa pun harus diragukan.¹¹³

¹ Somalia dan Ethiopia berperang untuk menguasai wilayah Ogaden milik Ethiopia. Uni Soviet awalnya mendukung Somalia kemudian pindah mendukung Ethiopia.

² *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland, 2003, hal. 9. Uni Soviet menyediakan bantuan militer bagi Vietnam Utara dalam perangnya dengan Vietnam Selatan dan AS, dan sesudah kemenangan Vietnam Utara pada tahun 1975 menjadi donor bantuan militer dan ekonomi terbesar bagi Vietnam. Berdasarkan sebuah Perjanjian pada tahun 1978, Vietnam memberikan Uni Soviet akses ke fasilitas-fasilitas di Da Nang dan Cam Ranh Bay, sehingga secara signifikan meningkatkan kehadiran angkatan laut Soviet di wilayah tersebut yang sampai saat itu hanya terbatas pada Soviet Timur Jauh.

³ Satu sumber dokumentasi yang mungkin adalah *Storage Centre for Contemporary Documentation* (TKhSD) di Moskow.

210. Pejabat-pejabat Australia juga meragukan kebenaran mengenai tujuan para komunis terhadap Timor. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, secara pribadi memberitahu Presiden Soeharto pada beberapa kesempatan bahwa pernyataan itu tidak berdasar. Departemen Luar Negeri memperkirakan dengan tepat pada bulan November 1974 bahwa Uni Soviet tidak akan "menaruh ambisi di situ, karena ... alasan bahwa hal ini dapat merusak apa yang harus dinilai oleh Moscow sebagai hubungan yang lebih penting dengan Indonesia."¹¹⁴

211. Sikap Soviet terhadap Timor-Leste digambarkan dengan baik dalam cerita di bawah, yang dikemukakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Saya ingat pernah bertanya kepada duta besar Soviet bagaimana reaksi Uni Soviet jika Indonesia bergerak untuk menggabungkan Timor Leste. Kami memainkan semacam sandiwara. Mengajak saya melihat peta Indonesia di dinding kantornya, dia bertanya: "Timor- Leste di mana?" Memainkan peran saya, saya pun menunjukkannya pada peta. "Sangat kecil dan dikelilingi oleh Indonesia, bukan?", dia berkata, dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan.¹¹⁵

212. Mr Woolcott menguraikan, bahwa cerita itu mengungkap sebuah sisi buruk kekuasaan yang besar, dan menyatakan bahwa USSR menyetujui invasi India di Goa pada tahun 1961.

213. Pernyataan-pernyataan perwakilan Soviet di PBB mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tetapi isi pernyataan itu sangat umum dan tidak mengecam Indonesia secara langsung.¹¹⁶ José Ramos-Horta melaporkan, bahwa diplomat-diplomat Soviet hanya memberi sedikit dukungan kepada delegasi Fretilin:

Tidak seperti orang Cina yang ramah, orang Rusia tidak pernah mengundang delegasi kami ke Misi mereka untuk pertemuan, apa lagi makan.¹¹⁷

214. Menulis pada bulan Februari 1976, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, John Ford, mengomentari sikap Rusia:

Hal ini sudah bernada pianissimo, dan saya mempunyai kesan, sejak awal Rusia sudah memutuskan bahwa Indonesia akan lolos dengan tindakannya, dan Rusia tidak akan mau membahayakan pengaruhnya yang berkembang di Indonesia. Seandainya Rusia memimpin kelompok pertentangan terhadap Indonesia, mereka mungkin akan diusir dan kedutaannya yang baru dan luar biasa indah, akan ditinggalkan begitu saja".¹¹⁸

215. Moscow menolak permohonan yang diajukan berkali-kali oleh perwakilan Fretilin untuk mengunjungi USSR. Mereka tidak memberikan visa sampai pada tahun 1985, sepuluh tahun setelah terjadinya invasi, dan kemudian hanya untuk mengambil bagian dalam acara-acara budaya.

216. Uni Soviet dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1953. Uni Soviet menyokong Indonesia dalam perselisihan mengenai Irian Barat dan mulai tahun 1960 Indonesia adalah penerima non-komunis terbesar untuk bantuan militer dari blok Soviet. Hubungan tersebut selamat dari penindasan politik terhadap sayap kiri oleh pasukan-pasukan Soeharto pada tahun 1965, dan, meskipun adanya pertentangan-pertentangan ideologi, kedua pihak melihat keuntungan bersama dalam kelanjutannya. Uni Soviet sangat menghargai kegunaan strategis

hasil hubungan itu, dan berusaha agar hubungannya dapat memperkecil pengaruh AS dan Cina di Asia Tenggara. Dalam perang dinginnya dengan AS, Moscow menghargai sikap Indonesia yang, tidak seperti Korea Selatan dan Filipina, tidak menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan militer AS, dan memperkenankan kapal selam nuklir Soviet untuk melewati lautan nusantara. Hubungan itu juga mengimbangi peningkatan pengaruh regional Cina yang mengancam kepentingan kedua negara dengan beberapa cara yang berbeda.

217. Selain mempertahankan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri pada nada *pianissimo*, Uni Soviet melunakkan posisinya mengenai isu Timor-Timur pada tahun 1979 sebagai imbalan atas dukungan Indonesia terhadap penggantian Khmer Rouge yang pro-Cina dengan pemerintahan pro-Soviet Heng Samrin sebagai perwakilan Kamboja di PBB. Soviet juga mengatakan, bahwa pemerintah Soeharto melakukan pembayaran kembali sebanyak US\$ 2 milyar dari periode Soekarno, dengan syarat Soviet menerima kedaulatan Indonesia di Timor.¹¹⁹

218. Kebijakan luar negeri Soviet berubah haluan ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi presiden pada bulan Maret 1985. Ia lebih menekankan penyelesaian konflik melalui negosiasi daripada kekuatan, yang dengan demikian seharusnya lebih berpihak pada Timor-Leste. Tetapi karena jauhnya Timor dari fokus Uni Soviet, dan pentingnya hubungan dengan Indonesia, Soviet justru menentangkebijakannya sendiri itu. Presiden Soeharto berkunjung ke Moscow pada bulan September 1989 dan Indonesia meringankan larangan-larangan terhadap perdagangannya dengan Soviet, dan kunjungan ke Soviet itu menghasilkan kemajuan ekonomi yang lebih kuat.

219. Pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan pembebasan “negara-negara tahanan”-nya, merupakan sumber inspirasi bagi perlawanan Timor. Dorongan semangat juang tidak datang dari keinginan untuk melihat Indonesia berpisah, tetapi karena mendemostrasikan bahwa *status quo* dapat diubah bahkan ketika ada kekuatan besar yang terlibat. Hal ini sangat berarti bagi peningkatan semangat rakyat Timor yang telah menjadi sasaran indoktrinasi dari semua pihak, bahwa penentuan nasib sendiri bagi rakyat kecil adalah sia-sia.¹ Dalam pidato-pidato ketika itu yang menitik-beratkan bahwa tidak ada yang tidak dapat diubah, José Ramos-Horta sering bercerita tentang kosmonot Soviet yang kepulangannya ke bumi harus ditunda, karena tempat pendaratan yang telah ditunjukkan oleh bagian kontrol misi tidak lagi menjadi bagian dari Uni Soviet.

220. Dukungan Rusia atas Jajak Pendapat tahun 1999 yang diatur oleh PBB serta dukungan terhadap Interfet, terkesan sangat kritis mengingat wewenang vetonya dalam Dewan Keamanan. Dukungan ini diberikan agar memungkinkan Timor-Leste untuk menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri, yang telah diperjuangkan sejak beberapa dekade yang lalu oleh Uni Soviet.

3.5 Inggris

221. Inggris adalah Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu dekat Portugal dan Indonesia, berdasarkan sejarah panjang hubungan dengan bangsa-bangsa ini sejak beberapa ratus tahun lalu. Namun selanjutnya pemerintah Inggris menunjukkan perhatian yang terbatas saja atas isu Timor-Leste, selama hampir 40 tahun sejarah dekolonisasi wilayah ini.

222. Aliansi Inggris dan Portugal berlangsung selama 600 tahun, dan Inggris tidak aktif mempertanyakan kegagalan rezim Salazar untuk membangun atau mendekolonisasi Timor Portugis berdasarkan Piagam PBB. Inggris menyatakan *abstain* ketika Majelis Umum PBB mengesahkan deklarasi tentang dekolonisasi, dan menggolongkan Timor sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri. pada tahun 1960. Inggris juga menyatakan *abstain* pada tahun 1964,

¹ Indonesia menyatakan dalam sebuah publikasi pada tahun 1980 bahwa: “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memisahkan bangsa Timor-Timur dari Indonesia.” Departemen Informasi, Republik Indonesia, *The Province of East Timor: Development in Progress*, hal. 8.

ketika Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi mengecam Portugal karena lalai menjalankan resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan sejak tiga tahun sebelumnya.¹²⁰

223. Menyusul keputusan Portugal untuk dekolonisasi pada tahun 1974, para pejabat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melaporkan perkembangan-perkembangan kepada pemerintah di London. Seorang pejabat kedutaan mengunjungi wilayah ini pada bulan Juli 1975, dan berdasarkan laporannya Duta Besar Inggris, John Archibald Ford, membuat rekomendasi-rekomendasi berikut bagi *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) di London:

Meskipun tanpa intervensi pun dari Uni Soviet atau Cina, wilayah tersebut berpotensi menjadi semakin sulit diatur, dan argumentasi untuk digabungkannya dengan Indonesia, semakin kuat...Tentu saja bila dipandang dari segi ini adalah menguntungkan Inggris, apabila wilayah Timor diserap ke dalam wilayah Indonesia secepatnya dan sediam mungkin. Dan apabila masalah ini memuncak dan dipermasalahkan di PBB, sebaiknya kita diam-diam saja dan menghindari melawan pemerintah Indonesia.¹

224. Kedutaan Besar Australia memperkuat pendekatan Inggris. Dalam surat rahasia ke Canberra tanggal 21 Juli 1975, seorang pejabat menulis:

Pandangan Kedutaan Besar Inggris...menarik...Mereka tahu apa yang pasti akan terjadi, dan mereka menempatkan kepentingan jangka panjang mereka di Indonesia. Mereka ingin berada pada jarak kejauhan yang nyaman.¹²¹

225. Australia memastikan kepada pemerintah Inggris pada bulan Oktober, bahwa Presiden Soeharto telah memutuskan intervensi militer. Duta Besar Ford melaporkan hal ini ke London:

Kedutaan Besar Australia kini telah memastikan (tetapi meminta kita tidak membalas komunikasi ini ke mereka di Canberra atau memberi tahu yang lain) bahwa Presiden Suharto telah mengesahkan operasi klandestin (termasuk penggunaan kapal dan pesawat terbang) ...Tujuannya adalah pengepungan total Dili sebelum 15 November.¹²²

226. Suratnya diakhiri dengan rekomendasi lebih lanjut tentang ketidak-terlibatan:

Duta Besar Amerika saat santap malam dengan Sir Michael Palliser tanggal 21 Oktober berkata, bahwa Timor ada pada urutan tinggi dalam daftar Kissinger mengenai tempat-tempat, di mana AS tidak ingin berkomentar atau terlibat. Saya yakin kita harus terus mengikuti sikap Amerika.¹²³

227. Rekomendasinya diterima oleh Menteri Luar Negeri Pemerintahan Partai Buruh, James Callaghan.²

228. Pemerintah Inggris tidak melakukan tindakan atas kematian wartawan Malcolm Rennie dan kameraman Brian Peters dari stasiun televisi Nine Network, keduanya warga negara Inggris,

¹ 21 Juli 1975, dikutip oleh Duta Besar Australia, Richard Woolcott. Brian Toohey and Marian Wilkinson di *The Book of Leaks*, Angus and Robertson, London, 1987, p. 176. Ford adalah duta besar Inggris ke Indonesia 1975-1978.

² Callaghan adalah Sekretaris Departemen Luar Negeri pada tahun 1975-1976, lalu Perdana Menteri 1976-79

di Balibo tanggal 16 Oktober 1975.¹²⁴ Pada tanggal 24 Oktober Duta Besar Ford menginformasikan ke London bahwa:

Kami mengerti bahwa para wartawan terbunuh, hampir pasti karena mereka kurang berhati-hati, selama serangan oleh pasukan Indonesia/UDT, dan bahwa jasad mereka dibuang oleh komandan setempat, mungkin dibakar ... Karena tidak ada protes apa pun yang mampu mengembalikan jenazah para wartawan tersebut, saya sarankan agar kita menghindari tuntutan kepada pihak Indonesia. Mereka berada di dalam zona perang atas pilihan mereka sendiri.¹²⁵

229. Kebijakan Inggris menanggapi pengambilan paksa Timor Portugis oleh Indonesia, dilaporkan ke Canberra oleh Australian High Commission (Komisi Tinggi Australia) di London:

Male (*Deputy Under-Secretary, FCO*) hari ini mengatakan bahwa seandainya Indonesia mengambilalih Timor dengan menggunakan kekerasan, pemerintah Inggris sebaiknya bertahan dari tekanan yang tentu saja akan berkembang dengan pesat di sini, untuk bukan sekedar mengutuk Indonesia secara lisan, tetapi pula untuk mengambil tindakan lebih drastis seperti menghentikan semua bantuan. Untuk menanggulangi tekanan tersebut, pemerintah Inggris perlu mengeluarkan sebuah pernyataan dengan cepat pada waktunya untuk (a) menekankan sikap kesabaran dan ketabahan di pihak Indonesia dalam menghadapi masalah ini, (b) menyangkal bahwa isu Timor, meskipun secara marjinal, merupakan masalah Inggris, dan (c) mengatakan bahwa negara-negara di wilayah yang memiliki alasan yang kuat untuk memperhatikan Timor, tidak merasa terlalu terganggu oleh perkembangan situasi.¹²⁶

230. Keputusan Inggris untuk tetap "bersikap low profile" sebagian besar didikte oleh kepentingan yang dikaitkannya pada kepentingan perdagangan jangka panjang di Indonesia. Hal ini mengacu kembali ke abad ke-17 dan ke-18, ketika *English East India Company* bersaing dengan *Dutch East India Company* untuk menguasai perdagangan rempah di kepulauan ini. Pada awal abad ke-20 investasi Inggris di Hindia Belanda berada di urutan kedua setelah Belanda. Inggris memimpin Pos Komando Sekutu di wilayah ini selama Perang Dunia Kedua, mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa, kemudian membantu mediasi antara Belanda dan Indonesia sebelum kemerdekaan. Hubungan memburuk pada awal tahun 1960-an ketika Sukarno menentang rencana Inggris untuk Singapura dan Malaysia. Soeharto segera mengakhiri kebijakan *konfrontasi* Sukarno, dan memperbaiki hubungan politik dengan menerima kunjungan Ratu Elizabeth II pada tahun 1974. Deregulasi pada tahun 1980an memungkinkan masuknya banyak perusahaan terbesar Inggris, dan Inggris sekali lagi menjadi investor kedua terbesar di Indonesia.¹²⁷

231. Kepada pemerintahan Inggris di London, Duta Besar Ford memberitahukan pandangannya, bahwa tindakan Indonesia dibenarkan atas dasar keamanan. Dalam memo rahasia setelah invasi tersebut, ia menulis:

Dugaan saya adalah, apabila Indonesia mengizinkan Fretilin mendirikan pemerintahan yang bermusuhan di Timor-Timur, dan menjadikan Timor-Timur sebagai sarang lindung bagi para pembangkang dari Maluku dan pulau-pulau bagian luar lainnya, hal ini akan jauh lebih merugikan. Saya kira Indonesia sebenarnya “membayar” keamanan dengan harga yang pantas, meskipun sebaiknya dapat memperolehnya dengan cara yang lebih murah apabila Indonesia lebih efisien.¹²⁸

232. Pada bulan Februari 1976, bertentangan dengan [opini] Menteri Inggris, Lord Goronwy-Roberts, Departemen Luar Negeri mengusulkan pertemuan dengan José Ramos-Horta:

Adalah kebijakan HMG untuk sedapat mungkin menghindari keterlibatan dalam isu Timor. Peranan kami di PBB terutama untuk menegaskan kembali dukungan kami terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Pada akhir November kami memutuskan untuk tidak mengakui UDI Fretilin. Menerima kunjungan Ramos-Horta berarti (a) Inggris menunjukkan perhatian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya; (b) memberi semacam pengakuan pada eksistensi “pemerintahan” Fretilin lebih tinggi daripada sebelumnya; (c) akan berpotensi merusak hubungan kami dengan Indonesia – hubungan yang telah cukup tegang karena dukungan kami terhadap resolusi Dewan Keamanan yang baru-baru ini.¹²⁹

233. Pada waktu yang sama, para wakil Inggris mendukung aspek-aspek kampanye Indonesia, dengan cara mengadakan pertemuan dengan dan memberi saran kepada para pejabat Indonesia tentang penanganan persoalan ini. Duta Besar Ford melaporkan pada Januari 1976:

Saya memberitahu mereka (para pejabat Indonesia) bahwa kami telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia di PBB dan saya yakin kami telah berhasil mengatur meredakan pembicaraan tentang persoalan Timor di New York.¹³⁰

234. Berita kawat tersebut berlanjut dengan melaporkan saran Duta Besar, tentang bagaimana menangani laporan-laporan kekejaman yang muncul akibat invasi Indonesia. Berita-berita kawat lainnya mengecam tindakan tak pantas dan kaku yang dilakukan Indonesia. Maka bukan berdasarkan keprihatinan terhadap Timor, tetapi karena inkompetensi semacam itulah yang membuat Inggris dan negara-negara lain lebih sulit membela Indonesia.

235. Berdasarkan kebijakan *low-profile*-nya, pemerintah Inggris bersikap *abstain* terhadap semua resolusi Majelis Umum mengenai masalah Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1982. Inggris mendukung Resolusi 384 (1975) dan 389 (1976) Dewan Keamanan PBB, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri Timor-Leste dan meminta Indonesia menarik pasukannya. Pada tanggal 22 April 1976 wakil Inggris, Murray, memberitahu Dewan Keamanan, bahwa Inggris menyatakan setuju terhadap Resolusi 389 “karena kami sangat menganggap penting prinsip penentuan nasib sendiri.”¹³¹ Ia juga menyatakan, bahwa Inggris tidak menganggap tindakan penentuan nasib sendiri telah dilakukan di Timor-Leste, karena tidak terpenuhinya tiga syarat penting: perdamaian dan ketertiban, ketiadaan tekanan dari pasukan asing, dan tata cara yang tepat.

236. Sejalan dengan kebijakan ini, Inggris tidak mengakui “tindakan penentuan nasib sendiri” yang diatur Indonesia, dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Dili pada tanggal 31 Mei 1976. Kemungkinan diundang ke Dili untuk menghadiri acara tersebut menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat di antara para diplomat negara-negara Barat di Jakarta, yang enggan mengakui apa yang mereka ketahui sebagai proses palsu. Seorang pejabat dari *Foreign Office* menulis:

Tujuan Indonesia jelas memperoleh lapisan penghormatan yang tipis atas pengambilalihan Timor-Timur secara cepat, dengan menghubungkan pihak asing yang terkemuka pada “tindakan pilihan”.¹³²

237. Agar tidak mengecewakan pemerintah Indonesia, Duta Besar Ford memilih memberitahu para pejabat mereka, bahwa ia ada acara lain hari itu. Ketika pemerintah Indonesia mengirim undangan lain yang meminta peran sertanya dalam suatu misi untuk mengesahkan dukungan rakyat bagi petisi integrasi tersebut, Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris, Anthony Crosland, menambahkan alasan lain untuk menjauhkan Inggris dari hubungan apa pun dengan proses tersebut:

Karena alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan kami di Kepulauan Falkland, Belize, dan Gibraltar, kami menekankan pentingnya mempertahankan prinsip keterlibatan PBB dalam penegakan penentuan nasib sendiri. Kami sangat terdorong, karenanya, untuk meminta anda menolak undangan tersebut.¹³³

238. Pemerintah Inggris menegaskan kembali pengakuannya atas hak penentuan nasib sendiri Timor dalam beberapa kesempatan. Dalam pernyataannya kepada Komite Keempat Majelis Umum pada tahun 1982, wakil Inggris menegaskan dukungan pemerintahnya bagi prinsip tersebut, dan kemudian menyatakan bahwa Portugal dan Indonesia “sendiri dapat menyelesaikan permasalahan ini” dan bahwa Inggris, sebagai teman kedua negara tersebut, berharap hal ini dapat dilaksanakan sesuai kehendak rakyat Timor-Leste.¹³⁴ Pada tahun 1992 Pemerintah Inggris mengulangi komitmen ini dalam konteks usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk penyelesaian masalah ini. Baroness Trumpington mengatakan kepada *House of Lords* 16 Juli 1992:

*Kerajaan Inggris belum mengakui aneksasi atas Timor Timur, begitu pula masyarakatnya. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah mengakuinya. Kami sangat yakin bahwa masa depan Timor-Timur paling baik diselesaikan melalui hubungan bilateral antara pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Portugal dan Indonesia. Usaha-usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk mempertemukan mereka dengan tujuan mencapai penyelesaian, berhak menerima dan mendapat dukungan kita.*¹³⁵

239. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah Inggris memisahkan masalah Timor dari hubungan bilateralnya dengan Indonesia, sambil tetap membiarkan terbukanya kemungkinan penentuan nasib sendiri, bilamana kesempatan timbul. Inggris mempertahankan bantuan penting dan program kerja sama militer dengan Indonesia selama pendudukan Indonesia atas Timor-Timur. Pemerintah Inggris mengungkapkan kepeduliannya atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, antara lain pada waktu pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, tetapi berpendapat bahwa dialog akan menghasilkan lebih dari sekedar mengambil “langkah-langkah mudah, seperti menghapus bantuan.”¹³⁶ Seruan untuk memasukkan situasi hak asasi manusia di

Indonesia dan Timor-Leste, dalam agenda konsorsium bantuan tersebut, yakni *Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)*, ditolak.

240. Indonesia hanya memiliki industri senjata yang kecil dan harus mengimpor sebagian besar peralatan militernya. Inggris menjadi pemasok utama senjata selama pendudukan Timor-Leste, dan dalam periode 1994-2004 sebagian besar peralatan militer Indonesia datang dari Inggris.¹³⁷ Sebagian besar perdagangan ini dilaksanakan setelah perlombaan senjata internasional yang berkaitan dengan Perang Dingin berakhir. Pemerintah Inggris menyetujui izin ekspor bagi perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjual macam-macam senjata ke Indonesia, antara lain pesawat tempur dan kapal perang, kendaraan bersenjata, senapan kaliber besar dan kecil, amunisi, bom, roket, misil, sarana pengendali kerusakan, dan peralatan untuk pelatihan militer. Para pejabat senior militer Indonesia juga dilatih di lembaga-lembaga militer Inggris.

241. Pemerintah Inggris mempertahankan hubungan militer dengan Indonesia. Baroness Trumpington of Sandwich mengatakan kepada House of Lords pada tahun 1992, bahwa Indonesia berhak mempertahankan kemerdekaannya; bahwa pelatihan militer oleh Inggris meningkatkan penghormatan bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia; dan bahwa pengajuan izin ekspor peralatan militer akan ditolak, apabila diduga peralatan militer tersebut digunakan untuk tindakan represi. Baroness Trumpington of Sandwich menyatakan:

*Kami tidak percaya bahwa peralatan militer Inggris yang pernah dijual kepada Indonesia telah dipakai untuk melawan rakyat Timor-Timur.*¹³⁸

242. Atase Militer Kedutaan Besar Indonesia di London mengakui pada tahun 1999, bahwa kendaraan bersenjata Saracen dan Saladin buatan Inggris digunakan di Timor-Leste.¹ Kelompok perlawanan Timor menyatakan, bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan pesawat penyerang Hawk yang dipasok Inggris, khususnya pada puncak peperangan pada tahun 1978-1979. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyatakan kepada Komisi pada bulan Juli 2003, bahwa delapan pesawat Hawk dipasok kepada Indonesia pada tahun 1978; tetapi pihak kedutaan mengatakan, bahwa pesawat-pesawat tersebut adalah model-model yang lebih tua, yang hanya sesuai untuk pelatihan bukannya pertempuran udara ke darat. Baik pemerintah Inggris maupun British Aerospace (BAe) menyangkal penggunaan pesawat-pesawat tersebut untuk kegiatan militer membasmi kelompok perlawanan.² Masalah ini menimbulkan kontroversi di Inggris, khususnya setelah pemerintah Inggris mengizinkan penjualan lebih lanjut pada tahun 1990an. (Lihat seksi 7.6.2 dalam bab ini mengenai masyarakat madani Internasional).

243. Apakah peralatan militer buatan Inggris digunakan dalam pelanggaran tertentu di Timor-Leste atau tidak, pemberian bantuan militer ini membantu Indonesia meningkatkan kemampuan militernya, dan memberikan kesempatan bagi pasukan bersenjata Indonesia untuk menggunakan peralatan lain di Timor-Leste. Lebih penting lagi kebijakan bantuan militer bagi Indonesia oleh kekuatan Barat utama dan anggota Dewan Keamanan, menjadi tanda dukungan politik yang mendasar bagi pihak penyerang dalam konflik ini, dan menyakitkan serta membingungkan orang Timor yang mengetahui dukungan yang diutarakan Inggris bagi penentuan nasib sendiri. Pada bulan Mei 1976 Duta Besar Inggris untuk Jakarta saat itu, John Ford, berpendapat, bahwa Timor-Leste terlalu terbelakang untuk menentukan nasib sendiri gaya Barat. Masyarakat Timor-Leste berhak mempertanyakan keberadaban Inggris dalam dukungan langsung atau tidak langsung terhadap agresi Indonesia itu.¹³⁹

¹ 29 Januari 1999. Mark Thomas Show, Channel 4. Hendro Subroto melaporkan bahwa Ferret Mk.2 Scout cars, VF 603 Saracen armoured personnel carriers dan kendaraan VF 601 Saladin (lengkap dengan senapan 76 mm) digunakan pada invasi Indonesia tahun 1975. *Eyewitness to Integration of East Timor*, Jakarta, 1997.

² Desember 1995, kedutaan besar Selandia Baru di Jakarta melaporkan tuntutan bahwa pesawat tempur Hawks digunakan untuk serangan pemboman terhadap Fretilin awal 1995. Atase Militer Inggris dan teknisi yang membantu merawat pesawat tersebut memeriksa buku log mencari bukti bahwa terjadinya pemboman tetapi hasilnya negatif. NZ...OIA Material, Volume 4, 13 Desember 1995.

244. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Departemen Luar Negeri, Robin Cook, pemerintahan Partai Buruh Inggris sedikit memperbaiki tindakannya, dengan mendukung secara aktif perundingan yang mencapai puncaknya pada tindakan penentuan nasib sendiri Timor-Leste pada bulan Agustus 1999. Jamsheed Marker, Wakil Pribadi Sekretaris Jendral untuk Timor-Leste, menyampaikan penghargaan kepada Duta Besar Inggris untuk PBB, Stewart Eldon, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Robin Christopher, atas kontribusi mereka bagi kelompok inti negara-negara yang bekerja sama dengan proses PBB. Duta Besar Christopher menampung Xanana Gusmão di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta setelah ia dibebaskan dari tahanan pada bulan September 1999. Baik sebagai Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris maupun sebagai wakil Uni Eropa, Robin Cook berperan dalam keputusan yang diambil pada pertemuan APEC di Auckland tanggal 9 September 1999, tentang mendesaknyanya keberadaan pasukan internasional untuk mengembalikan ketenteraman di Timor setelah pemungutan suara. Pada tanggal 11 September, Jeremy Greenstock, wakil Inggris di Dewan Keamanan, mengunjungi Timor sebagai bagian dari misi Dewan Keamanan yang mendahului pasukan internasional, dan menggambarkan Dili sebagai “neraka di bumi”. Inggris mengikutkan pasukan Gurkha dan mendanai pasukan Interfet.

3.6 Amerika Serikat (AS)

245. Amerika Serikat, yang dahulu juga wilayah jajahan, adalah arsitek utama dan salah satu negara pendiri PBB pada tahun 1945, se usai Perang Dunia Kedua dan anggota tetap Dewan Keamanan dan negara adikuasa. Nama “Perserikatan Bangsa-Bangsa” digagas oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt. Pendahulunya, Liga Bangsa-Bangsa, didirikan dalam situasi yang sama setelah Perang Dunia Pertama (1914-18). Berdirinya lembaga tersebut bermula dari reaksi terkejut Presiden AS Woodrow Wilson, bahwa sebuah peradaban maju dapat terlibat dalam kekejaman dan kehancuran yang ekstrim yang mewarnai Perang Akbar tersebut. Dalam pidato Empat Belas Poinnya yang tersohor pada tahun 1918, Presiden Wilson memaparkan hal-hal yang ia anggap sebagai premis dasar bagi penyelesaian konflik secara damai. Selain pembentukan suatu perserikatan bangsa-bangsa, di dalamnya terkandung rumusan awal mengenai prinsip penentuan nasib sendiri yang kemudian diadopsi dalam Piagam PBB.¹

246. AS tidak mendukung Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-Negeri dan Bangsa-Bangsa Jajahan oleh PBB pada tahun 1960, tetapi kemudian mengubah pendiriannya pada tahun 1961, dan juga mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dengan hak untuk menentukan nasib sendiri.

247. Kebijakan AS semakin berkembang selama masa ini, sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran akan terjadinya pertikaian antara Portugal dengan Indonesia atas wilayah tersebut. Seperti Australia, AS pun khawatir jika penolakan Perdana Menteri Salazar terhadap tuntutan PBB untuk dekolonisasi akan memancing campur tangan Presiden Soekarno atas nama anti-imperialisme. Untuk menghindari terjadinya peperangan, Departemen Luar Negeri AS mengusulkan, agar AS mengajukan masalah tersebut kepada Komite Dekolonisasi PBB, dan menentang segala kemungkinan penggunaan kekuatan oleh Indonesia dengan alasan, bahwa kekuatan tidak dapat dibenarkan dalam hal kegagalan dekolonisasi Portugal dan akan merugikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen kebijakan Departemen Luar Negeri tahun 1963 menyatakan:

¹ Poin ke-5 dari pidato *Fourteen Points* Presiden Wilson mengacu kepada klaim kolonial dan perlunya “ketaatan yang kuat terhadap prinsip bahwa dalam menentukan semua masalah kedaulatan semacam itu, berbagai kepentingan dari penduduk setempat juga harus dipikirkan secara seimbang”. Poin-poin yang lain mencakup perlunya pengurangan persenjataan oleh negara-negara “sampai pada titik terendah yang memungkinkan bagi keamanan dalam negeri”.

Satu kegagalan tidak dapat membenarkan kegagalan yang lain...Kita jangan memandang tindakan Indonesia semacam itu sebagai babak kedua dalam sebuah drama yang dimulai dengan Goa dan akan berakhir dengan kematian PBB... Kita tidak dapat membiarkan upaya apa pun untuk menguasai wilayah dengan menggunakan kekuatan. Tindakan demikian akan menjadi suatu pelanggaran terhadap berbagai kewajiban dalam Piagam PBB yang telah disetujui oleh Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kita harus menentang Indonesia secara diplomatik dan di dalam PBB.¹⁴⁰

248. Departemen Luar Negeri juga mengemukakan pandangan, bahwa Timor Portugis tidak mampu menjalankan penentuan nasib sendiri dan harus bergabung dengan Indonesia:

Kita dan Portugis harus mengakui, bahwa penentuan nasib sendiri untuk Timor Portugis tidak ada artinya untuk jangka waktu yang tidak menentu ke depan... Secara realistis, hanya satu masa depan yang mungkin bagi wilayah itu, yaitu sebagai bagian dari Indonesia.¹⁴¹

Garis-garis besar kebijakan ini tidak sampai perlu dilaksanakan, karena pertikaian yang telah diperkirakan ternyata tidak terjadi. Analisis pesimistik Departemen Luar Negeri AS mengenai terbatasnya pilihan bagi Timor pada waktu itu dapat dipahami, melihat penolakan rezim Salazar mempersiapkan wilayah tersebut untuk merdeka. Namun demikian ketika isu tersebut kembali mengemuka satu dekade kemudian, pandangan bahwa satu-satunya pilihan bagi Timor adalah berintegrasi dengan Indonesia, bersama dengan faktor-faktor Perang Dingin, menjadi penentu kebijakan dominan yang mengalahkan semua pertimbangan lain. Berbagai rekomendasi lain yang digagas pada tahun 1960-an, secara efektif diabaikan sampai berakhirnya Perang Dingin di akhir tahun 1980-an.

249. Gary Gray, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, memberikan kesaksian kepada Komisi, bahwa kebijakan AS mengenai Timor-Leste sejak tahun 1974 secara signifikan dibentuk oleh situasi global dan regional masa itu, dan oleh keinginan pihak Indonesia dan AS untuk memperkuat hubungan mereka, karena semakin meluasnya pengaruh komunis di kawasan Indocina. Ia mengatakan:

Seseorang dapat melihat tahun 1975 sebagai puncak kekuasaan komunis di dunia, dan persepsi ancaman bagi AS dan ancaman bagi apa yang pada waktu itu disebut dunia bebas [free world]...rejim-rejim komunis didirikan di Laos, Kamboja dan Vietnam pada bulan Maret dan April 1975, pemberontakan aktif komunis masih mewabah di Thailand dan Malaysia, dan konsep adanya ancaman komunis besar-besaran terhadap Asia Tenggara dan teori domino masih tetap diyakini. Pada waktu yang bersamaan terjadi kesepakatan yang kuat di Washington, bahwa Indonesia sebagai pengimbang anti-komunis sangat penting untuk melawan ekspansi komunis di Asia, baik di kawasan tersebut maupun di dalam Indonesia sendiri.¹⁴²

250. Hubungan saling menguntungkan bagi kepentingan masing-masing negara ini sudah terjalin dengan baik, sejak awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan ditekankan di tingkat kepemimpinan tertinggi. Hal ini mencakup dukungan AS untuk pengambilalihan Irian Barat oleh

Indonesia dan “Tindakan Pilihan Bebas” di sana pada tahun 1969.¹ Dalam sebuah memo kepada Presiden Gerald Ford pada bulan September 1974, Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger, merekomendasikan agar ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik “untuk meyakinkan Pemerintah Soeharto, bahwa Anda menganggap Indonesia sangat penting sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Timur, dan bahwa Anda berniat untuk terus memberikan bantuan ekonomi dan militer AS untuk Indonesia”.¹⁴³ Pengarahan tersebut selanjutnya menggariskan “pentingnya Indonesia secara strategis bagi kita” dalam arti geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam dan peran konstruktif di kawasan, baik di Vietnam maupun di ASEAN sebagai penyeimbang tekanan-tekanan dari Uni Soviet dan Cina. Sementara itu Presiden Soeharto menginginkan Menteri Luar Negerinya untuk bertemu dengan Presiden AS yang baru, agar menyampaikan kepadanya harapan Presiden Soeharto untuk membangun hubungan personal yang akrab, mengundangnya untuk mengunjungi Indonesia dan memberikan bantuan militer dan ekonomi. Kedua presiden tersebut bertemu dua kali pada tahun 1975: pada bulan Juli ketika Presiden Soeharto mengunjungi AS, dan pada bulan Desember ketika Presiden Ford mengunjungi Indonesia.²

251. Pemerintah AS mengetahui rencana-rencana Indonesia untuk memasukkan Timor Timur ke dalam wilayahnya. Setidaknya sejak bulan Februari 1975 Pemerintah AS juga mengetahui, bahwa ada kemungkinan digunakannya kekuatan, dan hal ini berarti akan melibatkan penggunaan perlengkapan militer yang dipasok oleh AS. Sebagai contoh, para pejabat AS sepakat, bahwa latihan militer gabungan Indonesia yang dilaksanakan di Lampung, Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Februari 1975, hampir pasti merupakan bagian dari persiapan untuk menguasai Timor. Mengomentari latihan tersebut, konsulat AS di Surabaya menulis:

Saya dan atase politik Zingsheim masing-masing terkesima dengan kesamaan kondisi lapangan dan gaya latihan ini, dan dengan yang akan dilibatkan dalam operasi Indonesia untuk menguasai Dili. Latihan itu meliputi pengepungan vertikal landasan pacu Branti, serangan amfibi terhadap daerah pantai terdekat, dan gempuran dari laut dan udara... dan pengerahan pasukan payung di wilayah musuh.³

252. Indonesia pada waktu itu menyangkal, bahwa latihan itu ada hubungannya dengan Timor; tetapi invasi ke Dili sepuluh bulan kemudian mengikuti pola yang dipaparkan di atas. Dalam dua kesempatan tersebut, gempuran terhadap garis pantai dilakukan dengan menggunakan kapal perang yang dipasok AS, KRI Martadinata. Hubungan kawat antara para

¹ Kedutaan AS di Jakarta menyatakan pada bulan Juli 1969: “Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat terjadi seperti sebuah cerita tragedi Yunani, akhirnya sudah diperkirakan. Tokoh jahat yang utama, Pemerintah Indonesia, tidak dan tidak akan pernah mengizinkan penyelesaian lain selain memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Kegiatan penentangan kemungkinan meningkat, tetapi Angkatan Bersenjata Indonesia akan mampu membendung, dan jika perlu, memberantasnya.” Presiden Nixon berkunjung ke Indonesia pada waktu Penentuan Pendapat Rakyat baru saja selesai. Penasihat Keamanan Nasionalnya, Henry Kissinger, mengatakan kepadanya: “Anda harus memberitahu (Soeharto) bahwa kami memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat”. Brad Simpson (ed.), *Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"*, dikirim 9 Juli 2004, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/index.htm>, pada July 2005. Dr Kissinger menjadi direktur dan pemegang saham di Perusahaan tambang emas dan tembaga AS Freeport McMoran setelah perusahaan itu memenangi konsesi di Irian Barat pada tahun 1967.

² Diklaim bahwa faktor penting dalam keputusan AS untuk mendukung pengambilalihan Timor oleh Indonesia adalah jaminan, bahwa selat laut dalam antara Timor dan Wetar tetap berada di tangan negara sahabat, karena selat tersebut dapat digunakan untuk jalur lintas tanpa hambatan antara Samudera Pasifik dan Hindia bagi kapal-kapal selam nuklir AS. Lihat Michael McGuire *The Geopolitical Importance of Strategic Waterways in the Asian-Pacific Region*, Orbis, Vol.19, No.3, Fall 1975, pp 1058-76 and Michael Richardson *Jakarta rules the Way: why Indonesian goodwill is vital to America's Indian Ocean submarine force*, *The Age*, 4 Agustus 1976. CAVR belum bisa memperoleh kepastian mengenai klaim ini. Namun demikian, jelas bahwa AS khawatir dukungan Pemerintah Soeharto untuk “prinsip kepulauan” dalam berbagai negosiasi mengenai hukum laut akan membatasi transit AS melalui kepulauan tersebut. Lihat memo Sekretaris Negara H. Kissinger untuk Presiden Ford, 21 November 1975. Dokumen 124 Dokumen Terdeklasifikasi National Security Archives.(NSA)

³ Konsulat AS Surabaya, 20 Februari 1975. Dokumen 23 NSA. Kapal-kapal digunakan dalam latihan dilabuhkan di Surabaya dan pasukan tentara berasal dari Malang di Jawa Timur

pejabat Australia dan AS pada waktu itu mengungkapkan kekhawatiran, bahwa perebutan Timor Timur dengan kekuatan yang menggunakan peralatan AS dan Australia akan merusak hubungan dengan Indonesia.¹⁴⁴

253. Pada masa itu juga, pemimpin oposisi Selandia Baru, Robert Muldoon, berkunjung ke Jakarta, dan diberi penjelasan mengenai Timor oleh para pemimpin Indonesia. Kedutaan AS melaporkan ke Washington:

Sikap yang diambil oleh Suharto dan Malik dengan Muldoon memperkuat dugaan, bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memasukkan Timor Timur ke dalam wilayahnya, meletakkan dasar politik untuk suatu pengambilalihan, dan mengharapkan bahwa negara-negara sahabat akan menemukan cara untuk tidak menentang tindakan ini.¹

254. Menanggapi penyelidikan Dewan Keamanan Nasional AS pada bulan Maret 1975, mengenai kebijakan yang akan diambil jika Indonesia menggunakan kekuatan di Timor Timur, Menteri Luar Negeri Kissinger menyetujui sebuah kebijakan non-aksi. Penyelidikan tersebut juga mencakup sebuah rekomendasi dari Duta Besar AS untuk Indonesia, David Newsom, yang mendukung non-aksi:

Duta Besar Newsom telah merekomendasikan sebuah kebijakan umum untuk tidak bertindak. Ia memberi alasan, bahwa kita memiliki kepentingan yang besar di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan di Timor Timur. Jika kita mencoba untuk membujuk Indonesia untuk tidak melakukan apa yang Suharto anggap sebagai penggunaan kekuatan yang perlu, hal ini bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan besar dalam hubungan kita.¹⁴⁵

255. Kebijakan ini diterapkan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Ford-Soeharto di Camp David pada tanggal 5 Juli 1975. Menteri Luar Negeri Kissinger tidak menyinggung Timor Portugis, dalam arahan yang diberikannya untuk Presiden Ford sebelum pertemuan tersebut, dan AS tidak mengemukakan isu tersebut atau memperingatkan Indonesia, tentang penggunaan kekuatan atau peralatan AS selama pertemuan itu, meskipun Presiden Soeharto memberikan kesempatan ketika ia dengan sukarela mengatakan, bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan. Sebagai tanggapan atas penjelasan Presiden Soeharto mengenai isu tersebut, Presiden AS membatasi diri untuk bertanya, apakah Portugal telah menentukan tanggal bagi rakyat Timor Timur untuk memilih. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Presiden AS mengumumkan paket bantuan militer untuk Indonesia.

256. Para pejabat AS menyampaikan kepada Indonesia melalui jalur-jalur diplomatik, bahwa AS memilih integrasi secara damai melalui penentuan nasib sendiri dan mengemukakan kekhawatirannya, bahwa penggunaan kekuatan dan peralatan militer AS akan menimbulkan

¹ Kedutaan AS di Jakarta, 25 Februari 1975. Dokumen 28 NSA. Berdasarkan komunikasi AS: "Adam Malik mengatakan kepada Muldoon bahwa pemerintahan Timor Portugis berpengaruh komunis dan bahwa orang-orang Timor prokemerdekaan telah menawarkan basis-basis kepada Uni Sovyet dan RRC sebagai balasan atas dukungan untuk gerakan kemerdekaan. Malik mengatakan bahwa para pengungsi melintasi perbatasan ke wilayah Indonesia untuk menghindari teror oleh kaum kiri di Timor Portugis... Soeharto mengatakan bahwa, karena situasi serius di Timor, Pemerintah Indonesia berharap negara-negara sahabat seperti Australia dan Selandia Baru 'akan memahami' posisi Indonesia, yang diartikan oleh pemerintah Selandia Baru sebagai permintaan agar Selandia Baru 'memahami' kemungkinan pengambilalihan Timor Portugis oleh Indonesia."

reaksi menentang di Kongres dan merugikan hubungan kedua negara.¹ Namun demikian kebijakan resmi adalah untuk tetap tampak tidak terlibat dan tidak terlalu peduli. Ketika diberitahu pada tanggal 8 Oktober 1975, bahwa Indonesia telah memulai operasi militer di Timor, Menteri Luar Negeri Kissinger menanggapi:

*Saya berasumsi Anda akan tetap menutup mulut mengenai hal ini...mengenai Indonesia. Juga di PBB...pastikan bahwa Utusan AS tidak akan membuat pernyataan apa pun.*¹⁴⁶

257. Pada tanggal 5 Desember 1975, menanggapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Indonesia pra-invasi, Presiden Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste yang baru diproklamasikan, Xavier do Amaral, mengirim sebuah telegram kilat kepada Presiden AS meminta AS untuk campur tangan:

Pemerintah saya percaya suara AS dapat mencegah sebuah perang yang akan menjadi perang yang panjang, berdarah dan menghancurkan... Demi perdamaian kami sangat memohon Anda untuk campur tangan.

258. Pemerintah AS tidak menghiraukan permohonan tersebut. Catatan Dewan Keamanan Nasional mengenai korespondensi tersebut menunjukkan, bahwa pada tanggal 15 Desember surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas dengan sebuah catatan:

Tidak perlu ada tindakan. Tidak perlu dibalas – ini merupakan masalah sensitif.¹⁴⁷

259. Presiden Ford dan Soeharto kembali bertemu di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1975, sehari sebelum invasi besar-besaran Indonesia ke Timor Leste. Menurut catatan Departemen Luar Negeri AS, pertemuan tersebut terjadi pada pukul 8 pagi, dan delegasi Amerika berangkat menuju pelabuhan udara pada pukul 10:30 pagi. Juga hadir pada pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Kissinger, Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Negara Sudharmono, Duta Besar Newsom dan seorang juru bahasa. Sepanjang pertemuan mereka, yang terutama berpusat pada pembahasan mengenai Indocina dan membendung komunisme, Presiden Soeharto mengemukakan situasi di Timor Timur, yang ia katakan sebagai ancaman bagi keamanan Indonesia dan kawasan setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin.

260. Kementerian Luar Negeri mencatat mengenai perbincangan tersebut, bahwa Presiden Indonesia mengatakan kepada delegasi Amerika:

Kami meminta pengertian Anda jika kami menganggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis.

261. Presiden Ford menjawab:

Kami akan mengerti dan tidak akan menekan Anda dalam hal ini. Kami mengerti masalah yang Anda hadapi dan niat yang Anda miliki.

¹ Duta Besar Newsom mengatakan kepada Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), Letnan Jenderal Yoga Sugama, pada tanggal 20 Agustus 1975: "Pemerintahan Indonesia harus waspada jika peralatan AS digunakan dalam pendudukan paksa Timor Portugis, hal ini dapat mengakibatkan diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri yang dapat membahayakan kelangsungan program bantuan militer. Oleh karena itu, jalan keluar terbaik adalah memasukkan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia secara damai." Kedutaan AS Jakarta, 21 Agustus 1975. Dokumen 73 NSA. Pada bulan Oktober, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Ford, Letnan Jenderal Brent Scowcroft, disarankan oleh stafnya untuk memperingatkan Ali Moertopo mengenai komplikasi politik yang akan terjadi jika peralatan AS digunakan. Dokumen 104 NSA.

262. Delegasi Amerika mengatakan, bahwa penggunaan persenjataan buatan AS dapat menimbulkan masalah, dan Menteri Luar Negeri Kissinger menambahkan:

Tergantung bagaimana kami memahaminya: apakah ini untuk membela diri atau operasi asing. Penting, bahwa apa pun yang Anda akan lakukan dapat cepat selesai. Kami dapat mempengaruhi reaksi di Amerika jika, apa pun yang akan terjadi, terjadilah setelah kami kembali. Dengan demikian akan lebih sedikit kesempatan bagi orang-orang berbicara secara tidak resmi. Presiden akan kembali pada hari Senin pukul 2:00 sore waktu Jakarta. Kami memahami masalah Anda, dan pentingnya untuk bergerak cepat. - Tetapi saya hanya mengatakan, bahwa akan lebih baik jika hal itu dilakukan setelah kami kembali.

263. Menteri Luar Negeri Kissinger menanyakan sebuah pertanyaan terakhir:

Apakah Anda mengantisipasi perang gerilya yang lama di sana?

264. Presiden Soeharto menjawab:

Kemungkinan akan ada perang gerilya kecil¹

265. Kedua pihak menghindari membuat pernyataan eksplisit mengenai intervensi militer, tetapi jelas dari pertemuan tersebut dan berbagai pernyataan mengenai penggunaan persenjataan AS dan perang gerilya, bahwa hal ini diketahui dan disetujui oleh Presiden AS. Dalam memberikan restunya, ia tidak menyebutkan apa pun mengenai hak penentuan nasib sendiri atau dampak kemanusiaan dari perang. Setuju dengan penggunaan kekuatan, juga berarti tidak menghiraukan nasihat dari para pejabat mengenai ketidak-sahan penggunaan persenjataan AS, karena sebagian besar peralatan angkatan bersenjata Indonesia adalah buatan Amerika.² Indonesia tidak menghiraukan permintaan untuk menunggu: invasi mulai dilancarkan dini hari pada hari Minggu, 7 Desember, lebih dari 24 jam sebelum jadwal waktu tibanya Presiden Ford di AS.

266. Dalam ulasan Gedung Putih mengenai kunjungan pada tanggal 10 Desember 1975, Presiden Ford dan Menlu Kissinger tidak membuat pernyataan apa pun mengenai Timor. Presiden Ford mengatakan:

Penting untuk pergi ke sana [Indonesia] setelah kejadian di Vietnam, untuk menunjukkan bahwa kita masih menjadi sebuah kekuatan Asia. Saya terkesan dengan Suharto, yang mencoba untuk mempersatukan negaranya dan menjalankan suatu pemerintahan yang layak, dan memperjuangkan anti-komunisme di sana.¹⁴⁸

¹ Kedutaan AS Jakarta, 6 Desember 1975. Dokumen 148 NSA. Pada tahun 1977, Pemerintahan Carter disarankan untuk menolak permintaan dari Anggota Kongres Donald Fraser untuk salinan laporan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah hak istimewa dan akan merugikan hubungan luar negeri AS jika dipublikasikan. Dokumen 405 NSA.

² Sebuah memorandum dari Menteri Luar Negeri Kissinger untuk Presiden Ford pada tanggal 21 November 1975 menyatakan: "Penggunaan persenjataan yang dipasok AS oleh Indonesia dalam sebuah pendudukan terbuka terhadap wilayah ini, akan bertentangan dengan undang-undang AS." Dokumen 124 NSA.

267. Pada tanggal 13 Desember, ia mengirim cinderamata pribadi berupa bola-bola golf kepada Presiden Indonesia.¹

268. AS memberi suara yang mendukung Resolusi 384 Dewan Keamanan PBB yang disepakati secara bulat pada tanggal 22 Desember 1975, yang menegaskan hak penentuan nasib sendiri dan menyerukan kepada Indonesia untuk menarik mundur pasukannya. AS tetap bersikap hati-hati selama sesi tersebut, tetapi mencoba untuk membantu Indonesia di belakang layar tanpa terlalu menyinggung sekutunya di NATO, Portugal, yang dibutuhkan oleh AS untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Azores, dan dukungan untuk berbagai isu lain di PBB. Sementara turut mendorong “sebuah penerimaan di PBB agar Jakarta dapat menyelamatkan muka”, AS juga menawarkan untuk membantu Portugal mengamankan pembebasan 23 tentara yang ditawan di Timor Indonesia.² AS abstain dalam Resolusi 389 Dewan Keamanan (1976) yang disahkan pada tanggal 22 April 1976 karena, menurut wakil AS, resolusi tersebut gagal untuk mengakui “pernyataan penting yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia bahwa sejumlah kekuatan telah ditarik mundur, dan penarikan mundur tersebut terus berlangsung”. Ia mengatakan abstainnya AS jangan ditafsirkan, bahwa AS “tidak memberi dukungan terhadap hak rakyat Timor-Leste atau rakyat dimana pun di dunia atas hak-hak kesetaraan dan penentuan nasib sendiri”.¹⁴⁹ AS juga abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum mengenai isu tersebut, yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 1975, kemudian memberi suara menentang semua resolusi Majelis Umum berikutnya sampai tahun 1999.

269. Pemerintah Indonesia dan AS mengetahui, bahwa persenjataan AS digunakan dalam invasi terhadap Timor-Leste. Anggota Kongres Helen Meyner, menyampaikan kepada sebuah penyelidikan Kongres pada tahun 1977, bahwa Jenderal Moerdani membenarkan penggunaan peralatan AS:

*Ketika kami bertemu di Djakarta dengan beberapa perwira tinggi Indonesia...John Salzberg menanyakan kepada Jenderal Moerdani, apakah persenjataan AS telah digunakan pada tahun 1975. Ia mengatakan, “Tentu saja, ini satu-satunya persenjataan yang kami punya. Tentu saja persenjataan AS digunakan”.*¹⁵⁰

270. Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS diberitahu pada tanggal 12 Desember 1975, bahwa peralatan AS digunakan dalam invasi tersebut.¹⁵¹ Laporan kepada NSC menyatakan, bahwa peralatan yang dipasok AS meliputi berikut ini:

¹ Dewan Keamanan Nasional, 13 Desember 1975. Dokumen 168 NSA. Dr Kissinger selanjutnya membela kebijakan Pemerintahan Ford mengenai Timor-Leste. Dalam sebuah forum publik pada tahun 2001, ia mengatakan kepada aktivis orang Timor-Leste, Constancio Pinto: “Timor tidak pernah dibahas dengan kami ketika kami di Indonesia. Di pelabuhan udara ketika kami berangkat, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa mereka akan menduduki koloni Portugis di Timor. Bagi kami hal itu tidak tampak sebagai peristiwa yang sangat penting karena India menguasai koloni Portugis yaitu Goa sepuluh tahun sebelumnya dan bagi kami hal itu tampak sebagai proses lain dari dekolonisasi. Tidak seorang pun tahu bahkan secara samar-samar apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak seorang pun meminta pendapat kami, dan terus terang saya tidak tahu apa yang harus kami katakan jika ada yang menanyakan pendapat kami. Ini benar-benar disampaikan kepada kami ketika kami tengah beranjak pergi.” Slate, *Whopper of the Week: Henry Kissinger*, 7 Desember 2001.

² Dewan Keamanan Nasional, 19 Desember 1975. Dokumen 178 NSA. Duta Besar AS untuk PBB pada waktu itu, Daniel Patrick Moynihan, menulis: “Amerika berharap semuanya akan terjadi seperti yang terjadi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Departemen Luar Negeri ingin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa benar-benar terbukti tidak efektif dalam langkah apapun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melakukannya lumayan sukses.” *A Dangerous Place*, Little Brown, 1980, hal. 247.

- setidaknya sembilan kapal bekas angkatan laut AS, yang salah satunya, KRI Martadinata, terlibat dalam penggempuran pesisir sejak tanggal 22 November, dan ikut serta dalam gempuran laut selama satu jam yang mengawali serangan di Dili pada tanggal 7 Desember;
- 13 pesawat yang digunakan dalam serangan di Dili dan Baucau;
- perlengkapan yang digunakan oleh Brigade Lintas Udara ke-18, yang menerjunkan pasukan di atas Dili pada tanggal 7 Desember dan Brigade Lintas Udara ke-17, yang terlibat dalam penerjunan pasukan di Baucau pada tanggal 9 Desember; perlengkapan yang digunakan terdiri dari senapan, senapan mesin, peluncur granat, mortir, peluncur roket, parasut dan radio; para penerjun payung utama mereka adalah didikan AS.
- Sejumlah perlengkapan radio AS digunakan oleh pusat komunikasi di Atambua, Timor Indonesia, yang mengendalikan operasi Timor.

271. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa, di menurut pendapatnya, Amerika Serikat memiliki banyak hal yang harus dipertanggung-jawabkan. "AS ialah yang paling buruk. Paling buruk, karena ia satu-satunya kekuatan yang mampu mengatakan kepada Indonesia, setelah invasi, bukan hanya sebelum, tetapi juga sesudahnya: 'Jangan nakal, hentikan pembunuhan-pembunuhan ini', tetapi mereka tidak melakukan itu...dan mereka sebenarnya tahu, mana yang benar."¹⁵²

272. Kelompok-kelompok dalam Kongres AS secara aktif terus mengemukakan isu penggunaan peralatan militer pasukan AS oleh Indonesia. Menindak-lanjuti penyelidikan yang dilakukan oleh Senator Gary Hart pada bulan Desember 1975, Senator Hubert Humphrey dan Clifford Case membawa isu tersebut; dan serangkaian audiensi Kongres dilangsungkan pada tahun 1977 setelah Jimmy Carter mulai menjabat sebagai Presiden AS pada bulan Januari.

273. Para pejabat AS mengatakan kepada penyelidikan Kongres pada bulan Maret 1977, bahwa persenjataan AS digunakan selama invasi itu. Mereka juga bersaksi bahwa, sebagai tanggapan, Pemerintah "menangguhkan secara administratif" pemberian bantuan tambahan antara bulan Januari dan Juni 1976 "untuk memastikan, bahwa kita mematuhi statuta yang berlaku".-; Tetapi bahwa hanya beberapa anggota Kongres saja yang diberitahu secara pribadi, mengenai penangguhan dan keputusan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.¹⁵³

274. Tindakan ini, yang diambil atas arahan Menteri Luar Megeri Kissinger, terutama dirancang untuk memastikan kelanjutan dukungan militer AS pada Indonesia, dan bukan ketaatan secara hukum. Hal ini bukan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, pada praktiknya, tidak mengubah kenyataan tentang dukungan militer AS untuk agresi Indonesia.¹ Penyelidik diberitahu, bahwa peralatan militer yang telah disepakati terus dikirimkan; bahwa bantuan militer kembali diberikan pada akhir bulan Juni 1976, karena terdapat "penurunan tingkat kekerasan yang signifikan di Timor"; dan bahwa Kongres tetap mengizinkan bantuan militer untuk Indonesia, setelah gagalnya usul amandemen yang mendesak penghentian bantuan. Hubungan dengan Indonesia tidak terpengaruh, karena para pejabat di Jakarta tidak mengetahui tentang penangguhan, atau yakin bahwa penangguhan tersebut hanya disebabkan alasan "administratif". Brent Scowcroft diberi pengarahannya sebelum bertemu dengan Adam Malik, pada bulan Juni 1976:

¹ Dokumen 296 NSA. Bahkan apabila Kongres menghentikan bantuan militer, Pemerintahan telah berkomitmen untuk menemukan cara untuk mengakalinya dan mulai membuat rencana-rencana cadangan pada awal tahun 1976 untuk melanjutkan bantuan. Dokumen 235 NSA.

*Delegasi Indonesia belum mengemukakan tentang penanggungan kita terhadap pengiriman peralatan militer kepada mereka...Jika mereka menyinggung tentang hal itu, Anda dapat mengatakan, bahwa penanganan kami yang hati-hati mengenai masalah ini telah berhasil melumpuhkan para pengkritik di Kongres seperti Senator Humphrey, dan pada saat yang sama memungkinkan kami kembali melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Jakarta.*¹⁵⁴

275. Pada bulan Oktober 1976 Pemerintah AS membenarkan berlanjutnya penggunaan persenjataan AS di Timor-Leste:

Kami paham, bahwa Pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan ini telah berusaha menggunakan peralatan non-AS dalam operasi Timor. Sejumlah unit perlengkapan AS tidak lagi digunakan. Apapun indikasinya adalah, bahwa peralatan yang dipasok AS – terutama peralatan transportasi dan komunikasi – masih digunakan. Pemerintah Indonesia telah diperingati mengenai kekhawatiran kita akan hal tersebut.¹⁵⁵

276. Kerja sama militer terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan AS untuk Indonesia selama dua dekade berikutnya.¹

277. Pemerintah AS berikutnya melanjutkan kebijakan dasar mengenai Timor yang dibangun oleh Pemerintahan Ford-Kissinger. Hal ini dijelaskan kepada Audiensi Senat AS pada tahun 1992 dalam pernyataan berikut:

*Pada tahun 1976 para pembuat kebijakan AS memutuskan untuk menerima penggabungan Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia sebagai suatu fakta yang telah terjadi. Mereka memutuskan, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat atau dunia, yang dapat mengubah kenyataan itu. Oleh karena itu, menentang penggabungan Timor-Leste oleh Indonesia hanya akan memberi sedikit pengaruh pada situasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya membuat suatu kebijakan yang dilanjutkan secara konsisten dan bipartisan: Kami menerima pengambilalihan Timor-Leste oleh Indonesia tanpa mendesak dilakukannya suatu penentuan nasib sendiri secara sah. Jelas, sebuah proses demokratis dalam penentuan nasib sendiri akan lebih konsisten dengan nilai-nilai yang kita anut; tapi kenyataan yang ada pada tahun 1975 tidak memungkinkan alternatif tersebut. Menerima dimasukkannya Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia, merupakan satu-satunya pilihan yang realistis.*¹⁵⁶

278. Pemerintahan Carter (1977-1981) terus mengutamakan pentingnya Indonesia. Zbigniew Brzezinski, penasihat keamanan nasional Presiden Carter yang mendukung cara militer, mendukung mempererat hubungan kedua negara.¹⁵⁷ Kunjungan Wakil Presiden Walter Mondale

¹ Program Bantuan Militer (Military Assistance Programme, MAP) AS untuk Indonesia berakhir pada tahun 1978 tetapi dilanjutkan dengan program penjualan kredit militer luar negeri (Foreign Military Sales, FMS).

kepada Presiden Soeharto di Jakarta pada bulan Mei 1978, dan kunjungan berkala Jenderal Moerdani ke AS yang terus berlanjut, menghasilkan peningkatan kerja sama militer AS dengan Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Holbrooke merangkum, mengapa AS begitu positif mengenai Indonesia pada sebuah audiensi Kongres pada tahun 1981:

Situasi yang terjadi di Timor-Leste adalah satu dari sejumlah kekhawatiran Amerika Serikat yang sangat penting di Indonesia. Indonesia, dengan jumlah penduduk 150 juta jiwa, merupakan negara terbesar kelima di dunia, anggota Gerakan Non-Blok yang moderat, sebuah negara penghasil minyak yang penting – yang memainkan peran moderat dalam OPEC – serta memiliki posisi strategis, dengan laut yang digunakan untuk jalur lintas perdagangan yang luas, antara Samudera Pasifik dan Hindia. Presiden Suharto dan para pemimpin terkemuka Indonesia lainnya, telah secara terbuka menyerukan dibebaskannya para tahanan kita di Iran. Kedudukan Indonesia dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara – ASEAN – juga penting, dan telah memainkan peran sentral dalam mendukung Thailand dan mempertahankan keamanan Thailand, ketika terjadi aksi-aksi yang mengganggu keamanan oleh Vietnam di Indocina. Akhir kata, Indonesia telah memberikan perlakuan yang manusiawi bagi lebih dari 50.000 pengungsi Indocina dan mengambil inisiatif untuk menyediakan salah satu pulaunya sebagai pusat pemrosesan pengungsi ASEAN. Indonesia, tentunya, penting bagi para sekutu utama AS di kawasan tersebut, terutama bagi Jepang dan Australia. Kami sangat menghargai hubungan kerja sama kami dengan Indonesia.¹⁵⁸

279. Pemerintahan Carter menambahkan penekanan yang lebih kuat, pada hak-hak asasi dan kebutuhan kemanusiaan dalam kebijakan tentang Timor yang dirangkum di atas, dan hal ini dijalankan oleh pemerintah-pemerintah selanjutnya. Selama masa jabatannya, lembaga-lembaga internasional diizinkan untuk beroperasi di Timor-Leste, para pejabat AS diizinkan untuk bertemu dengan José Ramos-Horta, dan Laporan tahunan Departemen Luar Negeri tentang Praktik-Praktik Hak-hak Asasi Manusia, yang dimulai pada tahun 1977, sering menyebut tentang pelanggaran-pelanggaran di Timor Timur.

280. Namun demikian, pada saat yang sama, sebagian besar kematian yang terjadi di Timor-Leste terjadi pada periode ini. Jumlah tentara Indonesia semakin meningkat, dan perlawanan Timor hampir tertumpas seluruhnya.¹ Arnold Kohen memberi kesaksian kepada Komisi:

¹ Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Laksamana Sudomo, mengatakan kepada Duat Besar Masters pada bulan Juli 1978 bahwa Indonesia sudah menempatkan 29.000 personil militernya di Timor Leste. Dokumen 602 NSA. Jenderal Moerdani menyangkal pernyataan bahwa bom napalm dan herbisida digunakan di Timor selama periode ini. Laporan Kedutaan AS, 3 Januari 1978. Dokumen 502 NSA. Demikian pula para pejabat AS menyangkal pernyataan Fretilin, bahwa personil AS turut berpartisipasi dalam pertikaian militer di Timor selama periode ini. Menteri Luar Negeri Cyrus Vance, 7 Juli 1978. Dokumen 599 NSA. Detail yang berhubungan dengan klaim Fretilin ditemukan dalam Dokumen 578 dan 614 NSA.

Adalah salah kalau kita percaya, bahwa tragedi di Timor-Leste merupakan tanggung jawab eksklusif dari Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger. Pernah ada kesempatan untuk mengubah kebijakan Amerika terhadap pendudukan Indonesia atas Timor-Leste pada awal tahun 1977, ketika Presiden Jimmy Carter mengambil alih jabatan...dan menyerukan perhatian yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia dalam membuat berbagai kebijakan luar negeri AS...Harapan-harapan semacam ini dihancurkan.¹⁵⁹

281. Pemerintahan Carter juga gagal membahas isu mendasar tentang penentuan nasib sendiri. Pemerintahannya mengakui kedaulatan Indonesia, tidak menyinggung tentang penentuan nasib sendiri, dalam laporan hak-hak asasi manusia tahunannya, dan tidak mendukung berbagai resolusi PBB mengenai Timor.¹

282. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan peristiwa pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, meningkatlah berbagai tekanan kepada AS untuk memainkan peranannya yang lebih aktif dalam usaha mencari pemecahan. Sejumlah pertemuan dengan Portugal terjadi. Pada bulan Januari 1992, sekelompok tokoh politik dan akademik Portugis yang terkenal, dipimpin oleh Presiden Ramalho Eanes, menyampaikan surat terbuka, yang menggunakan kata-kata pedas, kepada Presiden George Bush yang mendakwa AS bertanggung jawab, dengan berdiam diri, atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di Timor-Leste.¹⁶⁰ Meskipun AS telah menolak resolusi Majelis Umum pada tahun 1982, yang meminta Sekretaris Jenderal untuk membuka konsultasi dengan semua pihak yang terkait langsung, AS sekarang dan pada tahun 1992 dan 1993, menyatakan dukungannya terhadap dorongan Sekretaris Jenderal untuk memulai pembahasan antara Portugal dan Indonesia mengenai isu tersebut, yang mendukung berbagai inisiatif yang disampaikan Portugal di Komisi Hak-hak Asasi Manusia.¹⁶¹

283. Duta Besar Barry, wakil pemerintahan baru Clinton di Indonesia, mengunjungi Timor-Leste pada tanggal 21-23 Februari 1993, untuk "mendapatkan gambaran mutakhir". Ia melaporkan, bahwa:

kehadiran militer yang represif dan meluas merupakan kendala utama pencapaian integrasi oleh pemerintah... Rakyat Timor tidak menyukai paternalisme, korupsi dan dominasi militer terhadap ekonomi setempat, dan juga kekejaman mereka...Penggambaran yang paling baik mengenai aspirasi rakyat Timor berasal dari seorang pastor Salesian, yang sangat memahami situasi di sana: "Mereka tidak ingin diganggu".

284. Duta Besar tersebut menutup dengan perkataan "integrasi tidak akan pernah bisa diterima, selama diminta dengan todongan senjata..." Akan tetapi tidak menganggap sebagai solusi, apa yang diajukan oleh Indonesia sendiri; baru belakangan, beberapa tahun kemudian:

Bahkan pun jika orang-orang Indonesia telah siap untuk memberi pilihan penentuan nasib sendiri (dan mereka tidak siap), Timor-Leste tidak dapat bertahan sebagai suatu entitas terpisah. Otonomi terdengar bagus, tetapi sulit untuk mewujudkannya dalam negara yang sangat sentralistik ini.¹⁶²

¹ Setelah setiap pemungutan suara di PBB, Duta Besar Indonesia untuk PBB menulis kepada Pemerintah Carter untuk mengemukakan "terima kasih yang tulus dan penghargaan untuk dukungan yang diberikan kepada posisi Indonesia". Lihat sebagai contoh, Dokumen 491 and 713 NSA.

285. Pemerintah Clinton secara aktif mendukung proses pada tahun 1999, termasuk melalui Dewan Keamanan. AS merupakan salah satu negara penyumbang terbesar terbentuknya UNAMET, dan Presiden Clinton, Menteri Luar Negeri Madeleine Albright, yang telah bertemu sebelumnya dengan Xanana Gusmão di Jakarta, dan Menteri Pertahanan William Cohen, masing-masing menekan rekan-rekan Indonesianya untuk membendung kekerasan yang mengancam jajak pendapat.¹ Menyambut hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999, Menteri Luar Negeri Albright mengatakan, bahwa AS akan terus menjadi pendukung kuat proses yang dibantu oleh PBB, untuk mengubah Timor-Leste menjadi sebuah negara merdeka.¹⁶³ Setelah kekerasan pecah, Presiden Clinton mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras pada tanggal 9 dan 10 September 1999, dengan menekankan perlunya kehadiran pasukan keamanan internasional di Timor-Leste dan dukungan AS untuk pasukan semacam itu, jika Indonesia tidak dapat memulihkan ketertiban. AS menempatkan 1.000 personil angkatan lautnya di perairan Timor, tetapi membatasi keterlibatan langsung dalam Interfet dengan membantu secara logistik, termasuk pengangkutan untuk pengerahan pasukan-pasukan lain yang berpartisipasi.

3.7 Jepang

286. Jepang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956. Jepang bukan anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi merupakan satu-satunya anggota non-permanen Asia Timur, ketika Dewan Keamanan memperdebatkan masalah Timor-Leste pada tahun 1975 dan 1976.

287. Pada tahun 1960 Jepang mendukung diterimanya Deklarasi Pemberian Kemerdekaan untuk Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan PBB dan prinsip-prinsip pelaporan atas koloni-koloni.¹⁶⁴ Meskipun demikian Jepang bersikap *abstain* terhadap Resolusi SU 1542 (XV) yang mencantumkan Timor Portugis sebagai sebuah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.

288. Menyusul invasi Indonesia, Jepang mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), yang disetujui dengan suara bulat pada tanggal 22 Desember 1975. Resolusi itu menguatkan hak rakyat Timor Timur yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri, menyesali campur tangan angkatan bersenjata Indonesia, dan menuntut Indonesia untuk segera mundur.

289. Meskipun demikian Jepang berusaha mempengaruhi dan melemahkan resolusi ini. Duta Besar Jepang untuk PBB pada saat itu, Shizuo Saito, pernah menulis:

Jepang selalu mengambil inisiatif aktif dan terdepan... (dan) terutama memberi masukan, agar maksud Indonesia untuk menarik tentara-tentaranya akan dihormati, dan agar kecaman tidak akan terlalu menyakitkan bagi Indonesia. Pemerintah-pemerintah lainnya berpihak pada posisi Jepang.¹⁶⁵

290. Peran Jepang dalam Dewan Keamanan menyangkut isu itu ditegaskan oleh José Ramos-Horta, yang mewakili Fretilin dalam pertemuan-pertemuan:

Selama semua debat Dewan Keamanan mengenai Timor-Timur pada tahun 1975 dan 1976, upaya-upaya delegasi Jepang untuk melunakkan kecaman terhadap Indonesia sangat mencolok.¹⁶⁶

¹ Kepala UNAMET, Ian Martin, menulis bahwa AS tidak menekan Jakarta untuk menerima penjaga perdamaian sebelum jajak pendapat apabila hal ini akan membahayakan proses tersebut dan ragu bahwa pengamanan dapat lebih diperkuat lagi. *Self-Determination in East Timor, The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, Lynne Rienner Publishers, London, hal. 33.

291. Resolusi 384 adalah satu-satunya resolusi PBB yang didukung oleh Jepang setelah invasi Indonesia. Jepang yang bersikap *abstain* dalam voting Resolusi Dewan Keamanan 389 pada bulan April 1976, menyatakan; Jepang percaya Dewan Keamanan harus mengakui, bahwa Indonesia sudah mulai menarik pasukan-pasukannya dari Timor-Leste, sesuai dengan permohonan dalam resolusi sebelumnya. Pada tanggal 15 April 1976, wakil Jepang, Kanazawa, berkata kepada Dewan Keamanan:

Walaupun tampak oleh kami, bahwa perdamaian dan ketertiban di wilayah Timor belum sepenuhnya pulih, kami menilai baik karena perjuangan bersenjata sekarang tampak lebih terbatas pada daerah-daerah terpencil di wilayah itu, dan bahwa kehidupan rakyat sedikit demi sedikit kembali normal.¹⁶⁷

292. Kanazawa menyambut pernyataan Indonesia kepada Dewan Keamanan, “bahwa para sukarelawan bersenjata sudah mulai meninggalkan wilayah Timor pada bulan Februari, dan bahwa proses penarikan diri diharapkan akan selesai dalam waktu singkat.”

293. Pernyataan Indonesia, bahwa invasi terdiri dari “para sukarelawan” tidak dapat lebih dipercaya dibanding dengan pernyataannya untuk mundur. Pada saat itu kedua pernyataan tersebut diketahui sebagai tidak benar. Atase Pertahanan Selandia Baru di Jakarta menasihati pemerintahnya pada bulan Januari 1976, bahwa pernyataan mengenai “sukarelawan” merupakan “rekaan konyol”, dan ia mengatakan:

Pengelakan dan kebenaran yang setengah-setengah merupakan ciptaan diplomatik yang diterima, tetapi kebohongan yang terang-terangan tidak mudah untuk dimaafkan.¹⁶⁸

294. Lapornya pada periode Januari-Maret 1976 tidak menyebutkan perihal penarikan diri, dan mengatakan bahwa “situasi militer masih tidak stabil, untuk memberi perintah tegas tentang penarikan tentara Indonesia dalam jumlah yang besar [dari Timor-Leste] ...”¹⁶⁹ Utusan PBB, Winspeare Guicciardi, juga bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan Indonesia. Dalam laporan keduanya mengenai Timor-Leste, yang ditulis tujuh bulan setelah invasi pada bulan Juni 1976, ia menulis bahwa, ketika dia mengangkat isu yang menyangkut Resolusi Dewan Keamanan 384 dan 389, Indonesia dengan mudahnya mengulangi pernyataan-pernyataan sebelumnya, bahwa penarikan “sukarelawan Indonesia” akan selesai dalam waktu singkat.¹⁷⁰ Dalam perkembangan selanjutnya, wakil Indonesia di PBB mengatakan kepada rekan-sesamanya bahwa, Indonesia harus menghormati keinginan Pemerintahan Timor Timur Sementara, yang tidak mengingini penarikan pasukan bersenjata, dan ia bertanya: “Bagaimana caranya Indonesia bisa ditarik mundur dari wilayah yang sudah digabungkan ke dalam Indonesia?”¹⁷¹

295. Dalam pernyataan-pernyataan lain kepada Dewan Keamanan, Kanazawa mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan meminta kelanjutan usaha-usaha untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban serta perpanjangan mandat Perwakilan Khusus. Walaupun positif, proposal-proposal ini telah pernah disetujui oleh Indonesia sebelumnya, dan tidak ada tambahan baru atau yang sepadan dengan kapasitas Jepang, sebagai investor dan donor utama Indonesia, untuk mempengaruhi jalannya kejadian-kejadian.

296. Jepang menentang delapan Resolusi Sidang Umum PBB mengenai Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1982. Ini termasuk resolusi 1982 yang lemah, yang menyerahkan isu tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk menemukan penyelesaian melalui dialog. Selama kunjungannya ke Dili pada tahun 1976, Winspeare Guicciardi melihat poster-poster yang mengungkapkan perasaan terimakasih kepada Jepang, atas pemberian suara yang mendukung Indonesia di PBB.¹⁷²

297. Menurut Pemerintah Australia, Jepang secara implisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste pada tahun 1982, ketika Jepang menandatangani persetujuan pajak dengan Indonesia yang persyaratannya tidak mengeluarkan Timor-Leste dari wilayah Indonesia.¹⁷³ Jepang menyangkal, bahwa ia secara formal mengakui penggabungan itu. Jepang pun tidak menghadiri Majelis Rakyat pada tanggal 31 Mei 1976, saat petisi untuk integrasi dinyatakan oleh Indonesia sebagai tindakan penentuan nasib sendiri yang sah.¹ Pada tahun 1991, Parlemen Jepang mengatakan kepada PBB:

Pemerintah Jepang tidak pernah mengakui secara formal penggabungan Timor-Timur oleh Indonesia. Posisi resmi Jepang adalah sebagai berikut : "Posisi dasar kami berkaitan dengan daerah Timor-Timur adalah, bahwa Jepang terus mengawasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB"; dan bahwa "kami tidak berhak untuk mengklaim mengenai yurisdiksi pulau tersebut". Karena itu pemerintah Jepang telah menginstruksikan para penerbit buku-buku sekolah untuk menggambarkan jenis garis yang sama antara Timor-Timur dan Timor Barat seperti garis yang digambarkan antara Maroko dan Sahara Barat. Garis sejenis itu menunjukkan bahwa terjadi sebuah konflik internasional dan yang statusnya belum diselesaikan. Forum Anggota Diet telah berkali-kali menegaskan posisi ini, melalui pertanyaan-pertanyaan pada mimbar Diet, dan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada pemerintah.¹⁷⁴

298. Faktor penentu yang mengesampingkan posisi Jepang terhadap isu Timor pada tahun 1970an dan 1980an, adalah hubungan ekonominya dengan Indonesia. Setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang memusatkan fokusnya pada pembangunan kembali ekonominya, yang hanya memiliki sumber daya alam yang rendah, dan sangat bergantung pada jasa hubungan internasional. Tujuan-tujuan ekonomi ini mendikte kebijakan luar negerinya yang *low-profile*, dan yang pada dasarnya sejajar dengan kebijakan AS.

299. Indonesia dan Jepang membangun hubungan diplomatik resmi pada tahun 1957, setelah negosiasi yang berlarut-larut mengenai pampasan perang Jepang kepada Indonesia, akibat pendudukannya terhadap bekas koloni Belanda ini antara tahun 1942 dan 1945. Menyusul pula perluasan investasi Jepang, eksploitasi dan bantuan sumber daya alam. Indonesia, yang memiliki pasar yang sangat luas, sumber daya alam dan lokasi yang strategis, menjadi sangat penting bagi perekonomian Jepang, terlepas dari siapa memegang kekuasaan di Jakarta. Persentase persediaan minyak dan perdagangan Jepang yang signifikan mengalir melewati Selat Malaka. Setelah rezim Soeharto mengambilalih kekuasaan, Jepang memberi bantuan dalam pembangunan konsorsium bantuan internasional, *Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)*, yang mengadakan pertemuan pertamanya di Tokyo pada tahun 1967. Sejak tahun 1980an Jepang merupakan investor dan donor Indonesia yang terbesar, serta sangat melindungi hubungan tersebut. Tanggapan Jepang terhadap Timor-Leste dibatasi oleh prioritas-prioritas ini.

300. Pada tahun 1979, Jepang memberi 100 juta yen kepada program peringanan kelaparan gabungan Palang Merah Indonesia-Palang Merah Internasional di Timor-Leste. Pada tahun 1991, Pemerintah Jepang memutuskan untuk membuat hak asasi manusia dan faktor-faktor lain,

¹ Indonesia mengundang Jepang untuk hadir di Majelis Rakyat tanggal 31 Mei 1976. Dalam sebuah telegram pada tanggal 28 Mei 1976, seorang pejabat Kedutaan Inggris di Tokyo mengomentari masalah itu: "Orang Jepang sedang berada dalam dilema yang tidak asing. Di satu sisi mereka lebih baik tidak ada hubungannya dengan undangan itu, namun di sisi lain mereka takut mengecewakan orang-orang Indonesia. Mereka tidak ingin diwakili di Dili jika mereka tidak bersama kelompok yang baik...", dalam *UK unclassified documents*, Dowson Files 7.19.

seperti pengeluaran militer oleh negara penerima, sebagai pertimbangan dalam mengalokasikan program bantuannya yang besar-besaran. *Japanese Diet Members Forum* (Forum Anggota Diet Jepang) untuk Timor-Leste menyambut inisiatif yang menyatakan, bahwa “jika kriteria ini diterapkan secara jujur untuk Indonesia, penerima nomor satu Overseas Development Assistance (ODA; Bantuan Pembangunan Seberang Lautan) Jepang, diskusi mengenai isu Timor-Timur tidak dapat dihindari.”¹⁷⁵ Hal ini tidak terjadi. Pemerintah mengelak dari komitmen penting ini, dengan menandatangani Deklarasi Bangkok mengenai Hak Asasi Manusia, pada tahun 1993, yang menyatakan, bahwa bantuan seharusnya tidak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Walaupun mereka menilai catatan domestik hak asasi manusia Jepang sebagai yang terbaik di Asia Timur, Kenneth Christie dan Denny Roy menyimpulkan, bahwa:

Dalam praktek, pemasyarakatan hak asasi manusia bukan faktor yang penting dalam bantuan pembangunan luar negeri Jepang.¹⁷⁶

301. Pada tahun 1990an, Jepang tergerak untuk memainkan peran yang relatif lebih positif dalam permasalahan Timor-Leste. Hal ini dilakukan sebagian besar karena perkembangan di Timor-Leste dan tekanan domestik, terutama dari salah satu lembaga masyarakat dan anggota-anggota Diet Jepang, yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.¹

302. Sebuah contoh pembelaan masyarakat sipil, yaitu kesaksian kepada Komite Khusus Dekolonisasi pada tahun 1987 oleh Iwamura Shouhachi, seorang mantan perwira angkatan bersenjata, yang bertugas di Timor-Leste dari tahun 1942 sampai 1945. Dalam presentasinya ia meminta kepada Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat Jepang selama Perang Dunia II, dan untuk memperkenankan penentuan nasib sendiri yang benar:

Di Jepang saya hanya seorang warga negara yang tua. Tetapi saya bertekad untuk tidak pernah melupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Jepang dalam Perang Dunia ke-2, dan untuk bertindak atas apa yang telah saya pelajari dari pengalaman pahit.

303. Dengan menitikkan air mata, ia berkata kepada Komite:

Sangat menyakitkan untuk sekarang berbicara mengenai pengorbanan dan beban yang kami paksakan atas rakyat Timor, sebuah bangsa yang tidak ada hubungannya dengan perang itu...Pemerintah Jepang tidak pernah meminta maaf atau membayar pampasan kepada rakyat Timor, untuk apa yang telah dilakukan dalam Perang Dunia II: seharusnya Jepang melakukannya.²

¹ Suster Monica Nakamura mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan utama Free East Timor Japan Coalition, jaringan payung nasional Jepang yang utama, adalah “untuk mendukung hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mengenai bantuan kemanusiaan, kami [menyediakan hal itu] dalam beberapa kesempatan tetapi kami terpusat pada isu penentuan nasib sendiri.” CAVR audiensi publik nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Koalisi menghitung sekitar 40 kelompok di seluruh negara.

² 13 Agustus 1987, diberitakan dalam *The Australian*, 15 Agustus 1987. Sekutu-sekutu dan Jepang menduduki Timor Portugis dari tahun 1942 sampai 1945 melanggar kenetralan Portugis. Tentara-tentara Jepang bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian, pelanggaran terhadap perempuan, dan kerusakan fisik. Menurut sebuah survei di Timor-Leste pada tahun 1996, kira-kira 700 perempuan Timor dijadikan budak seks untuk tentara Jepang. (*Japan Times*, 14 Desember 2002). Sejak perang itu, Jepang telah membayar pampasan kepada lingkungan regional untuk meringankan reintegrasinya ke dalam wilayah itu dan telah meminta maaf secara eksplisit atas agresi dan pelanggaran pada masa peperangan. Indonesia menerima US\$223 juta dari Jepang, ditambah US\$400 juta untuk bantuan dan pembatalan hutang perdagangan sebanyak US\$177 juta. Timor-Leste tidak diganti kerugiannya akibat peperangan karena Portugal, dengan sikapnya yang netral selama peperangan, bukan salah satu penandatanganan Konferensi San Fransisco tahun 1951 yang menentukan kewajiban-kewajiban reparasi Jepang. Organisasi-organisasi non-pemerintah Jepang dan Gereja Katolik Jepang terus meminta permintaan maaf resmi dan reparasi, termasuk dari Dana Perempuan Asia yang dibentuk

304. Pada tahun 1995, sehubungan dengan tekanan domestik yang gigih serta perkembangan di Timor-Leste, Pemerintah Koalisi Sosialis/LDP Murayama mengubah posisi Jepang dari pengamat lepas menjadi pendukung proses PBB. Pada konferensi-konferensi APEC tahun 1995 dan 1996, Menteri Luar Negeri Jepang memberitahu rekannya Indonesia, Ali Alatas, mengenai minat Jepang untuk mencari penyelesaian isu itu secara damai dan cepat, melalui jasa-jasa baik Sekretaris Jenderal PBB.¹ Perubahan kebijakan ini juga membuka jalan bagi Jepang untuk menyediakan sumber dana untuk proses PBB, termasuk *All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogue* (AIETD), di mana Jepang menyumbang sebanyak \$100,000 pada tahun 1996.

305. Pada saat yang sama, Jepang dengan berhati-hati memisahkan isu itu dari hubungan ekonominya dengan Indonesia. Meskipun hampir setengah dari anggota Diet Jepang menandatangani sebuah petisi yang mengecam militer Indonesia, atas pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, pemerintah Jepang menahan diri dari memberi kecaman langsung dan membatasi tanggapannya pada penyesalan belaka. Jepang tidak memberi tanggapan resmi pada penyerahan Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta pada tahun 1996. Ketika José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada bulan Januari 1997, atas undangan kelompok-kelompok masyarakat sipil, Menteri Luar Negeri tidak dapat bertemu dengannya.² Surat kabar *Jakarta Post* memberitakan, bahwa Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto, yang sedang mengunjungi negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan krisis ekonomi Asia, memberitahu Presiden Soeharto bahwa tidak ada pejabat senior Jepang yang akan bertemu dengan José Ramos-Horta.³

306. Menyusul keputusan Kofi Annan pada tahun 1997 untuk menguatkan masalah Timor-Leste, Jepang adalah salah satu dari kelompok utama lima negara yang peran dukungannya diakui oleh Jamsheed Marker, Wakil Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste.⁴ Pemerintah Jepang mendukung keputusan Presiden Habibie, untuk memperkenankan dilakukannya pemilihan suara di Timor-Leste serta Jajak Pendapat yang diatur oleh PBB, yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Setelah pemilihan, Jepang meminta agar hasil dari pemilihan itu dihargai oleh semua pihak, dan agar Indonesia “memenuhi tanggung jawabnya atas keamanan (dan) mengambil semua langkah yang diperlukan” untuk mengendalikan para milisi.¹⁷⁷ Jepang mengumumkan bantuannya sebanyak mungkin untuk peralihan itu, namun menolak menghentikan bantuan kepada Indonesia sebagai balasan atas tindak penghancurannya, dan memperingatkan negara-negara donor lainnya bahwa penghentian bantuan dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan menghambat pemulihan ekonomi Asia Timur. Jepang tidak diperbolehkan oleh konstitusinya, untuk menyumbang tentara-tentaranya kepada Pasukan Internasional untuk Timor-Timur (*International Force for East Timor, Interfet*). Namun Jepang menjadi donor utama bagi Interfet, dengan menyumbang \$100 juta, agar tentara-tentara dari negara-negara berkembang dapat berpartisipasi. Sehubungan dengan usaha-usaha sebelumnya, Jepang juga memberi bantuan yang sangat banyak untuk memenuhi biaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Timor-Leste.⁵

pada tahun 1995 oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama, dan telah membantu korban-korban orang Timor untuk bersaksi di Tokyo.

¹ Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang Kono dan Ali Alatas dilangsungkan selama pertemuan Osaka APEC pada bulan November 1995 ketika pemuda Timor sedang mencari suaka di kedutaan besar Jepang di Jakarta. Pertemuan tahun 1996 antara Menteri-menteri Luar Negeri Yukihiko Ikeda dan Ali Alatas itu terjadi di Filipina setelah Penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

² José Ramos-Horta diberitahu bahwa Menteri Luar Negeri sedang sibuk mengatur situasi darurat di Peru ketika para militan menduduki Kedutaan Jepang.

³ Hubungan perekonomian Jepang-Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 1997 bukan karena negara Timor-Leste, melainkan karena mobil “Timor”. Ketika Presiden Soeharto menyerahkan hal monopoli untuk mobil Indonesia baru yang dinamakan “mobil Timor”, Jepang menganggap langkah itu merusak minat terhadap mobil Jepang di Indonesia. Protes pun dilayangkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia, hal yang menimbulkan kemarahan Presiden Soeharto.

⁴ PRSG memuji sumbangan Duta Besar Yukio Takasu. (*Jamsheed Marker*, hal. 14, 74).

⁵ Ini termasuk \$2 juta untuk para pengungsi Timor dan sumbangan yang sangat besar untuk Trust Fund (TFET) yang dibentuk untuk rekonstruksi Timor-Leste. Terbitan Pers, Departemen Luar Negeri Jepang, 4 Oktober 1999.

3.8 Kesimpulan

307. Jelas dari pengamatan di atas, bahwa selama sebagian besar periode mandat, tanpa memandang ideologi, lokasi atau tanggung jawab dalam tatanan internasional, kekuatan-kekuatan utama dunia sedikit banyak memiliki sikap yang sama terhadap masalah Timor-Leste. Dengan Cina sebagai pengecualian, selama tahun-tahun awal pendudukan Indonesia, pemerintah-pemerintah dengan berbagai corak politik di Eropa, Asia dan Amerika Utara jauh lebih banyak memberi dukungan kepada Indonesia daripada Timor-Leste. Beberapa dari pemerintah-pemerintah ini bekerja lebih keras dari yang lainnya, untuk mendukung dan mengkonsolidasi kehadiran Indonesia. Namun mereka yang memberi suara mendukung Timor-Leste di PBB, juga terus memprioritaskan hubungan mereka dengan Indonesia, dan tidak bersikap aktif dalam memberi dukungan untuk penentuan nasib sendiri di luar PBB.

308. Sikap ini ditunjukkan oleh banyak anggota PBB lainnya. Pemerintah-pemerintah barat seperti Kanada dan Selandia Baru serta pemerintah-pemerintah Asia seperti India, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand, semuanya sangat berpihak kepada Indonesia. Secara umum, satu-satunya pengecualian yang mencolok adalah Portugal, bekas koloni-koloninya di Afrika, dan beberapa negara-negara kecil.

309. Sikap resmi internasional mengenai masalah Timor-Leste diwarnai oleh pola pikir yang muncul pada masa Salazar, dan dikembangkan lebih jauh dan semakin mengakar pada tahun 1970-an. Pemikiran ini bersifat sangat negatif dan sangat merugikan aspirasi dan hak-hak rakyat Timor. Pemerintah-pemerintah mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan menyatakan, bahwa mereka tidak mendukung cara Indonesia melakukan penggabungan, tetapi tujuan umum dari pendekatan mereka, kalau bukan niat mereka, adalah untuk melegitimasi dan mengkonsolidasi pengambilalihan Indonesia. Aspek-aspek utama pola pikir ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kemerdekaan bagi Timor Timur tidak mungkin atau tidak diinginkan. Pandangan bahwa sebuah Timor merdeka tidak dapat berkembang secara ekonomi, sosial atau politik, dianggap sudah jelas dengan sendirinya pada tahun 1960-an, dan secara luas beredar dalam kalangan resmi di Portugal, Indonesia, Australia dan AS pada saat itu. Hal ini menjadi sebuah dogma pada tahun 1970-an, dan setelah Fretilin muncul diwarnai pula oleh pandangan, bahwa negara kecil yang lemah dalam kepulauan Indonesia akan menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Namun sangat mungkin juga, bahwa suatu negara Timor merdeka yang dipimpin oleh UDT, juga tidak akan dapat diterima.¹
2. Setengah dari pulau Timor di bagian timur secara alami merupakan bagian dari Indonesia. Pandangan ini dipromosikan sebagai sesuatu yang jelas kepada siapa pun yang mempelajari lokasi Timor di peta dalam hubungannya dengan Indonesia. Presiden Soeharto dan rakyat Timor pendukung integrasi menegaskan, bahwa dalam pandangan mereka bangsa Timor Timur dan Indonesia adalah saudara, dan bahwa integrasi adalah reuni yang "alamiah" setelah berabad-abad dipisahkan oleh kolonialisme Eropa.² Para penyusun kebijakan Barat juga memilih untuk menggambarkan integrasi, dalam kata-kata Henry Kissinger, sebagai "evolusi normal setelah akhir kekuasaan kolonial".¹⁷⁸

¹ Setelah mengunjungi wilayah itu pada awal tahun 1978 setelah pengambilalihan Indonesia, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Roger Peren menuliskan: "Kesimpulannya, rakyatnya miskin, kecil, dijangkiti oleh penyakit dan hampir semuanya tidak bisa baca-tulis, sangat sederhana dan, seperti yang diberitahukan kepada kami lagi dan lagi, 'primitif'... ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan ketika menilai kapasitas mereka untuk mengambil bagian dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri, atau bahkan bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dari sebuah negara merdeka." 13 Januari 1978, NZ...OIA Material, Volume 1.

² Pandangan ini semakin diterima di Indonesia dan menjelaskan rasa "sakit" di beberapa bagian ketika rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan dari Indonesia. Lihat, contoh, buku Lela E Madjiah yang berjudul *Timor Timur: Perginya Si Anak Hilang*, Antara, c. 2003. Melaporkan kematian Jenderal Benny Moerdani pada tahun 2004, David Jenkins menuliskan: "Moerdani selalu menganggap Timor Timur berada dalam Indonesia, dan menelan kepahitan ketika pada tahun 1999, Presiden Habibie, yang selalu tidak ia sukai, memperkenalkan Timor Timur untuk memilih keluar dari republik itu". *Sydney Morning Herald*, 10 September 2004.

3. Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk turut campur. Sejak tahun 1960-an, Indonesia terus menyampaikan kepada masyarakat internasional, bahwa ia tidak memiliki klaim legal atau ambisi teritorial atas Timor Portugis. Penggabungan Timor Leste akan lebih merupakan “reaksi defensif daripada sebuah keharusan nasionalis”.¹⁷⁹ Selain alasan-alasan keamanan, Indonesia juga mencoba untuk memberi pembenaran pada pengambilalihannya atas dasar kemanusiaan. Yusuf Wanandi, penasihat Presiden Soeharto, mengatakan kepada pers Kanada pada tahun 1984:

Kami bangun pada suatu hari, dan menyadari adanya kekacauan tepat di depan pintu kami. Portugis telah meninggalkan kekosongan...Tempat itu sangat kacau. Saya pikir kami kurang lebih dipaksa, untuk melakukan apa yang telah kami lakukan.”¹⁸⁰

Klaim ini didengungkan secara internasional selama masa konflik. Bahkan pada tahun 1995 Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Don McKinnon, menyangsikan bahwa penggabungan Indonesia bisa disebut sebagai “invasi”, dan mengatakan bahwa Indonesia turut campur karena adanya “masalah pengungsi yang besar”, dan untuk “mendukung pihak yang lemah” dalam sebuah perang saudara.¹⁸¹

4. Secara politik Fretilin tidak dapat diterima atau pun sah. Indonesia dan rakyat Timor yang pro-integrasi mendorong sentimen anti-Fretilin dengan mengutuk Fretilin sebagai komunis, teroris, tidak mewakili dan haus kekuasaan. Meskipun negara-negara Barat dan pejabat-pejabat lainnya tidak setuju dengan kebanyakan klaim Indonesia, pemerintah-pemerintah banyak negara seringkali bersikap menentang Fretilin dan menolak untuk berhadapan dengan wakil-wakilnya, walaupun PBB menerima Fretilin sebagai juru bicara yang sah bagi Timor Timur.
5. Pendudukan Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini dianggap jelas secara matematis, karena jumlah kekuatan Indonesia yang sangat dominan; dan istilah “tidak dapat diubah” muncul kembali bagaikan sebuah mantra, dalam pernyataan-pernyataan resmi yang dilayangkan selama bertahun-tahun.¹ Banyak pemerintah memberi suara menentang resolusi-resolusi mengenai Timor-Leste di PBB dengan dasar, bahwa kedaulatan Indonesia merupakan sesuatu yang sudah diputuskan (*fait accompli*). Untuk alasan yang sama, mereka memperkecil masalah itu secara internasional menjadi sebuah masalah bilateral kecil antara Portugal dan Indonesia, yang penyelesaiannya harus dibantu oleh PBB.

4 Vatikan²

4.1 Pendahuluan

310. Gereja Katolik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam persoalan Timor Timur selama mandat Komisi periode 1974-99. Perjuangan dekolonisasi berdampak berat pada Gereja dan melibatkan semua kalangan, mulai dari akar rumput hingga eselon teratas hirarki Gereja di Roma. Pentingnya isu ini bagi Gereja dan kepentingan politik Vatikan atas pemerintah Indonesia, jelas tampak dari fakta, bahwa Paus Johannes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan

¹ Jill Jolliffe terbukti benar ketika ia mengamati pada tahun 1978 bahwa “satu-satunya yang tidak bisa diubah tentang Timor Timur adalah pembunuhan.” *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, 1978, hal. 304.

² Komisi telah mencatat berbagai sumber untuk bagian ini, termasuk kesaksian langsung yang diungkapkan kepada CAVR. Komisi ingin memberikan penghargaan khusus kepada Arnold Kohen dan Pastor Patrick Smythe atas submisi dan saran mereka. Arnold Kohen adalah penulis *From the Place of the Dead – Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, 1999. Patrick A. Smythe adalah penulis *The Heaviest Blow– The Catholic Church and the East Timor Issue*, Lit Verlag Munster, 2004.

Indonesia. Bagian ini mengupas bagaimana Vatikan menanggapi dukungan kuat Gereja lokal terhadap rakyat Timor-Leste dalam hak penentuan nasib sendiri bagi warga.

4.2 Latar Belakang Keterlibatan Vatikan

311. Vatikan memiliki pengaruh dan jangkauan yang penting, baik secara langsung melalui jalur-jalur resminya maupun secara tidak langsung melalui keanggotaannya yang luas atas sekitar satu milyar umat dan jaringan institusi-institusinya, yang banyak di antaranya ditempatkan secara strategis. Berpusat di Roma dan dipimpin oleh Sri Paus, Vatikan merupakan otoritas pusat Gereja Katolik Romawi. Aktivitas politik dan diplomatik Vatikan diatur oleh Menteri Luar Negeri, jabatan terpenting di bawah Paus. Vatikan memiliki hubungan diplomatik formal dengan sebagian besar negara, dan mempertahankan kira-kira 100 misi diplomatik permanen di luar negeri. Misi diplomatik ini meliputi Washington, Lisboa, Canberra, dan Jakarta, di mana perwakilan Vatikan dibuka pada tahun 1965. Vatikan (atau "Holy See") mempunyai misi pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1964; karena itu Vatikan memiliki suara dalam keputusan-keputusan PBB, tetapi tidak memiliki hak suara. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Eropa, dan sebagian besar badan-badan khusus PBB. Stasiun radio resminya, Radio Vatikan, didengar luas di Eropa. Surat kabar semi resmi Vatikan, *L'Osservatore Romano*, diterbitkan setiap hari dalam bahasa Italia, dan setiap minggu dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Prancis.

312. Konsili Vatikan Kedua, yang berakhir sepuluh tahun sebelum invasi Indonesia, memerintahkan agar jaringan dan sumber daya milik Vatikan harus digunakan untuk melayani kebenaran, perdamaian, dan keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin dan papa. Gereja dan negara mempunyai peran yang berbeda, dan Gereja Katolik, meskipun sangat sentralistik, tidaklah monolitik. Sebagai pusat institusi global, Vatikan berhadapan dengan banyak dilema dan tekanan kebijakan dari kepentingan yang bertentangan, baik di dalam maupun di luar komunitas Katolik. Di sisi lain, benarlah bahwa Vatikan memiliki sumber daya dan pengaruh yang penting dan, khususnya dalam kasus Timor-Leste, memiliki informasi yang lengkap tentang situasi dan aspirasi Gereja lokal, yang dianggap menjadi tanggung jawab langsung Vatikan.

4.3 Gereja Katolik di Timor-Leste

313. Gereja Katolik di Timor-Leste mempunyai tiga pemimpin selama periode 1974-1999: Uskup José Joaquim Ribeiro, Dom Martinho da Costa Lopes, dan Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB. Selama pendudukan Indonesia, setiap pemimpin ini awalnya berusaha mengakhiri kekerasan melalui dialog dan perwakilan langsung kepada otoritas sekuler. Ketika upaya ini gagal, mereka masing-masing beralih mengambil peran yang semakin vokal untuk melindungi hak rakyat. Sejak sekitar tahun 1983, Gereja mengimbau adanya penentuan nasib sendiri, karena yakin bahwa penentuan hak kolektif tersebut merupakan kunci untuk mencapai perdamaian sejati dan dinikmatinya hak-hak individu. Peranan profetis Gereja lokal ini, dan advokasi hak politik mengenai penentuan nasib sendiri, yang merupakan tantangan terbesar bagi Vatikan ialah masalah Timor-Leste, meskipun Vatikan pula pada prinsipnya mendukung hak penentuan nasib sendiri.

4.4 Dom José Joaquim Ribeiro (1966-77)

314. Uskup Ribeiro yang berkebangsaan Portugis, memimpin Gereja selama dua tahun terakhir pemerintahan Portugis, dan selama dua tahun pertama pendudukan Indonesia.

315. Sebelum invasi Indonesia, peran dan status Gereja di Timor-Leste ditentukan dalam Konkordat 1940 antara Vatikan dan Portugal. Berdasarkan kesepakatan ini, Gereja di Timor-Leste menikmati beberapa keistimewaan termasuk subsidi negara, pengecualian pajak, dan hibah tanah yang luas. Gereja juga bertanggung jawab atas pendidikan, dan merupakan agen

utama “misi pemberadaban” Portugal¹. Hubungan istimewa ini berakhir dengan terjadinya Revolusi Bunga di Portugal. Sebagai bagian integral sistem kolonial kuno, Gereja benar-benar ditantang oleh perubahan lingkungan politis, dan disusul periode kebimbangan serta kegelisahan akut yang diperparah oleh kekerasan perang saudara dan bayangan invasi Indonesia.

316. Di Timor-Leste, program Fretilin termasuk kritik terhadap peran Gereja dalam masa kolonialisme dan kepemilikannya atas lahan-lahan yang luas. Beberapa pejabat Gereja dan pastor lebih berpihak pada UDT, karena mereka menghawatirkan tersebarnya paham komunisme di wilayahnya. Uskup Ribeiro secara terbuka menuduh Fretilin sebagai “komunis”. Dalam Surat Gembala yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1975, ia melarang umat Katolik memilih Komunis atau Sosialis, tetap membela hak atas properti pribadi dan memperingatkan, bahwa Marxisme mengancam “menghilangkan nilai-nilai positif rakyat Timor”². Meskipun kemudian diubah, pandangan-pandangannya mempengaruhi persepsi Gereja tentang Fretilin dan sikap Vatikan, serta beberapa negara yang menerima pengungsi perang saudara di Timor-Leste, khususnya Indonesia, Portugal dan Australia.

317. Invasi dan aneksasi Indonesia atas Timor-Leste terjadi menjelang akhir masa kepausan Paus Paulus VI (1963-78). Paulus VI memainkan peran utama dalam pembentukan dan penerapan perubahan-perubahan yang diperkenalkan Konsili Vatikan, termasuk doktrin-doktrinnya tentang keadilan sosial. Ia sangat menentang kekerasan, dan memberikan pidato tak terlupakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1963, di mana ia mendeklarasikan “tidak ada perang lagi, perang tidak akan ada lagi”¹⁸². Menteri Luar Negeri Vatikan, Jean-Marie Cardinal Villot (1969-79), mengetahui dengan baik invasi tersebut serta akibat-akibat kemanusiaannya dari beberapa sumber. Hal ini juga berlaku pada Uskup Ribeiro, yang mengharap intervensi militer Indonesia akan berjalan setenang aksi India di Goa; tetapi ia benar-benar terganggu dengan apa yang ia saksikan. Pada awal tahun 1976 ia berkata kepada pemerintah Indonesia, bahwa “pasukan Indonesia, dengan pembunuhan, pelanggaran dan penjarahan yang dilakukannya adalah ribuan kali lebih buruk” (daripada Fretilin); dan menambahkan, bahwa “pasukan terjun payung Indonesia turun dari langit seperti malaikat tetapi kemudian berperilaku seperti setan”¹⁸³. Ia terus melakukan protes hingga, karena kecewa, Ribeiro mengundurkan diri [dan kembali] ke Portugal tahun 1977.

318. Meskipun demikian, Komisi belum bisa mendapatkan bukti, bahwa Paus Paulus VI membuat tanggapan umum mengenai invasi tersebut, atau menggunakan jabatannya untuk memperkuat tuntutan Dewan Keamanan PBB tentang penarikan pasukan Indonesia.

319. Duta Besar Vatikan di Jakarta, Vincenzo Farano (1974-80), juga yakin akan hal ini. Ia percaya bahwa Gereja tidak perlu takut akan berintegrasinya Timor Timur dengan Indonesia. Tetapi, seperti halnya Uskup Ribeiro, ia terkejut dengan adanya kekerasan tersebut. Untuk menanggapi hal tersebut secara pribadi, ia menyediakan bantuan medis dan melakukan kunjungan berkala ke Timor-Leste, termasuk berkunjung ke wilayah yang dikuasai Fretilin, dan ke tempat-tempat pengungsian para pengungsi perang saudara di Timor Barat. Meskipun tidak disaksikan langsung, Wakil Paus di Australia juga lebih memahami perkembangan-perkembangan dari media, dan sumber-sumber seperti Komisi Katolik Australia untuk Keadilan dan Perdamaian, yang mengeluarkan serangkaian pernyataan tentang pada tahun 1975 dan 1976.

¹ Dalam situasi gejolak pemikiran Gereja di seputar Konsili Vatikan Kedua (1962-1965) dan gerakan pembebasan di Afrika, beberapa misionaris memanfaatkan perannya sebagai pengajar untuk mengkritik kolonialisme dan mengenalkan murid-murid mereka kepada ide-ide baru. Hal ini secara nyata dilakukan oleh seminari di Dare yang dikelola Yesuit, yang menjadi *alma mater* banyak pemimpin nasionalis masa depan.

² Patrick A. Smythe, ‘*The Heaviest Blow – The Catholic Church and the East Timor Issue*’, Lit Verlag, Münster, 2004, hal. 36. Uskup Atambua di Timor Barat, Indonesia, Theodore van den Tillart SVD, juga menggambarkan Fretilin sebagai Marxis kepada Kardinal Knox dari Australia dan berkata bahwa Fretilin mendapat bantuan dari gerakan komunisme internasional serta bersalah atas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang meluas. Kardinal Knox kemudian bertugas di Vatikan. Smythe, 72.

4.5 Dom Martinho da Costa Lopes (1977-83)

320. Uskup Ribeiro pensiun pada tanggal 23 October 1977. Karena kasus Timor-Leste yang tidak jelas, Vatikan kemudian berpikir tentang pengelolaan langsung Gereja lokal daripada menggabungkannya dengan Gereja Indonesia. Setelah membicarakannya dengan pemimpin agama setempat, Vatikan menunjuk Dom Martinho da Costa Lopes sebagai Administrator Apostolik dan menjadikannya putra asli Timor pertama yang menjadi pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste. Ia langsung bertanggung jawab kepada Vatikan melalui Duta Besar Vatikan di Jakarta.¹

321. Secara politik pengaturan ini penting. Hal ini menunjukkan dukungan Vatikan terhadap proses PBB tentang penentuan nasib sendiri, bukannya atas klaim Indonesia bahwa status politik wilayah ini telah diputuskan. Diwawancarai di Roma pada tahun 1980, para pejabat Vatikan menyatakan, bahwa mereka menganggap Timor-Leste sebagai “negeri terjajah” di mana tidak ada tindak nyata untuk mendorong penentuan nasib sendiri. Mereka menambahkan, bahwa Vatikan tidak akan mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, hingga jelas bahwa hal ini merupakan keputusan rakyat Timor-Leste, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa¹⁸⁴. Sejalan dengan kebijakan ini, Vatikan menjaga tanggung jawab langsung atas Gereja lokal melalui konflik, yang kemudian sejauh mungkin memberi perlindungan dan akses internasional bagi para pejabatnya, dan menolak tekanan dari Indonesia untuk melakukan integrasi eklesiastis². Namun Vatikan tidak mengumumkan atau pun memajukan posisinya secara internasional. Sangat sedikit umat katolik atau publik internasional umum yang mengetahui, bahwa Vatikan mendukung hak warga atas penentuan nasib sendiri.

322. Masa jabatan Monsignor Lopes cukup singkat. Selama tiga tahun pertama, ia menerapkan pendekatan kooperatif dalam pembicaraannya dengan otoritas Indonesia, mengenai banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh para pastor dan pihak-pihak lain kepadanya. Ia juga selalu memberi informasi baru kepada para uskup Indonesia dan Wakil Paus di Jakarta. Komisi tidak berhasil menemukan catatan apa pun, bahwa Vatikan membuat intervensi publik atau peranan yang mendukung selama periode ini.

323. Sejak tahun 1981, hubungan Monsignor Lopes dengan Vatikan dan militer Indonesia semakin memburuk, dan pada bulan April 1983 ia mengundurkan diri di bawah tekanan dari kedua pihak tersebut. Alasan-alasan retaknya hubungan dengan Vatikan berkaitan dengan perbedaan pandangan yang mendasar tentang isu ini dan bagaimana menanganinya. Masa ini merupakan periode krisis yang hebat setelah kekalahan besar perlawanan, akibat kelaparan, dan, pada pertengahan tahun 1981, oleh penyerangan militer baru terhadap Fretilin. Vatikan juga prihatin, bahwa meningkatnya keterlibatan Gereja dalam konflik ini akan membahayakan Gereja di Indonesia.

324. Kementerian Luar Negeri Vatikan di bawah pimpinan Kardinal Agostino Casaroli (1979-1990) memiliki pandangan yang sama dengan pandangan banyak negara, bahwa pengambilalihan oleh Indonesia yang bersifat menetap, baik secara internal maupun secara diplomatik, dan bahwa perlawanan yang terus berlanjut, tidak ada gunanya dan bahkan berbahaya. Pat Walsh menginformasikan Komisi, bahwa pada tahun 1980 Wakil Paus di Jakarta, Monsignor Pablo Puente, dan rekannya di PBB di New York, Monsignor Ettore de Filippo, keduanya memberitahu padanya, bahwa pengambilalihan oleh Indonesia adalah *fait accompli*; bahwa pembangunan di bawah Indonesia lebih baik dari pembangunan di bawah Portugal; bahwa Vatikan bertanggung jawab melindungi kepentingan Gereja lokal, dan bahwa hal ini dapat tercapai melalui kerja sama dengan Indonesia.¹⁸⁵ Vatikan juga percaya, bahwa usaha diplomasi

¹ Monsignor Lopes tidak ditahbiskan sebagai uskup tetapi, karena posisinya, orang-orang Timor-Leste biasanya menganggapnya sebagai uskup.

² Dalam laporan bulan Mei 1980 ke Vatikan, para uskup Indonesia, yang juga mendapat tekanan dari pemerintah mereka sendiri, meminta ‘Tahta Suci mempertimbangkan dan memikirkan status Gereja Katolik di Timor-Leste sehingga Gereja Timor-Leste dapat sepenuhnya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia’. Mengutip Smythe, hal 59.

diam-diam lebih produktif daripada diplomasi publik.¹ Hasil positif pendekatan ini dapat ditunjukkan dalam beberapa hal, contohnya, pengenalan Tetum sebagai bahasa katekis dan liturgi - suatu kontribusi yang signifikan bagi bertahannya kebudayaan - dan pemberian visa kepada para misionaris. Monsignor Puente juga percaya bahwa Indonesia telah menerima, bahwa pendekatan militer yang opresif adalah salah, dan bahwa mereka mendengarkan penegasannya mengenai peran Gereja yang substansial.

325. Monsignor Lopes memiliki sudut pandang yang sepenuhnya berbeda, yang secara efektif menyimpang dari strategi Vatikan, dan serupa dengan pembangkangan. Setelah enam tahun yang sulit dan mengecewakan, ia tidak memiliki pandangan yang sama dengan keyakinan Vatikan pada militer dan integrasi. Pada bulan Mei 1981 secara terbuka, untuk pertama kalinya, ia mengkritik tindakan kejam militer Indonesia. Kemudian, ketika ABRI menyalahkannya karena mereka merasa tidak didekati secara pribadi, Monsignor Lopes menanggapi dengan mengatakan, bahwa pendekatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya kepada pejabat militer senior, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Yusuf, tidak menghasilkan perubahan apa pun.² Ia juga mengkritik Gereja. Pada bulan Juli 1981, ia turut menandatangani pernyataan yang menegur Gereja Indonesia dan Vatikan atas sikap diam mereka. Menunjuk pada kematian lebih dari 200.000 orang selama enam tahun sebelumnya, pernyataan tersebut menyuarakan kepedihan:

Kami tidak mengerti, mengapa Gereja Indonesia dan Gereja Romawi Universal hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka dan resmi solidaritas mereka dengan Gereja, penduduk, dan agama di Timor-Leste. Mungkin ini adalah tamparan terkeras bagi kita... Kami terpana karena sikap diam ini yang membiarkan kita mati ditinggalkan.¹⁸⁶

326. Ia tidak setuju bilamana rakyat Timor-Leste harus menyerah. Ia mengadvokasi pendekatan anti-kekerasan, tetapi membela hak pembelaan diri Fretilin dan bekerja sama dengan pemimpin Perlawanan, Xanana Gusmão.³

327. Pada tahun 1981 Vatikan menolak permintaan Monsignor Lopes untuk bertemu Sri Paus. Pada tahun 1982, Vatikan menyalahkan Monsignor Lopes setelah ia menjadi pusat kontroversi, mengenai masalah kelaparan di Timor-Leste setelah penyerangan militer tahun 1981. Monsignor Puente mengkritik Administrator Apostolik dalam sebuah pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam. Whitlam yang pernah mengunjungi Timor-Leste tidak percaya, bahwa Timor-Leste mengalami kekurangan pangan. Catatan Pemerintah Australia tentang pertemuan ini menyatakan, bahwa: "Puente berbicara tentang Administrator secara hati-hati tetapi sangat penuh kritik. Whitlam berkata, ia beranggapan Administrator bertingkah laku "keji". Puente tidak menyerah."⁴ Dalam perbincangan dengan pihak Keuskupan Australia, Menteri Luar Negeri Vatikan mengkritik Monsignor Lopes yang melebih-lebihkan situasi pangan dan, dalam kritik terselubung mengenai Administrator, meminta agar isu sulit dan peka tentang Timor-Leste ditanggapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Pada bulan Maret 1983, Jenderal Benny

¹ Wakil Vatikan untuk PBB, Monsignor Renato Martino, memberitahu Patrick A Smythe: 'Tahta Suci bertindak dengan cara sangat tenang, diam-diam... Tidak ada tiupan terompet, tidak ada keinginan publikasi'. Op.cit. 191. Monsignor de Filippo berkata kepada Pat Walsh, bahwa pada saat itu ia memiliki pandangan pasif tentang Timor-Leste di PBB.

² Rowena Lennox mengutip perkataan Administrator Apostolik tentang masa ini: 'Berdasarkan ciri kenabian misi saya, saya merasakan keinginan kuat untuk memberitahu seluruh dunia ... tentang genosida yang dilakukan di Timor, sehingga, saat kita mati, paling tidak dunia tahu kita mati berjuang'. *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal 174.

³ Atas permintaan Xanana Gusmão ia menyelundupkan berkas-berkas ke luar Timor-Leste, untuk Delegasi Eksternal Fretilin, yang membahayakan militer Indonesia serta rekaman dan foto pembicaraan gencatan senjata pada tahun 1983. Ia membicarakannya dalam sebuah seminar di Melbourne pada bulan Oktober 1983: 'Jose Gusmão Xanana berkata Fretilin adalah rakyat dan rakyat adalah Fretilin. Ini benar'. *ACFOA East Timor Report*, No. 5.

⁴ Submisi dan Informasi Tambahan dari Hon. E.G. Whitlam, Australian Senate Inquiry into East Timor, 1999, hal 018 dan 097. Whitlam menyebarluaskan kritiknya atas Monsignor Lopes secara luas, khususnya di Australia.

Moerdani, seorang Katolik, ditunjuk menjadi kepala pasukan bersenjata Indonesia dan menekan Monsignor Puente untuk mengganti Monsignor Lopes. Hal ini terjadi pada bulan April, dan pada tanggal 17 Mei Monsignor da Costa Lopes terbang meninggalkan Dili bersama dengan Wakil Paus.¹ Fretilin menolak seruan untuk menyerah yang dikeluarkan Jenderal Moerdani pada bulan Agustus, dan serangan baru diluncurkan oleh militer Indonesia.

328. Rekan-rekan sesama pastor Monsignor Lopes marah atas perlakuan atas Monsignor Lopes. Dalam surat yang ditulis pada bulan April kepada uskup-uskup Katolik se-dunia, sekelompok pastor memuji Monsignor Lopes karena acap menjadi “satu-satunya suara yang muncul membela mereka yang dipaksa bisu dan takut, dan mereka yang karena penegakan kebebasan berekspresi hanya akan mengakibatkan penahanan atau penghilangan”. Pernyataan mereka mengungkapkan “kekecewaan” dan “luka yang dalam” pada “kampanye pencemaran nama baik” yang dilakukan untuk melawannya.¹⁸⁷

329. Dalam perjalanannya ke Portugal, Monsignor Lopes diterima oleh Paus Johannes Paulus II di Roma, dan ia menggambarkan secara positif sikap Sri Paus. Ia juga bertemu dengan Kardinal Casaroli dan berkata kepadanya “pendapat anda tentang Timor-Leste salah”. Ia kemudian mengunjungi banyak negara di Eropa, Amerika Utara dan Kepulauan Pasifik untuk menyuarakan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta memberikan kontribusi, meskipun di beberapa tempat tidak diperhitungkan sebagai saksi penting, terhadap mobilisasi berbagai badan Gereja. Ia tidak kembali ke negara tempat kelahirannya, dan meninggal di Portugal tahun 1991.

4.6 Dom Carlos Filipe Ximenes Belo SDB (1983-2003)

330. Penunjukan Dom Carlos Belo oleh Vatikan dilakukan tanpa diadakan pembicaraan yang semestinya dengan para pastor setempat, dan awalnya ia tidak disukai pastor-pastor di Timor-Leste, khususnya dalam konteks pengunduran diri Monsignor Lopes. Monsignor Belo dengan hati-hati menolak berperan politik, yang merusak hubungannya dengan pihak Perlawanan, tetapi seperti halnya dua pendahulunya ia perlahan-lahan terpaksa menjadi lebih vokal. Ia menjelaskan gejala-gejala tersebut dalam surat kepada Wakil Paus di Jakarta:

Sejak tahun 1983, tahun saya ditunjuk sebagai Administrator Apostolik, setiap tahun kami menyaksikan penganiayaan-penganiayaan serupa. Kami telah berbicara dengan pihak otoritas,¹⁸⁸ tetapi tidak ada hasil. Rakyatlah yang selalu menderita.

331. Sejak awal masa jabatan ia, sebagai uskup, membaktikan dirinya kepada penentuan nasib sendiri baik sebagai hak maupun sebagai rumusan perdamaian abadi. Pada tanggal 5 Desember 1984, ia menulis surat kepada Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian di Prancis:

¹ José Ramos-Horta mengenang bahwa Monsignor Lopes mengatakan pengunduran dirinya dilakukan karena tekanan politik tetapi bahwa ia menerima hal ini ‘sebagai rencana Tuhan’ dan tidak pernah mengecam Paus atau Monsignor Puente. *Funuhal* 203-4. Semua catatan menunjuk intervensi Jenderal Moerdani, meskipun jelas bahwa Vatikan telah kehilangan kepercayaan Administratornya.

Meskipun semua kekuatan melawan kami, kami tetap bersikukuh, bahwa satu-satunya solusi konflik Timor-Leste adalah solusi politik dan diplomatik, dan konsep ini tetap kami sebar-luaskan. Solusi tersebut harus mencakup, di atas segalanya, penghormatan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri. Kami pun berharap, bahwa imbauan Paus Johannes Paulus II kepada Duta Besar Indonesia ke Tahta Suci, contohnya, menghargai identitas kultural, etnik, dan religius masyarakat Timor-Leste, diwujudkan. Selama hal ini tidak diterapkan, tidak akan ada solusi damai bagi Timor-Leste¹⁸⁹.

332. Sebagai tanda kepercayaan, Vatikan mengangkat Monsignor Belo sebagai Uskup pada tahun 1988. Pada bulan Februari 1989, uskup baru ini mengulangi dukungannya bagi penentuan nasib sendiri dalam sepucuk surat pribadi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar. Surat-surat serupa dikirimkan ke presiden Portugal dan Sri Paus. Surat Uskup Belo tersebut menantang Sekretaris Jenderal untuk melangkah melampaui hubungannya dengan Portugal dan Indonesia, dan meminta pendapat rakyat Timor-Leste secara langsung melalui referendum. Surat tersebut secara eksplisit menolak pernyataan yang dipertahankan Indonesia, bahwa Timor-Leste telah sepenuhnya menjalankan hak penentuan nasib sendirinya, dan menyiratkan bahwa pernyataan-pernyataan partai politik Timor-Leste tentang status Timor-Leste juga cacat. Uskup Belo menulis:

Rakyat Timor-Leste harus diizinkan memilih masa depan mereka melalui referendum. Hingga saat ini masyarakat Timor-Leste tidak diajak bicara. Pihak lain berbicara atas namanya. Indonesia menyatakan, bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih integrasi, tetapi rakyat Timor-Leste sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Portugal menginginkan waktu untuk menyelesaikan persoalan. Dan kami terus mati sebagai manusia dan sebagai bangsa.

333. Menanggapi tekanan untuk menarik surat tersebut, Uskup menyatakan, bahwa ia tidak mengadvokasi satu pilihan politik di atas pilihan politik lain, tetapi menegaskan prinsip demokratis. Wakil Paus, Monsignor Canalini, menjauhkan diri dari surat tersebut dengan menyatakan, bahwa isi surat tersebut merupakan pandangan pribadi Uskup Belo semata.¹ Pada tahun 1987 ia menyatakan posisi resmi Vatikan dalam wawancara dengan salah satu media Indonesia, tetapi dinyatakannya bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan uraian hukum ketimbang kenyataan. Pada tahun 1990 ia diminta untuk menjelaskan posisi Vatikan tentang Timor-Leste dalam sebuah acara kebaktian di Dili, tetapi ia menolak.

334. Sikap Uskup Belo sangat menegaskan hubungannya dengan pihak Perlawanan, dan menjadikannya peraih Penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1996. Anugerah yang bergengsi ini, yang diterimanya bersama-sama dengan José Ramos-Horta, membuat perhatian internasional terpusat pada pentingnya penentuan nasib sendiri, dan berperan dalam momentum yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri ini pada bulan Agustus 1999. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Kepausan, Kardinal Roger Etchegaray, yang melakukan kunjungan yang disambut baik ke Timor-Leste pada bulan Februari tahun itu, bergabung dengan Uskup Belo pada upacara penganugerahan di Oslo.²

¹ *Readers Digest* melaporkan bahwa Wakil Paus memerintahkan Uskup Belo menjauh dari dunia politik. Paul Raffaele, "Hero of a Forgotten People", *Readers Digest*, Maret 1996. Edisi ini dilarang beredar di Jakarta.

² Uskup Belo mengomentari, bahwa kunjungan Kardinal Etchegaray telah 'mendorong kepercayaan atas Vatikan'. *CIIR Timor Link*, Maret 1996.

335. Vatikan tidak setuju kalau uskup-uskup lain mengeluarkan pendapat tentang Timor-Leste. Menanggapi surat Uskup Belo kepada PBB, Dom Manuel da Silva Martins, Uskup Setubal di Portugal, mengumpulkan tanda-tangan dari 160 uskup dalam surat dukungan yang dikirimkan kepada PBB. Kardinal Casaroli melarang Dom Manuel da Silva Martins mengirim surat tersebut, dan juga melarangnya berbicara secara terbuka tentang persoalan tersebut. Ia tidak sependapat, dan larangan dilonggarkan setelah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991¹. Uskup Soma dari Jepang, yang mengumpulkan 1257 tanda-tangan anggota Gereja untuk surat dukungan serupa yang dikirimkan kepada PBB, juga diperingatkan Vatikan. Suster Monica Nakamura memberitahu Komisi:

Suatu hari Uskup Soma memberitahu saya, bahwa setelah ia menyatakan rasa solidaritasnya bagi Timor-Leste, ia menerima surat dari pejabat Vatikan yang bertanya kepadanya, tentang siapa yang telah memberinya izin untuk melakukan hal semacam ini. Dengan senyum lebar Uskup Soma berkata, bahwa sama sekali tidak perlu meminta izin untuk melakukan hal yang benar¹⁹⁰.

336. Di Australia, Uskup Hilton Deakin juga menolak menghentikan pengeluaran pernyataan-pernyataan umumnya.

4.7 Paus Johannes Paulus II mengunjungi Timor Timur pada tahun 1989

337. Banyak pihak berharap, bahwa kunjungan Paus Johannes Paulus II ke Timor-Leste pada 1989 akan menjelaskan ambiguitas dalam kebijakan Vatikan tentang wilayah ini, dan menyatakan dengan tegas di mana Tahta Suci berpihak. Meskipun memahami pentingnya hal tersebut, ungkapan-ungkapan keprihatinan Sri Paus sebelumnya terbatas pada pengakuan tentang penderitaan di Timor-Leste, dukungan doa sepenuhnya, dan imbauan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah lain untuk menghormati identitas rakyat Timor-Leste.² Karena mengetahui peran Sri Paus dalam mewujudkan perubahan politik di Polandia, rakyat Timor-Leste berharap Sri Paus akan memanfaatkan kunjungannya untuk mendukung penentuan nasib sendiri secara politik, tetapi juga khawatir kalau-kalau kunjungan ini akan mendukung kedaulatan Indonesia. Kunjungan tersebut tidak menghasilkan kedua-duanya. Sri Paus mengakui konflik ini, dan menyatakan prinsip-prinsip untuk penyelesaian konflik, tetapi menekankan ciri pastoral kunjungannya dan menyatakan, bahwa solusi politik adalah masalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan masalah Vatikan.

338. Dalam wawancara di radio Portugis pada tahun 1991, Paus mengenang kunjungan tersebut:

¹ Wakil Paus membuka semua referensi tentang Timor-Leste laporan-laporan *ad limina* lima tahunan hirarki Portugis atas dasar bahwa Diosis Dili bukan tanggung jawab Portugal lagi. Smythe *op. cit.* 91.

² Contohnya Misa yang diadakan Paus John Paulus II di Fatima pada tahun 1982 diterjemahkan ke dalam bahasas Tetum.

Saya pergi ke Timor-Leste bukan sebagai seorang politikus tetapi sebagai Paus dan uskup, sebagai pastor Gereja yang mengunjungi berbagai komunitas Katolik.... hal yang saya inginkan bagi komunitas tersebut – yang juga saya katakan selama kunjungan saya di Timor – adalah, bahwa komunitas tersebut harus dapat hidup sejalan dengan prinsip-prinsip, kebiasaan, tradisi dan agamanya sendiri. Masalah politik adalah masalah yang harus diangkat di tempat lain: Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya harap – saya ungkapkan hal ini saat berada di sana, dan saya harus mengatakannya kembali kini - bahwa masalah Timor-Leste akan diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan serta hak-hak bangsa...Saya telah menjaga hubungan dengan uskup mereka, Monsignor Belo. Saya di sana juga memberikan perlindungan khusus bagi para korban...Namun satu hal yang harus ditekankan: apabila anda berbicara tentang melupakan Timor-Leste, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan perasaan saya yang sebenarnya, karena saya berdoa bagi pulau itu setiap hari.¹⁹¹

339. Rakyat Timor Timur sangat menghargai kunjungan Sri Paus. Yang paling penting adalah dia datang. Alex Gusmão, salah satu pelajar yang berdemonstrasi di dekat Misa Kepausan di Taci Tolu, menyampaikan kepada Komisi:

Kami merasa sangat bangga. Apabila ia hanya mengunjungi Indonesia, berarti ia menerima Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, tetapi ia mengunjungi kita. Hal ini memberi banyak harapan bagi kita.¹⁹²

340. Masyarakat Timor-Leste membedakan Sri Paus dari birokrasi Vatikan yang tetap mereka kecam keras. Pemimpin Perlawanan saat itu, Xanana Gusmão, yang menerima kunjungan Kepausan dengan terbuka, pada tahun 1991 menjawab pertanyaan tentang Vatikan:

Kami semua tahu tentang penyingkiran Monsignor Lopes, dan penyingkiran para pastor Portugis dan kami curiga suatu hari Monsignor Belo juga akan disingkirkan. Saya berpikir bahwa ini adalah tindakan tidak bermoral Vatikan, dan bahwa mereka bertindak berdasarkan kepentingan politik mereka sendiri. Pernyataan Pastor Tucci yang datang untuk mempersiapkan kunjungan Paus sangat mengejutkan. Ia berkata, bahwa Vatikan tidak seharusnya mengorbankan kepentingannya hanya demi beberapa ratus ribu orang Katolik. Saya pikir ini bukan sikap yang benar. Kami terus merasakan pengaruh Jakarta pada Vatikan, dan konsekuensi pengaruh yang dipaksakan Vatikan kepada Gereja Timor-Leste¹⁹³.

341. Setelah kunjungannya, Paus Yohanes Paulus II memberikan lebih banyak penekanan pada kebutuhan akan adanya resolusi konflik yang damai dan benar. Untuk tetap sejalan dengan hal ini, misi Vatikan ke PBB menjadi lebih aktif dan melakukan protes terus-menerus untuk meminta pengurangan pasukan, hak-hak asasi manusia, dan dialog. Pada tahun 1998, Sri Paus dan Menteri Luar Negeri, Kardinal Angelo Saldano, membicarakan persoalan ini dengan Sekretaris Jenderal PBB, dan memberikan dukungan mereka bagi proses PBB. Kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat pada bulan Agustus 1999 memuakkan Sri Paus:

Kami tidak dapat tetap mendinginkan kepedihan kami yang sangat dalam, karena sekali lagi gagal rasa kemanusiaan ketika, menjelang kedatangan Milenium Ketiga, tangan-tangan pembunuh saudara terangkat sekali lagi, untuk membunuh dan menghancurkan tanpa ampun ... dalam usaha sia-sia untuk menghapus keinginan yang diungkapkan rakyat dan aspirasi sahnya...¹⁹⁴

4.7.1 Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia

342. Vatikan tidak bertindak memobilisasi sumber-sumber globalnya untuk mendukung penentuan nasibnya sendiri secara politik, yang dianggap Gereja setempat dan Administrator Apostoliknya sebagai kunci menuju perdamaian. Hal ini tidak dilakukan karena tiga pertimbangan yang berkaitan: konsep Vatikan tentang misi Gereja, perhatian bagi Gereja Katolik di Indonesia, dan *modus operandi* diplomatik Vatikan.

343. Misi Gereja ditegaskan pada Konsili Vatikan II (1962-65). Secara singkat, Konsili ini mengikat Gereja modern pada misi spiritual dan sosial di dunia, terbebas dari sistem politik apa pun. Namun, Vatikan dan Gereja Timor-Leste berbeda dalam interpretasinya misi tersebut dalam konteks krisis di Timor-Leste. Gereja lokal, yang telah menjadi bagian dari sistem kolonial Portugis, kini menekankan basis komunitasnya untuk bersifat independen dari negara dan peran kenabian.¹ Vatikan lebih cenderung menggunakan pendekatan konsiliasi dan prinsip-prinsip yang ditekankan tanpa bersikap langsung atau spesifik. Vatikan juga beranggapan, bahwa kebijakan dan pengelolaan isu Timor-Leste merupakan tanggung jawab sendiri dan bukan tanggung jawab perwakilan setempat.

344. Tanggapan Vatikan juga dibentuk oleh tanggung jawabnya atas kesejahteraan dan misi Gereja di Indonesia, serta kepekaan terhadap situasi Gereja di Indonesia sebagai kelompok minoritas di negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pada pertemuan pertama mereka pada tahun 1985, Sri Paus berbicara kepada Uskup Belo:

Saya memahami posisi anda. Saya berdoa bagi Timor.
Saya menderita untuk Timor. Namun, di sisi lain, Gereja di Indonesia juga perlu perhatian kami.¹⁹⁵

345. Sejak Indonesia merdeka, hubungan Gereja-Negara di Indonesia secara umum baik. Sebagaimana yang terjadi di Timor-Leste, kemerdekaan didukung secara aktif oleh banyak pihak dalam Gereja Katolik, hal yang mengakibatkan berdirinya negara sekuler, dan bukan negara Islam. Hubungan ini makin erat setelah Jenderal Soeharto mulai berkuasa pada tahun 1965. Gereja, bekerja sama dengan pihak militer dan Soeharto, berperan dalam "mengimunitasi" masyarakat terhadap komunisme, dan bergabung dengan Orde Baru sebagai rekan dalam pembangunan bangsa melalui, di antaranya, jaringan institusi kesehatan dan pendidikannya yang disegani.² Orang-orang Katolik memperoleh beberapa posisi berpengaruh dalam pemerintahan Soeharto yang bertujuan melindungi Gereja dari Islam militan. Seperti halnya Gereja Indonesia,

¹ Dalam jumpa pers pada tahun 1996, Uskup Belo berkata: 'Saya sepenuhnya tahu norma-norma Gereja Katolik yang mengharuskan pemimpin agama tidak turut dalam praktik politik nyata yang menjadi bidang para politikus. Namun sebagai uskup saya memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan suara orang-orang miskin dan sederhana yang, ketika diintimidasi atau diteror, tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau menyuarakan penderitaan mereka'. 25 November 1996. Pastor Indonesia Romo Mangunwijaya mendukung usaha Uskup Belo dan berkata bahwa Pancasila, dasar negara Indonesia, juga mengharuskannya berbicara demi kepentingan publik.

² Peran Gereja Katolik pada masa pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terdokumentasikan dengan baik. Para uskup merasa cemas karena sejumlah pembunuhan dan meminta maaf karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak mereka yang mungkin berperan dalam pembunuhan yang kejam. Aktifis Katolik Harry Tjan dan Yusuf Wanandi, yang menjadi penasihat Presiden Soeharto dalam pengambilalihan Timor-Leste, secara aktif turut dalam aktivitas anti-komunis dan menjalin hubungan erat dengan militer.

Vatikan enggan membahayakan stabilitas hubungan ini dengan menjelaskan terlalu rinci atau secara terbuka isu Timor-Leste¹. Vatikan juga memperhitungkan keuntungan-keuntungan hubungan harmonis dengan Indonesia, bagi hubungannya dengan seluruh dunia Islam, maka lebih suka melihat isu Timor-Leste sebagai isu politik, dan bukan agama. Vatikan takut isu Timor-Leste dipandang sebagai isu agama, apabila Gereja menjadi terlibat lebih jauh. Gereja Indonesia bukan tidak peka atas penderitaan Timor-Leste dan permintaan Gerejanya, tetapi mengakui hambatan-hambatan politik yang dialami, dan memberi dukungan terbatas untuk memberikan bantuan dan pendampingan dalam bentuk praktik. Dalam suratnya kepada Monsignor Belo tertanggal 17 November 1983, yang ditulis setelah Uskup Belo menjelaskan persoalan Timor-Leste kepada para uskup dalam sidang mereka, Konferensi Wali Gereja Indonesia menulis:

Gereja Katolik Indonesia... meskipun menghadapi banyak hambatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan solidaritas dan rasa persahabatan kepada umat dan seluruh rakyat Timor-Leste, yang sedang dibanjiri cobaan yang dahsyat baik secara fisik maupun spiritual.²

346. Beberapa pastor Indonesia secara pribadi mendesak sikap yang lebih kuat yang, apabila diambil, mungkin akan memberikan lebih banyak pilihan bagi Vatikan.

347. Seperti yang telah disebutkan, Vatikan tidak melakukan diplomasi terbuka karena alasan kebijakan, atas dasar bahwa konfrontasi membatasi opsi-opsi strategis, menutup pintu menuju dialog, dan tidak seproduktif protes pribadi. Secara langsung pernyataan-pernyataan Vatikan tentang Timor-Leste secara kualitas bersifat umum, tidak terperinci; Vatikan tidak mempublikasikan aktivitasnya atau mengecam militer Indonesia secara langsung, dan mencoba menahan siapa pun yang melakukan hal tersebut. Kebijakan ini diberlakukan juga pada negara-negara lain yang berkaitan dengan Timor-Leste. Tidak ada bukti, contohnya, bahwa Vatikan menentang perdagangan senjata internasional dengan Indonesia, meskipun kebijakan Gereja menentang proliferasi senjata. Kebijakan yang tidak menarik perhatian itu juga melindungi hubungan Vatikan dengan Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, Pastor Patrick Smythe menyimpulkan:

Secara umum Gereja memberikan ulasan terbatas tentang Timor-Leste dalam siaran radio atau publikasi cetaknya. Karena itu gagal menjalankan tanggung jawabnya yang diproklamasikan "untuk melengkapi informasi yang masih berkurang bagi mereka yang membutuhkannya, dan menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara".³

348. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah ciri khas diplomasi Vatikan mengenai isu Timor-Leste. Dengan ketiadaan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur posisi resmi, seperti tingkah laku pemberian suara, pengawasan oleh media, hibah dan perdagangan, kurangnya informasi, menyulitkan usaha menilai tindakan yang menurut Vatikan diambil atas nama Timor-Leste, dan efektivitas mereka. Komisi berharap bahwa Vatikan akan membantu menyelesaikan persoalan ini, dengan membuat arsipnya terbuka bagi penelitian independen.

¹ Serangan-serangan sektarian atas gereja-gereja Kristen terjadi setelah Soeharto jatuh.

² Surat ini ditandatangani oleh Monsignor F X Hadisumarta, O. Cam dan Monsignor Leo Soekoto SJ dengan mengatasnamakan Majelis Agung Waligereja Indonesia, MAWI).

³ Smythe, p. 19. Ada banyak pengecualian lokal kepada ini, terutama oleh lembaga perdamaian, keadilan dan perkembangan Catholic di dalam beberapa negara dan oleh beberapa karangan keuskupan dan acara televisi.

4.8 Kesimpulan

349. Vatikan berperan dalam usaha penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan Komisi mengakui nilai kontribusi ini, khususnya pada tahun-tahun ketika Timor-Leste hanya memiliki sedikit sekutu yang berpengaruh. Vatikan tidak menelantarkan Gereja di Timor-Leste.

350. Akan tetapi, kontribusi Vatikan terbatas. Lebih banyak yang tidak dilakukan daripada yang dilakukan. Vatikan menjunjung tinggi prinsip penentuan nasib sendiri, dengan tidak memutuskan status Gereja lokal hingga rakyat Timor-Leste bebas memutuskan masa depan politik mereka sendiri, dan dengan tidak menyetujui dorongan integrasi baik dari Gereja maupun pemerintah di Indonesia. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II, dengan tindakan yang sangat dihargai, memasukkan Timor-Leste dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai tamu pemerintah Indonesia, tetapi ia tidak menyetujui integrasi dengan Indonesia, seperti yang dikhawatirkan banyak orang Timor akan dilakukannya.

351. Di sisi lain, Vatikan tidak berupaya menyuarakan penentuan nasib sendiri. atau mendesak pihak-pihak lain melakukan hal tersebut, bahkan kadang-kadang menyarankan integrasi. Hal ini dilakukan meskipun komunitas internasional secara prinsip setuju dengan pentingnya hak penentuan nasib sendiri, dan bahwa hak ini telah disangkal keberadaannya di Timor-Leste, meskipun penentuan nasib sendiri merupakan aspirasi murni Gereja Timor-Leste, dan satu-satunya cara yang mendasar dan nyata untuk menyelesaikan konflik, serta mengatur masalah-masalah Gereja lokal. Pendekatan ini memungkinkan Vatikan menyeimbangkan tanggung jawabnya terhadap Gereja di Indonesia, tetapi melemahkan kemungkinan kontribusinya, khususnya selama tahun-tahun awal ketika Vatikan secara khusus memperoleh informasi lengkap, dan krisis berada pada titik terburuk. Ketika pihak-pihak lain bersuara, Vatikan berusaha membungkam mereka. Pembungkaman dilakukan kepada banyak orang di Gereja, contohnya kepada Dom Martinho da Costa Lopes, putra Timor asli pertama yang menjadi pemimpin Gereja di Timor-Leste, yang setia sepenuhnya pada Gereja, Sri Paus, dan rakyat Timor, dan yang komitmennya melekat pada cawan penderitaan dan doa, bukan partai politik. Setelah mendiskreditkannya, Vatikan sebaiknya mengakui pelayanan Dom Martinho da Costa Lopes sebagai putra sejati Gereja, dan sebagai wakil pihak-pihak lain di Gereja, khususnya para pastor dan suster di Timor-Leste yang mendampingi umatnya pada masa-masa terkelamnya, dan rekan-rekan Gereja di mana pun mereka berada.

5 Diplomasi perlawanan

352. Timor Timur membentuk kampanye untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan atas tiga garis depan, yaitu: militer, diplomatik, dan klandestin. Bagian ini berhubungan dengan kampanye diplomatik dan mengemukakan kontribusi yang dilakukan oleh: 1) partai-partai politik, termasuk organisasi-organisasi payung Perlawanan, dan 2) diaspora Timor Timur. Usaha aktivis Timor di Indonesia dipaparkan di bagian lain dalam Laporan.

5.1 Partai-partai politik dan badan-badan payung

353. Dari lima partai bersejarah yang terbentuk di Timor Leste setelah Revolusi Bunga Portugal, pada bulan April 1974, hanya UDT dan Fretilin yang terlibat dalam kampanye internasional jangka panjang dengan tujuan menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan. Tiga partai kecil lainnya - Apodeti, KOTA, dan Tralabalista – tidak memiliki kapasitas untuk berperan di luar negeri dan, kecuali Tralabalista, mereka mendukung integrasi dengan

Indonesia.¹ Meskipun demikian, pada pertengahan Juli 1998, kelima partai ini bersatu menolak tawaran otonomi Habibie dan mengimbau diselenggarakan referendum.¹⁹⁶

354. UDT merupakan partai pertama dan pada awalnya terbesar di Timor Leste. Dalam sebuah pernyataan prinsip-prinsip yang disusun pada tahun 1974, UDT melibatkan diri dalam “penentuan nasib sendiri rakyat Timor yang bertujuan membentuk federasi dengan Portugal, sebagai satu cara untuk meraih kemerdekaan”.¹⁹⁷ UDT mengembangkan suatu kebijakan luar negeri, yang mempercayakan João Carrascalão dengan portfolio relasi luar negeri dan, dengan bantuan Partai Demokrat Kristen, mendirikan markas pusat (*Gabinete de Timor*) di Lisboa pada tahun 1974. Meskipun UDT menerbitkan surat edaran dan terlibat dalam semacam kegiatan internasional tetapi tidak memulai membangun dukungan internasional untuk partainya atau penentuan nasib sendiri secara sistematis.²

355. Usaha UDT di Lisboa terlaksana berkat dedikasi beberapa individu, termasuk Moises do Amaral, Paulo Pires dan, belakangan, Vicente Guterres. Seperti yang lainnya, partai itu juga memiliki beberapa penghubung dengan Timor Leste. Tetapi pada tahun-tahun awal, ketika komunikasi sangat sulit, UDT memanfaatkan kontak rahasia yang dilakukan sesekali dengan simpatisan-simpatisan UDT yang berada di wilayah pendudukan, termasuk Mario Carrascalão, Uskup José Joaquim Ribeiro dan Dom Martinho da Costa Lopes.¹⁹⁸ Di Portugal, di mana masyarakat sipil lebih terfokus pada Fretilin, partai tersebut tidak menarik dukungan masyarakat yang signifikan, tetapi orientasi dan kehadiran pro-Portugal di Lisboa memudahkan tujuan Timor Timur di tahun 1980-an, ketika Portugal menambah perhatiannya pada masalah itu.

356. Kekalahan UDT dalam perang saudara dengan Fretilin pada tahun 1975 menghancurkan partai tersebut secara politik dan organisasi. UDT tidak pernah membaik sepenuhnya, dan hal ini sangat melemahkan kontribusinya terhadap usaha penentuan nasib sendiri Timor Timur. Perang itu mengakibatkan terpecahnya kepemimpinan serta anggota-anggota partai tersebut dan marjinalisasinya di Timor Timur. Perselisihannya antara UDT dan Fretilin, yang pada awalnya berbagi cita-cita kemerdekaan dan berkoalisi, semakin mendalam dan berkembang.³ Setelah invasi, perwakilan UDT mengambil posisi menyokong kemerdekaan, berlawanan: secara internasional dengan pejabat-pejabat partai di Portugal; sementara rekan-rekan mereka di Timor Timur menyokong integrasi dalam kesaksian kepada PBB dan Kongres AS. Hal ini merusak kredibilitas partai itu, dan mengakibatkan timbulnya kekacauan dan ketidakpercayaan yang cukup besar secara internasional.⁴

¹ *Partido Trabalhista* (Timor Labour Party) mendukung kemerdekaan, tetapi Indonesia memanfaatkannya sebagai keuntungan propaganda, dan pemimpin-pemimpinnya tampak bekerja sama dengan Indonesia setelah pengambilalihan tersebut. Pat Walsh, *East Timor's Political Parties and Groupings*, Australian Council for Overseas Aid, April 2001, hal. 22.

² Misalnya, James Dunn melaporkan bahwa UDT berhasil meraih minat yang besar di Australia pada tahun 1974-5 tetapi “Horta telah melakukan beberapa kunjungan ke Australia sebelum para pemimpin UDT mengaturnya”. *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 50.

³ Domingos de Oliveira bersaksi kepada Komisi mengenai hubungan buruk dengan Fretilin yang telah timbul sebelum perang saudara dan diperburuk dengan adanya konflik dan akibatnya. Audiensi publik CAVR Nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004) Menyusul invasi Indonesia, sejumlah anggota UDT dibunuh oleh anggota-anggota Fretilin di Aileu, Maubisse, dan Same. (Lihat Bab 7.2; *Extrajudicial Executions and Enforced Disappearances*)

⁴ Mario Carrascalão, Presiden komite pendiri UDT, membela integrasi dengan Indonesia atas nama UDT dalam debat pertama Dewan Keamanan PBB mengenai Timor-Leste setelah invasi Indonesia. Pada tahun 1977, beliau bersaksi kepada Kongres AS sebagai pemimpin UDT. Dalam kesaksian ini beliau mengkritik laporan James Dunn mengenai kekejaman Indonesia pada saat terjadinya invasi sebagai “kebohongan nyata”, menuduh Australia “menyelundupkan senjata”, menyangkal bahwa telah terjadi “serangan udara”, mengatakan bahwa senjata-senjata yang beredar di Dili kebanyakan adalah “buatan Rusia”, mengkritik Fretilin dan mengatakan, bahwa Timor-Leste telah “mendapat banyak dari integrasi kami dengan Indonesia.” (“Pernyataan Mario Carrascalao [sic.], pemimpin dari partai politik Uniao Democrática Timorese di Timor Timur”, dalam *Human Rights in East Timor and the Question of the Use of U.S. Equipment by the Indonesian Armed Forces- Hearing before the Subcommittees on International Organizations and on Asian and Pacific Affairs of the Committee on International Relations*, House of Representatives, 95th on *Human Rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Forces*, 23 Maret 1977, hal. 47-58. Francisco Lopes da Cruz, Presiden UDT pertama, menandatangani Deklarasi Balibo dan Deklarasi 17 Desember 1975 yang membentuk

357. UDT menjadi lebih aktif pada pertengahan 1980-an dan sejak tahun 1993, setelah kembali pada garis demokrasi, merupakan pendukung Timor Leste yang efektif. Namun, diplomasi Perlawanan selama dekade pertama setelah invasi Indonesia, sebagian besar justru dilakukan oleh Fretilin.

358. Pada awal keberadaannya, Fretilin membuat dua keputusan kebijakan bersejarah, yang memberi dampak fundamental pada hasil kampanye internasional untuk kemerdekaan Timor-Leste, yaitu: ikut terlibat dalam diplomasi internasional dan memanfaatkan hukum internasional. Kedua keputusan tersebut lahir dari apresiasi realistis tentang kelemahan dan kerentanan Timor Timur, dan berhasil karena pemanfaatan kekuatan-kekuatan negara lain demi kepentingan Timor-Leste. -

5.1.1 Kebijakan internasionalisasi Fretilin

359. Sejak awal Fretilin terlibat dalam lobi dan jaringan sistematis internasional. Sejak pertengahan tahun 1974, perwakilan Fretilin yang bermarkas di *Casa de Timor* di Lisboa berusaha mencari dukungan para politisi, pemerintah dan masyarakat umum Eropa. Utusan pemerintah Australia di Stockholm, melaporkan adanya permintaan informasi dari beberapa pemerintah mengenai situasi Timor Timur menyusul kunjungan-kunjungan Fretilin ke Eropa.¹⁹⁹ Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Mari Alkatiri dan Roque Rodrigues menghadiri perayaan kemerdekaan Mozambique pada bulan Juni 1975. Menyusul sebuah pernyataan dukungan terhadap Fretilin oleh konferensi 49 negara Afro-Asia di Mozambique pada bulan September 1975, Mari Alkatiri mengunjungi beberapa negara Afrika pada bulan November. Sementara perwakilan Fretilin di Timor Leste terfokus pada wilayah sekitarnya. Alarico Fernandes mengunjungi Australia. José Ramos-Horta mengunjungi Indonesia, Selandia Baru, Fiji dan Australia – kunjungan ke Australia pada saat itu lebih dari satu kali. Sebagai imbalan, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan jurnalis mengunjungi Timor Timur, terutama dari Australia tetapi juga dari Portugal.

360. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri menjadi topik perdebatan kepemimpinan Fretilin pada tahun 1975. Sebagian memandang bahwa diplomasi bergaya Barat tidak berguna, dan menyatakan bahwa Timor Leste harus lebih fokus pada kepercayaan diri dan perjuangan bersenjata. Sebagian lainnya mendukung pembentukan garis depan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya di wilayah sekitar, termasuk gerakan pendukung di Indonesia. Walaupun demikian kebijakan resmi Fretilin tetap pro-ASEAN, dan menolak pendekatan-pendekatan dari Irian Jaya dan Maluku Selatan.²⁰⁰

361. Menyusul Deklarasi Kemerdekaan pada bulan November 1975, Fretilin memilih untuk menginternasionalkan perjuangan kemerdekaan. Salah satu keputusan pertama Kabinet Republik Demokratik Timor-Leste yang baru dibentuk, adalah membuka garis depan diplomasi dengan mengirim misi tingkat tinggi ke luar negeri. Delegasi ini terdiri dari Mari Alkatiri, menteri Hubungan Politik, Rogerio Lobato, menteri Pertahanan, dan José Ramos-Horta, menteri Hubungan Luar Negeri dan Informasi. Riwaiat diplomasi Timor-Leste mungkin akan sangat berbeda, jika mereka tidak terburu-buru meninggalkan Timor sebelum kedatangan pasukan Indonesia.²⁰¹ Mereka bergabung dengan tiga perwakilan Fretilin lainnya yang telah berada di luar negeri, yaitu: Abilio Araujo, menteri Ekonomi dan Sosial, Jose Luis Guterres, Guilhermina Araujo, wakil menteri Hubungan Ekonomi, dan Roque Rodrigues, duta besar untuk Mozambique. Tidak satu pun dari kelompok ini dapat kembali ke Timor Timur, sehingga selama kurang lebih 24 tahun Indonesia berkali-kali menyatakan, bahwa mereka tidak mewakili situasi Timor-Leste yang sebenarnya. [NC to Editor: Jabatan para leader fretilin disesuaikan dengan Bab Sejarah]

Pemerintah Propinsi Indonesia di Timor-Leste. Indonesia mengirim João Carrascalão ke Afrika dan Paolo Pires ke Belanda, tapi keduanya ditarik kembali ketika diketahui bahwa mereka menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang situasi yang sebenarnya di Timor-Leste.

362. Meskipun tujuan utama mereka adalah memperkenalkan Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste secara internasional, aktivitas mereka menjadi dasar yang kuat bagi kampanye penentuan nasib sendiri di masa depan. Merekalah yang membuka garis depan diplomasi utama di Eropa, Afrika, Amerika Serikat dan di PBB. Hubungan yang kuat dan berkesinambungan juga dipelihara bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil di banyak negara. Jaringan ini merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara terbelakang dan miskin, yang hampir tidak memiliki sumber daya sendiri, dan hanya bersekutu dengan beberapa negara.

363. Delegasi Eksternal Fretilin mendirikan markasnya di Maputo, Mozambique, di bawah pimpinan Mari Alkatiri. Pemerintah Mozambique memberi dukungan yang kukuh selama konflik. Selain memberi basis operasional, dukungan ini juga berupa pendanaan, paspor, dukungan diplomatik di PBB, dan kesempatan belajar.¹ Misi-misi Timor-Leste juga dibuka di Portugal (Abilio Araujo), Angola (Roque Rodrigues, satu periode sebagai Duta Besar di Mozambique), dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (José Ramos-Horta). Tugas mereka mewakili Timor-Leste di luar negeri, dan mempromosikan perjuangan kemerdekaan, baik di negara asalnya maupun di negara-negara lain. Dukungan kuat dari negara-negara Afrika terhadap Timor-Leste di PBB merupakan hasil diplomasi yang berbasis di Mozambique ini. Anggota-anggota perempuan Fretilin yang berbasis di Mozambique juga aktif secara diplomatik dan mewakili Timor-Leste lebih jauh lagi, termasuk ke Timur Tengah.²

364. Karena pengaruh Indonesia, kehadiran Fretilin tidak diterima di sebagian besar wilayah Asia-Pasifik, sehingga mulai April 1976 Pemerintah Australia melarang kunjungan pejabat-pejabat Fretilin ke Australia.³ Pemerintah-pemerintah sosialis di Asia Timur yang mengakui eksistensi Republik Demokratik Timor-Leste hanya sebagian kecil. Pada awalnya Republik Rakyat Cina memberi beberapa dukungan diplomatik dan finansial kepada Fretilin.⁴ Kunjungan-kunjungan dilakukan ke Republik Demokrasi Kamboja, sedangkan kontak persaudaraan dengan Republik Demokrasi Korea, serta Republik Demokrasi Laos tetap dipertahankan.⁵ Republik Vanuatu, setelah merdeka pada tahun 1980, merupakan suatu pengecualian di Pasifik Selatan, di mana pemimpinya, Walter Lini dan Barak Sope, mendukung Timor Timur di PBB dan menyetujui pembentukan usaha ekonomi oleh Abilio Araujo di Vanuatu, untuk membiayai kegiatan-kegiatan diplomatik Fretilin.⁶

365. Penolakan akses ke Australia terhadap pejabat-pejabat Fretilin diatasi dengan kehadiran kader-kader Fretilin dan kelompok-kelompok solidaritas yang mewakili Fretilin secara *de facto* di negara itu. Kegiatan-kegiatan mereka, di antaranya, mengoperasikan penghubung radio yang berbasis di Darwin, yang hingga penutupannya pada tahun 1978, merupakan satu-satunya jalur komunikasi langsung dua arah yang ada, antara Perlawanan Fretilin di Timor Timur dengan garis depan diplomatik. Meskipun demikian anggota-anggota Fretilin di Australia bersikap lamban untuk bersiap berperan secara publik. Mereka merupakan minoritas di tengah komunitas yang

¹ Sebagian besar pemimpin dan pelajar Fretilin yang bergabung dengan mereka yang dari Lisboa menyelesaikan kuliahnya di Mozambique dalam bidang studi seperti pertanian, hukum dan hubungan internasional. Sebagian besar dari mereka kembali ke Timor-Leste setelah tahun 1999, dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk melayani negara baru tersebut. Wawancara CAVR dengan Harold Moucho, 19 Maret 2005. Tabungan bank resmi Fretilin pada waktu itu adalah di Mozambique.

² Anggota-anggota perempuan Fretilin di Mozambique termasuk Ana Pessoa, Filomena de Almeida, Adelina Tilman, Marina Ribeiro, Madalena Boavida. Adelina Tilman adalah bagian dari tim Fretilin di PBB.

³ Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, memberitahu President Soeharto pada bulan November 1975, bahwa Pemerintahnya tidak akan menerima Ramos-Horta atau perwakilan Fretilin lainnya jika mereka datang ke Australia. (Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 580-581. Pelarangan itu ditarik pada tahun 1993 oleh Pemerintah Buruh Hawke.

⁴ Cina mengakui Republik Demokratik Timor-Leste dan menegaskan dalam pembelaannya di Dewan Keamanan. Mária Alkatiri dan José Ramos-Horta mengunjungi Cina pada awal terjadinya konflik. Mária Alkatiri, kesaksian kepada Audiensi CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003.

⁵ Rogério Lobato, Commander-in-Chief, Pasukan Revolusioner Timor-Leste, kepada leng Sary, Wakil Perdana Menteri Luar Negeri, Republik Demokrasi Kamboja, 21 Desember 1977.

⁶ Perwakilan Vanuatu di PBB, Robert van Lierop, secara aktif mendukung Timor-Leste di sejumlah forum. Usaha ekonomi itu gagal tetapi adalah bukti upaya dan kreativitas yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran kampanye internasional.

sebagian besar penganut UDT dan, sebagai pengungsi, mereka takut akan diusir jika mereka berpihak secara terang-terangan pada Fretilin menentang Indonesia. Demonstrasi pertama di mana bendera Fretilin dan RDTL dikibarkan secara terang-terangan, diadakan di Sydney pada tahun 1981. Situasi politik Australia menenangi setelah pemilihan Pemerintahan Buruh Hawke pada tahun 1983. Banyak orang Timor, termasuk pengurus-pengurus Fretilin seperti Lay Kuon Nhen, Abel Guterres dan yang lainnya, turut ambil bagian dalam *rally* publik di Melbourne, yang diamanatkan oleh Abilio Araujo dan Roque Rodrigues, dan mereka juga menghadiri demonstrasi pada konferensi Partai Buruh di Canberra pada tahun yang sama. Komite Fretilin resmi yang pertama dibentuk di Sydney pada tahun 1986, dengan Harold Moucho sebagai koordinator. Sampai pada akhir 1980-an Fretilin telah berdiri mapan di beberapa bagian di Australia, termasuk Darwin, Sydney, Melbourne dan Perth dan mempunyai jaringan komunikasi yang baik dengan gerakan perlawanan di Timor Timur. Agio Pereira adalah wakil Fretilin pertama di Australia. Yang lainnya adalah Alfredo Ferreira Borges, Estanislau da Silva dan Francisco Carlos. Mereka bertanggung jawab atas berbagai bagian Australia dan wilayah, dan bekerja keras membangun relasi dengan partai-partai politik, Gereja, masyarakat sipil dan media, guna memperoleh dukungan bagi Timor-Leste. Pada tanggal 14-20 Agustus 1998 Fretilin mengadakan Konferensi Luar Biasa di Sydney.

5.1.2 Pemanfaatan hukum internasional

366. Kampanye awal Fretilin berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Unilateral (UDI) pada tanggal 28 November 1975, dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Ketika mereka tiba di PBB di New York pada tanggal 11 Desember 1975, Abilio Araujo dan José Ramos-Horta memperkenalkan diri sebagai menteri-menteri RDTL. Dalam pidatonya kepada Dewan Keamanan pada tanggal 15 Desember, José Ramos-Horta mengadukan UDT, menyatakan UDI tanggal 28 November sebagai “sebuah tindakan heroik untuk menentukan nasib sendiri”, dan meminta Dewan untuk mengutuk invasi Indonesia sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat yang diakui oleh “negara-negara lain yang jumlahnya semakin bertambah”.²⁰² Pada tanggal 12 April 1976, dia memberitahu Dewan Keamanan, bahwa Fretilin “tidak lagi mengakui kedaulatan Portugis atas Timor Timur”, dan dengan demikian menolak pendapat PBB bahwa Portugal tetap menjadi kekuasaan yang mengatur di Timor Timur. RDTL, dikatakannya, siap menghadapi Indonesia dan Portugal hanya dalam hubungan “antara pemerintah dan pemerintah, atau negara dan negara”.²⁰³

367. Walaupun demikian, tidak lama kemudian menjadi jelas bahwa, dalam pernyataan José Ramos-Horta, “pengakuan Republik Demokratik Timor-Leste tidak akan terwujud”, karena hanya segilintir negara yang siap mendukung negara baru tersebut. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Tentunya dalam beberapa minggu pertama setelah invasi, saya dan yang lainnya berargumen dengan penuh semangat mengenai Republik Demokratik Timor-Leste. Tetapi sekitar 1976-77, kami memutuskan untuk merubah sikap dan berkonsentrasi pada Timor-Leste, sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri dengan hak atas penentuan nasib sendiri...Kami akan berada dalam posisi hukum yang lebih kuat dengan dasar penentuan nasib sendiri, bagi sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

368. Pada saat itu seorang rekan yang tidak senang dengan keputusan tersebut menyarankan, agar mereka mempertahankan jabatan kementeriannya supaya ketika pemerintah-pemerintah negara menyambut mereka, berarti mereka mengakui RDTL. Ramos-Horta menjawab: “Satu-satunya masalah dengan permintaan itu adalah kita mungkin tidak akan

pernah mendapat undangan untuk pergi ke mana pun!”¹ Walaupun tidak ditarik secara resmi, ² kebijakan tahun 1975 secara diam-diam dikesampingkan.

369. Keputusan Fretilin untuk lebih memanfaatkan sistem diplomasi internasional daripada perang, berdasar pada penilaian pragmatik terhadap realitas politik. Kemunduran strategis ini tidak langsung menghasilkan hasil politik, dan tetap memerlukan waktu untuk diterjemahkan ke dalam hal-hal yang praktis, tetapi menguntungkan Timor-Leste dalam jangka panjang. Penentuan nasib sendiri memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip dasar yang dipertaruhkan, daripada tuntutan-tuntutan suatu kelompok yang berkepentingan. Hal ini meningkatkan legitimasi serta daya tarik terhadap isu ini, serta menajamkan fokus pada tanggung jawab komunitas internasional, Portugal dan terutama PBB. Dalam beberapa waktu, terbentuk hubungan yang luas dengan Portugal, orang Timor yang bukan anggota Fretilin, Gereja dan masyarakat sipil. Selanjutnya perjuangan dijadikan sebagai isu moral dan hak asasi manusia untuk menentang Indonesia dan sekutu utamanya, terutama negara-negara demokratis Barat yang menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia.

5.1.3 Upaya Diplomasi di PBB

370. Sebagai badan dunia yang bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak atas penentuan nasib sendiri, PBB merupakan arena utama dalam penyelenggaraan usaha diplomasi Perlawanan. Usaha ini dibebankan terutama pada Fretilin karena UDT dan aktivis-aktivis independen Timor tidak melibatkan diri hingga pertengahan 1980-an. Fretilin mempercayakan tugas ini kepada José Ramos-Horta sebagai wakilnya di New York selama 13 tahun, hingga pengunduran dirinya dari keanggotaan pada tahun 1998.

371. Pekerjaan itu membutuhkan banyak usaha, keahlian, kreativitas, dan daya tahan yang sangat tinggi. “Orang-orang Indonesia”, ungkap José Ramos-Horta kepada Komisi, “sangat menguasai keadaan setiap saat”.²⁰⁴ Adalah sangat penting memahami cara kerja PBB itu sendiri dan melalui studi dan diskusi, mencapai suatu tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan internasional serta politik negara-negara anggota berpengaruh. Dari hari ke hari, usaha-usaha tersebut berjalan, termasuk melobi, kewaspadaan, memonitor informasi, serta membangun dan memelihara hubungan dengan sejumlah besar negara, pejabat, jurnalis dan masyarakat sipil. Usaha itu lebih intensif pada titik-titik tertentu dalam kalender PBB, terutama ketika hal-hal yang dipertaruhkan bagi Timor Leste memuncak. Anggota-anggota Delegasi Eksternal lainnya bergabung dengan José Ramos-Horta dalam kesempatan ini. Untuk memastikan komplementaritas dan konsistensi, usaha ini tetap harus dikoordinasikan dengan kegiatan diplomasi Perlawanan di negara-negara tertentu, yang juga membutuhkan keahlian yang serupa tetapi dalam skala yang lebih kecil dan lebih ringan.

372. Selain skala tugas politik yang monumental itu, José Ramos-Horta dan rekan-rekan Fretilinnya harus juga menghadapi banyak tantangan praktis dan organisasi. Delegasi itu mengalami kekurangan sumber daya manusia dan finansial. Pada awalnya misi Guinea-Bissau menyediakan tempat untuk perwakilan Fretilin di kantornya. sedangkan dukungan staf yang tidak pernah cukup disediakan oleh para sukarelawan.³ Komunikasi dengan Timor Timur bersifat tidak

¹ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 26 Mei 2004. Kira-kira 20 negara, yang sebagian besar di Afrika, mengakui RDTL.

² Dalam keputusannya, Permanent People’s Tribunal yang disponsori oleh Fretilin, diadakan di Lisboa 19-21 Juni 1981, mengakui legitimasi dan keabsahan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. (*Sessão Sobre Timor-Leste, Lisboa, 19/21 Junho 1981, Sentença*), hal. 29-30. Meskipun demikian, RDTL diminta tidak membantu secara legal. Pada tahun 1980, kasus Fretilin melawan pemerintah Belanda mengenai penjualan corvette ke Indonesia ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa RDTL atau pun Fretilin tidak memiliki status yang sah. Krieger, hal. 298.

³ David Scott membantu membuat misi itu dengan bantuan dari Pusat Metodelis Perempuan PBB. Salah satu dari orang Australia yang terakhir meninggalkan Timor-Leste pada malam sebelum terjadinya invasi Indonesia, dia hampir berangkat langsung ke New York atas nama Asosiasi Timor-Leste Australia untuk membantu Fretilin melobi Dewan Keamanan. Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

langsung dan tidak berkala. Sebagai gerakan kemerdekaan, delegasi itu tidak diakui statusnya sebagai sebuah pemerintahan atau pun pengamat.¹ Karena itu perwakilan Fretilin tidak mampu “memperdagangkan” suara, hibah atau bahan dagangan sebagai imbalan atas dukungan. Semua bergantung pada niat baik negara-negara lain, terutama Mozambique, Guinea-Bissau dan negara-negara bekas jajahan Portugis Afrika lainnya, yang baru merdeka. Dukungan ini dilengkapi pada awalnya dengan adanya dukungan dari Duta Besar Tanzania untuk PBB, Salim A Salim, Ketua Komite Khusus Dekolonisasi, dan Huang Hua, wakil Republik Rakyat Cina.

373. Portugal bersikap mendukung dalam perdebatan PBB tetapi tidak secara aktif. Sebaliknya Indonesia telah memiliki kekuatan karena memiliki kedutaan besar di negara-negara penting, dan tanpa perlu pertimbangan pola pemilihan suara di PBB, memiliki pula dukungan diplomatik dari sebagian besar negara-negara Barat, Muslim dan Asia, ditambah dengan bantuan ekonomi dan militer dari Barat yang cukup signifikan. James Dunn berkomentar: “Di dalam PBB perjuangan ini ibarat perjuangan antara Daud dari Timor melawan Goliath dari Indonesia”.² Koordinasi dengan diplomat Fretilin lainnya sulit dan membutuhkan banyak biaya. Di samping itu, delegasi dirintangi oleh perbedaan ideologi internal dan persepsi yang merusak (yang terkadang dikonfirmasi oleh pernyataan sendiri dan aliansi), bahwa dalam Perang Dingin Fretilin telah ambil bagian menentang negara-negara Barat.³ Selain itu Fretilin harus menghadapi upaya-upaya sistematis Indonesia, dan orang-orang Timor yang bersaksi kepada PBB mendukung integrasi guna menggerogoti kredibilitasnya. Kepada Dewan Keamanan mereka mengatakan bahwa Fretilin tidak mewakili mayoritas pendapat di Timor Leste, dan beralasan bahwa dari lima partai yang ada di Timor, hanya Fretilin yang menentang integrasi, dan bahwa Fretilin telah terlibat dalam kegiatan terorisme di Timor Timur.⁴

374. Pada awalnya mayoritas suara dalam Dewan Keamanan dan Majelis Umum berpihak pada Timor Timur, dan menjunjung tinggi hak atas penentuan nasib sendiri. Namun jumlah pendukung itu tidak mencerminkan realitas kekuatan politik dan ekonomis Indonesia, atau pun meningkatnya keyakinan bahwa pendudukan Indonesia di Timor-Leste tidak dapat diubah kembali. Walaupun Fretilin telah berusaha, namun naskah resolusi semakin melemah antara tahun 1975 dan 1981, dan jumlah negara baik yang menolak atau pun yang *abstain* ketika voting di sidang PBB semakin bertambah. Pada tahun 1981 negara-negara yang mendukung Timor-Leste sebanyak 54 negara, 42 negara yang menolak, dan 46 negara lain yang *abstain*. Ini berarti secara global hanya 34% negara-negara yang mendukung kasus Timor-Leste.

375. Strategi yang berbeda-beda telah dicoba, dengan tingkat kesuksesan yang bermacam-macam. Fretilin berhasil mengirim misi pencari-fakta PBB ke Timor-Leste pada tahun 1976, tetapi Indonesia memblokir utusan PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi, untuk menemui pemimpin-

¹ Tidak seperti organisasi-organisasi Palestina dan Afrika Selatan, ANC dan PAC, Fretilin tidak diberi status pengamat di PBB. Walaupun demikian, namanya diakui dalam preamble resolusi Majelis Umum antara tahun 1976 dan 1982. Dalam Resolution 36/50 tahun 1981, Fretilin disebut sebagai “gerakan pembebasan Timor-Leste”. Krieger hal. 27.

² José Ramos-Horta, Prakata dalam *Towards a Peaceful Solution in East Timor*, East Timor Relief Association (ETRA), NSW, Australia, 1996, hal. 7. Cerita dalam Alkitab mengenai Daud dan Goliath (1 Samuel, 17:1-58) adalah perumpamaan yang tepat untuk Timor-Leste. Daud mempelajari keberanian dan ilmu berperangnya sebagai seorang anak gembala yang melindungi sekumpulan hewan miliknya dari hewan liar, termasuk dari singa dan beruang. Dalam waktu senggangnya, dia mengembangkan dua keahlian lain – musik dan puisi. Dia menghadapi Goliath, si Raksasa Filistin, seorang diri dan mengalahkan kekuatan superior Goliath dengan sebuah ketapel.

³ David Scott menulis: “Abilio Araujo melihat perjuangan dalam konteks Marxis-Leninis yang dia dapatkan di Lisboa. Ia and José Ramos-Horta berdiskusi dan berdebat di Portugal mengenai pendekatan-pendekatan dan terminologi kebijakan. Abilio ingin kami menggunakan bahasa Marxis dalam membuat pernyataan kepada media; José memilih untuk menggunakan pendekatan politik yang lebih netral dan terfokus secara nyata”. Naskah yang tidak diterbitkan, 2004.

⁴ Pernyataan pertama Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB atas Timor Timur, dikirim oleh Anwar Sani, pada tanggal 15 Desember 1975, termasuk beberapa tuduhan terorisme oleh Fretilin. (Krieger, hal. 60.) Orang-orang Timor yang bersaksi atas nama Indonesia dalam sesi Dewan Keamanan ini adalah Mário Carrascalão (UDT), José Gonçalves (Independenti) dan José Martins (KOTA). Pernyataan mereka, yang termasuk serangan-serangan terhadap Fretilin dan José Ramos-Horta, menentang kredibilitas dan pembelaan Fretilin dalam PBB, dan memperkuat persepsi internasional bahwa masyarakat Timor-Leste sangat terpecah-pecah dan tidak stabil. Krieger, hal. 70-77. José Martins “hengkang” secara formal pada bulan Maret 1976 dan menyerahkan sebuah laporan rahasia kepada PBB yang berisi perincian rencana-rencana Indonesia terhadap Timor-Leste.

pemimpin Perlawanan Fretilin, dan kunjungan itu pun tidak membuahkan hasil. Sekretaris Jenderal PBB, Kurt Waldheim, tidak menuntaskan hal ini, dan kasus Timor-Leste pun tidak dimasukkan kembali ke dalam agenda Dewan Keamanan sampai tahun 1999. Untuk membeli waktu dan memperkuat posisi legal Timor-Leste, José Ramos-Horta mengusulkan membujuk Majelis Umum untuk meminta *Advisory Opinion* dari Mahkamah Internasional mengenai soal, pernah atau tidak pernah dilakukan tindakan penentuan nasib sendiri yang pantas seperti yang dikatakan oleh Indonesia. Walaupun demikian Portugal tidak setuju, dan ide itu pun tidak dikembangkan.¹ Dengan bantuan Francesco Vendrell di Sekretariat PBB, José Ramos-Horta berhasil membuat Majelis Umum menyinggung situasi kemanusiaan di Timor-Leste dalam resolusi-resolusi yang diadopsi pada tahun 1979-1981. Resolusi-resolusi tersebut mencakup akses bagi UNICEF, UNHCR dan WFP untuk memberi bantuan dan, secara tidak langsung, berhasil memperingatkan komunitas internasional mengenai dampak negatif pendudukan Indonesia, dan untuk menentang pelarangan aksesnya. Namun Indonesia hanya memberi akses kepada UNICEF.²

376. Salah satu cara mengukur kesuksesan diplomasi Perlawanan di dalam negeri dan di PBB, adalah dengan menghitung referensi terhadap Timor-Leste yang dibuat dalam debat-debat PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi, bahwa ia menghadiri sejumlah besar sesi Majelis Umum PBB hanya dengan harapan, akan mendengar isu Timor-Leste disebut, terutama oleh tokoh-tokoh senior pemerintah. Tetapi yang seringkali ia dapat hanya kekecewaan.

*Kita hitung apa yang kita dengar di Majelis Umum. Ketika seorang kepala negara, perdana menteri atau menteri luar negeri, membawa sebuah isu kepada sidang pleno Majelis Umum, itu merupakan sesuatu yang signifikan. Setiap tahun saya duduk di situ, mendengar, menghitung, dan bahkan setiap kali saya dengar satu acuan kecil saja pun, saya akan terkesima: 'wow, ini dia!' Tapi ini tidak banyak terjadi.*²⁰⁵

377. Ketika itu Delegasi Eksternal Fretilin mengalami perjuangan internal ideologi dan kepemimpinan yang berat, bersamaan dengan "pembersihan" internal Fretilin di Timor-Leste yang diperburuk oleh pemerosotan kegiatan militer, termasuk kematian pemimpin Fretilin, Nicolau Lobato, dan situasi diplomatik Timor-Leste yang rumit. Semua masalah itu memuncak pada tahun 1978 di Maputo, ketika Mari Alkatiri, Marina Ribeiro, José Ramos-Horta dan Ana Pessoa dijadikan tahanan rumah oleh rekan-rekan Fretilin. Ramos-Horta dikenai tuduhan "kapitulasionisme", dan ia menilai peristiwa tersebut sebagai "buruk dan sadis".²⁰⁶ Ia mengatakan kepada Komisi:

*Saya dituduh mau bernegosiasi dengan Indonesia, hanya karena saya tidak setuju dengan slogan di Timor waktu itu...dari Komite Sentral, yakni 'Negosiasi, Takkan Pernah'.*²⁰⁷

378. Ia berpendapat, bahwa fleksibilitas untuk berdialog, termasuk dengan Indonesia, seharusnya tidak disamakan dengan menyerah, tetapi diakui pentingnya untuk mengakhiri konflik tersebut. Ia mengatakan pula bahwa Abilio Araujo mendalangi peristiwa itu, dengan dukungan

¹ Portugal percaya bahwa Timor Timur belum menggunakan hak-haknya, dan bahwa Timor Timur seharusnya tidak menanyakan sanksi dengan meminta pendapat kepada ICJ. Dalam aksi terpisah pada tahun 1991, Portugal membawa Australia ke ICJ atas pelanggaran, inter alia, terhadap hak atas penentuan nasib sendiri Timor-Leste melalui perjanjian Australia dengan Indonesia untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber minyak dan gas di Laut Timor.

² Pada bulan Juni 1982, UNICEF dengan Palang Merah Indonesia memulai program untuk anak-anak, ibu-ibu dan keluarga mereka. Sebagai bagian dari program, UNICEF mengajarkan bahasa Indonesia kepada perempuan-perempuan Timor dengan alasan, bahwa mereka harus mengetahui bahasa Indonesia untuk dapat memahami cara memberi makan dan informasi kesehatan lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia menarik kritik kuat dari José Ramos-Horta. Wawancara CAVR, 26 Mei 2004. UNHCR memberi kontribusi dengan mendanai beberapa repatriasi ke Portugal dan Cape Verde.

dari Rogério Lobato dan aktivis Australia Denis Freney, yang juga hadir dalam pertemuan-pertemuan.¹ Isu tersebut diselesaikan dengan bantuan dari wakil-wakil Frelimo.

379. Peristiwa itu merusak Fretilin secara internal dan menghambat kampanyenya internasional, walaupun hal ini tidak diumumkan secara luas. Karena kesibukannya di Mozambique dari bulan September 1978 sampai Februari 1979, José Ramos-Horta terpaksa membatalkan kunjungannya ke Selandia Baru, yang telah berhasil diatur oleh kelompok-kelompok solidaritas yang berjuang di depan umum dengan pemerintah mereka, serta tidak dapat mewakili Timor-Leste pada Majelis Umum PBB tahun itu. Delapan negara menarik dukungan terhadap Timor-Leste selama sesi itu. Kecenderungan kemunduran tersebut sedikit berbalik pada tahun berikutnya. Berkat kerja keras delegasi Fretilin, Timor-Leste berhasil meraih kembali tiga suara.

5.1.4 Voting tahun 1982 di PBB

380. Sesi Majelis Umum PBB tahun 1982 menjadi ajang uji kekuatan bagi pemeran utama, dan merupakan detik-detik yang kritis bagi Timor-Leste. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pinto Balsemão, Portugal menunjukkan niat untuk membahas kembali isu tersebut, menyusul sebuah pernyataan dari Dewan Kementerian pada tahun 1980, yang menyetujui penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dan adanya inisiatif diplomatik. Sementara Indonesia mendapat, *inter alia*, dukungan lebih jauh dari Australia. Beberapa hari sebelum voting di Majelis Umum, mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mengatakan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB:

*Ini adalah saat waktu yang tepat untuk mencoret persoalan Timor Timur dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berhenti menyibukkan dan mengusik bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan Pasifik.*²⁰⁸

381. Sebagai tanggapan, José Ramos-Horta mengusulkan agar isu tersebut ditujukan pada kebijaksanaan Sekretaris Jenderal PBB, kemudian kepada Javier Perez de Cuellar (1982-91). Di apartemen bawah tanah yang sederhana di suatu bilangan East 55th Street, New York, ia menyusun sebuah rancangan resolusi sederhana, dengan harapan bahwa negara-negara anggota akan menerima rancangan tersebut. Ia yakin bahwa rancangan resolusi tersebut merupakan “kontribusi yang paling berharga” yang ia berikan pada perjuangan Timor-Leste.²

382. Indonesia berusaha keras menentang. Tetapi dengan dukungan dari Roque Rodriques, José Luis Guterres, dan sekutu utama Timor-Leste – Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, São Tomé dan Príncipe, Portugal, Brazil, Vanuatu, Zimbabwe, Benin dan Algeria – resolusi tersebut lolos, meskipun hanya dengan mayoritas empat suara. Ramos-Horta mengaku kepada Komisi bahwa “masalah Timor tidak akan pernah membaik jika kalah dalam voting itu”.²⁰⁹ Lebih dari setengah jumlah suara untuk Timor-Leste didapat dari negara-negara Afrika tempat markas delegasi Fretilin berada.³

383. Secara operasional resolusi itu merupakan suatu pertarungan, karena masa depan Timor-Leste dipercayakan penuh kepada dua pihak, yang oleh Fretilin masih diragukan

¹ José Ramos-Horta mengucapkan terima kasih atas kontribusi Denis Freney kepada Timor-Leste dalam Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo pada tanggal 10 Desember 1996. Meskipun demikian, ia mengkritik sikap “destruktif” Denis Freney pada saat ini, dan menyebutnya “sangat berdedikasi pada Timor-Leste tetapi melalui kepercayaan ideologinya sendiri, dan Abilio adalah teman dalam perjuangan yang ideologinya benar-benar terpercaya” . Wawancara CAVR, 26 Mei 2004.

² Resolusi Sidang Umum 37/30, 23 November 1982. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 29 Juli 2004.

³ 27 negara di Afrika yang mendukung Timor-Leste, 6 menolak, dan 13 abstain.

komitmennya, yaitu: Pemerintah Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB.¹ Referensi untuk berkonsultasi dengan Fretilin dan orang Timor lainnya dalam rancangan Ramos-Horta, diganti dalam naskah akhir dengan sebuah referensi yang tidak jelas artinya untuk [berkonsultasi dengan] “semua pihak yang bersangkutan secara langsung”, yang kemudian akan diputuskan oleh Sekretaris Jenderal, Javier Perez de Cuellar, siapa yang harus dikonsultasikan; dan, untuk Portugal, agar memastikan bahwa pandangan pihak Timor didengar juga dalam proses itu.

384. Tanda-tanda pertama itu tidak diterima dengan optimis. Hampir 12 bulan setelah isu tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, José Ramos-Horta secara publik menuduh Portugal telah bersikap acuh, apatis dan mengkhianat²¹⁰. Dua belas bulan kemudian, pada Agustus 1984, Lord Avebury, Ketua Kelompok Hak Asasi Manusia di Parlemen Inggris, merasa terpanggil untuk mengatakan kepada Sekretaris-Jenderal, bahwa Laporan Perkembangannya hanya ditujukan untuk komunikasi dengan Portugal dan Indonesia, dan “tidak ada indikasi adanya upaya untuk berunding dengan Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka (Fretilin) atau pun partai-partai Timor lainnya”.²¹¹

385. Keputusan untuk menggunakan sistem internasional ternyata berhasil. Isu Timor-Leste yang tetap ada dalam agenda PBB, mencegah terjadinya voting yang berpotensi fatal dalam Majelis Umum, dan harapan untuk solusi diplomatik tidak memudar, bahkan berkembang kembali saat angin segar berbalik mendukung Timor-Leste pada tahun 1990-an. Perlawanan tetap terfokus pada PBB dan memberi perhatian lebih pada forum-forum PBB lainnya, terutama pada rapat-rapat tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dan Komite Khusus Dekolonisasi PBB di New York, yang keduanya memperbolehkan debat mengenai penentuan nasib sendiri. Selain melobi dan membuat pernyataan sendiri, kelompok Perlawanan berhasil mendorong partisipasi masyarakat sipil (Lihat bagian mengenai masyarakat sipil internasional di bawah).

5.1.5 Pembentukan kembali partai-partai

386. Sejak tahun 1980-an, Fretilin dan UDT mengalami sejumlah perubahan yang mempengaruhi upaya diplomasi internasional mereka, dan langkah demi langkah memberikan kontribusi, paling sedikit untuk membentuk suatu koalisi parsial, guna mempromosikan upaya penentuan nasib sendiri.

387. Tahun 1981, setelah hampir hancur, Fretilin membentuk Dewan Revolusioner Perlawanan Nasional (*Conselho Revolucionario de Resistencia Nacional*, CRRN). Dewan itu dibentuk di Timor-Leste dengan masukan dari Abilio Araujo di Lisboa. Dari sudut pandang kampanye diplomatik, kontribusi yang penting dari badan baru ini untuk menunjukkan munculnya kembali Fretilin dan Perlawanan di dalam, dihubungkan kembali dengan perwakilan eksternal setelah beberapa tahun terisolasi secara paksa antara satu dengan lainnya. Di luar Timor-Leste, CRRN sendiri tidak banyak diketahui. Namun pertemuan Xanana Gusmão dengan komandan Pasukan Indonesia di Timor Leste, Kolonel Purwanto, pada bulan Maret 1983 di Lariguto, yang juga dihadiri Mario Carrascalão, dipublikasikan luas secara internasional dan sangat bermanfaat untuk mengembalikan dukungan kepada Timor-Leste.² Rencana Perdamaian Fretilin, yang diluncurkan secara internasional oleh José Ramos-Horta pada bulan Juni 1984 atas inisiatif dari dalam Timor Leste, memberi perhatian baru pada solidaritas internasional untuk bekerja dengan tujuan spesifik yang secara langsung mewakili Timor-Leste dalam pencarian penyelesaian secara tuntas di bawah naungan PBB. Permintaan untuk dilibatkan di dalam proses PBB,

¹ José Ramos-Horta percaya bahwa Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim (1972-1981) harus berbagi kesalahannya atas kegagalan Dewan Keamanan menyelesaikan resolusi tahun 1976 atas Timor-Leste. Dewan Keamanan tidak lagi membahas isu tersebut sampai pada tahun 1999. *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, hal. 122.

² Sebuah pertemuan publik, yang dihadiri 1500 orang, diadakan di Melbourne pada tahun 1983 dalam rangka menyambut Abilio Araujo dan Roque Rodrigues pada kunjungan resmi pertama Fretilin ke Australia setelah pencabutan pelarangan oleh Pemerintah Australia dan untuk mendengarkan laporan mereka mengenai pembicaraan perdamaian Lariguto antara Fretilin dan Indonesia.

bersama dengan Portugal dan Indonesia sebagai partai yang paling “bersangkutan secara langsung”, menjadi fokus utama Perlawanan dan bagian advokasi masyarakat sipil, dan oleh para pemimpin Timor dicanangkan dalam sejumlah besar dokumen dan forum.¹

388. Pembangunan kembali UDT terjadi di luar Timor-Leste, dan melibatkan usaha memperkuat partai itu di Australia. UDT mulai hadir di Australia setelah João Carrascalão bermigrasi ke Sydney dari Portugal pada tahun 1978, dan bergabung dengan para anggota dan pendukung UDT yang telah menetap di Australia sebagai pengungsi sejak perang saudara. Dengan didukung oleh Dominggos de Oliveira, Lucio Encarnação, António Nascimento, Fausto Soares dan teman-teman lainnya, kepemimpinan UDT harus menghadapi banyak tantangan baik individual maupun politik. João Carrascalão memberitahu Komisi, bahwa kehidupan di Australia sangat sulit untuk dimulai, dan bahwa pekerjaan pertamanya di Sydney di sebuah pabrik plastik, bekerja 12 jam sehari dengan putaran shift, dan bahwa belakangan ia terpaksa mengambil pekerjaan kedua sebagai pembersih bis dan kantor, agar dapat mengumpulkan uang untuk bepergian ke luar negeri atas nama Timor-Leste. Pengungsi UDT lainnya di Australia mempunyai pengalaman yang serupa. Ia juga harus menghadapi ketidakpercayaan terhadap UDT dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan beberapa bagian diaspora Timor di Australia.

Saya sangat terlibat dalam Perlawanan di luar negeri. Pada awalnya banyak yang tidak percaya, bahwa saya bukan pro-integrasionis. Karena kakak saya Gubernur, dan UDT tengah menderita dampak propaganda awal yang mengatakan, bahwa UDT menginginkan integrasi...Jadi sangat tidak mudah, banyak orang tidak percaya. Mungkin bahkan rekan-rekan saya dari pimpinan Perlawanan tidak percaya, kalau saya tidak pernah ada di pihak Indonesia.²¹²

389. Setelah berdiri, UDT mengikutsertakan suaranya dalam usaha menuntut penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1982, João Carrascalão merupakan salah satu dari dua orang Timor yang bersaksi dalam Audiensi Senat Australia tentang Timor-Leste.² Pada bulan November 1987, ia mewakili UDT dalam Konferensi Konsultatif Kristen untuk Asia -Pasifik yang pertama mengenai Timor-Leste, yang diadakan di Manila. Konferensi itu menuntut partisipasi langsung dari pihak Timor dalam perbincangan untuk menyelesaikan konflik.

390. Upaya-upaya untuk menjadikan partai sebagai alat yang lebih efektif dan meyakinkan bagi aspirasi masyarakat Timor, dirintangi oleh ketidak-setujuan internal antara para pemimpin UDT di Lisboa dan Australia. Masalah ini akhirnya diselesaikan pada tahun 1993 ketika partai itu, dengan dibantu oleh generasi muda pemimpin-pemimpin UDT yang berkomitmen pada reformasi demokratis, mengadakan sebuah kongres di Portugal yang merupakan pertama kali diadakannya pertemuan seperti ini sejak perang saudara.²¹³ Kongres memilih João Carrascalão sebagai presiden dan mengeluarkan Francisco Lopes da Cruz, presiden pertama UDT, atas “pengkhianatan terhadap partai, bangsa dan negara”.²¹⁴ Sejumlah komite regional dibentuk untuk melakukan kampanye yang lebih teratur bagi Timor-Leste. Zacarias da Costa bertanggung jawab atas relasi-relasi internasional dan selama lima tahun berikutnya UDT membawa kasus penentuan nasib sendiri di dalam semua forum PBB dan pertemuan-pertemuan besar masyarakat sipil internasional. Usaha ini berjalan efektif terutama di Eropa di mana, *inter alia*, usaha ini digabungkan dengan lobi oleh Portugal, Fretilin dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk membuat oposisi yang bertambah kuat dengan Parlemen Eropa terhadap penguasaan Indonesia di Timor-Leste.

¹ Sebagai contoh, surat Xanana Gusmão kepada Sekretaris Jenderal PBB, 7 Agustus 1985, dikirim oleh misi São Tomé. Dokumen PBB S/17592; surat kepada Boutros Boutros Ghali, 31 Januari 1992 dan kepada Nelson Mandela, 15 Mei 1992. Surat pertama Xanana Gusmão kepada PBB atas nama CRRN tertanggal 14 Oktober 1982 tetapi lebih seperti laporan situasi yang bersifat menentang daripada sebuah imbauan langsung untuk tindakan PBB.

² Saksi lainnya adalah João Gonçalves, Petugas Sosial untuk komunitas Timor-Leste.

391. Pada tahun 1993 Fretilin juga membahas perjuangan kekuasaan yang telah berlangsung lama antara para pemimpin delegasi eksternal: Mari Alkatiri, Abilio Araujo dan José Ramos-Horta. Para aktivis Timor sangat kritis terhadap perselisihan internal itu dan terus mengimbuai penyelesaiannya. Mereka percaya perselisihan itu memecah-belah Fretilin di luar negeri, mengalihkan perhatian para pemimpin dari peran utama mereka, dan menciptakan kekacauan dalam Perlawanan di Timor Timur, ketika mereka menerima informasi dari luar mengenai salah satu anggota yang menjelekan anggota lain. Mereka juga kritis terhadap ketidak-aktifan Abilio Araujo dan Guilhermina Araujo.²¹⁵ Pengunduran diri José Ramos-Horta dari Fretilin pada tahun 1988 dan pemilihannya sebagai Perwakilan Khusus CNRM, diikuti oleh keputusan Abilio Araujo untuk menerima kepemimpinan Fretilin, berakibat mempertajam perselisihan itu. Pada bulan Agustus 1993, atas inisiatif Mari Alkatiri, dan kemudian wakil ketua, Delegasi Eksternal Fretilin mencabut jabatan Abilio Araujo sebagai ketua delegasi dan perwakilan Fretilin untuk Eropa dan Portugal.¹

5.1.6 Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian

392. UDT dan Fretilin mengakui, bahwa demi kepentingan Timor-Leste, sangat penting untuk menyetujui suatu *modus vivendi*. João Carrascalão mengatakan kepada Komisi, bahwa hubungan pada tahun-tahun awal “amat sangat buruk”, terutama pada tingkat masyarakat. Tahun 1976 Joao dan Mari Alkatiri bertemu secara rahasia di Portugal untuk mendiskusikan masalah ini, tetapi memutuskan bahwa “saat ini masih sulit untuk bekerja sama”. Ia menyatakan “perlu waktu lama sebelum rakyat menyadari, bahwa perjuangan itu tidak dapat dilakukan secara terpisah”.²¹⁶

393. Pembentukan Persatuan Nasionalis (*Convergencia Nacionalista*) pada tahun 1986 merupakan langkah maju. Ide tersebut timbul dari diskusi-diskusi informal antara José Ramos-Horta dan João Carrascalão, tetapi didorong oleh Anacoreto Correia, seorang anggota parlemen Portugis, yang berkunjung ke Timor-Leste pada bulan Juli 1986. Persatuan ini bersifat eksternal bagi Timor-Leste, dan tidak mendapat dukungan yang besar atau pun yang berkelanjutan dari partai mana pun,² kecuali para penandatanganannya – Moises do Amaral (Ketua Komisi Politik UDT) dan Abilio Araujo (Ketua Delegasi Eksternal Fretilin). Mereka berpendapat, bahwa memperlihatkan adanya kesatuan sangat penting untuk mengimbangi dukungan internasional bagi Timor-Leste, dan untuk memenangkan dukungan lebih lanjut di Portugal dan Eropa.³ José Ramos-Horta percaya, bahwa usaha memperlihatkan kesatuan memang membantu:

*Memang membantu karena Portugis waktu itu memanfaatkan perselisihan antara Fretilin dan UDT, untuk membenarkan mereka yang tidak berbuat apa-apa. Memang membantu, tetapi ini benar-benar menjadi perjuangan tiada akhir untuk dapat terus mempertahankannya.*²¹⁷

394. Fretilin memberi kelonggaran pertama dari sejumlah kelonggaran yang diberikan kepada UDT. Fretilin mengakui UDT sebagai sesama partai, dan menyetujui adanya sistem multi-partai

¹ Abilio Araujo dikeluarkan dari Fretilin atas kolaborasinya dengan Indonesia. Beliau sekarang menjabat sebagai Presiden Partai Nasionalis Timor (*Partido Nacionalista Timorense*) yang didirikan di Dili pada tanggal 15 Juli 1999 untuk memasyarakatkan otonomi yang luas di Indonesia yang berdasar pada sebuah “kebijakan cara ketiga” yang menawarkan pilihan yang tidak melibatkan baik “kediktatoran” CNRT atau pun integrasi penuh dengan Indonesia. PNT menerima hasil pemilihan tahun 1999 dan peran UNTAET sebagai pihak berwenang yang sah di Timor-Leste selama masa transisi menuju kemerdekaan. Sebagai musisi yang terampil, Abilio Araujo mengubah musik untuk lagu kebangsaan *Pátria*, *Pátria* dan lagu-lagu Timor yang sangat dikenal yaitu *Foho Ramelau* dan *Funu nain Falintil*.

² João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa *Convergencia Nacionalista* “tidak dianggap serius pada saat itu baik oleh UDT maupun Fretilin” dan bahwa terdapat kecurigaan adanya keterlibatan Indonesia. Wawancara CAVR, Dili, 30 Juli 2004

³ Komunikasi-komunikasi Persatuan mendesak Portugal untuk mempercepat pembelaannya bagi Timor-Leste dalam pembicaraan yang disponsori oleh PBB dan mengembangkan suatu “rencana dinamis untuk bertindak” untuk pelaksanaan ketika Portugal bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1987. (Krieger, hal. 279.)

di masa depan. Pernyataan-pernyataan Persatuan mendeskripsikan UDT dan Fretilin sebagai “dua organisasi nasionalis Timor-Leste yang paling penting²¹⁸ dan “sah”, dan meminta Portugal untuk mendanai usaha diplomatik kedua partai tersebut. Pada tahun 1987, delegasi Fretilin dan UDT bersaksi kepada Komite Dekolonisasi di New York, mengenai dukungan untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengakui kebungkamannya yang lama dan ketidak-hadirannya di PBB. UDT menyangkal pernyataan Indonesia bahwa UDT mendukung integrasi, dan menyatakan menghendaki kemerdekaan serta mengatakan, bahwa “kami ingin bangsa kami memilih kedaulatan, melalui suatu proses demokratis di bawah pengawasan PBB”.²¹⁹

395. Pada bulan Desember 1988, dibentuk sebuah organisasi payung nasionalis baru, yaitu Dewan Nasional Perlawanan Maubere (CNRM). CNRM mewakili revisi radikal - terhadap doktrin dan strategi yang telah ditanda-tangani 12 bulan sebelumnya, ketika Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan bahwa dia menolak Marxisme, mendeklarasikan Falintil sebagai pasukan netral secara politik, dan keluar dari Fretilin.²²⁰ Yang memberi inspirasi pada perjuangan, kata Xanana, adalah keinginan untuk hidup bebas dari pendudukan asing, bukan revolusi. Ia menyatakan, bahwa blok Timur bersikap acuh terhadap Timor-Leste. Istilah “revolusioner” diganti dengan “Maubere”, CNRM pun diganti menjadi CRRN, menandakan bahwa ideologi politik harus dinomor-duakan di bawah kemerdekaan nasional, dan termasuk pendekatan non-partisan. Perubahan ini memberi dampak yang besar terhadap Timor-Leste. Mario Carrascalão mengatakan:

*Ketika Xanana mengatakan, bahwa ia bukan Fretilin, hanyalah komandan Falintil, itulah saat ketika perang ini mulai dimenangkan. Orang-orang Apodeti dan UDT yang sebelumnya menjadi musuh Fretilin, juga dapat bergabung dengan gerakan ini.*²²¹

396. Namun UDT masih merasa, istilah “Maubere” tidak cukup inklusif dan secara formal menahan keanggotaan dari CNRM, walaupun dalam praktik tetap kooperatif¹.

397. Perubahan-perubahan ini juga memberi dasar yang kuat untuk meluncurkan kampanye diplomatik baru yang efektif. Menjelang akhir Perang Dingin, perubahan tersebut merupakan tantangan yang tepat waktu bagi persepsi internasional yang kukuh, bahwa gerakan kemerdekaan adalah proyek sayap kiri ekstrim serta merupakan ancaman bagi Indonesia dan stabilitas wilayah. Bahasa hak-hak asasi manusia dan demokrasi, menggantikan retorika militan di masa lalu. Menurut Xanana Gusmão, CNRM:

Berkomitmen untuk membangun bangsa yang bebas dan demokratis, berdasarkan penghormatan pada kebebasan berpikir, berserikat dan berekspresi, serta menjunjung setinggi-tingginya Hak Asasi Manusia Universal. Sistem multi-partai dan ekonomi pasar akan menjadi fondasi Timor-Leste merdeka... Ia akan menjadi negara yang bebas dan tidak bersekutu, dengan tujuan kuat menjadi anggota ASEAN, untuk turut berperan bagi stabilitas regional.²

398. Pendekatan baru ini sudah diperhitungkan secara internasional dengan penunjukan José Ramos-Horta, sebagai perwakilan pribadi Xanana Gusmão, dan sebagai perwakilan khusus

¹ João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa istilah “Maubere” tidak dikenal di beberapa bagian di Timor-Leste dan tidak akurat: “Tidak semua dari kami *Maubere*”. Wawancara CAVR, 30 Juli 2004. Lihat juga bab Sejarah Konflik untuk diskusi mengenai asal usul istilah itu.

² Barbedo de Magalhães, *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, Portugal, 1992, hal. 43. Makna dari perubahan-perubahan ini, cara dan intinya, dapat diperoleh dari perbandingan dengan pengaduan tajam Nicolau Lobato terhadap Xavier do Amaral pada tahun 1977 untuk kejahatan-kejahatan revolusioner. Pernyataan Komite Pusat Fretilin atas “Pengkianatan Besar Xavier do Amaral,” Radio Maubere, 14 September 1977.

CNRM di luar negeri. Dengan menghubungkan Perlawanan dengan Ramos-Horta, yang kepercayaan sosial demokrat dan pandangan hak asasi manusianya lebih dapat diterima secara internasional dibanding Marxis Abilio Araujo, menunjukkan besarnya perbaikan itu. Pada awalnya pemilihan atas dirinya tidak diterima dengan baik oleh UDT dan Fretilin, yang ditakutkan justru akan melemahkan peran mereka.¹ Strategi baru itu mewajibkan mereka untuk menomor-duakan kepentingan partai dan menonjolkan sifat nasionalis, serta menyelenggarakan berbagai kampanye dengan aktivis Timor yang jumlahnya semakin bertambah dari luar barisan mereka.

399. Sebagai bagian dari ofensif diplomatik baru, Perlawanan meluncurkan rencana perdamaian lain yang dikembangkan oleh José Ramos-Horta atas dasar perundingannya dengan Delegasi Eksternal Fretilin dan Xanana Gusmão. Ramos-Horta menyusun rencana itu di Darhamsala, markas besar Dalai Lama, dan mengumumkan rencana itu untuk pertama kali di Brusel pada bulan April 1992. Rencana tersebut terdiri dari lima butir pendekatan baru CNRM, dan satu butir rencana perdamaian yang dikeluarkan oleh Xanana Gusmão pada tanggal 5 Oktober 1989 dan yang telah didukung oleh Persatuan Nasionalis UDT dan Fretilin.²²²

400. Rencana itu terbagi dalam tiga fase. Dalam fase pertama, yang berlangsung selama dua tahun, Indonesia akan tetap berkuasa tetapi akan diperkenalkan sejumlah langkah guna membangun kepercayaan pihak Indonesia, termasuk penarikan pasukan dan penerimaan pengawasan PBB atas hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada fase kedua, Timor-Leste diberi otonomi penuh yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun. Pada fase ketiga, kepastian status Timor-Leste akan ditentukan melalui referendum. Rencana tersebut bermaksud menekan Pemerintah Soeharto dengan menawarkan jalan ke luar yang terhormat, serta memperkenalkan Perlawanan sebagai pemeran utama yang lebih konstruktif dibandingkan yang lainnya. José Ramos-Horta berkata:

*Ini juga berarti bagi masyarakat Indonesia pada umumnya serta komunitas internasional, untuk menunjukkan sikap tanggung jawab, kedewasaan dan kehati-hatian para pemimpin Perlawanan Timor-Leste.*²²³

401. Tanggapan di dalam partai-partai, masyarakat sipil internasional dan diaspora Timor-Leste pada awalnya negatif. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

*Saya harus mempertahankannya begitu sering, baik di Portugal maupun di komunitas Timor, dengan Fretilin dan UDT. Ini sangat kontroversial pada awalnya, karena kata 'otonomi' sangat tabu ketika itu, tapi kemudian sebagian besar orang setuju dengan ini.*²²⁴

402. Pemerintah Indonesia juga bersifat curiga. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Saya ingat pernah berbicara dengan Ali Alatas di New York tanggal 18 Oktober 1994, pertemuan resmi kami yang pertama di New York. Alatas mengatakan, 'Rencana damai anda itu sepertinya merupakan batu loncatan menuju kemerdekaan'.

403. Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi, bahwa menteri Alatas "memang benar"; Tetapi ia menjelaskan, bahwa Indonesia akan diuntungkan jika I dapat memanfaatkan kesempatan itu secara konstruktif, dan rakyat pun puas dengan otonomi setelah sepuluh tahun.

¹ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004. *The Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor*, 10 November 1989, tentang "peran yang tak tergantikan" dari Fretilin dan UDT sebagai perwakilan masyarakat Timor-Leste. Krieger, hal. 282.

404. Sebuah jaringan perwakilan internasional dan penghubung CNRM untuk mempromosikan rencana itu ditempatkan di Portugal, Kanada, Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia serta wilayah sekitarnya. Jaringan itu melibatkan diplomat-diplomat generasi baru seperti José Amorim Dias, wakil CNRM di Uni Eropa sejak 1993, dan Constancio Pinto,¹ wakil CNRM di AS dan Kanada sejak 1994. Usaha mereka didukung Pusat Dukungan Internasional Timor-Leste (ETISC), yang didirikan di Darwin oleh Juan Federer, yang juga melakukan pencarian dana dan memberi bantuan pribadi kepada José Ramos-Horta. Pada saat yang sama, José Ramos-Horta meneruskan bekerja sama langsung dengan Fretilin dan UDT, sesuai dengan peran masing-masing, tetapi menegaskan perlu adanya koordinasi. Untuk kepentingan ini pada tahun 1995 dibentuk sebuah Komite Pengurus Garis Depan Diplomasi (menggantikan Persatuan Nasionalis), dan tanggung jawab dibagi antara kedua partai itu.

405. Di atas pertumbuhan kesadaran internasional setelah terjadinya pembantaian Santa Cruz, José Ramos-Horta menggunakan rencana itu untuk memperluas kampanye, membuka jalan untuk membawa kasus Timor-Leste kepada lembaga-lembaga penting, seperti Parlemen Eropa, Dewan Hubungan Luar Negeri AS, *the Royal Institute of International Affairs* di London, dan perkumpulan pers di Thailand dan Australia, serta mengarahkan usaha Perlawanan pada jalan yang baru dan positif.

406. Semua usaha tersebut memuncak dengan pemberian penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta pada tahun 1996. Keikut-sertaan José Ramos-Horta merupakan dukungan kuat terhadap diplomasi Perlawanan dan rencana perdamaannya, oleh lembaga-lembaga yang paling terhormat di dunia. Penghargaan itu menandakan pengakuan legitimasi masalah Timor-Leste dan dimulainya fase baru dalam perjuangan. Ramos-Horta mempromosikan rencana itu dalam pidato penerimaan hadiah Nobel. Dalam pernyataannya, Komite Nobel Norwegia menyatakan harapan, “bahwa penghargaan ini akan mendorong upaya-upaya untuk mencari solusi diplomatik bagi konflik di Timor-Leste, yang berdasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri”.²²⁵ Sekretaris-Jenderal PBB menyatakan pendapat yang sama dalam ucapan selamatnya atas penghargaan itu dan beberapa minggu kemudian, pada bulan Februari 1997, Kofi Annan, Sekretaris-Jenderal yang baru, menunjuk Jamsheed Marker sebagai utusan pribadinya untuk Timor-Leste guna mengaktifkan kembali proses PBB.

407. Dengan bantuan Pemerintah Portugis, pada tahun 1998 CNRM menyelenggarakan konvensi di Peniche, Portugal, yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari Timor-Leste. Pertemuan itu diadakan di luar negeri, agar Timor-Leste dapat memanfaatkan dorongan internasional yang baru dan, dalam pernyataan Agio Pereira, “untuk memperkenalkan suatu garis depan kesatuan nasional dan Xanana Gusmão sebagai pemimpin”.²²⁶ Konvensi itu memperkuat kesatuan dengan menghapus, atas instruksi eksplisit dari Xanana Gusmão, kata “Maubere” dari namanya sebagai kehormatan terhadap UDT. Dengan demikian namanya berubah menjadi *Conselho Nacional da Resistência Timorese* (Dewan Nasional Perlawanan Timor, CNRT), yang menyambut baik orang Timor yang sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Indonesia, serta mengakui peranan Gereja.² Pertemuan ini juga mengkonfirmasi komitmen Perlawanan terhadap demokrasi dan pluralisme, dengan mengadopsi sejenis *Magna Carta* mengenai kebebasan kebebasan, hak hak, kewajiban kewajiban dan jaminan jaminan untuk masyarakat Timor Leste hak asasi manusia. Konvensi itu disambut secara universal sebagai suatu peristiwa yang unik. Dalam pernyataan Pemerintah Australia dikatakan, konvensi itu berhasil menyatukan “pihak-pihak yang bertikai dalam perang saudara, yaitu UDT dan Fretilin, ke dalam suatu koalisi – hal yang belum pernah dicapai sebelumnya - dan persetujuan yang dicapai “atas pemilihan komandan Falintil Xanana Gusmão, yang ada di penjara, sebagai Presiden CNRT dan pemimpin utama Perlawanan”.²²⁷

¹ Sebelum meninggalkan Timor-Leste pada tahun 1991, Constancio Pinto telah bertanggung jawab atas nama CNRM dalam mengatur semua kegiatan klandestin di kota-kota dan desa-desa. Lihat Constancio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, Boston: South End Press, Boston, 1997.

² Perlawanan internal dan Xanana Gusmão, yang di penjara di Jakarta, diwakili pada pertemuan ini oleh Fr Filomeno Jacob SJ, dan Fr Domingos Maubere Soares.

408. Perlawanan bergabung dengan *All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogues* (AIETD) yang disponsori oleh PBB, yang dimulai pada tahun 1995, dengan posisi yang kuat dan mampu memanfaatkannya. Pada AIETD ke-empat, tahun 1998, José Ramos-Horta dengan dukungan dari UDT dan Fretilin memperoleh mayoritas dukungan komunitas Timor, untuk berpartisipasi langsung dalam pertemuan antara Portugal dan Indonesia yang disponsori PBB. Jamsheed Marker melaporkan bahwa, pada saat yang sama, negara-negara Barat dan diplomat-diplomat PBB mulai terlibat dalam perundingan langsung dengan Xanana Gusmão di penjara dan dengan perwakilan Perlawanan lainnya.²²⁸ "Hak atas berdialog" akhirnya berhasil direbut.¹

409. Pada bulan April 1999, CNRT mengadakan konferensi perencanaan di Melbourne. Inisiatif-inisiatif semacam ini dan keputusan CNRT untuk me-non-aktifkan Falintil serta mengatur sebuah kampanye kemerdekaan yang tertib, guna menghindari terjadinya provokasi oleh milisi pro-otonomi²²⁹, memperdalam kepercayaan diri internasional dalam Perlawanan, pada periode menjelang pemungutan suara bulan Agustus. Agio Pereira mengatakan kepada Komisi:

*Akan sangat sulit bagi PBB untuk menegosiasikan kesepakatan 5 Mei 1999 dengan Indonesia, apabila Perlawanan Timor terlihat pecah atau berantakan.*²³⁰

410. Diakuinya legitimasi Perlawanan oleh PBB dengan menggunakan nama dan bendera CNRT pada kartu pemungutan suara 30 August 1999, merupakan kepuasan yang besar dan suatu kebanggaan. Tetapi kehormatan yang paling berharga justru datang dari rakyat Timor yang mendukung Perlawanan, termasuk komponen-komponen politiknya pada hari bersejarah tersebut.

5.2 Diaspora

411. Diaspora Timor-Leste, secara umum, bukan bagian dari kampanye formal diplomatik Perlawanan atas penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian kehadiran dan kegiatan komunitas-komunitas Timor di luar negeri secara signifikan mengangkat profil isu ini di banyak negara, dengan tambahan sumber daya dan keahlian yang sangat penting bagi kampanye formal. Diaspora semakin berperan dan keefektifannya diakui oleh para pemimpin politik Timor-Leste. Banyak anggota utama diaspora yang kembali ke Timor-Leste selama dan setelah tahun 1999 untuk membantu membangun negara baru ini.

412. Pada puncaknya, diaspora itu terdiri dari 20.000 orang Timor di Australia, sekitar 10.000 di Portugal dan beberapa lagi yang tersebar di Macau, Mozambique, Kanada, AS, Inggris, Irlandia dan negara-negara lainnya. Mayoritas diaspora itu terdiri dari para pengungsi perang saudara tahun 1975 antara UDT dan Fretilin, baik yang mengungsi langsung ke Australia atau yang berhasil pergi ke Portugal melalui Timor Barat. Banyak yang pergi ke Portugal akhirnya pindah ke Australia untuk bergabung dengan sanak saudaranya, agar lebih dekat dengan Timor-Leste dan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dari tahun ke tahun jumlah mereka semakin bertambah dengan anggota-anggota keluarga, yang perjalanan mereka dari Timor-Leste secara resmi diatur oleh Palang Merah Internasional, pengungsi-pengungsi politik serta yang lainnya, yang melarikan diri melalui Indonesia, baik yang diam-diam secara individu dengan menggunakan jalur yang rumit, termasuk menyuap pejabat-pejabat Indonesia atau pun melalui permohonan suaka di kedutaan-kedutaan besar asing di Jakarta.² Mereka yang keluar melalui kedutaan besar dari tahun 1993 atau yang pergi setelah tahun 1995, memberi kontribusi yang sangat penting, karena mereka sangat termotivasi secara politik, dan dapat berbicara

¹ Ini adalah referensi untuk laporan Fretilin mengenai pembicaraan singkat Xanana Gusmão dengan Kolonel Purwanto pada tahun 1983 yang berjudul *Fretilin conquers the right to dialogue*, The FRETILIN External Delegation, Lisbon, 1983.

² Kampanye untuk Mempersatukan Keluarga Timor di Australia (*Reunite in Australia the Families of Timor*, RAFT) berhasil mengumpulkan beribu-ribu dolar dari organisasi-organisasi non-pemerintah Australia dan memberikan dana pinjaman untuk membantu keluarga-keluarga Timor, tanpa peduli afiliasi politik mereka, untuk mendanai sanak saudara bergabung dengan mereka di Australia.

berdasarkan pengetahuan pribadi mengenai pendudukan serta tidak terkait pada afiliasi-afiliasi politik tahun 1975. Dengan cepat dan mudah mereka bergabung dengan CNRM serta organisasi-organisasi solidaritas dan kegiatan di Inggris, Irlandia, Eropa, Kanada, AS, Portugal dan Australia. Pada tahun 1995, 1600 orang tiba di Australia, yang merupakan angka terbesar sejak perang saudara. Namun sejak tahun 1999, mereka cenderung kembali ke negara asalnya. Walaupun sebagian besar komunitas umum tetap memilih untuk tinggal di luar negeri, namun mayoritas pemimpin utama diaspora telah kembali ke Timor-Leste, atau masih mempertahankan kehadirannya di dua tempat.¹

413. Diaspora itu berjumlah sedikit, terpisah-pisah secara politik, tersebar-sebar dan pada umumnya miskin. Banyak di antara mereka yang memulai hidup baru di kamp-kamp pengungsi, dan membawa bekas luka serta antipati terhadap perang saudara dan invasi Indonesia. Di Portugal, jumlah orang Timor yang baru tiba tidak sebesar jumlah orang-orang dari bekas koloni Portugis di Afrika. Mereka menemui kesulitan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga banyak orang Timor tinggal di kamp-kamp di Lisboa selama bertahun-tahun lamanya.

414. Di Australia orang Timor memiliki kesulitan dalam bahasa, kebudayaan dan struktur negara tersebut. Abel Guterres bercerita kepada Komisi:

Teman-teman kami yang di Portugal bisa bicara bahasa Portugis, tapi kami di Australia punya masalah besar: kami tidak mengerti bahasanya...Kata pertama yang kami tahu adalah 'yes'. Kami berkunjung ke rumah teman, dan mereka bertanya: 'Mau kopi apa teh?' Dan kita semua menjawab 'yes', sehingga mereka akan bawa kopi dan teh sekaligus.²³¹

415. Mereka menetap terutama di daerah pinggiran di kota-kota besar, dan mencari pekerjaan di mana pun mereka bisa mendapatkannya, seperti di pabrik sebagai buruh lepas, dan di perusahaan transportasi umum. Faktor-faktor ini memperlambat dan menyulitkan perkembangan komunitas dan organisasi politik. Mereka dibantu dalam proses ini oleh organisasi-organisasi kesejahteraan, kelompok-kelompok masyarakat dan Gereja, serta pejuang-pejuang laki-laki dan perempuan yang terkemuka dalam golongan mereka sendiri.

416. Kesuksesan dalam membangun komunitas-komunitas dan penyebaran budaya politik nasionalis kepada generasi penerus merupakan prestasi yang luar biasa. Di Portugal, Macau dan Australia, komunitas-komunitas itu membentuk organisasi politik, budaya dan olahraga, mengadakan pertemuan, dan terus menginformasikan anggotanya melalui siaran radio yang mereka kelola sendiri, serta melalui surat edaran. Gereja Katolik berperan penting sebagai tempat pertemuan yang netral dan sumber spiritual, budaya dan pastoral, terutama di mana terdapat pastor-pastor dari Timor. Pembentukan komunitas-komunitas ini merupakan sikap membangkang atas penentuan nasib sendiri orang Timor di lingkungan asing, dan melahirkan sumber daya baru yang menambah kapasitas dan penjangkauan diplomatik Timor-Leste secara signifikan.

417. Walaupun seringkali mengalami rintangan besar yang disebabkan oleh warisan perang saudara, diaspora memberi dampak di negara-negara di mana komunitas mereka kuat, dan dalam beberapa kasus menyamai usaha solidaritas lainnya. Luisa Teotonio Pereira mengatakan kepada Komisi:

¹Untuk studi mengenai komunitas diaspora orang Timor di Sydney, lihat Amanda Wise 'No Longer in Exile? Shifting Experiences of Home, Homeland and Identity for the East Timorese Refugee Diaspora in Australia in the Light of East Timor's Independence, University of Western Sydney, 2002. Lihat juga disertasi Pascoela Barreto tentang Diaspora Timor Leste di Portugal.

Masyarakat Timor di Portugal selalu bertahan dengan organisasi-organisasi mereka sendiri [dan hanya] sekali-sekali diundang berpartisipasi dalam struktur-struktur Portugis. Mungkin hanya sekali mereka pernah bergabung sebagai warga negara Portugis yang setara: dalam kasus Komisi Kebebasan bagi Xanana, Kebebasan bagi Timor [Comissão Liberdade para Xanana, Liberdade para Timor], yang dibentuk tahun 1993.²³²

418. Itu juga berlaku bagi bagian-bagian komunitas Timor di Australia. Walaupun lambat memulai, yang lainnya membentuk persekutuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan saling mendukung melalui protes, lobi, penyebaran informasi, pencarian dana, serta kegiatan-kegiatan budaya, keagamaan dan politik – termasuk, pada tahun-tahun belakangan, aktivitas-aktivitas ini di antaranya konser dan produksi CD musik, pameran dan karya teater profesional. Hal ini tidak selalu mudah. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Ketika kami berdemonstrasi di Departemen Luar Negeri atau Kedutaan Indonesia, beberapa orang akan bilang ke atasannya bahwa mereka sakit, tapi kemudian muncul di televisi pada demonstrasi. Kalau atasannya memahami situasinya, ia akan mengizinkan mereka ambil waktu libur; tapi beberapa ada yang dipecat, dan kalau sudah dipecat – bagaimana mau makan?²³³

419. Beberapa orang mempelajari ilmu perdagangan dan bisnis dan mengambil kursus-kursus tingkat menengah dan di universitas, guna mempersiapkan diri untuk mengabdikan Timor-Leste setelah kemerdekaan. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Sebagian orang memberi satu persen, sebagian lagi sepuluh persen, dua puluh, tiga puluh, empat puluh sampai seratus persen hidupnya untuk Timor-Leste. Semuanya ikut berperan. Mungkin hanya hal-hal kecil saja, tapi mereka semua melakukan sesuatu.²³⁴

420. Orang-orang Timor juga terlibat dalam penjangkauan internasional dengan mendukung advokasi para diplomat dalam forum-forum internasional atau, dengan bertambahnya kepercayaan diri, merekalah yang mewakili Timor-Leste dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah-pemerintah asing atau di konferensi-konferensi internasional.¹ Selain membentuk dan mengurus organisasi-organisasi untuk mempertahankan identitas dan solidaritas komunitas mereka, diaspora Timor juga membentuk organisasi-organisasi yang efektif, untuk memberikan dukungan kemanusiaan, advokasi, hak asasi manusia dan dukungan lainnya kepada Timor-Leste secara langsung.²

421. Para pemimpin Timor-Leste mengakui dan mendorong kontribusi diaspora. José Ramos Horta yang tinggal di tengah komunitas di Australia, dan sering berinteraksi dengan mereka, dengan mengemukakan pandangannya terhadap masa depan, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam misinya. Setelah penangkapan atas dirinya, Xanana Gusmão mengirim surat-surat kepada diaspora untuk memperkuat kepercayaan mereka, bahwa diaspora Timor

¹ Di Eropa, misalnya, ini mencakup tur-tur oleh orang Timor yang bermaksud di Portugal yang berkampanye melalui Eropa, menari, menyanyi dan menunjukkan budaya Timor-Leste. Contoh-contoh lain adalah partisipasi perempuan diaspora Timor dalam Konferensi Dunia mengenai perempuan yang diadakan di Nairobi pada tahun 1985, konferensi berikutnya di Beijing, pertemuan-pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan gereja, dan pembelaan kepada Australia, Selandia Baru dan pemerintah lainnya.

² Dua contoh penting adalah East Timor Relief Association (ETRA), yang dibentuk di Sydney pada tahun 1992, dan Pusat Hak Asasi Timor-Leste (East Timor Human Rights Centre, ETHRC), yang dibentuk di Melbourne pada tahun 1995. Seperti halnya organisasi-organisasi diaspora yang terfokus pada pembebasan, mereka bubar setelah tahun 1999.

adalah bagian dari Perlawanan seperti mereka yang ada di Timor-Leste. Dalam sebuah surat yang dialamatkan kepada Xana Bernades, tertanggal 9 Juni 1992, Xanana menulis:

Saya tahu, bahwa anda "independen" (dari partai-partai politik), tapi bagaimanapun juga anda satu dengan kami. Anda adalah bagian kami. Dan kami, sebagai pejuang tua bangsa ini, bangga denganmu.¹

422. Xanana Gusmão mengulang pernyataannya itu setelah pembebasannya. Ia mengatakan dalam suatu konferensi pers di Lisboa tahun 2000, bahwa dunia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya, kecuali mereka yang melarikan diri dari Timor-Leste dan mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri. Dalam audiensi publik Nasional, Komisi mengenai Penentuan Nasib sendiri dan Komunitas Internasional, Komisaris Olandina Caeiro meminta Abel Guterres untuk mengidentifikasi suatu momen yang sangat istimewa dalam hidupnya, sejak ia meninggalkan Timor-Leste pada tahun 1975, Abel menjawab:

Ada banyak momen yang berkesan, tapi ada satu yang paling menonjol. Tahun 1999 saya datang ke Lcidere, saya lihat bendera CNRT sedang dikibarkan. Lalu saya berpikir: 'Wow, ini luar biasa'. Ini adalah sesuatu yang dari dulu selalu saya impikan. Rasanya seperti di surga. Sulit untuk menggambarkan perasaan saya waktu itu. Saya melihat semuanya menari tebe-tebe di sekitar bendera. Benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa.²³⁵

5.3 Kesimpulan

423. Perjuangan traumatis Timor-Leste selama 25 tahun demi penentuan nasib sendiri seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti negara-pulau kecil lainnya di wilayah itu, hak Timor-Leste yang diakui secara internasional untuk membuat keputusan-keputusannya sendiri, seharusnya dihargai, dipuji dan difasilitasi secara damai, dan tidak ditindas dengan kekerasan.

424. Di antara berbagai macam faktor yang menentukan kemerdekaan Timor-Leste, yang paling penting ialah kontribusi dari gerakan Perlawanan.

425. Untuk mencapai cita-citanya, Perlawanan harus menghadapi sejumlah besar masalah yang rumit, yang bersifat eksternal dan yang dibuatnya sendiri, termasuk perang saudara. Meskipun legitimasi yang jelas mengenai tujuannya, garis depan diplomatik terpaksa beroperasi dalam lingkungan yang bertentangan dengan ideologi dan tujuan-tujuannya, dan yang memihak pada kekuatan pendudukan daripada kekuatan yang sah. Perlawanan eksternal juga terpisah, dan beroperasi hanya separoh efektif. Fretilin harus memikul beban sendiri selama bertahun-tahun, sementara UDT membangun kembali organisasi dan kredibilitasnya setelah perang saudara, dan kolaborasi tokoh-tokoh utamanya dengan Indonesia.

426. Perlawanan menghadapi tantangan-tantangan ini dengan menggunakan kekuatannya, dan dengan menyesuaikan diri tanpa mengkompromikan cita-citanya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Walaupun tidak berhasil menghentikan nasib diplomatiknya yang memburuk, kebijakan awal Fretilin sangat penting dan memberi kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan itu meliputi keputusan membuka garis depan diplomatik, untuk memfokuskan pada PBB dan hak-hak atas penentuan nasib sendiri Timor-Leste yang diakui secara internasional, untuk bekerja dengan Portugal, untuk membangun dukungan di

¹ Surat kepada Xana Bernades, seorang perempuan muda Timor yang tinggal di Australia, menanggapi dalam sebuah surat dari dirinya bersama dengan dana yang terkumpul dari pertandingan kriket dan festival solidaritas di Melbourne (Sarah Niner (Ed.), *To Resist is To Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 170-171).

Afrika dengan lima negara bekas jajahan Portugis dan suara yang banyak di PBB, untuk membangun relasi-relasi dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penting di negara-negara Barat, serta memilih José Ramos-Horta sebagai wakil Timor-Leste di PBB. Kontribusi Fretilin dalam membangun dukungan masyarakat sipil dan kesadaran dunia mengenai Timor-Leste sangat luar biasa. Demikian pula masukannya tentang kebijakan dan strategi kepada Perlawanan, yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan diplomatiknya yang ekstensif, sangat penting baik di dalam maupun di luar negeri.

427. Kontribusi yang paling penting terhadap diplomasi Perlawanan berasal dari dalam, ketika Perlawanan dibentuk kembali sebagai pergerakan yang berdasarkan nasionalisme, dan bukan afiliasi partai atau ideologi politik, dan melibatkan diri dalam demokrasi pendukung pluralisme dan hak asasi manusia. Perubahan kebijakan ini membantu memperbaiki nasib Timor-Leste, dan José Ramos-Horta diberi kepercayaan memimpin pelaksanaannya di luar negeri. Untuk menerapkannya ke dalam praktik tentu saja membutuhkan waktu, tetapi dampak diplomatik yang timbul sangat luar biasa, karena berhasil menyangkal pernyataan-pernyataan, bahwa Perlawanan terbatas pada Fretilin dan hanya bersifat eksternal. Barisan-barisan Perlawanan di dalam dan luar Timor-Leste meningkat, termasuk di kalangan diaspora. Mereka mengkomodasi sejumlah kebijakan UDT yang signifikan, dan akhirnya berhasil meredam ketakutan, bahwa Timor-Leste potensial menjadi sebuah “Kuba di Asia Tenggara”. Walaupun ditolak di beberapa bagian, Perlawanan yang sebelumnya terpisah-pisah tumbuh menjadi suatu gerakan terpadu di bawah pimpinan Xanana Gusmão dan José Ramos-Horta.

428. Perlawanan internal dan eksternal telah memetik ilmu dari pengalaman pahitnya, dan menciptakan dirinya kembali dalam kancah peperangan dan politik internasional. Hasilnya, dalam kerja sama dengan masyarakat sipil, adalah salah satu gerakan diplomasi bangsa yang paling berhasil selama abad ke 20.

6 Masyarakat Sipil

6.1 Pendahuluan

429. Bagian ini memfokus pada kontribusi masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat sipil internasional menemani rakyat Timor-Leste dalam setiap langkah perjalanan panjang mereka menuju kemerdekaan, tetapi usaha-usahanya jarang diakui dalam catatan sumber-sumber resmi atau hanya disinggung secara umum.¹ Bagian ini ditujukan untuk mengakui solidaritas yang luar biasa itu, dan untuk memberitahu rakyat Timor-Leste, yang mayoritas tidak meninggalkan tanah airnya selama waktu perang dan terputus dari dunia luar, tentang aktivitas yang berlangsung di luar Timor-Leste guna membela hak asasi mereka untuk menetapkan nasib mereka sendiri. Karena keterbatasan tempat, tidaklah mungkin menceritakan secara detail atau berlaku adil terhadap ribuan individu dan organisasi yang terlibat selama 25 tahun [perjuangan] (1974-99). Setiap negara sebaiknya layak mendapat bagian tersendiri. Namun bab ini hanya difokuskan pada tahun-tahun awal, ketika kegiatan seminal yang dilakukan umumnya jarang diketahui hingga hari ini. Masyarakat sipil Indonesia layak dihargai secara khusus, karena keterlibatannya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kontribusi masyarakat sipil internasional dalam bidang-bidang penting lainnya seperti bantuan, pengungsi, dan kebutuhan kemanusiaan tidak disertakan, meskipun diketahui, bahwa layanan-layanan ini seringkali sangat penting untuk kelangsungan hidup dan tanpa mereka penentuan nasib sendiri mungkin akan menjadi tidak berarti bagi banyak warga Timor-Leste.

¹ Catatan resmi Pemerintah Australia tentang peran Australia di dalam menyelesaikan perdebatan Timor-Leste tidaklah memasukkan peran masyarakat sipil. Lihat *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001. Jamsheed Marker menyebut sepintas lalu tentang Organisasi Non-Pemerintah dalam *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland & Company, Inc., London, 2003. Dalam catatannya tentang pemungutan suara di tahun 1999, Ian Martin, kepala UNAMET, memberikan penghargaan besar terhadap Organisasi-organisasi Non-Pemerintah, tetapi mengakui bahwa cerita versi mereka bukanlah pokok persoalan buku yang dia tulis (*Self-Determination in East Timor*, hal. 13).

6.1.1 Terminologi

430. Komisi telah memilih menggunakan istilah “masyarakat sipil” karena empat alasan. Pertama, sebagai satu sektor istilah ini membedakan dari sektor-sektor penting lainnya, yang membentuk masyarakat demokrasi, seperti halnya pemerintah dan bisnis. Istilah ini mengakui timbulnya “sektor ketiga” dan perannya yang independen dalam menanggulangi masalah-masalah dunia. Dalam konteks Timor-Leste hal ini sangat relevan, karena dalam sebagian besar periode 1974-99, masyarakat sipil memainkan peran yang memiliki ciri khas tersendiri, dan dalam hal Timor Timur biasanya berseberangan dengan pihak pemerintah dan bisnis.¹ Kedua, istilah ini lebih luas dibanding “non-governmental organization” (NGO) dan “grup solidaritas,” yang sering digunakan dalam konteks ini, tapi tidak cukup luas untuk mencakup luas dan ragam individu, grup dan organisasi yang memberi dukungan Timor-Leste dalam penentuan nasib sendiri. Ketiga, istilah “masyarakat sipil”, tidak sekedar “non-governmental organization” (NGO), tetapi memiliki isi positif dan mewakili komitmen untuk membangun masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi. Istilah ini pantas digunakan di sini karena masyarakat sipil internasional mendapat legitimasi dan kehormatan dalam pembelaannya terhadap Timor-Leste, dengan mempromosikan nilai-nilai dasar, dan umumnya beroperasi tanpa kekerasan, di dalam batas-batas hukum dan melalui jalur hukum.² Terakhir, istilah masyarakat sipil direkomendasikan, karena telah diadopsi secara resmi oleh PBB, dan menandai pergeseran penting dalam pemikiran internasional. Telah tumbuh pengakuan di lingkungan pemerintah, bahwa masyarakat sipil memiliki peran dalam pemerintahan global, dan bahwa pekerjaan PBB bukan lagi monopoli pemerintah³. Pengalaman Timor-Leste melahirkan kebijaksanaan untuk tidak menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Seperti diakui Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan di Dili pada bulan Mei 2002, kontribusi masyarakat sipil sangat penting dalam peran PBB untuk menyelesaikan konflik Timor-Leste.

6.2 Masyarakat Sipil Internasional

431. Peran masyarakat sipil internasional dalam mendukung hak-hak politik Timor-Leste dibagi dalam lima tahap dan seperti riwayat Timor-Leste, diawali dan diakhiri pada tahap puncak; sedangkan di tengah perjalanannya, riwayat Timor-Leste penuh kegagalan dan keputus-asaan.

6.2.1 Tahap pertama: Tantangan-tantangan awal dan permulaan, 1974-78

432. Meskipun secara prinsip dekolonisasi dimulai pada tahun 1960,⁴ masyarakat sipil internasional tidak menunjukkan perhatian yang berarti hingga tahun 1974, ketika mereka merespons pemberitaan media dan lobi-lobi para aktivis Timor-Leste dan para perwakilan Fretilin khususnya. Masyarakat sipil internasional layak dikritik karena tidak menanggapi masalah Timor-Leste lebih cepat terhadap inisiatif PBB, dan mengingat situasi yang menyedihkan di Timor Portugis di bawah rezim Salazar-Caetano. Pada saat yang sama, dengan tanggapannya yang terlambat itu, maka masyarakat internasional tidak dapat dituduh telah merekayasa isu motif-

¹ Menurut kesaksian Luisa Teotonio Pereira kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Konflik Internasional, Portugal adalah pengecualian untuk aturan umum ini, setidaknya di tahun-tahun sesudahnya. Konfrontasi yang mencirikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil di negara-negara lain baru berubah pada tahun 1999, setelah Indonesia dan komunitas internasional menyetujui penyelenggaraan tindakan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Sektor swasta atau bisnis pada umumnya tidak terlibat secara terbuka dengan kedua belah pihak, walaupun mendapat untung dari hubungan-hubungan komersilnya dengan Indonesia, yang tumbuh drastis di bawah pemerintahan Soeharto. Tidak ada pergerakan warga yang mendukung Timor-Leste di negara-negara seperti bekas Uni Soviet dan Cina karena keberadaan “sektor ketiga” tidak dikenal dalam sistem-sistem sosialis.

² Kasus kontroversial adalah dirusaknya pesawat jet tempur Hawk milik Inggris oleh empat orang aktivis perempuan pada bulan Januari 1996. Setelah kejadian tersebut mereka dibebaskan oleh Pengadilan [Lihat Bab 7.1.4, Titik balik 1991-1998 di bawah]

³ Sementara PBB mendorong kemitraan, meski tetap menjadi forum negara-negara. PBB tidak berencana untuk memberikan kursi atau suara pada organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam Majelis Umum.

⁴ PBB pertama-tama memberi status koloni pada Timor-Leste, dengan hak untuk merdeka pada tahun 1960.

motif politik tersembunyi, seperti yang sering dinyatakan. Kesadaran masyarakat internasional justru berkembang, bukan sebaliknya, dan bertindak sebagai tanggapan atas inisiatif rakyat Timor-Leste.

433. Invasi Indonesia dikutuk oleh individu dan organisasi di sejumlah negara, termasuk Kanada, Jepang,¹ Selandia Baru, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Namun pada waktu itu pusat-pusat utama aktivitas masyarakat sipil internasional yang terorganisasi hanya ada di Portugal, Australia, dan Inggris.

434. Masyarakat sipil Portugal menyambut baik Revolusi Bunga tahun 1974 dan keputusan Pergerakan Pasukan Bersenjata (MFA, *Movimento das Forças Armadas*) untuk dekolonisasi, demokratisasi dan mengembangkan masyarakat sipil Portugis dan provinsi-provinsinya di seberang laut. Masyarakat sipil sendiri merupakan pewaris perubahan-perubahan politik tersebut, setelah berpuluh-puluh tahun termarginalisasi di bawah pemerintahan diktatorial. Bagi banyak orang, demokrasi dan dekolonisasi saling berkaitan. "Sebuah negara tidak bisa bebas selama menindas negara-negara lain", adalah slogan umum sebelum dan sesudah 25 April. Masyarakat Portugal yang hidup dan bekerja di Timor-Leste dan mereka yang telah bekerja untuk mengakhiri kediktatoran dan kolonialisme Portugis, merasakan tanggung jawab yang kuat terhadap rakyat Timor-Leste. *Centro de Informação e Documentação Anti-colonial* (CIDAC, Anti-colonial Information and Documentation Centre; Pusat Informasi dan Dokumentasi Anti-Kolonial) didirikan pada bulan September 1974 untuk menggalakkan dekolonisasi, termasuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Timor-Leste. CIDAC berkontribusi dalam pendirian *Associação de Amizade Portugal-Timor Leste* (Portugal and Timor-Leste Friendship Association; Badan Persaudaraan Portugal dan Timor-Leste) meski hanya sebentar; dan pada tahun 1981, pada pendirian *Comissão para os Direitos do Povo Maubere* (CDPM, Commission for the Rights of the Maubere People; Komisi Untuk Hak-Hak Rakyat Maubere) yang menjadi organisasi solidaritas utama Portugal sampai dibubarkan pada tahun 2002.

435. Meskipun hubungan dengan Timor Leste telah terjalin selama 400 tahun, dan dengan adanya bahasa yang sama, serta adanya orang Timor- Leste di Portugal, selama periode awal ini dalam hubungan dengan masalah Timor-Leste, masyarakat sipil menghadapi banyak tantangan pada tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat. Dalam hal ini termasuk ketidak-tahuan umum tentang Timor-Leste; kekacauan di Portugal yang menghasilkan perubahan politik yang radikal, setelah 48 tahun menghadapi rezim kediktatoran;- kesibukan dengan koloni-koloni Portugal di Afrika; dan perbedaan pendapat tentang masa depan Timor-Leste; serta perselisihan antara Fretilin dan UDT. Luisa Teotonio Pereira, koordinator CDPM selama 19 tahun, memberi kesaksian pada Komisi:

Ketidak-tahuan tentang sejarah dan kebudayaan rakyat Timor, konteks geo-strategis wilayahnya dan terpencilnya dari metropolis, dan juga tentang negosiasi rahasia antara Portugal dan Indonesia, menyebabkan diskusi tentang Timor menjadi rendah dan umumnya hanya menyinggung ideologi, dengan nilai praktis yang sangat sedikit. Warga Portugal yang tertarik dengan hak-hak rakyat Timor, tidak mampu memaksakan kekuatan-kekuatan politik saat itu untuk melakukan perubahan-perubahan strategi mendasar, yang selanjutnya dapat mengubah jalannya kejadian-kejadian, seperti tindakan memperkuat keberadaan dan tindakan Portugis di Timor, serta menginternasionalisasi masalah tersebut.²³⁶

¹ Contoh, protes-protes dilakukan di luar kantor Pemerintah Indonesia di Tokyo dan Osaka. [Suster Monica Nakamura, Kesaksian dalam Audiensi Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.]

436. Sadar akan tanggung jawab, khususnya karena memiliki bahasa yang sama dengan gerakan Perlawanan Timor-Leste, grup-grup masyarakat sipil berusaha keras menyebarkan informasi berdasarkan sumber-sumber Timor dan lainnya, termasuk hasil kerja luar biasa dari jurnalis-jurnalis Portugis yang berani seperti, antara lain, Adelino Gomes. Namun karena tantangan-tantangan tersebut di atas, masyarakat sipil Portugis membutuhkan bertahun-tahun sebelum dapat memaksimalkan kontribusinya.

437. Australia merupakan sentra utama untuk dukungan masyarakat sipil internasional terhadap Timor-Leste selama periode tersebut. Sebagai tetangga demokratis terbesar Timor-Leste, sejak 1974 Australia dijadikan sasaran oleh partai-partai politik Timor-Leste, khususnya Fretilin, dengan tujuan mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil untuk partai mereka dan program-programnya. Maka pada saat invasi Indonesia terjadi, masalah Timor-Leste sudah tercantum dalam agenda sejumlah organisasi dan individu Australia, termasuk kaum akademisi, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, politisi, lembaga bantuan, gereja, veteran tentara¹, mahasiswa dan serikat perdagangan. Sejumlah besar dari mereka itu pernah berkunjung ke Timor-Leste.

438. Sejak saat itu landasan bagi komitmen masyarakat sipil Australia yang beragam dan mantap telah diletakkan. Ini dapat dilihat dari survei singkat atas asosiasi-asosiasi pertama mereka, yang banyak di antaranya telah memberi kontribusi terhadap pengembangan dukungan jangka panjang regional dan internasional bagi Timor-Leste.

439. Beberapa anggota parlemen Australia mengunjungi Timor-Leste, dua kali pada tahun 1975, dan membentuk kelompok dukungan Timor-Leste yang kecil tapi kuat di Canberra, menentang kebijakan-kebijakan anti-kemerdekaan Timor dari pemerintah saat itu dan seterusnya. Salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh, Ken Fry, memberi kesaksian pada Dewan Keamanan PBB pada bulan April 1976, dan menjadi pendukung utama Timor-Leste di Parlemen nasional. Rekannya, Gordon McIntosh, juga aktif dalam Senat Australia dan berperan sangat penting dalam menggerakkan masyarakat sipil Selandia Baru. Penyelenggaraan Sidang Kongres AS tentang Timor-Leste pada tahun 1977, didorong oleh para anggota parlemen Australia yang dipimpin oleh Tom Uren, salah seorang veteran yang bertugas di Timor Barat pada Perang Dunia II.

440. Lembaga-lembaga bantuan Australia mengirim bantuan kemanusiaan sebagai reaksi atas perang saudara yang pecah tahun 1975. Di antaranya termasuk *Australian Council for Overseas Aid* (ACFOA; Bantuan Dewan Seberang Lautan Australia), sebuah asosiasi yang merangkul sekitar 70 organisasi non-pemerintah nasional. Selama 24 tahun berikutnya lembaga tersebut, secara terbuka, mengadvokasi baik di negara sendiri maupun di luar negeri penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Fr Mark Raper SJ, salah seorang anggota delegasi ACFOA, menggalang dukungan untuk Timor-Leste di jaringan-jaringan keadilan sosial di Australia dan Asia. Dengan demikian ia memperkuat dukungan atas penentuan nasib sendiri yang dianjurkan *Catholic Commission for Justice and Peace* (Komisi Katolik Untuk Keadilan dan Perdamaian). Lembaga-lembaga bantuan Australia, termasuk *Australian Catholic Relief* (Bantuan Katolik Australia) dan *Community Aid Abroad* (Bantuan Komunitas Luar Negeri), mendanai kunjungan James Dunn ke Portugal pada bulan Januari 1977, di sana ia mewawancarai para pengungsi yang meninggalkan Timor-Leste setelah bulan Agustus 1976. Lapornya sangat penting dalam memastikan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia sebagaimana diklaim oleh Fretilin.

¹ Beberapa veteran perang Australia yang bertempur melawan Jepang di Timor-Leste dengan pertolongan dan perlindungan dari masyarakat Timor Leste di dalam Perang Dunia kedua memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Australia berhutang secara moral kepada masyarakat Timor Leste untuk pengurbanan yang mereka lakukan untuk Australia. Mantan prajurit penyerang Cliff Moris dan Paddy Kenneally berada di antara mereka yang secara terbuka mengemukakan cara pandang ini, tetapi, khawatir akan penyebaran ajaran komunisme, tidak semua rekan mereka bisa setuju dengan mereka.

441. Australia merupakan negara tujuan utama bagi para pengungsi perang saudara Timor-Leste - suatu perkembangan yang berhasil memperkuat kampanye untuk Timor-Leste di Australia dan di wilayah sekitarnya. Lima orang pengamat Deklarasi Kemerdekaan Fretilin pada November 1975 semuanya warga Australia: jurnalis Michael Richardson, Jill Jolliffe, dan Roger East; David Scott, Ketua *Community Aid Abroad*, dan Sam Kruger, seorang bekas tentara. Jill Jolliffe menjadi salah seorang sumber yang paling mengerti tentang Timor-Leste, dan laporan-laporannya muncul di media internasional selama penjajahan. Tiga dari enam orang jurnalis yang berpangkalan di Australia, dan terbunuh di Timor-Leste sebelum akhir tahun 1975 adalah warga Australia. Nasib mereka menarik perhatian masyarakat luas di seluruh Australia. Istri salah seorang jurnalis itu, Shirley Shackleton, dan saudara laki-laki seorang jurnalis lainnya, Paul Stewart, menggunakan media dengan pandai dan ia menjadi simbol perjuangan Timor-Leste di Australia. Isu Timor mendapatkan dukungan di kalangan kaum buruh, dan menghasilkan pelarangan untuk barang-barang yang akan dikirim ke Indonesia; demikian pula kunjungan ke Jakarta pada April 1976 Presiden *Australian Council of Trade Unions* (ACTU; Dewan Serikat Buruh Australia), Bob Hawke, serta rekan-rekannya, para aktivis yang terlibat dengan masalah Timor, antara lain Jim Roulston, untuk mendorong dilakukannya penyelidikan tuntas terhadap tewasnya jurnalis-jurnalis di Balibo. Grup-grup solidaritas Australia yang paling lama bekerja, yaitu *Campaign for an Independent East Timor* (CIET; Kampanye Untuk Timor Timur Merdeka) dan *Australia East Timor Association* (AETA; Perhimpunan Australia Timor Timur), yang didirikan pada saat setelah para pendirinya mengunjungi Timor-Leste. CIET didirikan di Sydney pada bulan November 1974 oleh Denis Freney (1936-1995), yang mempunyai jaringan-jaringannya di Inggris, di beberapa kota Australia (Adelaide, Canberra, Darwin, Newcastle, Wollongong), dan kemudian juga di Selandia Baru. AETA, melalui David Scott, membantu pembentukan misi pertama Fretilin di PBB pada bulan Desember 1975. Setelah invasi Indonesia, CIET menjadi saluran informasi utama tentang penjajahan dan perlawanan, melalui hubungan radio Fretilin yang berbasis di Darwin¹ dan Biro Berita Timor Timur. CIET juga bertanggungjawab dalam membuat “”, film berbahasa Inggris pertama tentang Timor-Leste, yang dibuat tahun 1975. Komisi mendengar kesaksian David Scott tentang usaha-usaha nekat untuk membatalkan embargo terhadap Timor-Leste di tahun 1976, termasuk usaha yang gagal untuk mendaratkan kapal dari Darwin oleh beberapa orang Australia.²

442. Aktivitas masyarakat sipil di Inggris lebih kecil daripada yang di Portugal atau di Australia. Relasi Inggris dengan Timor-Leste, dibanding Australia dan Portugal hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang terpencil, dan tidak adanya komunitas Timor-Leste di Inggris yang mengikuti kejadian-kejadian di tanahair mereka. Di samping itu meskipun ada dua warga Inggris yang termasuk dalam lima jurnalis Australia yang terbunuh di Balibo pada bulan Oktober 1975, kebijakan pemerintah Inggris mengambil kebijakan yang bersifat menjauhkan diri dari masalah Timor-Leste, guna mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan publik untuk mengecam Indonesia. Berdasarkan hubungannya dengan Portugal yang sudah sejak dulu, Inggris mengambil sikap “low profile” terhadap masalah Timor-Leste selama tahun-tahun akhir pemerintahan Portugal di sana (Lihat bagian dalam bab ini tentang pemerintah Inggris.)

¹ Radio Maubere adalah satu-satunya alat bagi Perlawanan dalam berhubungan dengan dunia luar setelah militer Indonesia menutup wilayah tersebut. Siaran Fretilin tentang perang di Timor-Leste ditangkap di Darwin dan disebar oleh CIET ke perwakilan-perwakilan Fretilin di luar negeri, PBB, grup-grup dukungan, media dan pemerintah-pemerintah. Transmisi dari Darwin dilakukan dengan keterampilan dan kegigihan oleh anggota-anggota Fretilin Tony Belo dan Estanislau da Silva dan para pendukung mereka warga Australia, dipimpin oleh Brian Manning, meskipun secara periodic peralatan mereka disita oleh otoritas Australia. Komunikasi rahasia Fretilin harus di-decode sebelum disebar. Jaringan ini ditutup pada bulan November 1978 setelah militer Indonesia mengambil radio Fretilin dari tangan Alarico Fernandes di Timor-Leste. Sambungan ini dibangun kembali pada tahun 1985 untuk periode yang singkat. Catatan Brian Manning tentang aktivitas ini dapat ditemukan dalam ‘A Few Rough Reds’, ed Hal Alexander dan Phil Griffiths, Australian Society for the Study of Labour History, Canberra, 2003. Catatan Rob Wesley-Smith dapat ditemukan dalam ‘Free East Timor’, ed Jim Aubrey (ed.), Random House Australia, Milsons Point, NSW, 1998.

² Pemerintah Australia menyita kapal dan mendakwa kru tersebut dengan dakwaan pelanggaran hukum bea cukai. Pengadilannya berlangsung selama 12 hari. (David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004)

443. Meskipun menghadapi lingkungan yang tidak menunjang, dua organisasi masyarakat sipil Inggris tetap bersikeras mengangkat masalah tersebut. Hasil kerja mereka dan kemudian keterlibatan lembaga Gereja, akhirnya menjadikan Inggris pusat penting untuk dukungan internasional pada Timor-Leste. Pelopornya adalah *British Campaign for an Independent East Timor* (BCIET; Kampanye Inggris Untuk Timor Timur Merdeka) dan "Tapol", Kampanye Inggris untuk Pembebasan Tahanan Politik Indonesia.¹ BCIET dibentuk pada tahun 1974 sebagai bagian dari jaringan CIET yang dipimpin Denis Freney, dan menjadi ujung tombak gerakan solidaritas di Inggris sampai tahun 1979. Salah satu peran utamanya adalah menyebarkan informasi yang diterima dari Fretilin ke seluruh Inggris melalui Denis Freney. John Taylor dan Dave Macey adalah dua anggota penting yang bekerjasama erat dengan "Tapol", dan membangun hubungan yang erat dengan kalangan gereja, akademisi dan politik. John Taylor kemudian menulis dua buah buku tentang Timor-Leste, dan menyumbangkan karangan-karangannya pada beberapa buku lainnya.

444. "Tapol" dibentuk pada bulan Juni 1973 dan menerbitkan laporan-laporan reguler tentang Timor-Leste sejak tahun 1974. Setelah BCIET bubar, "Tapol" membantu terus menghidupkan isu tersebut di Inggris, sampai sejumlah organisasi gereja ikut mengobarkan kampanye sehingga tidak ikut mati bersama BCIET, dan *British Coalition for East Timor*; Koalisi Inggris untuk Timor Timur) dibentuk pada awal 1980-an. Umumnya "Tapol" berkampanye melalui publikasi laporan berkala, yang regularitas, kelangsungan dan profesionalismenya sangat dikagumi oleh aktivis lain. Kontribusinya yang utama berupa laporan-laporan yang berdasarkan sumber-sumber dari dalam Indonesia. "Tapol" dan laporan berkalanya sangat berhutang budi pada inisiatif dan dedikasi Carmel Budiardjo - ia sendiri bekas tahanan politik di Indonesia - dan Liem Soei Liong, orang Indonesia yang hidup terkucil di Belanda. Mereka menjalin jaringan internasional yang luas melalui laporan berkala mereka, dan berbicara kepada umum di luar negeri, termasuk kemudian di PBB. Mereka juga membangun jaringan dukungan yang kokoh di Inggris, yang terdiri dari para pelindung terpandang, termasuk orang-orang terkemuka seperti Lord Avebury, seorang advokat yang persuasif bagi banyak kalangan elite di sepanjang perjuangan Timor-Leste di Inggris.

445. Masyarakat sipil menerapkan dua pendekatan yang sangat berbeda mengenai isu Timor-Leste selama periode ini. Sebagian besar dari pihak pertama terdiri dari grup-grup solidaritas yang berkampanye mendukung kemerdekaan Timor-Leste dan Fretilin. Grup solidaritas pertama yang dibentuk bernama *Campaign for an Independent East Timor* (CIET). Kelompok ini berpendapat bahwa Timor Timur telah menentukan status politiknya sendiri, dan juga realitas kekuasaan Fretilin. Mereka dengan bersemangat menyetujui program-program reformasi Fretilin, yang cocok dengan perkembangan progresif dan agenda-agenda politik,² serta menolak anggapan bahwa Timor-Leste akan lebih baik di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Pendirian ini terus berjalan selama tahun-tahun awal penjajahan, ketika Fretilin menguasai wilayah dan kontak radio dengan dunia luar, dan diperluas dengan menyertakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri ketika Fretilin melakukan perubahan strategi. Gerakan Solidaritas ini bahkan tidak menjadi surut dengan terjadinya, atau diduga terjadinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh Fretilin. Sebagian besar masyarakat waktu itu tidak tahu tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut, atau percaya bahwa klaim-klaim, baik yang dari pihak Indonesia maupun yang dari pihak pendukung Timor -Leste dibesar-besarkan atau didasari motif politik.

446. Pihak lain dalam masyarakat internasional cenderung menempuh pendekatan yang lebih berdasar pada azas hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri, ketimbang pada politik

¹ Sebagai reaksi atas Timor-Leste dan situasi yang sedang berubah di Indonesia, Tapol memperluas namanya menjadi *British Campaign for the Defence of Political Prisoners and Human Rights in Indonesia* dan, sejak tahun 1986, menjadi *Indonesia Human Rights Campaign*.

² Contoh-contoh para kaum akademis yang mempromosikan Fretilin dan kebijakan-kebijakannya dalam hubungannya dengan pendidikan, ekonomi dan reformasi lainnya adalah António Barbedo de Magalhaes, Helen Hill dan John Taylor. Helen Hill, yang mengunjungi Timor-Leste sebelum diambil-alih Indonesia, menulis thesis doktornya tentang Fretilin, yang hingga saat ini menjadi satu-satunya studi tentang partai tersebut. Kontribusinya yang lain termasuk 'Timor Story', diterbitkan pada tahun 1976 oleh Timor Information Service. .

kepartaian. Dari pandangan kebijakan politik paling tidak pihak ini bersikap terbuka mengenai integrasi masa depan Timor-Leste dengan Indonesia, jika hal ini merupakan hasil dari proses yang adil, di samping itu juga bersikap menjaga jarak dengan Fretilin dan gerakan solidaritas. Sebagian besar pihak ini terdiri dari beberapa organisasi non-pemerintah, gereja dan beberapa organisasi hak asasi manusia yang bekerja atas dasar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan secara jelas. Mereka kurang fleksibel dibanding grup-grup solidaritas, tetapi seringkali lebih pandai dalam mengatur siasat kebijakan tentang isu Timor-Leste, khususnya dalam periode ketika Perang Dingin sedang memuncak. Kemandiriannya juga mencegah mereka terlibat dalam perang ideologi dan masalah organisasi, seperti yang terjadi pada beberapa bagian dalam gerakan solidaritas pada tahun-tahun awal. Namun meskipun mandiri, mereka tidak bertentangan dengan Fretilin atau pihak-pihak yang solider dengan Fretilin, dan sering bekerja sama serta bahkan mencari informasi dari mereka.

447. Contoh untuk pendekatan ini adalah mantan konsul Australia untuk Timor-Leste, James Dunn, yang pandangannya tentang masalah Timor-Leste memiliki pengaruh kuat pada persepsi publik dari berbagai kalangan. Ia mewakili banyak pihak ketika menulis hal-hal berikut di bawah ini kepada José Ramos-Horta (Fretilin) dan Domingos de Oliveira (UDT), pada tanggal 18 September 1974:

Saya menulis catatan pendek untuk anda – dan juga untuk Domingos Oliveira – dengan maksud menjauhkan diri dari laporan-laporan yang mengatakan, bahwa Australia mendukung integrasi Timor ke dalam Indonesia. Saya tidak ingin berkomentar tentang laporan ini, atau tentang kebijakan pemerintah Australia apa pun mengenai hal ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa, menurut saya, rakyat Timorlah yang harus memutuskan masa depan negara mereka, tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam isu mengenai integrasi dengan Indonesia, saya hanya dapat mengatakan bahwa, pada waktu saya berkunjung, saya merasa sangat sedikit rakyat anda yang memilih garis kebijakan ini sebagai solusi atas nasib mereka. Jika situasi ini berubah, dan rakyat Timor memilih untuk bergabung dengan Indonesia, tentu saja saya akan menerima keputusan tersebut. Begitu pula jika rakyat Timor memutuskan lebih memilih kemerdekaan, keputusan tersebut sepenuhnya akan saya terima secara pribadi, dan saya ingin membantu bangkitnya negara baru tersebut dengan cara apa pun. Saya juga akan menghormati keputusan rakyat anda untuk melanjutkan hubungan dengan Portugal, jika itu yang diinginkan. Tantangan ada pada anda: Australia tidak bisa memaksa anda ke arah mana pun melawan keinginan anda.¹

448. Pendekatan yang berhasil menarik publik yang lebih luas ini, diterapkan dengan hasil yang cukup baik oleh Action for World Development (AWD; Gerakan untuk Pembangunan Dunia), yang dipimpin Bill Armstrong. Sebagai gerakan gereja-gereja ekumenis di Australia, AWD menggunakan koneksinya dengan lembaga bantuan, para aktivis keadilan sosial dan gereja-gereja di Australia dan luar negeri, termasuk World Council of Churches [Dewan Gereja-Gereja

¹ Salinan dari surat dalam arsip CAVR. James Dunn adalah Konsul Australia untuk Timor Portugis 1962-1964. Ia mengunjungi wilayah tersebut mewakili pemerintah Australia pada 17-27 Juni 1974 dan mewakili ACFOA setelah perang saudara. Ia adalah seorang pembela untuk Timor-Leste yang tak mengenal lelah dan sangat kredibel selama penjajahan dan adalah pengarang 'East Timor: A Rough Passage to Independence', Longueville Books, 2003. Pada tahun 2001 ia dianugerahi Order of Australia dan 2002 dibuat *Grande Oficial of the Order of Prince Henry* oleh Dr Jorge Sampaio, Presiden Portugal.

Sedunia], untuk menggalakkan masalah Timor-Leste menjadi masalah hak asasi manusia, bukan sekedar masalah pro-Fretilin atau anti-Indonesia.

449. AWD mendukung publikasi *Timor Information Service* (TIS) yang diedit oleh John Waddingham, salah seorang aktivis Australia untuk Timor-Leste yang memiliki pengetahuan sangat luas mengenai isu tersebut. Ia menyediakan informasi dan analisis yang handal, berdasar beberapa sumber dan bukan hanya sumber Fretilin. Pendekatan ini menarik garis tajam antara militer Indonesia dan rakyat Indonesia, yang situasinya juga perlu diketahui lebih baik, sehingga memungkinkan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia, sebagaimana kemudian memang telah terjadi. Hal ini juga perlahan-lahan membuka kemungkinan dibangunnya hubungan dengan diaspora Timor-Leste di Macau, Portugal dan Australia, termasuk dengan anggota-anggota senior UDT¹, yang meninggalkan Timor-Leste sebagai pengungsi setelah kemenangan Fretilin dalam perang saudara. Mereka masih marah dan salah pengertian terhadap mereka yang dianggap pro-Fretilin.

450. AWD juga mendukung Pat Walsh yang bekerja untuk Timor-Leste dengan John Waddingham, sebelum bergabung dengan ACFOA dan bertugas sebagai peneliti utama dan advokat hak asasi manusia hingga tahun 2000. Pekerjaan ini beragam dan termasuk penggalakan masalah hak asasi manusia di Indonesia dan masalah hubungan Australia-Indonesia. Dalam kaitannya dengan Timor-Leste, pekerjaan tersebut difokuskan pada penentuan nasib sendiri tetapi juga termasuk usaha menangani para pengungsi, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia dan melibatkan jaringan ekstensif serta lobi di Australia dan internasional.

451. Namun variasi dalam pendekatannya tidak menghasilkan dampak pada pemerintah Indonesia dan sekutunya. Banyak pihak di kalangan pemerintah, media, bisnis² dan masyarakat sipil, mengacuhkan pihak-pihak yang vokal membela Timor-Leste, terlepas dari sikap mereka yang pro-Fretilin dan anti-Indonesia. Dukungan utama untuk Fretilin dari *Communist Party of Australia* (Partai Komunis Australia) memperkuat pandangan itu, dan dipropagandakan di Indonesia serta hirarki Gereja Katolik Timor-Leste, bahwa Fretilin adalah pengikut paham komunis³. Isu ini, ditambah perdebatan tentang Timor-Leste yang tidak layak hidup sebagai negara yang merdeka, dan pentingnya hubungan baik dengan Indonesia, memecah pendapat publik dan menghalangi perjuangan Timor selama beberapa tahun. Pemerintah dan pihak-pihak yang mendukungnya atau mereka yang diam saja dituduh ikut berdosa. Masyarakat sipil, menurut kata-kata David Scott, direndahkan sebagai “pencari perhatian”, “komunis” penganut paham yang berkelebihan simpati, simpatisan komunisme, “tidak loyal pada Australia” dan, yang paling kejam dari semuanya itu, dikatakannya sebagai ‘naif’.²³⁷

6.2.2 Tahap kedua: Krisis dan permulaan-permulaan baru 1978-83

452. Periode ini merupakan masa yang paling sulit dan menantang bagi rakyat Timor-Leste serta para pendukung internasionalnya. Tahun 1978 terjadi krisis yang mendalam. Pada akhir tahun ini Indonesia mencapai kemajuan yang penting di bidang militer. Tentara Fretilin hampir

¹ Beberapa pejabat Australia melaporkan pernyataan Jenderal Benny Moerdani pada 1 Desember 1975 bahwa ‘UDT memusuhi beberapa warga Australia, khususnya ACFOA dan perwakilan media tertentu dan juga Palang Merah. Orang asing siapa pun yang ada di Dili berisiko dituduh oleh UDT sebagai simpatisan Fretilin’. Dokument 354, Canberra, 2 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 593, n.4

² *Australia-Indonesia Business Co-operation Committee* (AIBCC) menekan pemerintah Australia kurang dari 12 bulan setelah invasi untuk memberikan pengakuan penuh atas kedaulatan Indonesia di Timor-Leste demi kepentingan keamanan regional. Komite tersebut, yang mewakili 153 perusahaan besar, termasuk ANZ Bank, the Bank of NSW, Blue Metal Industries, the Australian Wheat and Dairy Boards, dan perusahaan gula utama, CSR, berargumentasi bahwa oposisi berlanjut atas penggabungan Timor-Leste dengan Indonesia bisa merusak hubungan dengan Indonesia. “Recognize Takeover: Companies in Approach to Canberra.”, *The Age*, 23 Oktober 1976.

³ Di Australia, Bob Santamaria, pemimpin National Civic Council, yang sangat anti-komunis memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Fretilin dan mereka yang ia tuntut (meskipun sering salah) sebagai pihak yang sepehamannya. pendapat sangat berpengaruh di kalangan konservatif dan kalangan Gereja, hal yang merugikan Timor-Leste.

dibinasakan, dan Fretilin telah kehilangan pemimpinnya yang dipuja-puja, Nicolau Lobato, dan hubungan radio dengan dunia luar pun telah berhenti. Puluhan ribu warga Timor-Leste meninggal karena kelaparan atau menyerah, setelah dipaksa turun dari pegunungan dan keluar dari wilayah Fretilin, melalui serangan militer yang gencar serta bencana kelaparan. Pada tahun 1983 Dom Martinho da Costa Lopes, pemimpin Gereja Katolik dan pembela rakyat Timor-Leste yang terkemuka, dipaksa mundur dan meninggalkan Timor-Leste. Situasi diplomatik Timor-Leste juga berjalan buruk selama periode ini. Sayap eksternal Fretilin digoncang perpecahan internal yang serius, dan nasib Timor-Leste di PBB semakin parah. Pada tahun 1982 Timor-Leste mengalami "pukulan yang menghancurkan", menurut kata-kata José Ramos-Horta, ketika sebuah Resolusi PBB yang lemah itu pun hanya mendapat empat suara. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, secara girang mengatakan, bahwa hasil ini 'sangat memuaskan' dan bahwa Indonesia berharap PBB bisa menghapus isu Timor-Leste di tahun berikutnya, sekali untuk selamanya.

453. Perkembangan-perkembangan kritis ini berdampak besar pada semangat dan momentum dukungan masyarakat sipil untuk Timor-Leste. Dihentikannya transmisi radio Fretilin dan larangan Indonesia terhadap akses independen ke wilayah Timor-Leste, sangat menyulitkan usaha mempertahankan perhatian publik dan media pada isu tersebut, dan adanya rasa kegagalan menurunkan semangat perjuangan untuk Timor-Leste. Beberapa pemerintah berusaha memperlemah komitmen masyarakat sipil dengan berulang-ulang menyatakan, bahwa dukungan masyarakat sipil tersebut "percuma" dan bahwa solusi tentang masalah Timor-Leste sudah "tidak dapat diubah"¹. Banyak pihak juga berpendapat bahwa melanjutkan dukungan untuk masalah tersebut tidak bertanggungjawab, karena hanya akan mendorong perlawanan dan menghasilkan lebih banyak lagi kematian serta penindasan di Timor-Leste.

454. Meskipun semangat sudah lemah, khususnya dalam kapasitasnya untuk memobilisasi opini publik, masyarakat sipil tetap mempertahankan komitmennya. Telah diputuskan bahwa, meski tidak ada lagi yang mungkin dapat dilakukan, isu tersebut harus tetap dihidupkan. Ini didasarkan pada keyakinan, bahwa perjuangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum, dan bahwa perdamaian yang langgeng di Timor-Leste hanya dapat dijamin melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati². Sikap rakyat Timor-Leste juga menjadi faktor yang menentukan. Luisa Teotonio Pereira mengatakan pada Komisi:

Meskipun [di Portugal] pihak yang skeptis, khususnya pada tingkat pemerintah, berusaha membenarkan tindakan-tindakan "realistis", untuk "mengakhiri penderitaan rakyat Timor", mereka selalu menjawab: "Selama rakyat Timor-Leste terus berjuang, apakah masuk akal jika kami menyerah pada ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan?"²³⁸

455. Usaha solidaritas terus berlanjut. Di Selandia Baru pada tahun 1978, CIET melancarkan kampanye besar-besaran berjudul "Biarkan Horta Berbicara", dan memaksa pemerintah Selandia Baru untuk membatalkan penolakan pemberian visa kepadanya.³ Di Belanda pada tahun 1980, masyarakat sipil bekerja sama dengan Fretilin untuk menuntut pemerintah Belanda ke pengadilan, karena mengeksport peralatan militer (korvet) ke Indonesia. Pengadilan memutuskan

¹ Menteri Luar Negeri Selandia Baru B.E. Talboys memberi contoh tipikal. Dalam sebuah memo kepada Kabinet setelah kunjungan Dubes Roger Peren dan Atase Pertahanan Kolonel Macfarlane ke Timor-Leste pada tahun 1978, beliau menulis: 'Kesimpulan utama mereka adalah bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia tidak dapat diubah kembali. Ini sesuai dengan pendapat pribadi saya tentang ini. Sementara Pemerintah keberatan dengan tindakan-tindakan Indonesia di Timor, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa dicapai, paling tidak bagi rakyat Timor, dengan terus mempermasalahkan masa lalu'. ("Memorandum for Cabinet", Office of the Minister of Foreign Affairs, Wellington, 8 February 1978, dalam NZ...OIA Material, Volume 1).

² Sebagai contoh, ACFOA mengakui dalam Catatan Perkembangannya, Juli 1980, bahwa Timor-Leste 'jarang sekali disebut dalam media Australia' tapi 'hak rakyat Timor-Leste akan penentuan nasib sendiri harus tetap menjadi tujuan dasar ...'

³ Ramos-Horta tidak jadi berangkat karena krisis Fretilin di Maputo. Aktivis utama Selandia Baru pada periode tersebut adalah Colin Isles, Harry Bruhns dan John Compton.

memenangkan pemerintah, dengan dasar bahwa Republik Demokratik Timor-Leste dan Fretilin tidak memiliki status hukum. Grup-grup lain di Eropa dan Skandinavia berusaha mempublikasikan keadaan buruk Timor-Leste, dan memprotes pemerintah karena tidak melakukan tindakan. Ini termasuk aktivitas Michel Robert melalui *Association de Solidarite avec Timor-Oriental* (Perhimpunan Solidaritas dengan Timor Timur) di Prancis. Hasil kerja Torben Retboll di Denmark, termasuk melalui *International Working Group on Indigenous Affairs* (IWGIA; Kelompok Kerja Internasional tentang Masalah Pribumi), dan hasil kerja Klemens Ludwig atas nama *Society for Threatened Peoples in Germany* (Perserikatan untuk Bangsa-Bangsa yang Terancam di Jerman). Pada tahun 1985, para aktivis Jerman berhasil membujuk lebih dari 100 anggota Parlemen untuk menekan Menteri Pertahanan Jerman, agar mengangkat masalah Timor-Leste kepada Presiden Soeharto pada kunjungannya ke Jakarta. Ia menolak. Seperti Belanda, Swedia, Prancis dan Inggris, Jerman juga tetap menjual senjata ke Indonesia. Tetapi terdapat kemajuan di Parlemen Eropa, yang menghasilkan sejumlah resolusi tentang Timor-Leste, dan pada tahun 1994 mengimbau diakuinya hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta penghentian semua bantuan militer dan penjualan senjata ke Indonesia.

456. Pada tahun 1981 grup solidaritas Asia pertama untuk Timor-Leste dimulai di Jepang oleh para kelompok perempuan di Hiroshima, dipimpin oleh Jean Inglis. Grup ini menerbitkan laporan berkala berbahasa Jepang, berjudul *Higashi Chimoru Tsuchin (East Timor Newsletter)*, yang mencurahkan perhatiannya terhadap usaha penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste. Di AS, Arnold Kohen yang memulai keterlibatannya dalam masalah Timor-Leste, setelah mendengar José Ramos-Horta berbicara pada tahun 1975, memfokuskan usahanya pada pihak-pihak terkemuka di tiga institusi penting, kebanyakan di Washington: Kongres, media, dan Gereja Katolik. Ia bekerja sama dengan para anggota Kongres yang bersimpati dan para asistennya untuk mengadakan Audiensi Kongres baru, yang kali ini berfokus pada tanggapan Amerika terhadap kelaparan yang melanda Timor Timur tahun 1978-79.¹ Ia dan Fr Reinaldo Cardoso, bersama asisten Noam Chomsky, berhasil membujuk *New York Times* untuk menerbitkan editorial yang sangat kritis terhadap pemerintahan Carter. Pada tahun 1980, *New York Times* mengimbau AS untuk mendukung penentuan nasib sendiri [bagi rakyat Timor-Leste] dan terus melakukannya. Noam Chomsky memberi kesaksian mendukung Timor-Leste pada Komite Dekolonisasi PBB pada tahun 1978. Ia menulis panjang-lebar tentang Timor-Leste, khususnya mengkritik pers AS karena kurang memperhatikan masalah ini. Arnold Kohen memberitahu Komisi:

Kata-kata Chomsky tentang masalah ini memiliki pengaruh nyata, terkadang tidak langsung; dan sejarah harus mencatatnya, karena kata-katanya sangat penting dalam membantu mengubah ketidak-tahuan yang luas tentang TimorLeste yang dulu ada di AS dan negara-negara lain.²³⁹

457. Arnold Kohen juga mengakui kontribusi mending Edward Doherty pada “waktu yang gelap ini”, kontribusi seorang penasihat kebijakan luar negeri untuk Uskup Amerika, David Hinkley, juga dari ketua Seksi Amerika untuk *Amnesty International*, dan Michael Chamberlain, salah seorang dari “sedikit aktivis akar rumput pada waktu itu” dan pendiri *East Timor Human Rights Committee* yang sudah bekerja selama 1979-84.

458. Di Australia, grup-grup masyarakat sipil memulai penyelidikan publik oleh Parlemen Australia tahun 1982-83. Proses tersebut mengumpulkan wakil-wakil komunitas Timor-Leste, Gereja, *Amnesty International*, beberapa lembaga bantuan, universitas dan grup solidaritas dari tujuh kota. Carmel Budiardjo, sekretaris “Tapol” di London, dan Profesor Roger Clark, dari

¹ Dalam kesaksiannya ke Komisi, mantan pejabat PBB, Francesc Vendrell, memberi penghargaan pada sukses luar biasa Arnold Kohen dalam mendapatkan dukungan Kongres AS untuk Timor-Leste yang berlanjut hingga tahun 1999. Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional,, Dili, 15-17 Maret 2004

Rutgers University di AS, juga memberi kesaksian. Penyelidikan ini memaksa pemerintah mengirim delegasi Parlemen Australia ke Timor-Leste dalam usaha menetralkan bukti dari para saksi¹

459. Pada waktu itu sahabat-sahabat Timor-Leste juga menghasilkan beberapa publikasi. Pekerjaan rintisan Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism* (Nasionalisme dan Kolonialisme Timor Timur) diterbitkan pada tahun 1978, dan selama beberapa tahun menjadi referensi berbahasa Inggris utama tentang Timor-Leste. Bekerja dari Portugal, ia juga menerbitkan '*Timor Newsletter*' selama 1980-1983. Pada tahun 1979 "Tapol" mengisi kekosongan di Inggris dan AS dengan menerbitkan *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor* (Tindakan Genosida Invasi Indonesia atas Timor Timur), oleh Arnold Kohen dan John Taylor. Pada tahun 1980, *Yale Journal of World Public Order* (Jurnal Ketertiban Masyarakat Dunia, Yale) menerbitkan monograf penting Profesor Roger Clark berjudul *The 'decolonisation' of East Timor and the United Nations norms of self-determination and aggression* (Dekolonisasi Timor Timur dan Norma-Norma PBB tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Agresi). Lahir di Selandia Baru, Clark seorang profesor hukum terkemuka di Rutgers University di AS. Penghancuran secara ilmiah atas klaim-klaim Indonesia, yang mengatakan klaim-klaim itu sudah sejalan dengan hukum internasional, merupakan sumbangan pertama dari seorang pakar di bidang ini. Clark juga memberi kesaksian di PBB dan lembaga-lembaga lain tentang Timor-Leste. Pada tahun 1981, *Det Glomda Kriget* (Perang yang Terlupakan) diterbitkan di Stockholm oleh Ollie Tornquist dan H. Amahorseja dari *Osttimor Kommitten* di Swedia

460. Periode krisis ini memaksa masyarakat sipil untuk lebih kreatif dan membagi-bagi fokus dan jaringannya, agar dapat terus menghidupkan masalah ini. Mereka berpendapat, bahwa protes dan fokus pada isu penentuan nasib sendiri saja tidak cukup Khususnya sebagai tanggapan atas bencana kelaparan tahun 1978-1979 yang mengejutkan, maka warga dan organisasi yang merasa prihatin [atas nasib Timor-Leste] didorong untuk menjalin hubungan dengan Timor-Leste dengan cara-cara baru, misalnya melalui isu-isu seperti hak asasi manusia, penyatuan keluarga, pemukiman pengungsi, bantuan pembangunan dan bantuan darurat. Intervensi dari *International Committee of the Red Cross* (ICRC; Komite Palang Merah Internasional), *Catholic Relief Services* (CRS; Pelayanan Bantuan Katolik), *World Vision* (Visi Dunia) dan *Oxfam-UK* (Oxfam Inggris Raya) sebagai tanggapan terhadap kelaparan tersebut diterima dengan baik, meskipun dengan hati-hati demi alasan kemanusiaan dan lainnya, meskipun ada keberatan-keberatan tentang cara-cara CRS melakukan pekerjaannya. Foto-foto korban kelaparan dan informasi lainnya, juga digunakan untuk menunjukkan dampak perang dan untuk memobilisasi opini publik. Seperti sudah disebut, Penyelidikan Kongres dan Parlemen terhadap masalah ini dilakukan di AS dan Australia.

461. Tiga awalan baru terjadi selama periode ini. Masing-masing memiliki konsekuensi jangka panjang yang positif, dan menjadi sumber harapan di tengah kesuraman.

462. Pertama, diaspora Timor-Leste, yang telah menetap di Portugal, Macau dan Australia, menjadi lebih aktif. Organisasi-organisasi yang mereka dirikan menentang persepsi yang mengatakan, bahwa hanya minoritas warga Timor-Leste yang berhaluan nasionalis, dan kemudian menjadi sumber inspirasi dan informasi penting untuk komunitas yang lebih luas di negara sendiri dan di luar negeri.

463. Kedua, periode ini menyaksikan permulaan kolaborasi internasional. Meskipun fenomena ini memuncak pada tahun 90an, namun fondasinya telah diletakkan saat itu. Contoh yang patut diperhatikan yaitu sidang Pengadilan Masyarakat Permanen tentang Timor-Leste, yang diadakan di Lisboa 19-21 Juni 1981. Sidang ini dimaksud untuk mengangkat profil Timor-Leste selama periode suram, khususnya di Portugal, mengumpulkan para pemimpin Fretilin, para pengacara, kaum akademisi, para politisi, jurnalis, perwakilan Gereja, dan orang-orang Indonesia dari lima belas negara. Organisasi solidaritas Portugis, CDPM (*Comissão para os Direitos do Povo*

¹ Delegasi ini dipimpin oleh W.L. Morrison MP dan berkunjung ke Timor-Leste Juli-Agustus 1983.

Maubere, Commission for the Rights of the Maubere People; (Komisi untuk Hak-Hak Rakyat Maubere) dibentuk pada saat itu.

464. Ketiga, Gereja Katolik di Timor-Leste tumbuh menjadi lembaga kritik publik tentang tingkah laku militer Indonesia. Ini merupakan perkembangan politik yang luar biasa penting bagi Timor-Leste, baik secara domestik maupun internasional. Karena sebelumnya Gereja merupakan sebuah lembaga yang tidak representatif, dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Fretilin. Peranan Gereja berkembang pesat setelah invasi Indonesia¹, dan menjadi kekuatan politik meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para pastor dan mendapat tekanan dari Vatikan. Intervensi Gereja menutup kerugian militer lebih lanjut yang dialami Fretilin, dan merupakan pukulan serius bagi Indonesia yang berharap Gereja dan negara akan dapat bekerja sama dalam membangun provinsi baru. Melalui jemaah keagamaannya Gereja juga mempunyai hubungan internasional yang sangat berguna, dan hubungan khusus dengan Vatikan. Gereja dikritik di beberapa kalangan,² tapi para pendukung internasional dapat menunjukkan pernyataan-pernyataannya sebagai bukti, bahwa masalah Timor-Leste belum selesai dan bahwa perlawanan tidak hanya terbatas pada Fretilin. Keterlibatan Gereja juga melegitimasi isu bagi banyak orang, yang sebelumnya masih bimbang atau khawatir akan adanya klaim, yang menghubungkan mereka dengan paham komunis.

465. Beberapa kesaksian pastor-pastor yang pernah bekerja di Timor-Leste memastikan perkembangan-perkembangan ini. Termasuk di antaranya mantan utusan Portugis Pastor Leoneto do Rego dan Pastor Reinaldo Cardoso, dan pastor-pastor Timor-Leste Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres. Kesaksian mereka dalam beberapa forum internasional diperkuat oleh kunjungan-kunjungan internasional Dom Martinho da Costa Lopes ke Oseania, Amerika Serikat, Jepang dan Eropa setelah keberangkatannya dari Timor-Leste. Kunjungan-kunjungannya ini diatur dan didanai oleh grup-grup masyarakat sipil, di mana ia menggalakkan kampanye penentuan nasib sendiri [bagi rakyat Timor-Leste]. Setelah kunjungannya ke Jepang, Uskup Aloisius Soma memasukkan Timor-Leste ke dalam agenda *Japanese Catholic Council for Justice and Peace* (Dewan Katolik Jepang untuk Keadilan dan Perdamaian), dan pada tahun 1987 menunjuk Suster Monica Nakamura menjadi petugas khusus untuk Timor-Leste. John Taylor dan Arnold Kohen memberitahu Komisi, bahwa kunjungan-kunjungan uskup ke Inggris dan AS "sangat efektif, karena berhasil menunjukkan kegagalan Indonesia untuk menguasai sebagian besar Timor-Leste, dan mengkonfirmasi bahwa para diplomatnya pada umumnya mewakili opini umum di wilayah tersebut."²⁴⁰ Efeknya adalah bahwa Gereja internasional, setelah beberapa tahun dalam kebimbangan, mulai bergerak dan bergabung dengan Gereja Timor-Leste dalam program advokasi bersama. Ini kemudian diperkuat lebih jauh oleh keterlibatan beberapa badan Protestan penting di Eropa, Amerika Serikat, Asia dan Oseania, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan pendirian mengenai isu itu dengan Gereja Protestan Indonesia.

¹ Untuk lebih detilnya, lihat bagian tentang Vatikan di atas. Menurut sebuah laporan Gereja Indonesia yang belum dipublikasikan, orang Katolik yang dibaptis adalah sekitar sepertiga dari populasi tapi pada akhir tahun 1976 sebagian besar orang Timor Timur sudah mengklaim afiliasi Katolik. Catatan tentang Timor Timur, 2 November 1976.

² Roger Peren, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, melaporkan kunjungannya ke Timor-Leste pada tahun 1978. "Hanya anggota Hirarki Katolik Roma, dari Paus ke bawah, telah secara terbuka bertindak dengan kritis kepada pemerintah ini, tapi seiring dengan waktu kami menemukan diri kami semakin tidak menaruh kepercayaan pada pandangan-pandangan mereka." Dia mengklaim di bagian laporan selanjutnya bahwa pandangan negatif milik kalangan kependetaan ini mungkin disebabkan oleh "ketidakpuasan alamiah karena mereka tidak lagi memegang kekuasaan yang mereka nikmati di bawah rejim Portugis." (para 8 dan para 86, 13 Januari 1978, Selandia Baru, East Timor OIA Material, Volume 1)

6.2.3 Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil 1983-91

466. Meskipun pernah hampir binasa, pihak Perlawanan berhasil selamat dari *Anschluss*¹ Indonesia. Gejala utama tahap ini adalah dikembangkannya kembali Perlawanan di Timor-Leste oleh Xanana Gusmão, tampilnya Xanana Gusmão sebagai pemimpin Perlawanan, dan perubahan Perlawanan tahap demi tahap menjadi sebuah gerakan nasionalis yang luas, sehingga di dalamnya dapat berperan semua lapisan masyarakat dan bukan hanya Fretilin serta militer. Seorang pemimpin lain juga muncul dalam tahap ini: Dom Carlos Felipe Ximenes Belo yang diangkat sebagai kepala Gereja Katolik pada tahun 1983, dan menjadi pembela yang gigih untuk penentuan nasib sendiri, serta menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat sipil internasional. Tiga perkembangan menjelang akhir periode tersebut secara tidak langsung juga membela perjuangan Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri. Tiga hal tersebut yaitu: keputusan Presiden Soeharto untuk membuka wilayah Timor-Leste, berakhirnya Perang Dingin, dan kunjungan Paus Yohannes Paulus II, satu-satunya pemimpin dunia yang berkunjung di tengah-tengah konflik sedang berlangsung.

467. Hasil perubahan-perubahan yang dibawa oleh Xanana Gusmão membutuhkan waktu. Tapi hasil terakhirnya tampak pada lebih kuatnya bukan saja gerakan perlawanan di dalam negeri, tapi juga front diplomasi, demikian pula diaspora Timor-Leste serta masyarakat sipil internasional. Pada tahun 1983, setelah dicekal oleh pemerintah Australia, sebuah delegasi para pemimpin Fretilin berhasil berkunjung ke Australia, dan berpidato di depan 1500 orang dari segala lapisan masyarakat di Melbourne, yang diorganisasi oleh *Australia East Timor Association*. José Ramos-Horta terus bersafari untuk membangkitkan dukungan di setiap negara yang ia kunjungi². Dengan dukungan dan kadang-kadang nasihat dari grup-grup masyarakat sipil, orang Timor-Leste lainnya pun mulai melakukan lobi internasional³.

468. Sebagai pimpinan baru dalam Gereja Katolik yang sekarang mempunyai kebijakan arus umum, pandangan Uskup Belo berpengaruh di lingkungan masyarakat sipil internasional. Ia melanjutkan kebijakan Dom Martinho da Costa Lopes dalam menyatakan keprihatinan umum tentang HAM, tapi lebih menfokus pada perlunya penyelesaian jangka panjang. Kegigihannya dalam membela kebijakan penentuan nasib sendiri mempunyai arti sangat penting untuk mengakhiri konflik dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, menumbuhkan semangat pada para pendukung Timor-Leste di luar negeri, yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya bahwa masalah hak asasi manusia bagi rakyat Timor-Leste dapat dicapai tanpa adanya penyelesaian politik.

469. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan dan bertambah kuatnya sejumlah jaringan baru baik internasional maupun nasional. Victor Scheffers (*Netherlands Catholic Commission for Justice and Peace*; Komisi Katolik Belanda untuk Keadilan dan Perdamaian) dan Robert Archer (*Catholic Institute for International Relations*; Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional) di London mendirikan *Christian Consultation on East Timor* (Konsultasi Kristen tentang Timor Timur) yang menjadi forum tahunan besar untuk gereja-gereja dan organisasi masyarakat sipil, khususnya di Eropa. Grup-grup warga Jepang bekerja untuk menentang kebisuan tentang masalah Timor-Leste di kalangan media massa, kaum akademisi, parlemen, grup-grup keagamaan dan pemerintah. Mereka mengundang José Ramos-Horta ke Jepang pada tahun 1985, dan Dom Martinho da Costa Lopes pada tahun berikutnya. Mereka bekerja dengan para anggota Parlemen Jepang, dipimpin oleh Satsuki Eda, membentuk *Diet Members Forum on East*

¹ Kurt Waldheim, Sekjen PBB warga Austria, menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan tindakan-tindakan Indonesia di Timor-Leste. Istilah itu berkenaan dengan invasi Adolf Hitler ke Austria pada Perang Dunia II. Lihat memo Kantor Luar Negeri Inggris, 15 Mei 1976 (Arsip CAVR).

² Sebagai contoh, José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada bulan Maret 1985 atas undangan East Timor Coalition Jepang, menjadikannya orang Timor Timur pertama yang memperkenalkan masalah Timor-Leste secara langsung ke publik Jepang. (Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.)

³ Sebagai contoh, kunjungan Agio Pereira, Abel Guterres dan Mimi Ferreira ke wilayah Pasifik dan keikutsertaan Emilia Pires dan Ines de Almeida pada *World Conference of Women* di Nairobi tahun 1985.

Timor (Forum Anggota *Diet* tentang Timor Timur). Pada tahun 1987 mereka mengunjungi Timor-Leste dan mengajukan petisi pada PBB. Melalui usaha para aktivis seperti Akihisa [Aki] Matsuno dan Kiyoko Fukusawa, *Free East Timor Coalition* (Koalisi Timor Timur Merdeka) dibentuk pada tahun 1988, dan tumbuh menjadi beranggota sekitar 40 grup di seluruh Jepang. Pada tahun 1995 masyarakat sipil membantu mengubah posisi Jepang dari pro-Indonesia menjadi mendukung proses PBB di Timor-Leste.

470. Pada bulan November 1987, *Christians in Solidarity with East Timor* (CISSET; Umat Kristen dalam Solidaritas dengan Timor Timur) mengadakan konsultasi masyarakat sipil Asia-Pasifik pertama tentang Timor-Leste. Diadakan di Filipina, konsultasi tersebut menekankan perlunya partisipasi rakyat Timor-Leste dalam mencari penyelesaian politik. Di Kanada, mengikuti pekerjaan *Canada Asia Working Group* (Kelompok Kerja Kanada untuk Asia) dan *Indonesia East Timor Program* (Program Timor Timur Indonesia), *East Timor Alert Network* (ETAN; Jaringan Kerja Siaga Timor Timur) dibentuk pada tahun 1986 atas inisiatif Elaine Briere. ETAN merupakan salah satu dari sedikit organisasi yang memberikan tanggung jawab sektor swasta terhadap masalah hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada tahun 1997 ETAN memproduksi sebuah siaran video berjudul *The Sellout of East Timor*, yang berisi kritik sangat pedas terhadap hubungan bisnis Kanada dengan Indonesia. Foto-foto Timor-Leste karya Briere yang menakutkan, yang diambil pada tahun 1974, digunakan oleh organisasi-organisasi [pendukung] di banyak negara¹. Grup-grup solidaritas di Eropa menciptakan dimensi baru dalam kampanye mereka, dengan memperluas jaringannya untuk menyertakan *Campaign Against Arms Trade* (CAAT; Kampanye Menentang Perdagangan Senjata)². Pada tahun 1988 jaringan internasional *Parliamentarians for East Timor* (PET; Para Anggota Parlemen untuk Timor Timur) dibentuk. Dalam kekuatan penuh PET terdiri dari 900 orang anggota parlemen di 40 negara. PET melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan representasi kepada Sekjen PBB tentang nasib Timor-Leste, dan merekomendasikan masyarakat Timor-Leste untuk hadiah Nobel Perdamaian³.

471. Sejumlah sumber informasi baru muncul pada waktu itu, dan memberi tambahan sangat penting pada materi yang beredar tentang Timor-Leste. Sumber-sumber tersebut termasuk *Timor Leste : Mensagem aos vivos* oleh António Barbedo de Magalhães (Portugal, 1983); *Timor: A People Betrayed* (Timor: Rakyat yang Dikhianati) oleh James Dunn (Australia, 1983); *Em Timor-Leste , a paz é possível* (Untuk Timor-Leste: Perdamaian itu Mungkin) (laporan berkala Portugis dihasilkan oleh Jean Pierre Catry, 1983-91); *East Timor: The Struggle Continues* (Timor Timur: Perjuangan Berlanjut) diedit oleh Torben Retboll (Copenhagen, 1984); *Timor: Past and Present* (Timor: Masa Lalu dan sekarang) oleh Finngeir Hiorth (Norwegia, 1985); *The War Against East Timor* (Perang Melawan Timor Timur) oleh Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong (Britain, 1984); *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* (Funu: Kisah Timor Timur yang Tak Kunjung Sudah) oleh José Ramos-Horta (USA, 1987); *Timor Link* (Jaringan Timor), jurnal triwulan yang dihasilkan oleh *Catholic Institute for International Relations* (CIIR; Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional) yang didirikan pada tahun 1985 oleh Robert Archer, yang kemudian diedit oleh John Taylor dan Catherine Scott; *The Shadow over East Timor* (Bayang-Bayang Di Atas Timor Timur), video Denis Freney, James Kesteven dan Mandy King (Sydney, 1987); *Buried Alive: The Story of East Timor* (Dikubur Hidup-Hidup: Kisah Timor Timur), sebuah video oleh Gil Scrine, Fabio Cavadini dan Rob Hibberd (Sydney, 1989); *Descolonização de Timor: Missão impossível*, oleh Mario Lemos Pires (Portugal, 1991); *Timor-Est, le genocide oublié* (Timor Timur, genosida yang dilupakan) oleh Gabriel Defert (Paris, 1992). Amnesty International dan Human Rights Watch, organisasi baru yang berbasis di New York, juga menerbitkan sejumlah laporan tentang

¹ Aktivis Timor-Leste Abe Barreto dan Bella Galhos memberi dimensi Timor-Leste yang penting dalam usaha solidaritas di Kanada, saat mereka "menyeberang" ke Kanada meninggalkan tur dunia dan melibatkan diri dalam kampanye ETAN 1994-1999.

² CAAT didirikan di London tahun 1974 untuk mengakhiri perdagangan senjata internasional, khusus subsidi pemerintah dan dukungan pengeksportan senjata kepada rezim-rezim yang menindas masyarakatnya melalui konflik bersenjata. CAAT tersebut bertujuan mengekspose relasi militer barat dengan Indonesia yang memungkinkan pemerintah Soeharto tetap berkuasa dan tidak mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste

³ Parliamentarians for East Timor (PET) awalnya diketuai Lord Avebury, yang juga ketua all-Party Parliamentary Human Rights Group di Parlemen Inggris. Dukungan sekretariat disediakan oleh Sharon Scharfe di Kanada.

Timor- Leste dalam periode ini. Kedua organisasi tersebut bersikap netral tentang isu penentuan nasib sendiri, meskipun mereka bersaksi pada Komite Dekolonisasi PBB. Laporan independen dan lengkap mereka tentang hak asasi manusia dianggap lebih kredibel dibanding sangkalan resmi Indonesia, dan berhasil meyakinkan banyak pihak di kalangan masyarakat sipil tentang perlunya penyelesaian selayaknya konflik tersebut, dengan melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati.¹

472. Selama periode ini masyarakat sipil berhasil meningkatkan perhatian PBB. Karena kekhawatiran akan nasib Timor- Leste di PBB, setelah pemungutan suara tertutup pada Majelis Umum pada tahun 1982, antara 20 sampai 25 organisasi non-pemerintah internasional membuat “ziarah tahunan” ke New York untuk mengajukan permohonan pada Komite Khusus Dekolonisasi PBB guna mendukung kebijakan penentuan nasib sendiri [bagi Timor-Leste]². Sangat sedikit, walaupun ada, isu-isu lain dalam agenda Komite yang mendapat perhatian masyarakat sipil yang sebanding. Para pemohon dalam Pertemuan 1986, termasuk pemerhati ahli Indonesia Profesor Benedict Anderson dari Cornell University, Elizabeth Traube, ahli kebudayaan Timor-Leste, dan sejumlah organisasi non-pemerintah dari yang besar seperti *Asia Watch* sampai grup solidaritas yang kekurangan dana, tetapi sangat melibatkan diri, seperti *Hobart East Timor Committee* (Komite Timor Timur Hobart) dari Australia.

473. Organisasi-organisasi non-pemerintah juga meningkatkan masukan mereka kepada Komisi hak asasi manusia PBB di Jenewa, baik dalam Sub-Komisi Minoritas maupun dalam debat tahunan tentang penentuan nasib sendiri. Usaha ini sering tidak dihargai, karena sedikit saja pemerintah yang menyebut-nyebut Timor-Leste dalam pernyataan-pernyataan mereka, atau pada kesempatan lobi di tempat minum kopi Komisi. Sebagai tambahan, para advokat masyarakat sipil harus menghadapikritik pemerintah Indonesia di depan seluruh dunia, karena membuat klaim-klaim yang hanya berdasar pada obyektifitas politis. Perwakilan masyarakat sipil berubah-ubah dari tahun ke tahun. Organisasi non-pemerintah yang berbicara membela Timor-Leste pada sidang Sub-Komisi Minoritas pada tahun 1987 adalah *Pax Romana*, *Pax Christi International*, *National Aboriginal* dan *Islander Legal Service*, serta *Human Rights Advocates*. Intervensi masyarakat sipil sering merupakan praktik-praktik kolaboratif berdasarkan masukan-masukan dari organisasi non-pemerintah di berbagai bagian dunia. Organisasi-organisasi non-pemerintah internasional yang diterima oleh PBB kadangkala mengorbankan hak-hak berbicara mereka, untuk memberi kesempatan pada perwakilan Timor-Leste agar berbicara atas nama mereka atau menyediakan dana untuk mereka. Partisipasi José Ramos-Horta di Sub-Komisi PBB pada bulan Agustus 1991 didanai oleh *Community Aid Abroad* (CAA -- Bantuan Komunitas Luar Negeri) dan *Australian Council for Overseas Aid* (ACFOA; Dewan Australia untuk Bantuan Seberang Lautan). Hal itu menghasilkan kunjungan Pelapor Khusus tentang Penyiksaan PBB ke Timor-Leste tahun tersebut.

474. Institusi-institusi arus utama mulai mempertanyakan peraturan Soeharto pada periode ini. Berita-berita yang mengkritik kekayaan dan kebijakan anti-demokrasi Soeharto muncul di pers Barat sebelum kunjungan “Winds of Freedom” (Angin Kemerdekaan) Presiden AS Ronald Reagan ke Asia pada tahun 1986. Indonesia membalas dengan memberangus media yang bertanggung-jawab atas pemberitaan tersebut, tetapi justru menghasilkan kontroversi lebih jauh

¹ Dalam kesaksiannya ke Komisi, Ian Martin mengakui para peneliti Amnesty Internasional yang mengerjakan penelitian atas Timor-Leste selama penjajahan Indonesia, yaitu Anthony Goldstone, Sidney Jones, Geoff Robinson dan Kerry Brogan [Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.] Sidney Jones kemudian bekerja untuk Human Rights Watch dan menghasilkan sejumlah laporan penting tentang Timor-Leste. Pentingnya pekerjaan organisasi-organisasi ini dapat dilihat dari tuduhan-tuduhan pemerintah Indonesia bahwa klaim-klaim mereka tidak benar dan bermotivasi politis. Lihat surat Departemen Luar Negeri Indonesia ke Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, 2 November 1994, dalam Krieger hal.231.

² Francesc Vendrell, seorang mantan pejabat PBB, memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia yang memicu ide mendorong organisasi-organisasi non-pemerintah internasional untuk mengajukan permohonan ke Komite Khusus Dekolonisasi PBB. (Kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.) Praktek ini didorong oleh José Ramos-Horta dan pada tahun 1991 telah dikoordinasi oleh International Federation for East Timor (IFET) yang dilahirkan oleh Tn. Kan Akatani, seorang pensiunan diplomat Jepang dan perwakilan Japanese Catholic Council for Justice and Peace.

dan memperkuat alasan para pengkritik. Pada saat yang sama lebih dari 100 anggota Kongres menekan Presiden Ronald Reagan untuk mengangkat masalah Timor-Leste pada Presiden Soeharto. Ini menjadi pertanda penting yang diikuti oleh advokasi bertahun-tahun oleh masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar Indonesia¹.

475. Pada tahun 1989 beberapa kesempatan menjadi terbuka bagi Timor- Leste, dan jaringan dukungan internasionalnya pun menjadi berkembang. Sejak 1 Januari 1989, Presiden Soeharto membuka Timor- Leste untuk pertama kali, yang tertutup sejak bulan Desember 1975. Para individu dan organisasi dari masyarakat sipil yang peduli, mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi Timor-Leste dan, meskipun terdapat larangan-larangan dan bahaya, melakukan kontak dengan pihak Perlawanan, menyediakan bantuan materi, bertindak sebagai kurir dua arah, serta membangkitkan perhatian baru di negara-negara mereka. Diperkirakan sekitar 3000 orang asing telah berkunjung pada tahun 1989-91.² Untuk memfasilitasi komunikasi, *Australia East Timor Association* menerbitkan kamus Tetum-Inggris pertama, karya Cliff Morris, seorang veteran Perang Dunia kedua.

476. Contoh penggunaan kesempatan ini oleh masyarakat sipil adalah wawancara yang berani dengan pemimpin perlawanan Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung, yang dilakukan pada bulan September 1990 oleh seorang pengacara dan anggota serikat buruh, Robert Domm. Wawancara tersebut disiarkan oleh *Australian Broadcasting Commission* dan telah sangat meningkatkan profil dan status internasional Xanana Gusmão.³ Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat, sebagai konsekuensi dari dibukanya kawasan Timor-Leste. Ini memungkinkan para nasionalis di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia, dan pihak-pihak internasional yang bekerja di Jakarta atau berkunjung, termasuk wakil-wakil media massa.

477. Tamu terpenting setelah Timor-Leste dibuka adalah Paus Yohannes Paulus II, yang berkunjung pada bulan Oktober 1989. Pengakuan Paus tentang adanya konflik di Timor-Leste dan perlunya penyelesaian secara damai, berselisih dengan sebagian besar pemerintah dunia dan menjadi inspirasi bagi rakyat Timor-Leste dan para pendukung internasionalnya. Secara internasional dampak kunjungannya lebih diperbesar ketika terjadi demonstrasi yang pertama kali sejak invasi Indonesia, yang digelar pada akhir misanya di Tasi Tolu, dan diberitakan oleh media massa dunia. Pada tanggal 9 November 1989, runtuhnya Tembok Berlin secara simbolis menandai berakhirnya Perang Dingin. Peristiwa itu bergema sangat kuat pada masyarakat sipil pro-Timor-Leste di seluruh dunia, dan melumpuhkan dua dogma penting yang digunakan untuk melawan advokasi mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri, dengan alasan: bahwa integrasi Timor-Leste dengan Indonesia diperlukan untuk menahan penyebaran komunisme, dan bahwa kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste 'tidak dapat diganggu-gugat'.

¹ Artikel pers tersebut adalah David Jenkins, 'After Marcos, now for the Soeharto billions', Sydney Morning Herald, 10 April 1986, dan artikel oleh A.M. Rosenthal di New York Times mengenai represi di Indonesia. Laporan The Sydney Morning Herald menimbulkan kontroversi cukup besar karena Soeharto disamakan dengan diktator Filipina yang dijatuhkan, Ferdinand Marcos.

² Bantuan terhadap Perlawanan tidak berupa bantuan militer tetapi termasuk barang-barang seperti obat, kamera video dan telepon. Pada saat berangkat pengunjung-pengunjung membawa dokumen-dokumen, rekaman wawancara, foto-foto dan materi lain untuk digunakan di luar, termasuk bagi para pemimpin Perlawanan di luar Timor. Beberapa catatan terdapat pada 'Kirsty Sword dan Pat Walsh (ed.), *Opening Up: Travellers Impressions of East Timor 1989-1991*. (Melbourne, AETA 1991)

³ Wawancara juga mengekspose tawaran Xanana Gusmão kepada Indonesia tanpa pra-kondisi di bawah naungan PBB. Indonesia menolak tawaran tersebut yang dipromosikan Timor-Leste Talks Campaign, yang menerbitkan buletin berjudul 'The Missing Peace'. Catatan kunjungan berbahaya Domm ke pegunungan dengan pemandu orang Timor dan teks wawancara terdapat East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive, ACFOA Development Dossier No 29, February 1991.

6.2.4 Tahap keempat: Titik-titik balik 1991-98

478. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam perjuangan Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Periode tersebut dimulai dengan bencana hebat yang menimpa militer Indonesia dalam bentuk pembantaian Santa Cruz, dan 12 bulan kemudian diikuti dengan penangkapan Xanana Gusmão. Pada tahun 1996, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada para pembela hak penentuan nasib sendiri yang terkemuka, yaitu Uskup Belo dan José Ramos Horta; dan pada tahun 1997 Kofi Annan, Sekretaris Jendral PBB yang baru, memutuskan untuk mengintensifkan diplomasi PBB. Periode ini berakhir dengan jatuhnya pemerintah Soeharto pada bulan Mei 1998. Masyarakat sipil telah memberikan kontribusi mereka pada setiap titik balik ini, dan menggunakannya untuk memajukan isu penentuan nasib sendiri. Teknologi komunikasi baru juga mulai tersedia pada periode ini, dan cukup mampu meningkatkan kapasitas serta pengaruh masyarakat sipil.

479. Tidak seperti kekejaman lain yang diderita di Timor-Leste, pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 merupakan titik balik pendapat dunia tentang kawasan ini. Ini sebagai akibat dari hadirnya para pengamat internasional ketika peristiwa menyedihkan itu terjadi, dan sebagai akibat dari proyeksi pada dunia luar, yang mereka lakukan atas tragedi tersebut melalui media cetak, radio dan televisi. Terbunuhnya salah seorang tokoh internasional, Kamal Bamadhaj, menambah kemarahan publik, khususnya di Selandia Baru, Australia dan Malaysia¹. Rekaman video peristiwa penembakan dan teror yang dibikin dengan risiko tinggi oleh Max Stahl, diselundupkan keluar dengan berani dari Timor-Leste ke Amsterdam oleh seorang wartawan Belanda, Saskia Kouwenberg.² Bukti yang kuat ini, ditambah dengan foto-foto yang diambil oleh fotografer Inggris Steve Cox yang babak belur dianiaya²⁴¹, mengkonfirmasi tuduhan yang selama itu diajukan oleh para pendukung masyarakat sipil, yaitu bahwa Timor-Leste adalah masyarakat yang ada dalam cengkaman ketegangan, bahwa penindasan militer adalah realitas, dan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri adalah kunci untuk mencapai perdamaian.

480. Keterlibatan masyarakat sipil internasional meningkat pesat setelah tragedi Santa Cruz. Pada tanggal 19 November 1991, Portugal mengadakan hari berkabung nasional. Tokoh-tokoh masyarakat sipil terkemuka menandatangani surat terbuka kepada Presiden AS untuk memrotes Amerika Serikat yang telah menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, meskipun tanpa dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri. Para mahasiswa Portugis yang tergabung dalam *Forum Estudante dan Missao Paz por Timor* menggalang dana untuk menyewa kapal feri Portugis, *Lusitania Expresso*, untuk melakukan protes atas situasi tersebut dengan berlayar ke Timor-Leste. Segera setelah pembantaian Santa Cruz, East Timor *Action Network* (ETAN) dibentuk di AS oleh Charles Scheiner, John Miller dan lainnya dengan tujuan mengubah kebijakan luar negeri AS untuk mendukung penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Jurnalis AS, Alan Nairn dan Amy Goodman, yang hampir tidak selamat dari pembantaian Santa Cruz, berkampanye ke seluruh Amerika Serikat, memberi andil bagi perkembangan ETAN. Pada tahun 2000, ETAN telah didukung oleh sekitar 10.000 anggota dengan 27 grup lokal di seluruh AS. Juga di bulan November, *International Platform of Jurists for East Timor* (IPJET; Mimbar Ahli Hukum Internasional untuk Timor Timur) dibentuk di Belanda dipimpin oleh Pedro Pinto Leite. Tujuan IPJET adalah memobilisasi ahli hukum internasional untuk mendukung usaha penentuan nasib sendiri. Ini dilakukan melalui konferensi-konferensi, publikasi dan petisi, termasuk ke PBB

¹ Orangtua Kamal Bamadhaj berasal dari Selandia Baru dan Malaysia; saat itu ia adalah mahasiswa di Australia dan aktif mendukung hak asasi manusia untuk Timor-Leste. Pada tanggal 12 November ia sedang bekerja sebagai penerjemah untuk Bob Muntz dari Oxfam-Community Aid Abroad. Muntz hampir terbunuh dan kembalinya ke Australia dia memberikan kesaksian sebagai saksi mata tentang kekejaman itu tanpa kenal lelah. Pada tahun 1994, dalam kasus *Todd vs Panjaitan*, Center for Constitutional Rights (CCR) yang berbasis di New York berhasil menuntut Mayjen Sintong Panjaitan atas perannya dalam pembantaian Santa Cruz. Ia diperintahkan membayar US\$14 juta biaya kerugian ke Helen Todd, ibu Kamal Bamadhaj. Pembayaran tidak pernah dilakukan. Helen Todd memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.

² Saskia Kouwenberg menyelundupkan sebagian kaset tersebut dalam pakaiannya. Max Stahl sendiri membawa sebagian kaset keluar dan sedikitnya satu kaset tidak dapat diselamatkan dari tempat persembunyiannya di pemakaman Santa Cruz.]

dan Uni Eropa. Pada tahun 1995, IPJET sudah memiliki 250 anggota di lebih dari 50 negara. Dukungan publik dimobilisasi di Irlandia oleh *East Timor Ireland Solidarity Campaign* (ETISC; Kampanye Solidaritas Irlandia Timor Timur) yang dibentuk oleh Tom Hyland di Dublin setelah film Yorkshire Television berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor* (Dengan Darah Dingin: Masaker Timor Timur) ditayangkan pada bulan Januari 1992, yang menggunakan gambar-gambar pembantaian milik Stahl. Hasil kerja ETISC merupakan contoh lain, di samping Portugal, di mana gerakan solidaritas dapat bekerja secara efektif dengan pemerintahnya. Dengan menyediakan informasi kritis dan memobilisasi energi komunitas rakyat Irlandia, ETISC mendukung peran utama pemerintah Irlandia dalam kasus Timor-Leste di Uni Eropa pada tahun 1990-an. Di Skotlandia, *Glasgow University East Timor and Indonesia Support Group* (Kelompok Bantuan Timor Timur dan Indonesia Universitas Glasgow) dibentuk pada pertengahan 1990-an.

481. Penangkapan Xanana Gusmão oleh militer Indonesia pada tanggal 20 November 1992 pada awalnya menimbulkan depresi di kalangan diaspora Timor dan masyarakat sipil. Tetapi cepat disadari, bahwa cara terbaik untuk melindungi pemimpin perlawanan adalah dengan mengkampanyekan profil internasionalnya, membangun publisitas yang telah dihasilkan oleh masyarakat sipil, dan bahwa penahanan dan pengadilan Xanana Gusmao justru memberi kesempatan untuk melancarkan kampanye baru. Organisasi-organisasi hak asasi manusia sangat memperhatikan proses pengadilannya yang berlangsung di Dili pada bulan Mei 1993. Pemerintah Indonesia menolak memberi visa untuk Rodney Lewis, yang meminta untuk mengamati proses pengadilannya sebagai wakil dari *International Bar Association and the Law Council of Australia*. Protes terdengar semakin keras setelah hakim pengadilan memerintahkan Gusmão berhenti dengan pembelaannya, yang baru tiga halaman dibacanya, dengan menyatakan bahwa pembelaan itu “tidak relevan”, dan meminta serta menahan dokumen pembelaan tersebut. Sementara itu kelompok-kelompok masyarakat sipil menganggap dokumen pembelaan Gusmao sangat relevan. Mereka menerjemahkan dan menerbitkan salinan pembelaan tersebut, yang diselundupkan dan diterbitkan lebih sebagai gugatan terhadap Indonesia dan sekutu-sekutunya ketimbang sebagai sebuah pembelaan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil itu juga menilai proses pengadilan Gusmao sebagai cacat hukum, sama seperti yang dialami Timor-Leste sendiri.²⁴² Portugal dan Amnesty International, antara lain, mengutuk pengadilan tersebut. Semangat perlawanan di pihak pembela juga memberi ilham pada para pendukung dan melegakan mereka, setelah disebarakan isu bahwa setelah Gusmão tertangkap, dia menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, dan mengimbau para pengikutnya agar menyerahkan diri.

482. Grup-grup solidaritas mengkampanyekan “Xanana dalam tahanan” sebagai simbol Timor-Leste yang terjajah, dan mengaitkan nasib Xanana dengan nasib Timor-Leste. Stiker-stiker bertuliskan “Bebaskan Xanana, Bebaskan Timor-Leste” beredar di ruang konferensi pada Konferensi Dunia tentang hak asasi manusia di Wina tahun 1993, termasuk ditempel di balik pintu-pintu toilet yang diduga akan digunakan oleh delegasi pemerintah Indonesia di konferensi tersebut. Kampanye-kampanye dalam bentuk kartu pos, doa massal, demonstrasi, dan tulisan-tulisan tentang Gusmão menjadi berlipat ganda. Pada bulan September 1994 *United Nations Association of Australia* memberi penghargaan kepada Xanana sebagai pembela hak asasi manusia *in absentia*. Ulang tahunnya menjadi saat isyarat berkumpul bagi mereka setiap tahun, selain menandai pelannya hukuman seumur hidup baginya berjalan, tapi juga menandai solidaritas dari para pendukungnya dan komitmen mereka pada apa yang ia anjurkan, termasuk masalah referendum.

483. Ironisnya, pemenjaraan Xanana Gusmão di Jakarta justru memungkinkan dia bisa berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat sipil dan komunitas internasional, dibanding pada saat dia ada di pegunungan terpencil di Timor-Leste. Kirsty Sword Gusmão sangat berperan dalam melakukan hal tersebut, khususnya selama tahun 1992-96 ketika ia bertugas di Jakarta. Selain pekerjaan tetapnya, Kirsty bertugas sebagai sekretaris klandestin Perlawanan dan dibantu, antara lain, oleh Victoria Markwick-Smith, yang berpengalaman dalam kegiatan ilegal Timor di Jakarta, dan didukung dari luar negeri oleh keluarganya dan jaringan kecil teman-temannya yang terpercaya. Meski banyak tantangan dan resiko, kegiatan ini memungkinkan terjadinya

komunikasi dua arah tingkat tinggi, yaitu antara Xanana Gusmão yang di dalam sel penjara dengan duta besarnya, José Ramos-Horta, dan banyak orang-orang lainnya lagi. Juga memungkinkan terjadinya banyak diskusi baik pribadi maupun resmi, antara Xanana Gusmão dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, dan bahkan pelelangan lukisan-lukisannya dari penjara di luar negeri, dalam rangka pengumpulan dana untuk Perlawanan.¹

484. Film John Pilger, *Death of a Nation* (Matinya Satu Bangsa), banyak berperan dalam memperkuat keterlibatan dunia pada Timor-Leste, menyusul pemutarannya di Jenewa pada saat sidang tahunan Komisi hak asasi manusia PBB pada awal tahun 1994. Setelah ditayangkan di televisi nasional di Selandia Baru, contohnya, para anggota parlemen membuat petisi, dan pemerintah Selandia Baru menghapus kebijakannya yang menyatakan bahwa status Timor-Leste tidak dapat diubah lagi.

485. Pada tahun 1994, *Asia Pacific Coalition for East Timor* (APCET; Koalisi Asia Pasifik untuk Timor Timur) dibentuk di Filipina. APCET mengadakan beberapa konferensi yang diatur oleh sekretariatnya, *Initiatives for International Dialogue* (Inisiatif-inisiatif untuk Dialog Internasional), dipimpin oleh Gus Miclat. Masyarakat sipil telah aktif di beberapa negara Asia selama beberapa tahun, tapi ini merupakan awal dari solidaritas untuk Timor-Leste yang terkoordinasi dan terus berjalan di seluruh Asia. Berturut-turut konferensi APCET di Filipina, Malaysia dan Thailand menentang tanggapan yang bersifat bermusuhan dari Indonesia dan sekutu-sekutu dekatnya di ASEAN. Mereka juga menentang pendapat beberapa pemerintah Asia bahwa hak asasi manusia tidaklah universal, dan anggapan dari beberapa negara Barat bahwa Timor-Leste tidak memiliki dukungan di kawasan Asia. Dua organisasi masyarakat sipil diwakilkan dalam konferensi APCET tahun 1995 di Kuala Lumpur, dan tidak lama kemudian *Solidamor* (Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur) didirikan di Jakarta. Salah satu bentuk kegiatan APCET tentang Timor-Leste adalah dikumpulkannya orang-orang dari komunitas tertindas di kawasan Asia. Para warga Timor peserta APCET bertemu dengan para aktivis dari Myanmar, Sri Lanka, Mindanao, Aceh dan Papua Barat, membantu mengembangkan hubungan-hubungan yang masih berlanjut hingga hari ini. *Asia Students Association* (ASA; Perhimpunan Mahasiswa Asia) yang berbasis di Hong Kong adalah afiliasi penting bagi APCET. Sekretariatnya bekerja keras untuk membawa isu Timor-Leste ke gerakan-gerakan mahasiswa di negara-negara kawasan tersebut.

486. Penggunaan senjata, yang dipasok negara Barat, untuk pembantaian Santa Cruz, mendorong masyarakat sipil untuk meningkatkan imbauan agar dilakukan embargo senjata terhadap Indonesia.² Kampanye ini sangat vokal terdengar di AS dan Inggris, *didukung oleh Campaign Against Arms Trade*. Pada bulan Januari 1996 empat perempuan dari *Ploughshares for Peace* memasuki pabrik pesawat Inggris, dan dengan menggunakan martil-martil melumpuhkan sebuah jet tempur British Hawk yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Indonesia. Pesawat Hawk diberitakan telah digunakan untuk melawan Perlawanan di Timor-Leste, dan empat perempuan tersebut mendesak agar pengiriman Hawk dibatalkan selama tiga tahun. Inggris negara pemasok senjata terbesar kedua bagi Indonesia. Perempuan-perempuan tersebut ialah, Andrea Needham, Lotta Kronlid, Joanna Wilson dan Angie Zelter, melaporkan perbuatan mereka kepada perusahaan Hawk terkait dan kemudian ditangkap. Pengadilan mereka pada tahun 1996 memahat sejarah hukum: mereka dibebaskan oleh juri di Liverpool dengan menyatakan, bahwa perempuan-perempuan tersebut bertindak demi mencegah

¹ Kirsty Sword Gusmão mengunjungi Timor-Leste tahun 1991 membantu Yorkshire Television dengan menyelesaikan film *In Cold Blood*. Usahanya untuk penentuan nasib sendiri diceritakan Kirsty Sword Gusmão dan Rowena Lennox dalam bukunya 'A Woman of Independence', Macmillan, Sydney, 2003. Contoh-contoh komunikasi Xanana Gusmão dengan masyarakat sipil, termasuk pesan-pesan terhadap *East Timor Talk Campaign*, H J C Princen dan perempuan-perempuan *Ploughshares for Peace* terdapat di otobiografi *To Resist is To Win*

² Allan Nairn memberi kesaksian bahwa M-16, pasokan AS, digunakan dalam pembantaian. Kesaksian kepada Komite Senat AS mengenai Relasi Luar Negeri, 27 Februari 1992.

kejahatan pemusnahan yang lebih besar²⁴³. Namun, kampanye tersebut gagal mengubah kebijakan bantuan militer Inggris dan AS terhadap Indonesia saat itu.¹

487. Inisiatif penting lainnya dalam periode tersebut adalah sejumlah seminar yang diadakan pada tahun 1990-an oleh seorang profesor Portugis, Dr António Barbedo de Magalhães². Seminar-seminar yang sebagian besar diadakan di Portugal itu, menyatukan para aktivis dan kaum akademisi, termasuk dari Indonesia, untuk berbagi informasi, dan mengembangkan kebijakan dan strategi-strategi tentang Timor-Leste. Di Australia organisasi dan inisiatif baru terus bermunculan. Termasuk *Australians for a Free East Timor* (AFFET; Organisasi Australia untuk Timor Timur Merdeka), yang didirikan di Darwin oleh aktivis lama Rob Wesley-Smith sekitar saat pembantaian Santa Cruz, cabang *Sydney Australia East Timor Association* pada tahun 1992³, *Friends of East Timor* (Sahabat-Sahabat Timor Timur) yang berbasis di Perth, *Mary McKillop Institute of East Timorese Studies* (MMIETS; Lembaga Studi Timor Timur Mary McKillop) didirikan pada tahun 1993 di Sydney oleh *Sisters of St Joseph, East Timor International Support Centre* (Himpunan Biarawati St Joseph, Pusat Bantuan Internasional Timor Timur) di Darwin, dikepalai oleh Juan Federer yang mendirikan *Timor Aid* pada tahun 1998, di Melbourne, *University Students for East Timor, East Timor Human Rights Centre* (Pusat hak asasi manusia Timor Timur, Mahasiswa Universitas Timor Timur), diketuai oleh Uskup Hilton Deakin, *Action in Solidarity with Indonesia and East Timor* (ASIET; Aksi Solidaritas dengan Indonesia dan Timor Timur) yang dipimpin oleh Max Lane juga didirikan pada waktu itu dan menggalakkan hubungan antara grup-grup klandestin mahasiswa Timor-Leste dengan organisasi-organisasi sosialis yang berusaha menuntut perubahan di Indonesia. *Australian Coalition for East Timor* (ACET; Koalisi Australia untuk Timor Timur) menyiapkan diri untuk mengkoordinasi, tapi sebagian besar grup-grup tersebut memilih konsultasi secara informal. *International Federation for East Timor* (IFET; Federasi Internasional untuk Timor Timur), yang didirikan pada periode ini, memiliki pengalaman yang mirip. IFET berhasil mencapai keanggotaan 30 organisasi dari 18 negara, tetapi banyak di antaranya yang ada dalam konstelasi organisasi pro-Timor yang sekarang menjadi besar dan beragam, meskipun tidak ikut serta dalam aksi mendukung penentuan nasib sendiri.

488. Pada waktu itu hak masyarakat Timor atas penentuan nasib sendiri di bidang kebudayaan diperkuat oleh inisiatif-inisiatif seperti pembukaan sekolah untuk anak-anak dari Timor di Darwin, yang disponsori oleh Jepang, dan usaha mengejutkan Profesor Geoffrey Hull dengan penerbitan buku pelajaran Tetum, *Mai Koalia Tetum*, justru di kala bahasa Tetum masih dilarang untuk penggunaannya di sekolah-sekolah dan sebagai bahasa resmi. Dibantu oleh Profesor Geoffrey Hull dan ahli bahasa Timor, Manuel Viegas, *Mary McKillop Institute* tersebut di atas memperbanyak penerbitan buku-buku untuk tingkat sekolah dasar dalam bahasa Tetum, yang membantu Uskup Belo dalam perlawanannya terhadap kebijakan resmi, yaitu ketika dia memilih untuk menggunakan bahasa Tetum untuk sekolah-sekolah Katolik di Timor-Leste.

489. Juga layak dicatat dalam periode ini ialah timbulnya pengaruh gambar-gambar video terhadap perhatian masyarakat, tumbuhnya organisasi-organisasi baru dan koordinasi antara organisasi-organisasi itu, yang sangat diuntungkan oleh datangnya "jaman internet". Dengan adanya pelayanan internet untuk umum pada tahun 1990-an, kurang lebih bersamaan dengan keputusan Indonesia untuk dalam batas tertentu mempermudah orang masuk ke Timor-Leste. Kebersamaan waktu tersebut bukan saja suatu kebetulan yang menggembirakan; adanya

¹ Pemerintah Inggris menahan tekanan publik dan membela penjualan senjata ke Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia memiliki hak untuk membela diri, peralatan tersebut tidak digunakan melawan rakyat Timor Timur dan bahwa latihan militer Inggris akan memperbaiki rasa hormat militer Indonesia pada hak asasi manusia dan demokrasi. Lihat Baroness Trumpington, House of Lords, 10 Juli 1992 (Krieger, hal. 302)

² Barbedo de Magalhães pertama kali mengunjungi Timor-Leste pada tahun 1975 dan sangat tertarik pada kebijakan pendidikan Fretilin. Dia adalah pengarang *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, 1992 dan publikasi-publikasi lain termasuk *Timor-Leste na encruzilhada da transição Indonésia*, Gradiva, 1999.

³ Pembuat film Timor-Leste Gil Scrine adalah orang pertama yang memanggil rapat. Di bawah Jefferson Lee dan Andrew McNaughtan, *Australian-East Timor Association* (AETA) di Sydney mengembangkan sebuah profil internasional dan, melalui kunjungan-kunjungan oleh McNaughtan, mendirikan hubungan-hubungan langsung dengan Perlawanan di Timor-Leste.

internet juga sangat bertepatan dengan kebutuhan para aktivis hak asasi manusia karena cepat, murah, aman, mudah digunakan, interaktif dan memiliki kapasitas serta jangkauan global yang sangat berarti. Informasi tentang Timor-Leste yang selama lima belas tahun sebelumnya, merupakan komoditas yang langka, kini tersedia luas melalui internet berkat keterampilan dan komitmen para anggota masyarakat sipil. Situs *apa kabar, sebuah milis elektronik gratis* milik John MacDougall yang menjadi perintis, meliput Indonesia dan Timor-Leste; dan rintisan ini segera diikuti oleh *reg.easttimor*, yang menjadi pusat dan saluran utama untuk komunikasi cepat mengenai isu Timor-Leste ke seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1994 dan dikoordinasi oleh ETAN/US, *reg.easttimor* memungkinkan publik dan organisasi masyarakat sipil di Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Serikat untuk melakukan konferensi interaktif, dan mengakses laporan-laporan dan bahan-bahan terjemahan tentang Timor-Leste, dari layanan-layanan kabel dan media Indonesia, Portugis dan lainnya, sebagai dokumen-dokumen resmi dari PBB, pemerintah-pemerintah dan sumber-sumber lainnya. Buku tentang Timor-Leste yang relatif sedikit tersedia, sekarang bertambah banyak dengan adanya website yang dapat diakses publik. *TimorNet* di Universitas Coimbra, Portugal, menyediakan jaringan informasi tentang sejarah, geografi dan kebudayaan Timor-Leste, dokumen-dokumen penting PBB, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, artikel, publikasi dan saran untuk bertindak dan mengatur aksi. Para aktivis menggunakan email untuk mengembang-biakkan informasi dan untuk mengkoordinasi dan mengatur kegiatan. Colin Renwick mendirikan sebuah pusat mini untuk membantu organisasi-organisasi non-pemerintah kecil dan rawan di Indonesia dan Timor-Leste, agar dapat memiliki akses internet yang murah, dapat diakses dan aman dan juga memberi pelatihan ke beberapa aktivis Timor-Leste terpilih,¹ sehingga meningkatkan efektifitas kaum klandestin. Dengan keterampilan ini, orang-orang Timor-Leste yang mendukung Xanana Gusmão di Jakarta dapat mengirim pesan-pesan email tertulis kepada rekan-rekan di luar negeri, termasuk kepada José Ramos-Horta.

490. Internet digunakan juga untuk tindakan langsung. Pada tahun 1997, sebuah penyedia jasa internet Irlandia melancarkan protes terhadap pemerintah Indonesia, setelah Indonesia mendaftarkan domain milik Timor-Leste sebagai persiapan kemerdekaan politis. Pada tahun yang sama, *Portuguese Hackers Against Indonesia* memasuki website milik militer Indonesia, dan menyebarkan 'propaganda' di website tersebut. Ini diikuti oleh penyusupan-penyusupan website di Departemen Luar Negeri Indonesia dan tempat-tempat lain, yang melancarkan serangan balasan terhadap website Portugis oleh para *hacker* Indonesia. Perang *cyber* mengenai Timor-Leste berlanjut sampai tahun 1999. Pada bulan Agustus 1998 empat puluh lima domain Indonesia di-*hack* dan diikuti sabotase oleh Indonesia terhadap *Connect Ireland*, pencipta domain untuk Timor. Semua ini berakhir dengan perubahan kebijakan mengenai Timor-Leste oleh Presiden Habibie. Meskipun demikian diketahui, Indonesia – tidak seperti Timor-Leste – yang rawan di bidang ini menginspirasi José Ramos-Horta untuk mengancam, pada bulan Agustus 1999, bahwa ia akan meluncurkan kampanye internet yang 'nekat dan ganas', jika Indonesia menolak menghormati hasil referendum yang akan diselenggarakan tanggal 30 Agustus.²⁴⁴

491. Keputusan Komite Nobel Norwegia untuk memberi penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional sedunia, 10 Desember 1996, merupakan dorongan moral, politik dan organisasi yang sangat besar bagi usaha masyarakat sipil untuk hak penentuan nasib sendiri. Hadiah tersebut diberikan secara terpisah oleh Komite Nobel dan sangat layak diterima dua orang tersebut, Uskup Belo dan José Ramos-Horta, tetapi nominasi terhadap mereka adalah hasil inisiatif masyarakat sipil, dan khususnya teman-teman lama Timor-Leste yang bekerja di balik layar di Amerika Serikat. Penghargaan yang prestisius tersebut mengkonfirmasi kebenaran moral usaha masyarakat sipil, dan lebih jauh memperlemah tuntutan yang diajukan pemerintah Indonesia dan para pembelanya, termasuk dalam hal sejarah konflik versi Indonesia. Penghargaan tersebut juga membantu secara politis, melalui pembahasan tentang perlunya dilakukan penentuan nasib sendiri untuk menyelesaikan konflik – tujuan utama pembelaan masyarakat sipil selama 20 tahun – dan penetapan masalah hak penentuan nasib sendiri sebagai

¹ Pastor Domingos Soares, alias Fr Maubere, adalah salah satu orang yang dilatih Colin Renwick.

isu utama.¹ Hadiah tersebut ibarat bonus bagi organisasi masyarakat sipil. Liputan media global yang terjadi karenanya, dan berlanjut mengiringi perjalanan José Ramos-Horta keliling dunia dalam peran barunya, menghasilkan minat dan dukungan baru dari publik bagi kampanye masyarakat sipil di banyak negara.

492. Akhir kekuasaan Soeharto datang secara mendadak. Dipicu oleh krisis moneter Asia Timur yang melanda hebat seperti tsunami pada bulan Juli 1997, dan mengekspos betapa rawan *Orde Baru* di balik mistifikasi tentang Orde Baru yang tidak bisa dihancurkan. Bagi Timor-Leste, jatuhnya Soeharto merupakan sebuah 'keuntungan moral' seperti disebut Bernard Williams.²⁴⁵ Sebagian orang dari kalangan masyarakat sipil mengatakan, bahwa perubahan harus dicapai sementara Soeharto masih berkuasa, karena hanya Soeharto yang memiliki kekuasaan untuk memerintah militer.² Yang lain mengatakan, bahwa kemerdekaan bergantung pada demokratisasi di Indonesia atau, paling tidak, pada perubahan kepemimpinan. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi:

Saya mendengar dari para mahasiswa Timor Timur di Jawa, bahwa Xanana sendiri mengatakan kemerdekaan Timor Timur akan tergantung pada proses demokratisasi Indonesia. Akan sulit untuk mencapai kemerdekaan tanpa demokrasi di Indonesia [yang berarti bahwa Soeharto harus jatuh].²⁴⁶

493. Pendapat yang kedua terbukti benar. Soeharto tetap keras pada pendiriannya, dan hingga detik terakhir ia menolak memberi otonomi terbatas sekalipun pada Timor-Leste. Tekanan masyarakat sipil meningkat. Soeharto menjadi sasaran demonstrasi masa di Vancouver, ketika ia menghadiri KTT *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada bulan November 1997³. Di dalam negeri mahasiswa berhasil merebut dukungan yang terus meningkat dari kelas menengah, untuk reformasi total dan mengatur demonstrasi-demonstrasi besar-besaran. Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kursi Presiden ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

6.2.5 Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998-99

494. Periode ini menandai babak akhir kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste, dan saat yang dramatis serta intens bagi semua yang terlibat, termasuk masyarakat sipil. Seperti kedatangannya 24 tahun sebelumnya, kepergian Indonesia penuh kekerasan dan kekacauan. Tapi kali ini tujuannya, meskipun tidak dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kebijakan internasional dan dihargai oleh masyarakat sipil. Indonesia membalik posisinya langkah demi langkah. Pada bulan Juni 1998, Presiden Habibie menawarkan otonomi terbatas di dalam Indonesia kepada Timor-Leste. Tujuh bulan kemudian, pada bulan Januari 1999, dia menawarkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di bawah supervisi PBB. Pemilihan suara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, dan menghasilkan pilihan kemerdekaan secara penuh.

¹ Rilis pers Komite Nobel Norwegia menyatakan: "Komite Nobel akan mendorong usaha untuk mendapatkan solusi diplomatik terhadap konflik Timor-Leste berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri". Komite yakin hal itu terjadi. Beberapa tahun kemudian Geir Lundestad, Sekretaris Komite, mengatakan mengenai pemberian hadiah Nobel: "Terlihat beberapa dampak positif yang disebabkan pemberian Hadiah Nobel 1996 kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta dalam perjuangan untuk membela hak atas menentukan nasib sendiri rakyat Timor-Leste". (Geir Lundestad, Sekretaris, Komite Nobel Norwegia, "Reflections on the Nobel Peace Prize", <http://nobelprize.org/peace/articles/undestad>, pada 10 Juni 2004.

² Umur Soeharto yang telah lanjut dan masalah kesehatannya merupakan faktor penting dalam pemberian Hadiah Nobel. Di Australia, organisasi-organisasi non-pemerintah bertemu dengan Abdurrahman Wahid, pemimpin Muslim progresif yang kemudian menjadi presiden Indonesia keempat, untuk membicarakan pendekatan terhadap Soeharto oleh David Lange, mantan perdana menteri Selandia Baru. Rencana tersebut di dahului oleh even-even.

³ Selama sepuluh hari sebelum APEC, 13 orang Timor Leste yang diasingkan dan beberapa orang Indonesia melakukan tur di Kanada mengimbau pihak berwenang untuk 'menghalangi Soeharto atau penjarakan dia' atas kejahatan-kejahatannya di Timor-Leste dan Indonesia.

Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR Indonesia mengakui hasil tersebut, dan mencabut dekrit tahun 1976 yang memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 November 1999, pasukan-pasukan terakhir TNI meninggalkan wilayah Timor-Leste.

495. Awalnya, masyarakat sipil meragukan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seseorang yang dianggap eksentrik, dan tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada isu Timor-Leste selama hubungannya yang panjang dan erat dengan Soeharto. Ternyata masyarakat sipil sangat diuntungkan dari kekuasaan Habibie yang singkat itu. Ia menerima apa yang selama itu dituntut oleh masyarakat sipil, yaitu tindakan penentuan nasib sendiri yang sejati di Timor-Leste. Secara substansial ia membuka ruang demokrasi, yang memberi kebebasan bagi masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste untuk mengatur dan mengkampanyekan penentuan nasib sendiri, suatu kesempatan yang sangat mereka manfaatkan.¹

496. Pembalikan kebijakan oleh Habibie secara dramatis juga mengubah dinamika sekitar masalah Timor di arena internasional. Pemerintah-pemerintah yang sebelumnya mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dan sangat mendukung Orde Baru, sekarang mengubah kebijakan mereka untuk mendukung penentuan nasib sendiri. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1975, pemerintah dan masyarakat sipil – dengan pengecualian Portugal, yang sudah sama-sama sepakat – mengakhiri perselisihan mereka, paling tidak dalam masalah-masalah kebijakan substansial, dan mulai bekerja sama untuk menyokong penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan tidak lagi saling menentang.

497. Digabung dengan akses dan laporan media tentang Timor-Leste seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perkembangan ini mendorong masyarakat sipil dengan semangat yang baru. Bahkan negara-negara yang sudah sejak lama melibatkan diri dalam menyaksikan perkembangan yang dramatis dalam hal kadar dan luasnya dukungan publik. Jean Pierre Catry memberi tahu Komisi, bahwa di Portugal saja tumbuh ratusan grup dari parlemen ke sekolah-sekolah, kotamadya, jemaah gereja, asosiasi profesional, serikat dagang ... tidak mungkin untuk menyebut semuanya²⁴⁷. Australia memiliki pengalaman yang sama². Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengakui fenomena ini: "selama saya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tidak ada isu kebijakan luar negeri yang mendapat perhatian publik di Australia lebih dari Timor-Leste ..." ²⁴⁸. Pemerintah Australia juga mengakui peran masyarakat sipil di dalam negerinya dalam merebut hak penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, dengan mengundang dua wakil masyarakat sipil untuk bergabung dalam delegasi resmi guna mengamati pemungutan suara bulan Agustus 1999 tersebut.³

498. Sebagian besar dari 2.300 orang pengamat pemungutan suara yang disetujui PBB berasal dari kalangan organisasi non-pemerintah. Mengenai peran mereka, Ian Martin mengatakan:

Banyak yang berasal dari grup-grup solidaritas dengan komitmen pada penentuan nasib sendiri atau kemerdekaan Timor-Leste Tapi mandat yang mereka terima saat akreditasi mengharuskan mereka untuk bersikap netral.²⁴⁹

499. Sebagian besar para pengamat, sekitar 1.700 orang, adalah orang Indonesia dan Timor-Leste. Dalam suatu penampilan organisasi internasional dan solidaritas yang mengesankan,

¹ Habibie melakukan sejumlah reformasi yang secara langsung menguntungkan masyarakat sipil. Dia mengakui kebebasan berkumpul dan pembentukan partai-partai politik, mengurangi pembatasan pers, membebaskan para tahanan politik dan mengatur penandatanganan atau pengesahan konvensi-konvensi hak asasi manusia dan buruh internasional penting.

² Luasnya kekhawatiran publik Australia terbukti dari banyaknya grup-grup masyarakat sipil dan individu yang memberi kesaksian pada penyelidikan tentang Timor-Leste Parlemen Australia tahun 1999.

³ Kedua pengamat tersebut adalah Pat Walsh dari ACFOA dan Anne Wigglesworth dari Caritas Australia.

mereka didukung oleh rekan-rekan dari seluruh dunia, sebagian besar dikoordinasi oleh *International Federation for East Timor* yang berbasis di AS/ETAN(IFET), *Asian Network for Free Elections* (ANFREL) yang berbasis di Thailand dan *Asia-Pacific Coalition for East Timor* (APCET) yang berbasis di Filipina. Mereka mewakili banyak warga di banyak negara, yang bagi mereka, sama seperti bagi rakyat Timor-Leste, pemungutan suara itu menjadi klimaks dari perjuangan hebat, dan mendemonstrasikan kembali pentingnya serta besarnya kekuatan rakyat dalam menghadapi masalah-masalah global.

6.3 Masyarakat sipil Indonesia

500. Masyarakat sipil Indonesia pada tahun 1990-an memasukkan masalah Timor-Leste ke dalam daftar masalah-masalah sosial, hak asasi manusia dan lingkungan yang sangat mendesak. Meskipun kecil dan terisolasi, bagian-bagian penting dari gerakan pro-Timor itu langsung menuju inti masalah, dan menyatakan pembelaan mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri. Orientasi politik ini terjadi berkat pengaruh orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan orang-orang Timor-Leste yang belajar di Jawa dan Bali. Pembelaan mereka di Indonesia era Soeharto membutuhkan taruhan keberanian yang luar biasa. Meskipun Konstitusi Indonesia mengharuskan memerangi kolonialisme dan menegakkan hak semua bangsa atas kemerdekaan²⁵⁰, namun dalam pandangan rezim tersebut, mendukung penentuan nasib sendiri di Timor-Leste (setelah tahun 1976) adalah tindak subversi terhadap asas utama persatuan nasional, yang harus menyokong kebijakan negara dan militer. Mereka yang mendukungnya atau berkolaborasi dengan para pembela Timor diganggu dan beresiko dicap sebagai pengkhianat. Terlebih-lebih di Timor-Leste, aktivitas-aktivitas tersebut lebih berbahaya. Namun dengan keberanian berbicara mereka, grup-grup masyarakat sipil Indonesia mematahkan tabu ketakutan dan kebisuan, dan dengan susah-payah mereka berhasil memobilisasi dukungan. Kegiatan ini memuncak dengan hadirnya ratusan warga Indonesia di samping warga Timor-Leste, ketika rakyat Timor-Leste melaksanakan hak penentuan nasib sendiri pada bulan Agustus 1999.

6.3.1 Tahun-tahun awal

501. Sampai tahun 1990-an Timor-Leste bukanlah isu penting di kalangan organisasi non-pemerintah di Indonesia, meskipun beberapa tokoh perseorangan dan organisasi sudah aktif sebelum tahun-tahun itu. Bagi sebagian orang keterlibatan ini merupakan bagian dari tugas-tugas profesional mereka yang, meski seringkali sensitif dan sulit, namun tanpa melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas politik. Ini termasuk George Aditjondro yang mengunjungi Timor-Leste pada bulan Mei 1974 sebagai koresponden *Tempo*, dan berbagi informasi dengan kalangan Gereja di luar negeri, setelah invasi¹; tokoh-tokoh perseorangan yang berasosiasi dengan Gereja Protestan, seperti Yopie Lasut, Gustaf Dupe, Asmara Nababan dan Ade Rostina Sitompul, yang mengurus para tahanan politik Timor-Leste yang ditahan di penjara-penjara Indonesia; para anggota lembaga Gereja Katolik LPPS, Fr Gerry Zegwaard MSC, Fr Hardoputranto SJ dan Ibu Immaculata Mardani yang menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Timor-Leste, dan merupakan sumber informasi rahasia tentang Timor-Leste bagi orang-orang di luar Indonesia.²

¹ George Aditjondro adalah anggota dari sebuah grup Katolik Indonesia muda yang pada tahun 1974 berusaha memformulasi kebijakan Timor-Leste yang demokratis dan non-militer untuk Dewan Uskup Indonesia. Dokumen mereka ditemukan sebagai Appendix 1 dalam 'East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out' diedit oleh Herb Feith, Emma Baulch dan Pat Walsh, ACFOA Mei 1994. Aditjondro juga dipercaya telah menulis laporan non-pemerintah pertama dari dalam Indonesia setelah invasi dalam bentuk sebuah surat kepada Fr Mark Raper, SJ yang diterima Asian Bureau Australia pada tanggal 21 April 1976. (arsip CAVR)

² LPPS didukung oleh dan melakukan kontak secara reguler dengan agensi-agensis Katolik di seluruh dunia melalui Asia Partnership for Human Development (APHD) yang berbasis di Hong Kong. Meskipun tidak secara langsung relevan dengan catatan ini, harus diakui kontribusi kemanusiaan tidak egois yang dilakukan oleh banyak orang Indonesia pada Timor-Leste selama penjajahan Indonesia. Untuk catatan pengalaman mereka selama pergolakan pada tahun 1999, Lihat Yohanes Sukandar, Sigit Wijayanto, Martinus Manggo (ed.), *Selamat Tinggal Timor Timur*, Insist Press, Yogyakarta 2000.

502. Sebagian orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga aktif mendukung Timor-Leste sebelum 1990, khususnya di kalangan mereka yang meninggalkan Indonesia untuk menghindari pembersihan PKI setelah Soeharto merebut kekuasaan pada tahun 1965.¹ Di Eropa mereka bergabung dengan grup-grup pendukung di Jerman, Prancis, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia dan Belanda (*Komite Indonesia*), tapi umumnya tetap tidak mau diketahui namanya karena sensitifnya isu dan kerawanan mereka sebagai orang politik yang diasingkan. Kusni Sulang aktif di Paris dan Hendrik Amahorseja di Swedia. Di Australia, Siauw Tiong Djin, Goei Hok Gie (Andrew Gunawan), dan di Belanda juga Ernst Utrecht. Pada tahun 1981 Jusfiq Hadjar dan Liem Soei Liong menjadi orang-orang Indonesia pertama yang secara terbuka menentang invasi dan mendukung kemerdekaan Timo- Leste, ketika mereka memberi kesaksian pada Pengadilan Masyarakat Permanen di Lisboa. Sebagai balasan, pemerintah Soeharto menyatakan mereka sebagai *persona non grata*, dan dicekal untuk kembali ke Indonesia. Orang-orang yang diasingkan lainnya tidak pernah secara terbuka menunjukkan dukungan mereka, dan kemudian diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia dengan selamat. Sebagian diaspora Indonesia yang mendukung Timor-Leste diwaspadai sebagai usaha untuk memperlihatkan sikap dan perhatian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang. Liem Soei Liong menyangkal pekerjaannya atau pekerjaan Carmel Budiardjo di "Tapol" didorong oleh agenda ganda seperti itu.²

503. Diaspora Indonesia di Eropa membantu aktivitas pro-Timor di Indonesia. Mereka menyediakan informasi alternatif tentang Timor-Leste, sebagai contoh, dengan mengirim laporan berkala "Tapol" dan melakukan kunjungan-kunjungan rahasia³. Para jurnalis Indonesia yang bekerja di Radio Belanda seperti Tossy Santoso dan Yoss Wibisono menyiarkan berita dan wawancara tentang Timor-Leste yang diterima di Indonesia. Tossy Santoso juga menulis beberapa buku tentang Timor-Leste dalam Bahasa Indonesia. Strategi produktif lainnya yang mereka lakukan adalah usaha menghubungkan para aktivis Timor Leste dengan para aktivis Indonesia dan rekan-rekan internasionalnya. Para aktivis seperti Max Lane di Australia dan António Barbedo de Magalhães di Portugal memiliki jaringan strategi yang sama. Inisiatif-inisiatif internasional ini memberi kontribusi dalam pembentukan dan pengarahannya organisasi-organisasi non-pemerintah Indonesia seperti Infight, Solidamor dan SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere). Orang-orang Indonesia di luar negeri menjadi lebih aktif tentang masalah Timor-Leste pada akhir 1980-an dan pada 1990-an. Dua orang Indonesia yang menetap di Belanda, Aeri Harapan dan Reza Muharram, bergabung dengan kapal protes Portugis *Lusitania Expresso* pada bulan Maret 1992. Sebagai hukuman paspor mereka berdua dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Yeni Rosa Damayanti juga dibatalkan paspornya setelah partisipasinya dalam sebuah demonstrasi anti-Soeharto pada tahun 1996. Kewarganegaraan mereka hanya dikembalikan setelah Soeharto jatuh.

504. Warga-warga Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bekerja sementara, izin belajar atau bepergian ke luar negeri sering dihadapkan pada isu Timor-Leste melalui media atau rekan-rekan mereka. Para pemimpin masyarakat sipil seperti Abdurrahman Wahid, Mulya Lubis, Buyung Nasution dan Abdul Hakim Garuda Nusantara terkadang menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk membahas isu tersebut, dan bertemu dengan tokoh-tokoh Timor-Leste. Mereka tetap diawasi dan karena tanggung jawabnya di Indonesia mereka tidak berani

¹ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunitas pertama di Asia dan pada tahun 1966 telah menjadi salah satu yang terbesar. Orde Baru muncul pada tahun 1966 setelah pengambilalihan militer, dicekalnya PKI dan dilikuidasinya hampir satu juta orang anggotanya dan mereka-mereka yang dituduh sebagai pendukungnya.

² Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Dalam sikap sensitif pada saat kesaksian publiknya pada CAVR, Yeni Rosa Damayanti menyertakan aktivis Inggris Carmel Budiardjo dalam daftarnya yang berisi orang-orang Indonesia yang aktif di luar negeri. Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret 2003, hal. 5. Carmel Budiardjo dipenjara di Indonesia setelah tahun 1965 dan, setelah dibebaskan dan kembali ke Inggris, mengabdikan hidupnya untuk membela hak asasi manusia di Indonesia.

³ Liem Soei Liong melakukan beberapa kunjungan rahasia selagi dia dicekal dan pada tiap kesempatan tersebut memberikan ceramah tentang Timor-Leste pada para aktivis Indonesia. Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Aktivis Indonesia Nugroho Katjasungkana mengkonfirmasi pengaruh dari para [diaspora] Indonesia pada pekerjaan solidaritas para aktivis Indonesia. Kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret, 2003.

mengambil resiko berbicara terbuka, karena akan mendapat kesulitan dari pihak yang berwenang, baik bagi mereka sendiri ataupun organisasi mereka.

6.3.2. Tahun 1990-an

505. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sipil di Indonesia seringkali membisu tentang Timor-Leste sampai tahun 1990-an. Masyarakat sipil hampir tidak ada di Indonesia di bawah rezim Soeharto. Sistem Orde Baru adalah otoriter, malahan hampir totaliter. Masyarakat sipil tidak memiliki tempat formal dalam struktur politik yang membela kaum korporat, dan bertindak dari atas ke bawah, yang melarang hak-hak sipil dan politik dengan alasan persatuan, pembangunan dan stabilitas nasional. Ketika organisasi-organisasi masyarakat sipil akhirnya muncul, mereka terlalu disibukkan oleh isu-isu tanah, tenaga kerja, lingkungan dan lainnya dan hanya memiliki sedikit kebebasan dan sumber-sumber seperti yang dimiliki organisasi-organisasi komunitas di negara-negara demokratis.

506. Selain dikucilkan, masyarakat sipil juga dibuat tidak tahu tentang realitas di Timor-Leste. Pemerintah Soeharto membatasi akses ke wilayah tersebut, termasuk untuk media massa Indonesia dan masyarakat sipil, mengontrol dengan ketat informasi tentang Timor-Leste, dan pemerintah hanya mengumumkan versi resmi, yaitu integrasi adalah positif dan telah mengikuti tindakan penentuan nasib sendiri. Dalam kesaksian terbukanya pada Komisi, Yeni Rosa Damayanti bertanya secara retorik: "Di mana rakyat Indonesia ketika rakyat Timor-Leste sedang menderita?" Dia menjawab: "Jawabannya, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini."²⁵¹

507. Faktor terbesar kedua adalah iklim ketakutan di Indonesia yang diciptakan oleh pengambilalihan oleh militer yang penuh kekerasan pada tahun 1965, dan yang diresmikan secara hukum serta operasional selama pemerintahan Soeharto. Dalam penilaian Liem Soei Liong,²⁵² Timor-Leste selalu merupakan isu yang sensitif, dan mungkin pada awal 1980-an merupakan isu yang lebih sensitif dibanding isu PKI/1965²⁵². [endnote] Yeni Rosa Damayanti mengilustrasikan maksud pernyataan ini dalam praktek, ketika dia memberitahu Komisi tentang interogasinya oleh seorang Mayor *Bakorstanas* pada tahun 1991 menyusul sebuah protes terhadap Perang Teluk, yang dikaitkan oleh para aktivis Indonesia dengan invasi Indonesia ke Timor-Leste. Dia memberi kesaksian:

*Sang Mayor meletakkan pistolnya di hadapan saya dan berkata: "Kamu boleh berbicara tentang apa saja, tapi kamu tidak boleh berbicara tentang Timor Timur. Ribuan tentara telah meninggal di Timor Timur dan saya tak akan membiarkan satu pun orang Indonesia untuk berbicara tentang Timor Timur. Ribuan orang telah meninggal dan kamu hanyalah satu orang lagi, dan nyawa satu orang Indonesia tidak ada artinya..."*²⁵³

508. Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian pada Komisi, bahwa pada tahun 1980-an orang-orang Indonesia yang tertarik pada pendidikan, kesehatan dan koperasi alternatif menjadi tertarik pada Timor-Leste ketika mereka mengetahui bahwa Fretilin juga mempunyai perhatian pada bidang-bidang tersebut juga pada tahun 1975²⁵⁴. Tapi permulaan dari dukungan politik yang bersinambung bagi Timor-Leste, dimulai pada awal 1990-an oleh organisasi-organisasi seperti Inflight (Saleh Abdullah), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (H.J.C. Princen¹) dan Hidup Baru (Yopie Lasut). Selain dari masukan internasional dari orang-orang Indonesia di luar negeri, kontak-kontak dengan mahasiswa Timor-Leste yang belajar di Jawa, setelah dibukanya provinsi

¹ Dilahirkan di Belanda, Haji Princen adalah seorang perintis terkemuka hak asasi manusia di Indonesia sejak waktu Kemerdekaan di mana dia berperang bersama pihak Indonesia. Dia melindungi banyak orang Timor Timur, termasuk mereka yang mencari suaka ke luar negeri. Rakyat Timor Timur mengadakan upacara di Taman Borja da Costa, Dili, untuk menandai kematiannya pada tahun 2002.

tersebut pada tahun 1989, memberi kontribusi pada kebangkitan ini. Yeni Rosa Damayanti memberitahu Komisi:

*Saya dikenalkan pada kasus Timor Timur ketika rekan-rekan mahasiswa Timor Timur yang sekolah di Jawa mulai berdatangan. Ada beberapa orang saat itu, Fernando de Araujo dan lainnya...Mahasiswa-mahasiswa Timor Timur datang ke tempat kami dan di sanalah saya pertama kali mendengar tentang apa yang sedang terjadi di Timor Timur. Bayangkan, setelah bertahun-tahun.*²⁵⁵

509. Ini juga menjelaskan mengapa gerakan dukungan lebih kuat di kalangan mahasiswa yang sebagian besar berada di Jawa dan Bali. Seperti di banyak negara lainnya, pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 juga merupakan sebuah titik balik bagi banyak pihak di Indonesia. Banyak yang merasa, bahwa sifat asli dari negara Indonesia sedang diungkapkan di Timor-Leste dan bahwa sistemnya sendiri sudah salah, bukan hanya aktivitasnya di wilayah tersebut. Para anggota Infight, LPHAM dan Hidup Baru bergabung dengan pemuda Timor-Leste untuk memprotes pembantaian tersebut di depan kantor PBB di Jalan Thamrin pada tanggal 19 November 1991, yang menyebabkan mereka ditangkap dan diinterogasi. Pada tanggal 23 November, menyusul sebuah inisiatif oleh Asosiasi Mahasiswa Yogyakarta, 12 Dewan Mahasiswa menandatangani sebuah petisi di Bandung untuk menuntut penarikan mundur pasukan-pasukan Indonesia dari Timor-Leste, dan "hak yang penuh dan bebas untuk penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur."²⁵⁶

510. Pokastim, Forum Komunikasi Timor Timur, melakukan koordinasi yang longgar. Bekerja untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Timor-Leste, Pokastim menjadi organisasi yang pertama dalam mengadakan pertemuan publik pertama di Timor-Leste tentang isu penentuan nasib sendiri, yang diadakan di sebuah universitas pada akhir 1997. Grup-grup solidaritas Indonesia Fortilos (*Solidarity for the Timor Lorosa'e*) dan Solidamor (Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur, *Indonesian Solidarity for Peace in East Timor*) tumbuh dari Forum ini.²⁵⁷ Kedua grup tersebut secara eksplisit mendukung penentuan nasib sendiri. Solidamor memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi di Indonesia,¹ memonitor pemungutan suara Agustus 1999 dan pada bulan tersebut juga menjadikan kantor perwakilannya di Jakarta untuk perlawanan Timor-Leste (CNRT). Pada bulan Mei 2000, sekitar 50 orang Timor-Leste pro-integrasi menyerang kantor Solidamor, mencuri berkas-berkas dan uang, dan mencederai beberapa aktivis, termasuk Bonar Tigor (Coki) Naipospos, ketua Solidamor. Yang berwenang tidak berbuat banyak untuk menanggapi.

511. Grup-grup pro-Timor bertujuan untuk memberi informasi dan memobilisasi para aktivis muda dengan menerbitkan informasi alternatif tentang Timor Timur. Contoh-contoh awal termasuk wawancara Robert Domm dengan Xanana Gusmão dan *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide* (Timor Timur: Pendudukan Indonesia dan Genosida) oleh Profesor Barbedo de Magalhães. Pijar menerbitkan laporan Pelapor Khusus PBB, Bacre Waky Ndiaye, pada tahun 1995, wawancara-wawancara Michele Turner dengan para pengungsi Timor-Leste yang disebut *Telling*, dan permohonan pembelaan dari pemimpin klandestin Renetil, Fernando de Araujo. Di Salatiga, Geni (Gemi Nastiti Foundation) menerbitkan artikel-artikel kritis mengenai perkembangan Timor-Leste dan demonstrasi-demonstrasi anti-Uskup Belo di Jawa. Di Semarang, para mahasiswa Universitas Diponegoro menerbitkan permohonan pembelaan Xanana Gusmão dan kritik George Aditjondro pada penjajahan Indonesia atas Timor-Leste.

512. Para aktivis Timor-Leste dan Indonesia juga terlibat dalam tindakan langsung gabungan, khususnya melalui SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere),

¹ Pada tahun 1986 Solidamor menerjemahkan dan menerbitkan ' *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*' karya José Ramos-Horta. Hubungan publik Solidamor untuk Timor yang kreatif juga termasuk penerbitan [buku saku] *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidamor, Jakarta, September 1998.

bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). Para anggota PRD, yang juga terdiri dari para mahasiswa, pekerja, petani dan artis, selalu menyertakan tuntutan partai atas referendum di Timor-Leste selain advokasi mereka untuk upah minimal, pemilu yang bersih dan presiden baru. SPRIM mengadakan rapat-rapat umum dan, pada tahun 1995, bergabung dengan beberapa orang Timor-Leste, untuk menduduki Kedutaan Belanda dan Rusia di Jakarta.

513. Para aktivis Indonesia juga berhubungan dengan organisasi-organisasi yang sehaluan di wilayah Asia-Pasifik. Pemimpin Pijar Rachlan Nashidik dan Tri Agus Susanto Siswowiharjo menghadiri konferensi *Asia-Pacific Coalition for East Timor* (APCET) pertama yang diadakan di Manila pada tahun 1994. Orang-orang Indonesia juga hadir di APCET II di Kuala Lumpur pada tahun 1995 dan APCET III di Bangkok pada tahun 1998. Hubungan dengan Australia juga dipertahankan melalui jaringan beragam, termasuk *Action in Solidarity with Indonesia* dan *East Timor* (ASIET) dan *Indonesia Australia Program for Cooperation with Indonesia* (IAPC).¹ Majalah triwulan Australia, *Inside Indonesia*, yang dibentuk pada tahun 1983, adalah sebuah media pertukaran informasi yang dihormati dan menjadi sumber informasi alternatif satu lagi tentang Timor-Leste untuk para pembaca Indonesia.

514. Organisasi-organisasi non-pemerintah lain menyediakan bantuan hukum dan perawatan penantunan bagi para tahanan politik Timor-Leste di Timor-Leste dan Indonesia di dalam penjara, dan kegiatan untuk mempropagandakan hak penentuan nasib sendiri. Ketika sejumlah besar orang Timor ditahan, setelah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991, para pengacara Indonesia dan lainnya pergi ke Timor Timur untuk membantu mereka dalam pembelaan hukum. Ibu Ade Rostina Sitompul memberi kesaksian pada Komisi tentang resiko pribadi yang mereka hadapi untuk membantu para tahanan Timor di Dili saat itu:

*Itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena aparat keamanan sangat represif, dan kita selalu dibuntuti ke manapun kita pergi...Para pengacara, seperti Pak Luhut [Pangaribuan], diteror di Hotel Turismo...Kita menerima panggilan-panggilan telepon yang menyuruh kita pulang atau akan dibunuh dan saya takut sekali waktu itu.*²⁵⁸

515. Elsam dan lembaga-lembaga keadilan sosial dari Gereja Protestan (PGI) dan Katolik (KWI) mendirikan *Joint Committee for the Defence of the East Timorese* (JCDET – Komite Gabungan untuk Membela Timor Timur). Fungsinya adalah menyediakan bantuan hukum, membantu keluarga para tahanan di Timor-Leste dan mencari dana bagi para mahasiswa Timor-Leste yang, karena aktivitas politik mereka telah menyebabkan kehilangan beasiswa dari pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mewakili José António Neves pada pengadilaannya tahun 1994-1995 dan mengatakan, bahwa pengadilan tersebut tidak sah karena Timor-Leste belum menjalankan haknya atas penentuan nasib sendiri.

516. Pada tahun 1994 Ibu Ade Rostina Sitompul terpaksa meninggalkan Indonesia selama enam bulan agar tidak tertangkap.

517. Pengalaman Dr George Aditjondro menggambarkan lebih jauh tentang akibat dari penentangan kebijakan Indonesia atas Timor Timur. Pada tahun 1994, setelah sebuah surat kabar asal Australia menerbitkan laporan-laporannya mengenai Timor-Leste, Aditjondro dicap sebagai “pengkhianat” oleh tokoh-tokoh pemerintah dan rumahnya di Salatiga dilempari

¹ IAPC didirikan oleh Australian Council for Overseas Aid (ACFOA, sekarang ACFID) untuk menumbuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara Indonesia dan Australia, dan sebagian untuk menutup kelemahan persepsi di Indonesia yang menganggap bahwa NGO-NGO Australia terlalu fokus ke Timor-Leste. Kontribusinya pada International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan organisasi Indonesia lainnya memungkinkannya untuk mengangkat Timor-Leste dalam lingkungan yang lebih positif. Pada tahun 1992, Sekretarisnya, Pat Walsh, diusir dari Indonesia dan dicekal selama beberapa tahun setelah disebut dalam pengadilan pembantaian Dili.

dengan batu. Ia terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1995 untuk periode yang panjang.¹

518. Para pendukung Timor-Leste dari Indonesia tidak hanya harus menghadapi pihak militer dan pemerintah yang tidak bersahabat. Banyak pihak dalam masyarakat sipil arus utama, termasuk orang-orang Kristen, Muslim dan profesional kelas menengah, juga tidak setuju dengan mereka dan mendukung pendirian resmi tentang Timor Timur. Apapun alasan mereka, banyak orang Indonesia dari kalangan ini mempunyai kekhawatiran yang sama, bahwa Indonesia akan pecah seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, jika Timor Timur diperbolehkan memilih keluar dari Republik Indonesia. Pandangan ini juga terdapat dalam beberapa gerakan demokrasi yang, sementara setuju dengan imbauan aktivis untuk reformasi luas, mendesak pendukung Timor-Leste dari Indonesia dan rekan-rekannya di Timor Timur untuk meninggalkan cita-cita kemerdekaan, dan bekerja sama dengan mereka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demokrasi untuk semua. Hal-hal tersebut merupakan alasan yang kuat. Namun para aktivis Timor Timur tidak pernah sekalipun mengancam keamanan Indonesia, integritas nasional atau mencoba ikut campur dalam urusan internal Indonesia. Mereka tetap menaruh perhatian pada perjuangan mereka sendiri.

519. Sejak pertengahan 1990-an beberapa tokoh pro-demokrasi dan organisasi-organisasi, bergabung dengan generasi yang lebih muda dalam mendukung Timor Timur. *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID -- Forum Organisasi Non-Pemerintah Internasional untuk Pembangunan Indonesia) - sebuah koalisi dari lebih 100 organisasi non-pemerintah Indonesia dan internasional - mengomentari tentang "munculnya makin banyak suara dalam gerakan demokratisasi di Indonesia untuk penyelesaian damai dari konflik Timor Timur."²⁵⁹ Mereka yang berbicara termasuk editor *Tempo* Gunawan Mohammad, ahli pendidikan Katolik Pastor Y.B. Mangunwijaya, pemimpin serikat buruh, Mochtar Pakpahan, dan pembangkang Islam terkemuka, Sri Bintang Pamungkas yang masing-masing mendukung penentuan nasib sendiri.

520. Beberapa tokoh masyarakat juga menentang kebijakan pemerintah, termasuk pemimpin dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Pada tahun 1996, ketua Muhammadiyah, Amien Rais, menyatakan secara terbuka, bahwa Timor Timur sebaiknya dibiarkan berpisah dari Indonesia, jika memang itu kehendak rakyatnya. Ia memberitahu pers Australia, bahwa ia percaya pemerintah Indonesia telah berusaha yang terbaik; "tapi jika rakyat Timor Timur tetap menginginkan referendum dan menginginkan negara merdeka, saya pikir lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika hasil referendum memang benar, berarti kita tidak boleh bertahan pada posisi kita. Biarkan mereka bebas"²⁶⁰. Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, pemimpin Nadhlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, membuat banyak pernyataan terbuka, dan lebih terus terang, tentang perlunya menyelesaikan masalah Timor Timur. Dengan dukungan Gus Dur, INFID terus-menerus selalu membuat pernyataan tentang Timor Timur dalam resolusi-resolusi setiap konferensi-konferensi yang diselenggarakannya. Dengan alasan bahwa hak asasi manusia dan demokratisasi sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, INFID menentang 'pendekatan keamanan' secara militer dan mengimbau komunitas internasional untuk menghentikan segala bentuk bantuan militer, sebelum TNI berada di bawah kontrol kekuasaan sipil. INFID juga mengimbau komunitas internasional supaya "mendukung dilakukan pengadilan internasional untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang dilakukan anggota militer Indonesia di Timor Timur"²⁶¹, setelah kekerasan pasca-pemungutan suara tahun 1999.

521. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi tentang euforia yang melanda kalangan masyarakat sipil Indonesia, menyusul jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998. Dalam beberapa bulan berikutnya, para aktivis Indonesia mengunjungi Timor Timur secara bebas dan

¹ Alasan utama Aditjondro pergi adalah untuk menghindari pengadilan politis karena artikel-artikel yang ia tulis tentang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Soeharto, tetapi pandangan-pandangannya tentang Timor-Leste juga mempersulit hubungannya dengan rezim Soeharto (Herb Feith, Emma Baulch, and Pat Walsh (ed.), *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out*).

meningkatkan kampanye publiknya. “Kami tidak lagi berbicara tentang Timor Timur dalam ruang-ruang tertutup.”²⁶² Walaupun demikian, sebagian besar warisan Orde Baru tetap hidup, dan Damayanti dan Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian bahwa organisasi-organisasi non-pemerintah Indonesia, berdasarkan pengalaman penindasan di tangan aparat keamanan selama bertahun-tahun, sangat terkejut ketika PBB menyerahkan soal keamanan kepada militer dan polisi Indonesia pada tahun 1999. Pada bulan April 1999, sebagai contoh, kelompok-kelompok pendukung Indonesia terpaksa menyembunyikan teman-teman Timor Timur di rumah-rumah aman, ketika Kopassus membawa 150 orang milisi pro-integrasi ke Jakarta untuk mencari orang-orang yang berkampanye untuk penentuan nasib sendiri.²⁶³

522. Meskipun mereka tidak percaya pada TNI, dan karena itu jugalah maka sekitar 600 anggota masyarakat sipil Indonesia mengunjungi Timor Timur pada bulan Agustus 1999, untuk mengamati jalannya pemungutan suara. Dikoordinasi oleh Kiper¹ (*Komite Independen Pemantau Suara, Independent Committee for Direct Ballot Monitoring*), mereka membentuk grup pengamat eksternal terbesar, dan menolak klaim Indonesia yang mengatakan bahwa PBB telah memanipulasi jumlah suara. Dengan kehadirannya, mereka menawarkan perlindungan bagi para pemilih Timor Timur, dan membantu memfasilitasi tindakan penentuan nasib sendiri bersejarah tersebut. Sebagai orang Indonesia, mereka telah menyumbangkan segala kemungkinan untuk melawan. Presiden Habibie bukanlah orang pertama di Indonesia yang berbicara tentang referendum bagi Timor Timur, dan mereka itu pun tidak mendengarnya pertama kali dari Perdana Menteri Australia John Howard. Masyarakat sipil Indonesia telah membela ide tersebut jauh-jauh hari sebelum 1999.

6.4 Kesimpulan

523. Ian Martin, pemimpin UNAMET yang bertugas menjamin rakyat Timor Timur menjalankan haknya untuk penentuan nasib sendiri, menulis bahwa:

Peran hebat yang dilakukan organisasi non-pemerintah, dan beberapa tokoh individu, yang tetap menaruh kekhawatiran atas nasib Timor Timur, ketika dunia diplomatik sangat tidak memperhatikan, adalah kisah yang memiliki pelajaran-pelajaran penting...²⁶⁴

524. Pandangan ini disetujui secara luas. Sebagian besar pekerjaan orang-orang dalam gerakan solidaritas, dilakukan dengan resiko menghadapi sikap tidak bersahabat pemerintah dan para pemegang kekuasaan lainnya. Begitupun di negara-negara kaya, sebagian besar organisasi solidaritas dan individu berjuang untuk memperoleh dana dan sumber-daya, justru ketika banyak orang menganggap Timor Timur hanya isu marginal. Sebagian besar usaha tersebut dilakukan oleh para individu dengan mengorbankan waktu dan kehidupan pribadi mereka, demi perjuangan Timor Timur. Itu adalah sebuah proses perjuangan, tapi juga proses berbagi dan belajar, untuk mencapai rakyat Timor yang ada di dalam negeri dan diaspora, serta proses pembangunan kemitraan dan persahabatan antar-kelompok di negeri-negeri lain dan di dalam negeri.

525. Pada 23 Mei 2002, tiga hari setelah perayaan kemerdekaan Timor-Leste, sekumpulan orang dipanggil rapat di Dili untuk menghormati “solidaritas internasional”. Tiga orang pemimpin Timor-Leste yang baru disumpah, Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan Menteri Senior Urusan dan Kerja Sama Luar Negeri, José Ramos-Horta, menggunakan kesempatan tersebut untuk memberi pujian pada semua individu dan grup yang mendukung perjuangan Timor-Leste. Beberapa hari sebelumnya, di Taman Rakyat Internasional di tepi laut Lecidere, Sekjen PBB Kofi Annan, memberi tahu sekelompok orang yang dikumpulkan oleh program United Nations Volunteer: “tanpa kerja para anggota UNV, Timor Timur tidak akan

¹ Kiper diketuai oleh Bonar Tigor Naipospos. Para anggota dewan termasuk Dr Lukman Soetrisno, Abdurrahman Wahid, Dr Arief Budiman, Dr Saporinah Sadli dan Dr George Aditjondro.

pulih dari kehancuran, tanpa tindakan-tindakan solidaritas internasional, Timor Timur tidak akan dapat mencapai kemerdekaan". Sebuah piagam di tempat tersebut mencantumkan kata-kata berikut dari Dr José Ramos-Horta, penerima Nobel Perdamaian: "Kami tidak akan pernah melupakan anda teman-teman abadi kami"²⁶⁵.

526. Komisi yakin bahwa pelajaran-pelajaran berikut dapat dipetik dari pengalaman ini:

- Kontribusi masyarakat sipil untuk penyelesaian masalah Timor-Leste hanya mungkin, karena adanya masyarakat sipil dan diperbolehkannya mereka bergerak bebas sebagai sektor independen di berbagai belahan dunia; atau karena, seperti di Indonesia dan Timor-Leste sendiri, masyarakat sipil mewajibkan diri mereka sendiri untuk melawan penindasan. Pengalaman Timor-Leste adalah, bahwa masyarakat sipil yang kuat sangat penting, agar masyarakat individual dan komunitas internasional dapat berjalan dengan baik.
- Selama dua puluh lima tahun perjuangan, kemitraan yang kuat ditempa antara para pemimpin Timor-Leste sekarang di segala aspek kehidupan, dengan masyarakat sipil internasional yang jarang ditemukan dalam sejarah pembangunan bangsa. Kemitraan ini, yang sekarang memasuki tahap baru, sebaiknya dijunjung tinggi oleh kedua pihak, karena merupakan aset jangka panjang yang penting bagi Timor-Leste.
- Dari pengalaman Timor-Leste masyarakat sipil memetik pelajaran bahwa, selain harus strategis, mereka sangat efektif ketika (a) bertahan pada prinsip (b) tidak terlibat terlalu dalam dengan politik (c) tidak menggunakan kekerasan (d) terbuka pada kontribusi semua orang dan (e) independen tapi siap bekerja sama dengan kalangan pemerintah dan bisnis bila memungkinkan.

7. Temuan-temuan

7.1 Komunitas Internasional

527. Komisi menemukan bahwa:

1. Pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa Timor-Leste adalah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, merupakan hal yang fundamental bagi -nasib Timor-Leste sebagai bangsa yang kecil dan rawan. Hal ini memberi dasar hukum internasional bagi masalah tersebut, yang menjadi aset utama bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka menuju kemerdekaan.
2. Rasa hormat negara-negara anggota terhadap sistem hukum internasional dan peran PBB, merupakan suatu hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan penegakan perdamaian dan keadilan, terutama bagi golongan minoritas. Bangsa Timor-Leste tahu, dari pengalamannya, bahwa kegagalan negara-negara anggota untuk menghormati prinsip-prinsip internasional memiliki konsekuensi yang amat pahit, tetapi juga bahwa PBB yang berfungsi dengan baik akan dapat menguntungkan semua.
3. Sebagian besar anggota PBB gagal untuk mendukung Timor-Leste dalam Sidang Umum dari tahun 1976 sampai 1982, baik dengan memberi suara menentang resolusi-resolusi untuk Timor-Leste, maupun dengan tidak memberi suara sama sekali. Sampai ketika diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB di tahun 1982, masalah Timor-Leste hanya dapat dipertahankan di PBB oleh sepertiga dari komunitas dunia. Sebagian besar negara-negara ini adalah negara-negara Dunia Ketiga atau sosialis. Hanya empat negara Barat yang mendukung Timor-Leste di PBB sepanjang periode ini, yakni: Siprus, Yunani, Islandia, dan Portugal.

4. Sebagian besar negara-negara Barat gagal untuk menyeimbangkan dukungan, bagi prinsip penentuan nasib sendiri dan kepentingan-kepentingan strategis dan ekonomi terkait Indonesia. Pada tahun 1975 mereka jelas lebih mementingkan kepentingan mereka dengan Indonesia, dan hanya di permukaan menghormati penentuan nasib sendiri.
5. Masyarakat sipil memainkan peran penting dengan menegakkan prinsip-prinsip internasional di banyak negara, termasuk Portugal dan Indonesia. Masyarakat sipil mendorong hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, memberikan dukungan moral, politik dan keuangan bagi perjuangan Timor, dan menentang pengabaian atau sikap permusuhan pemerintah-pemerintah di dunia terhadap Timor-Leste. Penghormatan kepada hak-hak sipil dan politik serta berfungsinya suatu masyarakat sipil yang kuat, sangat penting bagi fungsi yang baik komunitas-komunitas individu dan sistem internasional.
6. Timor-Leste memperoleh keuntungan dari kerja pejabat-pejabat dan badan-badan penting PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Khusus atau Pribadi yang mereka tunjuk, staf dalam Sekretariat yang bertanggung jawab atas isu tersebut, Komite Khusus Dekolonisasi, Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia dan Sub-Komite Perlindungan Golongan Minoritas.
7. Dewan Keamanan mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri di tahun 1975 dan 1976, namun gagal untuk menegakkan hak ini secara efektif hingga tahun 1999. Dewan Keamanan tidak melakukan intervensi untuk menghentikan invasi Indonesia, walaupun sekurangnya dua dari anggotanya mengetahui maksud Indonesia; Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dan perlunya menghindari pertumpahan darah selanjutnya, tetapi tidak memberi bantuan kemanusiaan darurat; Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi kepada Indonesia atas kegagalan pemenuhan keinginan-keinginannya; Dewan Keamanan tidak menindak-lanjuti Resolusi 389 dan menanggukkan masalah ini hingga tahun 1999. Kegagalan ini merupakan tanggung jawab Anggota-Anggota Tetap Dewan Keamanan yang semuanya, kecuali Cina, bersikap menyepelkan masalah Timor, dan memilih untuk melindungi Indonesia dari reaksi internasional atas kerugian Timor.
8. Amerika Serikat mengakui, bahwa bangsa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri tetapi tidak mendukung satu pun resolusi-resolusi Sidang Umum mengenai isu tersebut antara tahun 1975 dan 1982, atau memberi bantuan apapun untuk perjuangan Timor untuk penentuan nasib sendiri hingga tahun 1998. Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan dan negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mencegah campur tangan militer Indonesia, tetapi menolak untuk melakukan hal itu. AS menyetujui invasi itu dan membiarkan Indonesia menggunakan peralatan-peralatan militernya, walaupun menyadari bahwa hal ini melanggar hukum AS sendiri, dan akan digunakan untuk menekan hak atas penentuan nasib sendiri. AS terus memberi dukungan militer, ekonomi dan politik kepada Indonesia, walaupun resolusi-resolusi Dewan Keamanan meminta Indonesia untuk mundur, dan memperkenankan pelaksanaan penentuan nasib sendiri secara bebas.
9. Perancis dan Inggris mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tetapi, walaupun mereka Anggota Tetap Dewan Keamanan, memilih untuk tinggal diam mengenai isu tersebut. Kedua negara itu bersikap abstain dalam mendukung semua resolusi-resolusi Sidang Umum antara tahun 1975 dan 1982, serta gagal dalam mengkampanyekan hak tersebut, atau dalam memberi bantuan kepada perjuangan rakyat Timor hingga tahun 1998. Kedua negara itu justru meningkatkan bantuan, perdagangan serta kerja sama militer mereka dengan Indonesia selama pendudukan. Beberapa peralatan militer Perancis dan Inggris digunakan oleh pasukan-pasukan Indonesia di Timor-Leste.

10. Cina dan Uni Soviet mendukung resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Umum atas isu tersebut antara tahun 1975 dan 1982 (dengan Cina sebagai pengecualian di tahun 1979). Indonesia dengan gegabah menyatakan, bahwa kedua negara itu bersekutu dengan Fretilin dan mempunyai kepentingan strategis di Timor-Leste, dan memanfaatkannya untuk membenarkan campur tangan militer. Kenyataannya, kedua negara itu memberi prioritas besar kepada Indonesia, dan hanya menaruh sedikit perhatian pada nasib Timor, kecuali dukungan awal oleh Cina.
11. Jepang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengakui pengambilalihan oleh Indonesia, juga tidak memberi bantuan militer kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang mendukung hanya satu resolusi Dewan Keamanan, dan menentang semua resolusi Sidang Umum antara tahun 1975 dan 1982. Jepang adalah investor dan donor bantuan terbesar bagi Indonesia, serta memiliki kapasitas lebih banyak dari negara-negara Asia lainnya untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan di Jakarta, tetapi Jepang tidak menggunakan pengaruh ini atas nama Timor-Leste.
12. Vatikan mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan, konsisten dengan kebijakan ini, Vatikan tidak menggabungkan Gereja Katolik setempat ke dalam Gereja Indonesia, walaupun ada tekanan dari Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Paus Yohanes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan. Para pemimpin Gereja di Timor-Leste secara berkala meminta Vatikan agar mendukung permintaan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Tetapi Vatikan, yang berkepentingan untuk melindungi Gereja Katolik di Indonesia yang mayoritas Muslim, tetap bungkam di depan umum mengenai masalah tersebut, dan mencegah pihak-pihak lain di Gereja untuk membicarakan isu tersebut.

7.2 Pemegang kepentingan utama

528. Komisi menemukan bahwa:

13. Diplomasi pihak perlawanan Timor Timur merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai penentuan nasib sendiri. Perlawanan mempertahankan komitmennya dalam menghadapi tantangan-tantangan luar biasa, termasuk perpecahan yang cukup berarti, keterbatasan sumber daya, isolasi dan besarnya kendala yang dihadapi di dalam dan di luar Timor-Leste. Diplomasi pihak perlawanan pada akhirnya berhasil, karena berfokus pada prinsip-prinsip yang disetujui secara internasional, menghindari penggunaan ideologi dan kekerasan, terbuka bagi kontribusi semua orang Timor, dan menggunakan secara maksimal jaringan internasional, media massa dan jaringan-jaringan masyarakat sipil. Lebih cenderung sebagai isu hak-hak asasi manusia dan moral ketimbang isu ideologi, masalah Timor-Leste memperoleh legitimasi dan dukungan internasional dan mulai tidak menguntungkan Indonesia, yang menyandarkan penyelesaian masalah pada kekuatan, yang tidak memiliki dasar pada hukum internasional atau moralitas.
14. Republik Indonesia di bawah Presiden Soeharto melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini terletak terutama pada Presiden Soeharto, tetapi ditanggung bersama-sama oleh pasukan-pasukan bersenjata Indonesia, lembaga-lembaga intelijen dan Centre for Strategic and International Studies yang secara prinsipil bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya.
15. Presiden Soeharto dan penasihat-penasihatnya memutuskan untuk menggabungkan Timor Portugis pada tahun 1974, dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Cara-cara itu meliputi jalan propaganda, intimidasi, subversi, campur tangan urusan dalam negeri Timor Portugis, penggunaan kekuatan dan pendudukan militer.

16. Majelis Rakyat Timor Timur yang bersidang di Dili pada tanggal 31 Mei 1976 tidak memenuhi syarat-syarat internasional untuk sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang murni. Sidang ini tidak representatif dan tidak pula merupakan suatu proses yang terbuka dan demokratis. Timor ketika itu tengah berada dalam cengkeraman pendudukan militer dan konflik bersenjata, dan masih belum sampai pada taraf pemerintahan sendiri, dengan lembaga-lembaga politik yang bebas yang akan memungkinkan rakyatnya menentukan pilihan yang sesungguhnya. Proses itu hanya memberi satu pilihan, dan karenanya ditolak oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
17. Militer Indonesia secara paksa menekan perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia berusaha menetralkan para pendukung dari masyarakat sipil Timor, Indonesia serta internasional terhadap penentuan nasib sendiri.
18. Bangsa Indonesia tidak memikul tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran ini. Masyarakat sipil Indonesia menunjukkan keberanian yang luar biasa, dengan secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.
19. Menyusul perubahan kebijakan Indonesia oleh Presiden Habibie, sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya diadakan di Timor Timur pada tahun 1999, walaupun militer Indonesia berusaha untuk menggagalkan aksi tersebut dengan menggunakan kekerasan.
20. Republik Portugal di bawah perintah rezim Salazar-Caetano melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan tidak mengakui status wilayah itu sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan dengan tidak mempersiapkan rakyat Timor untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan persyaratan-persyaratan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegagalan-kegagalan ini merugikan hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan turut menyebarkan pendirian bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak akan mungkin bertahan secara ekonomi ataupun politik, dan Timor-Leste hanya dapat hidup melalui penggabungan dengan Indonesia.
21. Keputusan yang diambil Portugal pada tahun 1974 untuk mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah nasib Timor. Meskipun demikian, Portugal gagal menjalankan tanggung jawabnya selama masa penting ini, dan meninggalkan Timor-Leste dalam keadaan relatif tidak berdaya, baik di lapangan maupun secara internasional dalam menghadapi rencana-rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut.
22. Sebagai kuasa pemerintahan, Portugal setia kepada prinsip penentuan nasib sendiri sepanjang pendudukan Indonesia, serta memberi bantuan keuangan dan politik kepada bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, diplomasi Portugis tidak menandingi diplomasi Indonesia, dan tidak mengkampanyekan penentuan nasib sendiri dengan cukup kuat atau secara konsisten, hampir di sepanjang masa pendudukan Indonesia.
23. Masyarakat sipil Portugis secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, terutama melalui pembelaan di dalam dan luar negeri, dan terus melakukan penyebaran informasi.

24. Australia ada pada posisi yang sangat baik untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan mengenai isu tersebut; karena baik bangsa Timor-Leste, Presiden Soeharto, maupun komunitas internasional memandang penting pandangan-pandangan Australia tentang masalah ini. Australia memberi peringatan menentang penggunaan kekuatan pada tahun 1975, namun juga memberi kesan kepada Indonesia bahwa Australia tidak akan menentang rencana penggabungan Indonesia. Australia tidak menggunakan pengaruh internasionalnya untuk menghalangi invasi, dan menghindarkan Timor-Leste dari akibat-akibat kemanusiaannya yang dapat diduga akan terjadi. Australia mengakui hak atas penentuan nasib sendiri, tetapi pada praktiknya melemahkannya dengan menerima rencana-rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut, menentang kemerdekaan Timor-Leste dan menentang Fretilin, serta memberi pengakuan *de jure* kepada pengambilalihan oleh Indonesia. Australia hanya mendukung satu resolusi Sidang Umum atas masalah tersebut antara tahun 1975 dan 1982, memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia, dan bekerja keras untuk mendapat dukungan publik Australia dan komunitas internasional untuk keuntungan posisi Indonesia.
25. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota-anggotanya dengan tegas mendukung tindakan penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan pada tahun 1999.

Lampiran: Sikap memilih atas resolusi-resolusi mengenai Timor-Leste di Sidang Umum PBB

Table 1 - Tabel A: Resolusi-resolusi Majelis Umum; bagaimana mereka memberikan suara antara 1975-1982

Negara	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Afghanistan	A	A	A	Y	Y	Y	Y	Y
Albania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Algeria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Angola	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Antigua dan Barbuda	-	-	-	-	-	-	NP	T
Argentina	A	A	A	A	A	T	T	T
Australia	Y	A	A	T	T	T	T	T
Austria	A	A	A	A	A	A	A	A
Bahama	A	A	A	A	A	A	A	A
Bahrain	Y	A	A	A	A	A	T	T
Bangladesh	Y	T	T	T	T	T	T	T
Barbados	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Belgia	A	A	A	A	A	A	A	A
Belize	-	-	-	-	-	-	Y	Y
Benin	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bhutan	A	A	A	A	A	A	A	A
Bolivia	Y	A	A	A	A	T	T	A
Botswana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Brazilia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Bulgaria	Y	Y	Y	Y	NP	NP	NP	NP
Myanmar	NP	NP	A	A	A	A	A	A
Burundi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Byelorussia SSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Cambodia (Democratic Kampuchea)	NP	Y	NP	A	NP	T	T	T
Canada	A	A	A	A	Y	T	T	T
Cap Verde	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Central African Republic	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Chad	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T
Chile	A	T	T	T	T	T	T	T
China	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y
Colombia	A	Y	A	A	T	T	T	A
Comoros	NP	NP	Y	NP	NP	NP	T	NP
Congo	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Costa Rica	A	A	A	NP	Y	A	NP	A
Cuba	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Cyprus	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Czechoslovakia	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Democratic Yemen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Denmark	A	A	A	A	A	A	A	A
Djibouti	-	-	A	NP	NP	NP	NP	NP
Dominica	-	-	-	-	NP	NP	NP	A
Dominican Republic	NP	A	A	A	A	A	T	A
Ecuador	Y	Y	Y	A	NP	A	Y	NP
Egypt	A	A	T	T	T	T	T	T
El Salvador	Y	A	A	A	A	T	T	T
Equatorial Guinea	Y	Y	Y	NP	Y	Y	A	NP
Ethiopia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Fiji	Y	A	A	A	A	A	A	T
Finland	A	A	A	A	A	A	A	A

Perancis	A	A	A	A	A	A	A	A
Gabon	Y	Y	Y	A	A	A	A	A
Gambia	Y	Y	Y	Y	Y	NP	T	T
Republik Demokrasi Jerman	Y	Y	Y	Y	NP	NP	NP	NP
Republik Federal Jerman	A	A	A	A	A	A	A	A
Ghana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	Y
Yunani	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Grenada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Guatemala	A	A	A	A	A	NP	T	T
Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Guinea-Bissau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Guyana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Haiti	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y	A
Honduras	NP	A	A	A	T	T	T	T
Hungaria	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Iceland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
India	T	T	T	T	T	T	T	T
Indonesia	T	T	T	T	T	T	T	T
Iran	T	T	T	T	Y	Y	Y	NP
Iraq	A	A	T	T	T	T	T	T
Ireland	A	A	A	A	A	A	A	Y
Israel	A	A	NP	A	A	A	A	A
Italy	A	A	A	A	A	A	A	A
Ivory Coast	Y	Y	A	A	A	A	A	A
Jamaica	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	A
Jepang	T	T	T	T	T	T	T	T
Jordan	A	T	T	T	T	T	T	T
Kenya	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kuwait	Y	A	A	A	A	NP	T	T
Laos Republik Demokrasi Rakyat	Y	Y	Y	A	Y	Y	NP	Y
Lebanon	NP	A	A	A	A	NP	NP	A
Lesotho	Y	Y	Y	Y	Y	A	Y	Y
Liberia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	T
Republik Arab Lybia	NP							
Luxembourg	A	A	A	A	A	A	A	A
Madagascar	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Malawi	Y	Y	A	Y	Y	Y	Y	Y
Malaysia	T	T	T	T	T	T	T	T
Maladiva	NP	A	T	T	T	T	T	T
Mali	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Malta	NP							
Mauritania	A	T	T	T	A	A	A	A
Mauritius	A	Y	NP	Y	NP	A	NP	Y
Meksico	Y	Y	Y	Y	Y	NP	Y	Y
Mongolia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NP	NP
Moroko	A	T	T	T	A	A	A	T
Mozambique	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Nepal	Y	A	A	A	A	A	A	A
Nederland	A	A	A	A	A	A	A	A
Zelandia Baru	A	A	A	A	T	T	T	T
Nikaragua	A	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Niger	Y	NP	Y	Y	Y	Y	NP	A
Nigeria	Y	NP	Y	A	A	A	A	A
Norwegia	A	Y	A	A	A	A	A	A
Oman	A	T	T	T	T	T	T	T
Pakistan	Y	A	A	A	A	A	A	T
Panama	A	Y	Y	A	A	A	A	A
Papua Niugini	NP	A	A	T	T	T	T	T
Paraguay	A	A	A	T	T	NP	T	T

Peru	Y	A	A	A	A	A	A	A
Filippina	T	T	T	T	T	T	T	T
Polandia	Y	Y	Y	NP	NP	A	A	A
Portugal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Qatar	T	A	A	T	T	T	T	T
Romania	Y	Y	Y	NP	A	A	A	A
Rwanda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
St Christopher and Nevis	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Lucia	-	-	-	-	Y	Y	Y	T
St Vincent dan Grenadin	-	-	-	-	-	NP	T	NP
Samoa	-	-	A	A	A	A	A	A
Sao Tome dan Principe	NP	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Saudi Arabia	A	T	T	T	T	T	T	T
Senegal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A	A
Seychelles	-	NP	NP	A	Y	Y	Y	Y
Sierra Leone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Singapura	A	A	T	T	T	T	T	N
Kepulauan Solomon	-	-	-	NP	NP	NP	A	N
Somalia	NP	Y	NP	NP	NP	T	A	A
Africa Selatan	NP	NP						
Spanyol	A	A	A	A	A	A	A	A
Sri Lanka	A	A	A	A	A	A	A	A
Sudan	A	A	A	A	T	T	T	T
Suriname	NP	T	T	T	T	T	T	T
Swaziland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Swedia	Y	Y	Y	Y	Y	A	A	A
Republik Arab Syria	A	A	T	T	T	T	T	T
Thailand	T	T	T	T	T	T	T	T
Togo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Trinidad dan Tobago	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Tunisia	NP	T	T	T	T	T	T	T
Turki	A	T	T	T	T	T	T	T
Uganda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Ukraina SSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
USSR	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Uni Arab Emirat	Y	A	A	A	A	A	NP	NP
Inggris Raya	A	A	A	A	A	A	A	A
Republik Persatuan Kameran	Y	Y	Y	Y	A	A	A	A
Republik Persatuan Tanzania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Amerika Serikat	A	T	T	T	T	T	T	T
Upper Volta	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	A
Uruguay	A	T	T	T	T	T	T	T
Vanuatu	-	-	-	-	-	-	Y	Y
Venezuela	Y	A	A	A	A	A	A	A
Vietnam	-	-	Y	NP	Y	Y	Y	Y
Yemen	NP	A	NP	NP	T	T	NP	T
Yugoslavia	A	A	A	A	A	A	A	A
Zaire	A	A	T	T	T	A	A	A
Zambia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Zimbabwe	-	-	-	-	-	Y	Y	Y
Total	72:10:	68:20:	67:26:	59:31:	62:31:	58:35:	54:42:	50:46
	43:19	49:9	47:9	44:16	45:14	46:15	46:15	50:11
Proporsi suara untuk	50%	46.6%	44.9%	39.3%	40.8%	37.7%	34.4%	31.8%

Y = Setuju; N = Menolak; A = Abstain; - = bukan anggota PBB pada saat pemungutan suara; NP = Tak Hadir pada saat pemungutan suara

Total = Y:N:A:NP Pemungutan tentang Timor 1975-82 Suara PBB

¹ Lihat paling akhir, *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) *International Court of Justice* [selanjutnya: ICJ], paragraf [selanjutnya: para] 155.

² Ini termasuk di dalam Resolusi Dewan Keamanan [selanjutnya: DK] 384, 22 Desember 1975; Resolusi DK 389, 22 April 1976; Resolusi Sidang Umum [selanjutnya:SU] 3845 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi SU 31/53, 1 Desember 1976; Resolusi SU 32/34, 28 November 1977; Resolusi SU 33/39, 13 Desember 1976, Resolusi SU 35/27, 11 November 1980; Resolusi SU 36/50, 24 November 1981; Resolusi SU 37/30, 23 November 1982.

³ *Common article* 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik selanjutnya:PIHSP] dan Pasal 1(2) dari *Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*[selanjutnya: PIHESB], Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960, para 2.

⁴ Pasal. 3, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa Kolonial, Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960.

⁵ Pasal 1(3), PIHSP dan Pasal 1(3) PIHESB

⁶ Komite Hak Asasi Manusia, *General Comment* 12, para 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Baik dan Kooperasi antar-bangsa yang mengikuti Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Resolusi SU 2625 (XXV), 24 Oktober 1970

⁹ Opini Penasihat mengenai Konsekuensi Legal bagi Negara-Negara atas Keberlanjutan Keberadaan Afrika Selatan di Namibia (Afrika Barat-Daya) tanpa memperhitungkan Resolusi DK 276 (1970) (1971) ICJ Reports 16 at para 119; Opini terpisah dari Hakim Weeramantry dalam Kasus-kasus Mengenai Timor Timur (Portugal v Australia) (1995) Laporan ICJ 90, esp at 204; art 41(2), Komisi Hukum Internasional [selanjutnya: KHI] Rancangan Pasal-pasal mengenai Tanggungjawab negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Internasional, KHI, Komentar mengenai Rancangan Pasal-pasal atas tanggungjawab Negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Nasional, at hal. 287-291, esp p.290

¹⁰ Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 1; dan Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 1.

¹¹ Pasal 25, Piagam PBB

¹² Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 2; Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 2.

¹³ Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 3.

¹⁴ Dokumen 391, Jakarta, 23 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, Department of Foreign Affairs and Trade Documents on Australian Foreign Policy, Melbourne University Press, Victoria, 2000 [selanjutnya: Wendy Way, (ed.), DFAT], hal.650

¹⁵ Dokumen 154, Jakarta, 10 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.291

¹⁶ Resolusi SU 1542 (XV), 15 Desember 1960 Krieger hal. 29-30.

¹⁷ Korespondensi antara Dr Salazar dan Perdana Menteri Australia, R.G. Menzies, 1961-1964, Penyelidikan Senat Australia ke Timor Timur, 1999-2000, Submisi 5, hal. 31-47.

¹⁸ Kabel rahasia, 5 Februari 1963, dikeluarkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2002.

¹⁹ José Ramos-Horta, *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1978, hal. 14.

²⁰ *Secretariat to the Special Committee on Decolonisation, Working Paper on Timor*, 20 November 1975. Krieger, hal. 18-26.

²¹ Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 674. Pandangan yang serupa diungkapkan oleh Duta Besar Selandia Baru, Roger Peren, tahun 1978, di material *New Zealand*

Government Official Information Act (OIA) [selanjutnya: New Zealand...OIA] Dokumen Pemerintah Selandia Baru, Vol. 1, 13 Januari 1978.

²² Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, No. 7, Agustus 1976, hal. 43.

²³ Resolusi DK 3294 (XXIX), 13 Desember 1974, para 2

²⁴ Mario Lemos Pires, Kesaksian diberikan pada kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003

²⁵ Surat dari Misi Permanen Portugal kepada Sekretaris Jenderal PBB, 28 November 1975, di Krieger, hal. 39.

²⁶ *Communique of the Council of Ministers* . dikutip dalam Laporan PBB mengenai Dekolonisasi, *op.cit*, hal. 45.

²⁷ Kontak Rahasia antara Portugal, Indonesia, dan PGET: Juni-Juli 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 782-783.

²⁸ *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995), Laporan *International Court of Justice* 90.

²⁹ Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada, *ibid*.

³⁰ CAVR wawancara dengan Adelino Gomes, Dili, 11 Juni 2003.

³¹ Krieger, hal. 39-40.

³² David Scott, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, hal. 2.

³³ Laporan Senat Australia, Timor Timur, Desember 2000, hal. 138.

³⁴ Surat kepada J.L Jones, Foreign and Commonwealth Office, 11 Juni 1976, di dokumen terdeklasifikasi (Dowson File 7.25).

³⁵ Pernyataan, 6 September 1983, Torben Retboll (ed.) *East Timor: The Struggle Continues* , International Working Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, Oktober 1984, hal. 197.

³⁶ Dokumen 888, 4 Maret 1993, Arsip Keamanan Nasional di George Washington University [selanjutnya:AKN]

³⁷ Jamsheed Marker, *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence* , McFarland & Company, Inc., London, 2003, hal. 73.

³⁸ Resolusi DK 1272, 25 Oktober 1999.

³⁹ Resolusi SU 56/282, 8 Mei 2002.

⁴⁰ Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, hal. 41.

⁴¹ Dikutip dalam Donald Weatherbee, "Portuguese Timor: an Indonesian Dilemma" , *Asian Survey* , 6 (12), Dec. 1966, hal. 689.

⁴² Weatherbee, hal. 690.

⁴³ Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam dikutip dalam Departemen Politik PBB, *Report on Decolonisation*, hal. 47.

⁴⁴ Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Politik PBB, *Report on Decolonisation* dikutip dalam hal. 14, 48.

⁴⁵ Dokumen 95, Jakarta, 24 Februari 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 198.

⁴⁶ Richard Woolcott, *The Hot Seat: Reflections on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings* , Harper Collins Publishers, Sydney, 2003, hal. 306.

-
- ⁴⁷ Dokumen 217, Jakarta, 6 September 1975, dalam Wendy Way (Ed.), DFAT, hal. 391-392.
- ⁴⁸ Krieger, hal. 63.
- ⁴⁹ Resolusi SU 3485 (XXX), 12 Desember 1975 dan Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, hal. 123, 53.
- ⁵⁰ Laporan Winspeare Guicciardi kepada Sekretaris Jenderal, 29 Februari 1976, dalam Krieger, hal. 92.
- ⁵¹ Krieger, hal. 47-49.
- ⁵² Krieger, hal. 124.
- ⁵³ Kongres AS Sidang dengar pendapat mengenai Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Committee on International Relations, 19 Juli 1977, hal. 47.
- ⁵⁴ 1 Juni 1976, dalam NZ...OIA, Volume 1
- ⁵⁵ José Ramos-Horta, surat kepada Sekretaris Jenderal, 8 Juli 1976. UN Doc. S/12133.
- ⁵⁶ Fransesc Vendrell, Kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
- ⁵⁷ Kesaksian diberikan pada *Ibid.*
- ⁵⁸ Krieger, hal. 275.
- ⁵⁹ dikutip dalam Woolcott, hal. 164.
- ⁶⁰ Siaran Pers PBB, 3 September 1999.
- ⁶¹ Notilen Kabinet, Canberra, 5 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 26.
- ⁶² Dokumen 375, Jakarta, 13 Desember 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 627.
- ⁶³ Notilen Kabinet, Canberra, 21 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.26, n.1
- ⁶⁴ *Ibid.*, hal. 26-27.
- ⁶⁵ Pengiriman kabar dari Furlonger, Jakarta, 19 Januari 1973. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 43.
- ⁶⁶ 1 Desember 1970. Dokumen, p. 42.
- ⁶⁷ 30 Mei 1973: Catatan R. Woolcott kepada Whitlam. Documents, p. 45.
- ⁶⁸ Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 141.
- ⁶⁹ Dokumen 263, Canberra, 16 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 263.
- ⁷⁰ Dokumen 26, Yogyakarta, 6 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92
- ⁷¹ Dokumen 45, Lisbon, 14 Oktober 1974. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 119.
- ⁷² Dokumen 24, Canberra, 2 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92.
- ⁷³ Document 123, Townsville, 4 April 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 246.
- ⁷⁴ Dokumen 169, Jakarta, 17 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 313-314.
- ⁷⁵ Dokumen 191, Canberra, 27 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
- ⁷⁶ Dokumen 265, Jakarta, 16 Oktober 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
- ⁷⁷ Dokumen 310, Jakarta, 29 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 533.
- ⁷⁸ Department of Foreign Affairs and Trade, *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Canberra, 2001, p. 13.
- ⁷⁹ Australian Senate Report, *East Timor*, hal. 167.

⁸⁰ Ibid., hal. 174-75.

⁸¹ Untuk teks laporan survei, lihat *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya *East Timor in Transition*, DFAT], Canberra 2001, hal. 177-179.

⁸² Australian Senate Report, *East Timor*, hal. 142.

⁸³ Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, pp. 53-54.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Laporan SRSG, 29 Februari 1976. Krieger, pp. 87-93.

⁸⁶ Resolusi DK 389 (1976), Krieger, hal. 93.

⁸⁷ Fransesc Vendrell, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.

⁸⁸ Kesaksian diberikan pada *Ibid.*

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Jamsheed Marker, hal. 204

⁹² Teks Kesepakatan terdapat di, *Self-determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, oleh Ian Martin. Lynne Rienner Publishers, 2001, pp. 141-148.

⁹³ Resolusi UNSC 1236 (1999).

⁹⁴ Mark Riley, "How the UN plans to abandon a people", *Sydney Morning Herald*, 7 Agustus 1999.

⁹⁵ Ian Martin, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004

⁹⁶ Kesaksian diberikan pada *Ibid.*

⁹⁷ Resolusi DK 1264 (1999).

⁹⁸ Dokumen 55, Jakarta, 29 Oktober 1974, dalam Wendy Way (Ed.) DFAT p. 130.

⁹⁹ Dokumen 98, Canberra, February 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 201.

¹⁰⁰ 16 Desember 1975. dalam Krieger, hal. 69.

¹⁰¹ Ramos-Horta, *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, Red Sea Press, 1987, hal. 156.

¹⁰² *UK Unclassified Documents*, Dowson Files 7.2

¹⁰³ Dokumen 478, Jakarta, 3 Juli 1976, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 807.

¹⁰⁴ Krieger, hal. 85

¹⁰⁵ Krieger, op.cit, hal. 117

¹⁰⁶ Resolusi Sidang Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975.

¹⁰⁷ Krieger, hal. 152.

¹⁰⁸ Konvensi yang berhubungan dengan perpajakan ganda dan penghindaran fiskal, ditandatangani oleh Prancis dan Indonesia pada tanggal 14 September 1979. Krieger, hal. 292

¹⁰⁹ Ramos-Horta, *Funu*, hal. 142

¹¹⁰ Gabriel Defert, *Timor Est, le genocide oublie: Droit d'un peuple e raisons de'Etat*, L'Harmattan, Paris, 1992, hal. 246.

-
- ¹¹¹ Ibid.
- ¹¹² Ramos-Horta, *Funu*, hal. 142.
- ¹¹³ New Zealand...OIA Material, Vol. 1
- ¹¹⁴ Dokumen 58, Canberra, 14 November 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 133.
- ¹¹⁵ Woolcott, hal. 149.
- ¹¹⁶ Debat Dewan Keamanan 18 Desember 1975 dan 22 April 1976, dalam Krieger, hal 81, 117.
- ¹¹⁷ Ramos-Horta, *Funu*, hal. 109.
- ¹¹⁸ Kawat ke London, 10 Februari 1976, dalam *UK unclassified documents* Dowson Files 7.4
- ¹¹⁹ Defert, hal.241-243; Ramos-Horta, *Funu*, hal. 155.
- ¹²⁰ UN Monthly Chronicle, Vol. 1(4), Agustus-September 1964, hal. 32.
- ¹²¹ Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 295.
- ¹²² Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 6
- ¹²³ Ibid.
- ¹²⁴ Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 137.
- ¹²⁵ Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.
- ¹²⁶ Dokumen 249, 2 Oktober 1975, in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 443.
- ¹²⁷ See Richard Mann, 400 years and More of *The British in Indonesia* , Gateway Books, United Kingdom, 2004.
- ¹²⁸ J. A. Ford, 10 Februari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.4.
- ¹²⁹ A.K. Goldsmith, South East Asian Department FCO, 4 Februari 1976, dalam dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.5.
- ¹³⁰ J. A. Ford, 2 Januari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.2.
- ¹³¹ Krieger, p. 118.
- ¹³² A.M. Simons, 20 Mei 1976. Dowson Files 7.15.
- ¹³³ 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.26.
- ¹³⁴ Krieger, p. 164.
- ¹³⁵ Baroness Trumpington, House of Lords, 16 Juli 1992. Krieger, p. 301.
- ¹³⁶ Krieger, p. 302.
- ¹³⁷ Tapol and Campaign Against the Arms Trade (CAAT) Factsheet, Juni 2004.
- ¹³⁸ United Kingdom –House of Lords, Official Report, Parliamentary Debates, Unstarred Question-Indonesia: Aid and Human Rights, 16 Juli 1992. Krieger, p. 302.
- ¹³⁹ 24 Mei 1976. di dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.16.
- ¹⁴⁰ Saran yang disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik, Averell Harriman, 5 Februari 1963. Dokumen 2 NSA
- ¹⁴¹ Ibid.
- ¹⁴² Gary Gray, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Gary Gray memberi kesaksian dalam kapasitas sebagai pribadi.

-
- ¹⁴³ Menteri Luar Negeri, 25 September 1974. Dokumen 15 NSA.
- ¹⁴⁴ Kedutaan AS di Canberra, 20 Februari 1975. Dokumen 24 NSA.
- ¹⁴⁵ Dewan Keamanan Nasional, 4 Maret 1975. Dokumen 40 NSA.
- ¹⁴⁶ Pertemuan Staf Menteri Luar Negeri, 8 Oktober 1975. Dokumen 90 NSA.
- ¹⁴⁷ Permohonan kepada Presiden AS, 5 Desember 1975. Dokumen 174 NSA.
- ¹⁴⁸ Memo pembicaraan Gedung Putih, 10 Desember 1975. Dokumen 163 NSA.
- ¹⁴⁹ Krieger, hal. 119
- ¹⁵⁰ Kreiger, hal. 239
- ¹⁵¹ Laporan Dewan Keamanan Nasional kepada Brent Scowcroft, 12 Desember 1975. Dokumen 165 NSA.
- ¹⁵² Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
- ¹⁵³ *Human rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Force*: Audiensi di hadapan Sub-Komite mengenai Urusan Asia dan Pasifik dan Sub-Komite mengenai Organisasi-organisasi Internasional, 10, 17, 22 dan 23 Maret 1977, US Government Printing Office, Washington, 1977.
- ¹⁵⁴ Dewan Keamanan Nasional, 29 Juni 1976. Dokumen 312 NSA.
- ¹⁵⁵ Surat kepada Senator Humphrey, 15 Oktober 1976. Dokumen 355 NSA.
- ¹⁵⁶ Pernyataan yang disampaikan Kenneth M Quinn, Asisten Sementara Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, kepada Audiensi di hadapan Komite Senat Hubungan Luar Negeri AS, 6 Maret 1992, dalam Krieger, hal. 318.
- ¹⁵⁷ Memorandum untuk Presiden Carter, 14 Juni 1977. Dokumen 398 NSA.
- ¹⁵⁸ Dikutip oleh Gary Gray kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ¹⁵⁹ Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ¹⁶⁰ 31 Januari 1992. Dokumen 872 NSA.
- ¹⁶¹ CHR Vole tentang Timor Leste, 4 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
- ¹⁶² Kedutaan AS Jakarta untuk Menteri Luar Negeri, 5 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
- ¹⁶³ Siaran Pers Kementerian Luar Negeri AS, 4 September 1999.
- ¹⁶⁴ Resolusi SU 1514 (XV) dan 1541 (XV). Lihat Buku Tahunan 1960 PBB, hal. 49,509.
- ¹⁶⁵ Shizuo Saito, *New Trends at the United Nations: Reactions to the Structural Changes in the International Order*, Shinyudo, Tokyo, 1979, hal. 19.
- ¹⁶⁶ Ramos-Horta, *Funu*, hal. 122.
- ¹⁶⁷ Krieger, hal. 109.
- ¹⁶⁸ 10 Januari 1976. dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
- ¹⁶⁹ 4 Mei 1976, dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
- ¹⁷⁰ Krieger, hal. 50.
- ¹⁷¹ April 1976, Dokumen NSA 252
- ¹⁷² Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 674.
- ¹⁷³ *East Timor in Transition*, DFAT, , hal. 12. Untuk Persetujuan Pajak, lihat Krieger, hal. 292.

-
- ¹⁷⁴ Pernyataan oleh 92-anggota Diet Jepang, Members Forum di Timor-Timur kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB, New York, 8 Agustus 1991.
- ¹⁷⁵ Petisi kepada Komite Khusus Dekolonisasi, 8 Agustus 1991.
- ¹⁷⁶ Kenneth Christie dan Denny Roy, *The Politics of Human Rights in East Asia*, Pluto Press, London, 2001, hal, 274-275. Piagam ODA direvisi pada tahun 2003.
- ¹⁷⁷ Terbitan Pers, Menteri Luar Negeri Jepang, 4 September 1999.
- ¹⁷⁸ Henry Kissinger kepada sebuah pertemuan makan siang di Sydney, 13 November 1995., dalam E G Whitlam, “E.G. Whitlam launches Bill Nicol’s Timor – a Nation Reborn”, *It’s time e-magazine*, Issue 7, University of Sydney Co-op Bookshop, 26 Juni 2002.
- ¹⁷⁹ Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Panggabean, 22 Juli 1974. dalam NZ...OIA Material, Volume 1.
- ¹⁸⁰ Dikutip dalam Peter Elgin *East Timor, The Globe and Mail and Propaganda*, Portuguese Studies Review 11 (1) 2003, hal. 69-70.
- ¹⁸¹ Don McKinnon, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Pidato kepada Canterbury School of Journalism, 21 Maret 1995, dalam NZ...OIA Material, Volume 3, Februari 1994-Oktober 1995
- ¹⁸² Eamon Duffy, *Saints and Sinners, A History of the Popes*, Yale University Press, Princeton, New Jersey, 2002, hal 367.
- ¹⁸³ Dikutip dalam Frédéric Durand, *Catholicisme et protestantisme dans l’île de Timor: 1556-2003*, Irasec, Bangkok, 2002, hal 89.
- ¹⁸⁴ Pat Walsh, “Church May Hold Key to Timor’s Future”, *National Outlook*, January 1982, hal 14.
- ¹⁸⁵ Wawancara CAVR dengan Pat Walsh, Dili, 25 February 2005
- ¹⁸⁶ Dikutip dalam Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan, dan Perdamaian, Melbourne, *The Church and East Timor: A collection of documents by National and International Church Agencies*, Catholic Commission for Justice, Development and Peace, Melbourne, 1993, hal 13-15; dan Frédéric Durand, hal 92-93.
- ¹⁸⁷ Dikutip dari jumpa pers Christians in Solidarity with East Timor, 20 Mei 1983.
- ¹⁸⁸ Surat kepada Monsignor Francesco Canalini (1986-1991), dalam *The Church and East Timor: A Collection of documents by National and International Church Agencies*, Catholic Commission for Justice, development and Peace, Melbourne, hal 10.
- ¹⁸⁹ Surat kepada Pastor Pierre Toulat, Sekretaris, Komisi Prancis untuk Keadilan dan Perdamaian, Paris.
- ¹⁹⁰ Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan pada pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ¹⁹¹ Radio Renascenza, 12 Mei 1991, dipetik dari Frédéric Durand, hal 111.
- ¹⁹² Wawancara CAVR dengan Alex Gusmão, 28 Maret 2005.
- ¹⁹³ Wawancara dengan Kay Rala Xanana Gusmão pada bulan September 1990. Robert Domm “East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive”, *ACFOA Development Dossier 29*, 1991, hal 24.
- ¹⁹⁴ Dikutip di Smythe, hal 199.
- ¹⁹⁵ dikutip dalam Dikutip di Kohen, hal 154.
- ¹⁹⁶ Pat Walsh, *East Timor’s Political Parties and Groupings*, ACFOA, April 2001
- ¹⁹⁷ Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
- ¹⁹⁸ Ibid.

-
- ¹⁹⁹ Fretilin on the World Stage”, in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 450
- ²⁰⁰ Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, 1978, hal. 221.
- ²⁰¹ David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ²⁰² Krieger, hal. 66-7.
- ²⁰³ Krieger, hal. 96.
- ²⁰⁴ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
- ²⁰⁵ Ibid.
- ²⁰⁶ Ibid.
- ²⁰⁷ Ibid.
- ²⁰⁸ UN Press Release, Department of Public Information Press Section, GA/D/2334, 9 November 1982.
- ²⁰⁹ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 29 Juli 2004.
- ²¹⁰ *Statement on the Current Portuguese Attitude on the Question of East Timor* , 6 September 1983, Ost-Timor Information, No. 3, Oktober 1983.
- ²¹¹ Surat dari Parliamentary Human Rights Group in Britain kepada Sekretaris Jenderal, 10 Agustus 1984, dalam Torben Retbøll, hal. 209-211
- ²¹² Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
- ²¹³ wawancara CAVR dengan Zacarias da Costa, 14 Maret 2005.
- ²¹⁴ Maria Angela Carrascalão, *Timor: Os Anos da Resistencia*, Mensagem, Lisbon, 2002, hal. 135.
- ²¹⁵ Estavão Cabral, ‘Fretilin: Roots of the Friction’, *Fitun*, No. 11, September 1993.
- ²¹⁶ Wawancara CAVR, dengan João Carrascalão, Dili 30 Juli 2004.
- ²¹⁷ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili 26 Mei 2004.
- ²¹⁸ Surat Persatuan Nasional Timor kepada Presiden Republik Portugis, Mário Soares, 9 Maret 1988, dalam Krieger, hal. 280.
- ²¹⁹ Pernyataan oleh Uni Demokrasi Timor kepada Komite Khusus Dekolonisasi, New York, 13 Agustus 1987.
- ²²⁰ Pesan 7 Desember 1987 mengenai 12 tahun invasi Indonesia., dalam Sarah Niner (ed.), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 129-136.
- ²²¹ Ben Anderson *et. al*, wawancara dengan Mário Carrascalão, Indonesia (76), Oktober 2003, hal. 21-22.
- ²²² *Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor* , 10 November 1989, dalam Krieger, hal. 281-282.
- ²²³ José Ramos-Horta, *Towards a Peaceful Solution in East Timor* , East Timor Relief Association (ETRA), Sydney, 1996, hal. 31.
- ²²⁴ Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
- ²²⁵ Nobel Committee Press Release, 1996.
- ²²⁶ Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
- ²²⁷ *East Timor in Transition*, DFAT, hal. 10.
- ²²⁸ Jamsheed Marker, *East Timor*

-
- ²²⁹ Lihat Fernando de Araujo, 'kampanye untuk kemerdekaan CNRT', dalam James J. Foxdan Dionisio Babo Soares(ed.), *Out of the Ashes*, Crawford House, Canberra, 2000, hal. 106-125.
- ²³⁰ Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
- ²³¹ Abel Guterres, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ²³² Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ²³³ Abel Guterres, kesaksian, Ibid.
- ²³⁴ Ibid.
- ²³⁵ Ibid.
- ²³⁶ Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
- ²³⁷ David Scott, manuskrip tak diterbitkan, salinannya ada di dalam arsip CAVR.
- ²³⁸ Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
- ²³⁹ Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, Dili.
- ²⁴⁰ Wawancara CAVR dengan John Taylor dan Arnold Kohen, Dili, 2 Februari 2005.
- ²⁴¹ Untuk catatan hasil kerja Steve Cox di Inggris setelah pembantaian tersebut, lihat Kirsty Sword Gusmão with Rowenna Lennox, *A Woman of Independence*, Macmillan, Sydney, 2003, hal. 38-39.
- ²⁴² Lihat, sebagai contoh, Peter Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana's Defence*, East Timor Relief Association, Sydney, Mei 1996.
- ²⁴³ Esai oleh Carmel Budiardjo dalam 'East Timor: Testimony by Elaine Briere', Toronto, 2004, hal. 68.
- ²⁴⁴ Lihat David T. Hill 'East Timor and the Internet: Global political leverage in/on Indonesia', *Indonesia* (73), April 2002, hal.25-51.
- ²⁴⁵ Dikutip dalam Carlos Santiago Nino, *'Radical Evil on Trial'*, Yale University Press, Princeton, New Jersey, 1996, p. 186.
- ²⁴⁶ YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik CAVR mengenai penentuan nasib sendiri, 15-17 March 2004.
- ²⁴⁷ Jean Pierre Catry, Memo ke CAVR, 28 Januari 2005.
- ²⁴⁸ *East Timor in Transition*, DFAT, hal. v.
- ²⁴⁹ Lihat Ian Martin, Self-determination dalam *East Timor....*, hal. 88.
- ²⁵⁰ Para 1, mukadimah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- ²⁵¹ YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
- ²⁵² Liem Soei Liong, Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005.
- ²⁵³ YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
- ²⁵⁴ Nugroho Katjasungkana, kesaksian diberikan pada, Ibid.
- ²⁵⁵ Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004

²⁵⁶ Dikutip dalam George J. Aditjondro ‘Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau’, Yayasan Hak dan Fortilos, Jakarta, 2000, hal. 251.

²⁵⁷ James Goodman “Indonesians for East Timor”, *Inside Indonesia*, No 59, 1999.

²⁵⁸ Ade Rostina Sitompul, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politis, 17 Februari 2003, hal. 5-6

²⁵⁹ Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 11, Bonn, 4-6 Mei 1998.

²⁶⁰ Patrick Walters, ‘Let Timor-Leste Decide, Muslim leader’, *The Australian*, 11 Desember 1996.

²⁶¹ Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 12 tentang Peran Militer dalam Masyarakat Indonesia, Bali, 14-17 September, 1999.

²⁶² Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, Dili, 15-17 Maret 2004.

²⁶³ Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004

²⁶⁴ Ian Martin, Self-determination in *East Timor...*, hal. 13.

²⁶⁵ Geoffrey C. Gunn, “International Actors and East Timor’s Right to Self-determination”, Laporan ke CAVR, Agustus 2003, hal. 138.